

Yth.

1. Direksi Perusahaan Asuransi Syariah;
2. Direksi Perusahaan Reasuransi Syariah;
3. Direksi Perusahaan Asuransi yang memiliki Unit Syariah; dan
4. Direksi Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah,
di tempat.

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 2 /SEOJK.05/2018

TENTANG

BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN BERKALA PERUSAHAAN ASURANSI
SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH, DAN UNIT SYARIAH

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6107), perlu untuk mengatur ketentuan bentuk dan susunan laporan berkala perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi syariah, dan unit syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi syariah, unit syariah pada perusahaan asuransi, dan unit syariah pada perusahaan reasuransi.
2. Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah.
3. Perusahaan Reasuransi Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah atas risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau perusahaan reasuransi syariah lainnya.

4. Unit Syariah adalah unit kerja di kantor pusat perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor di luar kantor pusat yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah.
5. Laporan Berkala adalah laporan yang disusun oleh Perusahaan untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan dalam periode tertentu.
6. Laporan Bulanan adalah laporan yang disusun oleh Perusahaan untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan, yang meliputi periode tanggal 1 Januari sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan.
7. Laporan Triwulanan adalah laporan yang disusun oleh Perusahaan untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan, yang meliputi periode tanggal 1 Januari sampai dengan akhir triwulan yang bersangkutan.
8. Laporan Tahunan adalah laporan yang disusun oleh Perusahaan untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan, yang meliputi periode tanggal 1 Januari sampai dengan akhir tahun yang bersangkutan.
9. Laporan Lain adalah laporan yang disusun oleh Perusahaan untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan selain Laporan Bulanan, Laporan Triwulanan, dan Laporan Tahunan yang disampaikan dalam periode tertentu.

II. BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN BERKALA BAGI PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH, DAN UNIT SYARIAH

1. Laporan Berkala Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah terdiri atas:
 - a. Laporan Bulanan;
 - b. Laporan Triwulanan;
 - c. Laporan Tahunan; dan
 - d. Laporan Lain.
2. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c bagi Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah terdiri atas:
 - a. aspek keuangan; dan
 - b. aspek manajemen.

3. Bentuk dan susunan Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, Laporan Triwulanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, dan Laporan Tahunan untuk aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi perusahaan asuransi umum syariah dan Unit Syariah pada perusahaan asuransi umum adalah sebagaimana tercantum dalam format I A;
 - b. bagi Perusahaan Reasuransi Syariah dan Unit Syariah pada perusahaan reasuransi adalah sebagaimana tercantum dalam format I B dan
 - c. bagi perusahaan asuransi jiwa syariah dan Unit Syariah pada perusahaan asuransi jiwa adalah sebagaimana tercantum dalam format I C.
4. Bentuk dan susunan Laporan Tahunan untuk aspek manajemen sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b bagi Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah adalah sebagaimana tercantum dalam format I D Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. Bentuk dan susunan Laporan Lain sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d bagi Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk laporan rencana korporasi adalah sebagaimana tercantum dalam format II A;
 - b. untuk laporan rencana bisnis adalah sebagaimana tercantum dalam format II B;
 - c. untuk laporan program reasuransi/retrosesi otomatis adalah sebagaimana tercantum dalam format II C;
 - d. untuk laporan pengaduan konsumen dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen adalah sebagaimana tercantum dalam format II D;

- e. untuk laporan penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan adalah sebagaimana tercantum dalam format II E;
- f. untuk laporan tahunan pelaksanaan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan adalah sebagaimana tercantum dalam format II F;
- g. untuk laporan profil risiko terintegrasi adalah sebagaimana tercantum dalam format II G;
- h. untuk laporan kecukupan permodalan terintegrasi adalah sebagaimana tercantum dalam format II H;
- i. untuk laporan rencana kegiatan pengkinian data dan laporan realisasi pengkinian data adalah sebagaimana tercantum dalam format II I; dan
- j. untuk ringkasan laporan keuangan triwulan dan/atau tahunan adalah sebagaimana tercantum dalam format II J.

III. TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN BERKALA

1. Penyampaian Laporan Berkala dilakukan secara *online* melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
2. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 belum tersedia, Perusahaan harus menyampaikan Laporan Berkala secara *online* melalui surat elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan.
3. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan secara tertulis kepada Perusahaan mengenai alamat surat elektronik yang digunakan untuk penyampaian Laporan Berkala paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum batas waktu penyampaian Laporan Berkala.
4. Perusahaan harus menyampaikan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan alamat surat elektronik Perusahaan yang digunakan untuk penyampaian Laporan Berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2.
5. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 mengalami permasalahan teknis atau Perusahaan mengalami gangguan sehingga tidak dapat menyampaikan Laporan Berkala secara *online*, Laporan Berkala disampaikan

secara *offline* disertai dengan pemberitahuan secara tertulis dan dikirimkan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat yang ditandatangani oleh direksi atau yang setara dan ditujukan kepada:

Otoritas Jasa Keuangan

u.p. Direktur IKNB Syariah

Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 15

Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 42

Jakarta 12710.

6. Penyampaian Laporan Berkala secara *offline* sebagaimana dimaksud pada angka 5, dilakukan dengan cara salah satu sebagai berikut:
 - a. diserahkan langsung; atau
 - b. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman.
7. Perusahaan dinyatakan telah menyampaikan Laporan Berkala dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk penyampaian secara *online* melalui:
 - 1) sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - 2) bukti pengiriman surat elektronik terhadap laporan yang dikirimkan ke alamat surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal pengiriman melalui jaringan komunikasi data tidak dapat dilakukan; atau
 - b. untuk penyampaian secara *offline*, dibuktikan dengan:
 - 1) surat tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan, apabila laporan diserahkan langsung; atau
 - 2) tanda terima pengiriman dari perusahaan jasa pengiriman, apabila laporan dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman.

IV. KETENTUAN PENUTUP

1. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
2. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/SEOJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang Menyelenggarakan

Seluruh Usahanya dengan Prinsip Syariah dan Unit Syariah dari Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Januari 2018

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 2 /SEOJK.05/2018

TENTANG

BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN BERKALA PERUSAHAAN ASURANSI
SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH, DAN UNIT SYARIAH

FORMAT I A

BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN BULANAN/TRIWULANAN/TAHUNAN ASPEK KEUANGAN BAGI PERUSAHAAN ASURANSI UMUM SYARIAH DAN UNIT SYARIAH PADA PERUSAHAAN ASURANSI UMUM

Data Umum

Tanggal Pelaporan	
Kode Perusahaan	
Nama Perusahaan	
Alamat Perusahaan	
Periode Pelaporan	
Triwulanan Pelaporan	
Tahun Fiskal	
Jenis Periode Pelaporan	Laporan Bulanan/Triwulanan/Tahunan
Nama Direksi	
Jabatan Direksi	

K e p a d a

Yth.Direktorat IKNB Syariah
Otoritas Jasa Keuangan

**LAPORAN BULANAN/TRIWULANAN/TAHUNAN
ASURANSI UMUM SYARIAH**

Profil Perusahaan

Per Triwulanan

	Keterangan
Nama Perusahaan	
Alamat Lengkap	
Telepon dan Fax	
E-mail	
NPWP	
No. & Tanggal Izin Usaha	
Jumlah Cabang/Perwakilan	
Jumlah Tenaga Kerja	
Jumlah Tertanggung	
Auditor Eksternal	
Pengendali	
PIC Laporan Keuangan	
Penyusun Laporan	
Nama Petugas	
Divisi	
Telepon	
Fax	
Email	
Penanggung Jawab Direksi	
Nama Penanggung Jawab	
Jabatan	
Telepon	
Fax	
E-mail	

Surat Pernyataan
Laporan Keuangan

Per

31-Desember

Tahun

"Periode"

"Nama Perusahaan"

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan

"Nama Perusahaan"
2. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan telah disajikan secara lengkap sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
3. Laporan keuangan Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

"Tempat", "Tanggal"

"Nama Perusahaan"

"Nama Direksi"

"Jabatan Direksi"

Saya,

"Nama Aktuaris"

, nomor register

"No Reg PAI"

 dengan ini menyatakan bahwa:

1.

"Nama Perusahaan"

 telah menyajikan semua data secara wajar
2. Saya telah melakukan penelaahan terhadap laporan keuangan perusahaan berdasarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan keuangan perusahaan perasuransian

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

"Tempat", "Tanggal"

"Nama Aktuaris"

"No Reg PAI"

Catatan: Untuk laporan tahunan saja

Surat Pernyataan
Laporan Keuangan

Per

"Tanggal"

Triwulan

"Periode"

"Nama Perusahaan"

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan

"Nama Perusahaan"
2. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan telah disajikan secara lengkap sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
3. Laporan keuangan Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

"Tempat", "Tanggal"

"Nama Perusahaan"

"Nama Direksi"

"Jabatan Direksi"

Catatan: Untuk laporan triwulanan saja

PT ...
Perusahaan Asuransi Umum Syariah
PERNYATAAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH
Periode.....

Setelah melakukan penelitian terhadap pengelolaan kekayaan dan kewajiban Dana *Tabarru'* Dana *Tanahud*, Dana Perusahaan, dan Dana Investasi Peserta PT, maka dengan ini Dewan Pengawas Syariah PT menyatakan bahwa pengelolaan kekayaan dan kewajiban Dana *Tabarru'*, Dana *Tanahud*, Dana Perusahaan , dan Dana Investasi Peserta telah dilakukan sesuai prinsip Syariah Islam.

Jakarta,20xx

Dewan Pengawas Syariah PT

Ketua

Anggota

Catatan: Untuk laporan tahunan saja

Rincian Pemegang Saham

Per ...

Nomor Baris	Pemegang Saham Pengendali			Kepemilikan Saham	
	Nama Pemegang Saham		Rupiah	Persentase	
1			-		0,00%
2			-		0,00%
3			-		0,00%
4			-		0,00%
5			-		0,00%
6			-		0,00%
7			-		0,00%
8			-		0,00%
9			-		0,00%
10			-		0,00%
...			-		0,00%

Rincian Pihak Utama

Per ...

Nomor Baris	Nama	Jabatan	Tanggal Mulai
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
...			

Rasio Pendidikan dan Pelatihan - I

Per Triwulanan

Nomor Baris	Uraian	Biaya Pendidikan dan Pelatihan			(dalam jutaan rupiah)
		Anggaran	Realisasi	Persentase	
1		-	-	-	0,00%
2		-	-	-	0,00%
3		-	-	-	0,00%
4		-	-	-	0,00%
5		-	-	-	0,00%
6		-	-	-	0,00%
7		-	-	-	0,00%
8		-	-	-	0,00%
9		-	-	-	0,00%
10		-	-	-	0,00%
...		-	-	-	0,00%
Total		-	-	-	-

Rasio Pendidikan dan Pelatihan - II

Per Triwulanan			(dalam jutaan rupiah)
Uraian	Anggaran	Realisasi	
Biaya Pegawai dan Pengurus	-	-	
Biaya Pendidikan dan Latihan			
a. Diklat Pegawai	-	-	
b. Diklat Direksi	-	-	
c. Diklat Komisaris	-	-	
d. Diklat Dewan Pengawas Syariah	-	-	
Total Biaya Diklat	-	-	
Rasio Biaya Diklat dan Biaya Pegawai dan	0,00%	0,00%	

Laporan Kinerja Keuangan
Untuk Periode Yang Berakhir

Uraian	Dana Perusahaan	Dana Tabarru'	Dana Investasi Peserta			Penyesuaian	Gabungan
			Akad Wakalah Bil Ujrah	Akad Mudharabah			
PENDAPATAN							
PENDAPATAN INVESTASI DAN UJROH							
Hasil Investasi	-	-	-	-	-	-	-
Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Hasil Investasi	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Ujroh Pengelolaan Investasi	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Hasil Investasi dan	-	-	-	-	-	-	-
PENDAPATAN UNDERWRITING							
Kontribusi Bruto/Ujroh Diterima/Alokasi							
a. Alokasi Kontribusi Langsung:	-	-	-	-	-	-	-
b. Alokasi Kontribusi Tidak Langsung:	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Kontribusi Bruto/Ujroh	-	-	-	-	-	-	-
Kontribusi Reasuransi/Retrosesi	-	-	-	-	-	-	-
Kontribusi Neto	-	-	-	-	-	-	-
Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi							
a. Penurunan (kenaikan) Penyisihan	-	-	-	-	-	-	-
b. Penurunan (kenaikan) PAKYBMP	-	-	-	-	-	-	-
c. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan atas	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Kontribusi Neto	-	-	-	-	-	-	-
PENDAPATAN UNDERWRITING	-	-	-	-	-	-	-
BEBAN							
BEBAN UNDERWRITING							
Beban Klaim							
a. Klaim Bruto	-	-	-	-	-	-	-
b. Klaim recovery	-	-	-	-	-	-	-
c. Kenaikan (Penurunan) Penyisihan Klaim	-	-	-	-	-	-	-
d. Penarikan Dana Investasi Peserta yang	-	-	-	-	-	-	-
e. Penarikan/Penebusan Dana Investasi	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Beban Klaim Netto	-	-	-	-	-	-	-
Beban Adjuster	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH BEBAN UNDERWRITING	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH SURPLUS (DEFISIT)	-	-	-	-	-	-	-
a. Surplus underwriting untuk dana	-	-	-	-	-	-	-
b. Surplus underwriting untuk Peserta	-	-	-	-	-	-	-
BEBAN USAHA:							
a. Beban Pemasaran	-	-	-	-	-	-	-
b. Beban Akuisisi	-	-	-	-	-	-	-
c. Beban Umum dan Administrasi:	-	-	-	-	-	-	-
- Beban Pegawai dan Pengurus	-	-	-	-	-	-	-
- Beban Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-	-	-	-
- Beban Umum dan Administrasi Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
Kenaikan (penurunan) Penyisihan Ujroh	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH BEBAN USAHA	-	-	-	-	-	-	-
LABA (RUGI) USAHA ASURANSI	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Lain	-	-	-	-	-	-	-
Beban Lain	-	-	-	-	-	-	-
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	-	-	-	-	-	-	-
Pajak Penghasilan	-	-	-	-	-	-	-
LABA SETELAH PAJAK	-	-	-	-	-	-	-
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH KINERJA SELURUH DANA	-	-	-	-	-	-	-

(dalam jutaan rupiah)

Laporan Arus Kas
Untuk Periode Yang Berakhir

Uraian	(dalam jutaan rupiah)				
	Dana Perusahaan	Dana Tabarru'	Dana Investasi Peserta		Gabungan
			Akad Wakalah Bil Ujrah	Akad Mudharabah	
SALDO AWAL	-	-	-	-	-
PENINGKATAN (PENURUNAN) SALDO KAS	-	-	-	-	-
SALDO AKHIR KAS	-	-	-	-	-
ARUS KAS DARI AKTIFITAS OPERASI	-	-	-	-	-
a. Arus Kas Masuk	-	-	-	-	-
Kontribusi Para Peserta	-	-	-	-	-
Ujroh yang diterima	-	-	-	-	-
Penerimaan Alokasi Surplus Dana Tabarru'	-	-	-	-	-
Klaim Reasuransi Diterima	-	-	-	-	-
Penerimaan Distribusi Surplus Underwriting	-	-	-	-	-
Lain - Lain	-	-	-	-	-
b. Arus Kas Keluar	-	-	-	-	-
Klaim Dibayar	-	-	-	-	-
Penarikan Dana Investasi Peserta yang telah	-	-	-	-	-
Penarikan/Penebusan Dana Investasi	-	-	-	-	-
Pembayaran Distribusi Surplus UW ke	-	-	-	-	-
Pembayaran Distribusi Surplus UW ke	-	-	-	-	-
Beban Akuisisi	-	-	-	-	-
Beban Pemasaran	-	-	-	-	-
Pembayaran Ujroh Reasuransi	-	-	-	-	-
Pembayaran Ujroh Asuransi	-	-	-	-	-
Kontribusi Reasuransi Dibayar	-	-	-	-	-
Pembayaran Sewa	-	-	-	-	-
Pembayaran Zakat	-	-	-	-	-
Pembayaran Pajak	-	-	-	-	-
Lain-lain	-	-	-	-	-
ARUS KAS DARI AKTIFITAS INVESTASI	-	-	-	-	-
a. Arus Kas Masuk	-	-	-	-	-
Penerimaan Hasil Investasi	-	-	-	-	-
Penerimaan Bagi Hasil Investasi Dana	-	-	-	-	-
Penerimaan Bagi Hasil Investasi Dana	-	-	-	-	-
Pencairan Investasi	-	-	-	-	-
Penjualan Aktiva Tetap	-	-	-	-	-
Lain-lain	-	-	-	-	-
b. Arus Kas Keluar	-	-	-	-	-
Penempatan Investasi	-	-	-	-	-
Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana	-	-	-	-	-
Pembayaran ujroh/fee kepada Perusahaan	-	-	-	-	-
Pembelian Aktiva Tetap	-	-	-	-	-
Lain-lain	-	-	-	-	-
ARUS KAS DARI AKTIFITAS PENDANAAN	-	-	-	-	-
a. Arus Kas Masuk	-	-	-	-	-
Setoran Modal/Modal Kerja	-	-	-	-	-
Pinjaman Subordinasi	-	-	-	-	-
Penerimaan Qardh	-	-	-	-	-
Lain-lain	-	-	-	-	-
b. Arus Kas Keluar	-	-	-	-	-
Pembayaran Pinjaman Subordinasi	-	-	-	-	-
Pembayaran Dividen	-	-	-	-	-
Pembayaran Qardh	-	-	-	-	-
Lain-lain	-	-	-	-	-

LAPORAN PERUBAHAN DANA

Untuk Periode Yang Berakhir

URAIAN	Dana Perusahaan	Dana Tabarru'	Dana Investasi	Gabungan
I. Saldo Dana Awal	-	-	-	-
II. Penambahan	-	-	-	-
Modal Disetor	-	-	-	-
Laba komprehensif periode berjalan	-	-	-	-
Kenaikan akumulasi dana tabarru' / dana investasi	-	-	-	-
Penambahan lainnya	-	-	-	-
III. Pengurangan	-	-	-	-
Rugi komprehensif periode berjalan	-	-	-	-
Penurunan akumulasi dana tabarru' / dana	-	-	-	-
Pembayaran Deviden	-	-	-	-
Pengurangan lainnya	-	-	-	-
IV. Saldo Akhir Dana	-	-	-	-

ANALISIS DANA PERUSAHAAN
PERHITUNGAN ASET DAN LIABILITAS DANA PERUSAHAAN

Uraian	Saldo Buku Besar (SAB)	Penilaian Berdasarkan SAP	Selisih Berdasarkan Penilaian Berdasarkan SAB dan SAP	AYD Setelah Batasan Per Perusahaan	AYD Setelah Batasan Per Jenis Aset	AYD Setelah Batasan Afiliasi	AYD Setelah Batasan Luar Negeri (dalam jutaan rupiah)
I. Investasi	-	-	-	-	-	-	-
Deposito	-	-	-	-	-	-	-
Sertifikat Deposito	-	-	-	-	-	-	-
Saham Syariah	-	-	-	-	-	-	-
Sukuk atau Obligasi Syariah	-	-	-	-	-	-	-
MTN Syariah	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah Negara RI	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah Negara Selain RI	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah Lembaga Multinasional	-	-	-	-	-	-	-
Reksa Dana Syariah	-	-	-	-	-	-	-
Efek Beragun Aset Syariah	-	-	-	-	-	-	-
Dana Investasi Real Estat Syariah	-	-	-	-	-	-	-
REPO	-	-	-	-	-	-	-
Pembiayaan Melalui Kerjasama Dengan Pihak	-	-	-	-	-	-	-
Pembiayaan Syariah Dengan Hak Tanggungan	-	-	-	-	-	-	-
Penyertaan Langsung	-	-	-	-	-	-	-
Properti Investasi	-	-	-	-	-	-	-
Emas Murni	-	-	-	-	-	-	-
Investasi Lain	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Investasi	-	-	-	-	-	-	-
II. Bukan Investasi	-	-	-	-	-	-	-
Kas dan Bank	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Ujrah Penutupan Langsung	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Ujrah Penutupan Tidak Langsung	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Hasil Investasi	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Investasi	-	-	-	-	-	-	-
Aset Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-
Biaya Akuisisi Ditungguhkan	-	-	-	-	-	-	-
Property Bukan Investasi	-	-	-	-	-	-	-
Aset Lain	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Bukan Investasi	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH KEKAYAAN (I+II)	-	-	-	-	-	-	-

ANALISIS DANA PERUSAHAAN
PERHITUNGAN LIABILITAS DANA PERUSAHAAN

Uraian	Saldo Buku Besar (SAK)	Penilaian Berdasarkan SAP	Selisih Penilaian SAK dan SAP
I. Utang	-	-	-
II. Penyisihan Ujrah	-	-	-
III. Penyisihan untuk Penjaminan Atas Pokok	-	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN (I+II+III)	-	-	-

(dalam jutaan rupiah)

ANALISIS DANA TABARRU
PERHITUNGAN ASET DAN LIABILITAS DANA TABARRU'

Uraian	Saldo Buku Besar (SAK)	Penilaian Berdasarkan SAP	Selisih Berdasarkan Penilaian Berdasarkan SAK dan SAP	AYD Setelah Batasan Per Perusahaan	AYD Setelah Batasan Per Jenis Aset	AYD Setelah Batasan Afiliasi	AYD Setelah Batasan Luar Negeri (Saldo SAP)	(dalam jutaan rupiah)
I. Investasi			-					
Deposito	-	-	-	-	-	-	-	-
Sertifikat Deposito	-	-	-	-	-	-	-	-
Saham Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukuk atau Obligasi Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
MTN Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah Negara RI	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah Negara Selain RI	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah Lembaga Multinasional	-	-	-	-	-	-	-	-
Reksa Dana Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Efek Beragun Aset Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana Investasi Real Estat Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
REPO	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembiayaan Melalui Kerjasama Dengan Pihak	-	-	-	-	-	-	-	-
Emas Murni	-	-	-	-	-	-	-	-
Investasi Lain	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Bukan Investasi			-					
Kas dan Bank	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Kontribusi Koasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Recovery Klaim Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Hasil Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Lain	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Bukan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH ASET (I+II)	-	-	-	-	-	-	-	-

ANALISIS DANA TABARRU
PERHITUNGAN LIABILITAS DANA TABARRU'

Uraian	Saldo Buku Besar (SAK)	Penilaian Berdasarkan SAP	Selisih Penilaian SAK dan SAP
Utang	-	-	-
Penyisihan Kontribusi	-	-	-
Penyisihan Kontribusi Yang Belum Merupakan	-	-	-
Penyisihan Klaim	-	-	-
Penyisihan atas Risiko Bencana (Catastrophic	-	-	-
Jumlah Liabilitas	-	-	-

(dalam jutaan rupiah)

ANALISIS DANA INVESTASI PESERTA
PERHITUNGAN ASET DAN LIABILITAS DANA INVESTASI PESERTA PADA PAYDI YANG DIGARANSI

Uraian	Saldo Buku Besar (SAK)	Penilaian Berdasarkan SAP	Selisih Penilaian Berdasarkan SAK dan SAP	Aset PAYDI Digaransi
(dalam jutaan rupiah)				
I. Investasi				
Deposito	-	-	-	-
Sertifikat Deposito	-	-	-	-
Saham Syariah	-	-	-	-
Sukuk atau Obligasi Syariah	-	-	-	-
MTN Syariah	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah Negara RI	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah Bank Indonesia	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah Negara Selain RI	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah Lembaga Multinasional	-	-	-	-
Reksa Dana Syariah	-	-	-	-
Efek Beragun Aset Syariah	-	-	-	-
Dana Investasi Real Estat Syariah	-	-	-	-
REPO	-	-	-	-
Pembiayaan Melalui Kerjasama Dengan Pihak	-	-	-	-
Emas Murni	-	-	-	-
Investasi Lain	-	-	-	-
Jumlah Investasi	-	-	-	-
II. Bukan Investasi				
Kas dan Bank	-	-	-	-
Tagihan Hasil Investasi	-	-	-	-
Tagihan Investasi	-	-	-	-
Aset Lain	-	-	-	-
Jumlah Bukan Investasi	-	-	-	-
JUMLAH KEKAYAAN (I + II)	-	-	-	-

ANALISIS DANA INVESTASI PESERTA
PERHITUNGAN LIABILITAS DANA INVESTASI PESERTA PADA PAYDI YANG DIGARANSI

Uraian	Saldo Buku Besar (SAK)	Penilaian Berdasarkan SAP	Selisih Penilaian SAK dan SAP
Utang	-	-	-
Akumulasi Dana Investasi Peserta	-	-	-
Penyisihan PAYDI yang memberikan garansi	-	-	-
JUMLAH LIABILITAS	-	-	-

(dalam jutaan rupiah)

RASIO KEUANGAN
PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS

Uraian	Dana Tabarru'	Dana Perusahaan	(dalam jutaan rupiah)
Tingkat Solvabilitas	-		-
A. Aset yang diperkenankan (AYD)	-		-
B. Liabilitas, selain Qardh dari Dana Perusahaan	-		-
DTMBR/MIMBR	-		-
A. Risiko Kredit	-		-
B. Risiko Likuiditas	-		-
C. Risiko Pasar	-		-
D. Risiko Asuransi	-		-
E. Risiko Operasional	-		-
F. MIMBR atas PAYDI Digaransi	-		-
1. Risiko PAYDI Digaransi	-		-
a. Risiko Kredit	-		-
b. Risiko Likuiditas	-		-
c. Risiko Pasar	-		-
2. Aset PAYDI Digaransi	-		-
3. Liabilitas PAYDI Digaransi	-		-
Rasio Tingkat Solvabilitas Internal	0,00%		0,00%
Rasio Target Tingkat Solvabilitas Internal	0,00%		0,00%
Rasio Tingkat Solvabilitas dengan DTMBR/MIMBR	0,00%		0,00%
Aset yang Tersedia Untuk Qardh yang	-		-
A. kekurangan (kelebihan) tingkat solvabilitas	-		-
B. Ketidakcukupan investasi, kas dan bank	-		-
Rasio Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' dan Dana	0,00%		0,00%

RASIO KEUANGAN
SELAIN TINGKAT SOLVABILITAS

Uraian	Indikator				(dalam jutaan rupiah)
	Dana Tabarru'	Dana Perusahaan	Dana Investasi Peserta	Gabungan	
Rasio Likuiditas					-
A. Kekayaan lancar	-	-	-	-	-
B. Kewajiban lancar	-	-	-	-	-
C. Rasio (a:b)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Rasio perimbangan investasi dengan liabilitas					-
A. Investasi, kas dan bank	-	-	-	-	-
B. Penyisihan teknis	-	-	-	-	-
C. Utang klaim retensi sendiri	-	-	-	-	-
D. Rasio [a:(b+c)]	0,00%	-	-	-	0,00%
Rasio Pendapatan investasi netto					-
A. Pendapatan investasi netto	-	-	-	-	-
B. Rata-rata investasi	-	-	-	-	-
C. Rasio (a:b)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Rasio beban klaim					-
A. Beban klaim netto	-	-	-	-	-
B. Kontribusi netto	-	-	-	-	-
C. Rasio (a:b)	0,00%	-	-	-	0,00%
Rasio perubahan dana					-
A. Dana tahun/triwulan/bulan berjalan	-	-	-	-	-
B. Dana tahun/triwulan/bulan lalu	-	-	-	-	-
C. Perubahan dana (a-b)	-	-	-	-	-
D. Rasio (c:b)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Rasio Aset Unit Syariah					-
A. Aset Dana Tabarru	-	-	-	-	-
B. Aset Dana Investasi Peserta	-	-	-	-	-
C. Aset Dana Asuransi Perusahaan	-	-	-	-	-
D. Rasio (a+b) : (a+b+c)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Penghitungan Qardh yang Diperlukan Dana					-
A. Jumlah Kewajiban selain Qardh	-	-	-	-	-
B. Jumlah Aset	-	-	-	-	-
Jumlah Qardh yang Diperlukan (a-b)	-	-	-	-	-

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU' MINIMUM BERBASIS RISIKO
RISIKO KREDIT

Uraian	Jumlah Deviasi			PAYDI (digaransi)
	Dana Tabarru	Dana Perusahaan		
Risiko Kredit (a)	-	-	-	-
Risiko Kredit (b)	-	-	-	-
Total Risiko Kredit	-	-	-	-

(dalam jutaan rupiah)

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU' MINIMUM BERBASIS RISIKO

RISIKO KREDIT - RISIKO KEGAGALAN ATAU KETIDAKMAMPUAN DEBITUR ATAU PIHAK LAIN

Uraian	Dana Tabarru'	Jumlah AYD Dana Perusahaan	PAYDI (digaransi)	Faktor	(dalam jutaan rupiah)		
					Dana Tabarru'	Jumlah Deviasi Dana Perusahaan	PAYDI (digaransi)
Investasi				-	-	-	-
Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito				-	-	-	-
Kategori Khusus (sampai dengan 2 milyar per	-	-	-	-	-	-	-
Kategori Lain, sesuai peringkat Bank:				-	-	-	-
a. Peringkat klaster 1	-	-	-	1,20%	-	-	-
b. Peringkat klaster 2	-	-	-	2,10%	-	-	-
c. Peringkat klaster 3	-	-	-	3,00%	-	-	-
d. Peringkat klaster 4	-	-	-	4,50%	-	-	-
e. Peringkat klaster 5	-	-	-	9,00%	-	-	-
Sukuk / Obligasi Korporasi Syariah				-	-	-	-
a. Peringkat klaster 1	-	-	-	1,60%	-	-	-
b. Peringkat klaster 2	-	-	-	2,80%	-	-	-
c. Peringkat klaster 3	-	-	-	4,00%	-	-	-
d. Peringkat klaster 4	-	-	-	6,00%	-	-	-
e. Peringkat klaster 5	-	-	-	12,00%	-	-	-
MTN Syariah				-	-	-	-
a. Peringkat klaster 1	-	-	-	1,60%	-	-	-
b. Peringkat klaster 2	-	-	-	2,80%	-	-	-
c. Peringkat klaster 3	-	-	-	4,00%	-	-	-
d. Peringkat klaster 4	-	-	-	6,00%	-	-	-
e. Peringkat klaster 5	-	-	-	12,00%	-	-	-
Surat Berharga Syariah Negara				-	-	-	-
Surat Berharga Yang Diterbitkan oleh Bank	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Yang Diterbitkan oleh Negara				-	-	-	-
a. Peringkat klaster 1	-	-	-	1,60%	-	-	-
b. Peringkat klaster 2	-	-	-	2,80%	-	-	-
c. Peringkat klaster 3	-	-	-	4,00%	-	-	-
d. Peringkat klaster 4	-	-	-	6,00%	-	-	-
e. Peringkat klaster 5	-	-	-	12,00%	-	-	-
Surat Berharga yang diterbitkan oleh Lembaga				-	-	-	-
REPO	-	-	-	1,00%	-	-	-
Pembayaran Melalui Kerjasama dengan Pihak				-	-	-	-
a. Sangat sehat	-	-	-	1,60%	-	-	-
b. Sehat	-	-	-	2,80%	-	-	-
c. Kurang sehat	-	-	-	4,00%	-	-	-
d. Tidak sehat	-	-	-	6,00%	-	-	-
Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan				-	-	-	-
Properti residensial				-	-	-	-
a. LTV < 65%	-	-	-	2,80%	-	-	-
b. 65% < LTV < 75%	-	-	-	4,00%	-	-	-
Properti komersial lainnya				-	-	-	-
a. LTV < 65%	-	-	-	5,60%	-	-	-
b. 65% < LTV < 75%	-	-	-	8,00%	-	-	-
Properti yang tidak digunakan				-	-	-	-
Bukan Investasi				-	-	-	-
Kas dan Bank	-	-	-	8,00%	-	-	-
Tagihan Kontribusi Penutupan Langsung	-	-	-	-	-	-	-
Aset Reasuransi				-	-	-	-
a. aset yang bersumber dari nilai estimasi	-	-	-	-	-	-	-
b. aset yang bersumber dari perjanjian	-	-	-	30,00%	-	-	-
Tagihan Klaim Reasuransi				-	-	-	-
Dalam Negeri	-	-	-	2,80%	-	-	-
Luar Negeri				-	-	-	-
a. Peringkat klaster 1	-	-	-	2,80%	-	-	-
b. Peringkat klaster 2	-	-	-	4,00%	-	-	-
c. Peringkat klaster 3	-	-	-	6,00%	-	-	-
d. Peringkat klaster 4	-	-	-	12,00%	-	-	-
e. Peringkat klaster 5	-	-	-	15,00%	-	-	-
Tagihan Kontribusi Reasuransi				-	-	-	-
Dalam Negeri	-	-	-	2,80%	-	-	-
Luar Negeri				-	-	-	-
Peringkat Klaster 1	-	-	-	2,80%	-	-	-
Peringkat Klaster 2	-	-	-	4,00%	-	-	-
Peringkat Klaster 3	-	-	-	6,00%	-	-	-
Peringkat Klaster 4	-	-	-	12,00%	-	-	-
Peringkat Klaster 5	-	-	-	15,00%	-	-	-
Tagihan Klaim Reasuransi				-	-	-	-
Dalam Negeri	-	-	-	2,80%	-	-	-
Luar Negeri				-	-	-	-
a. Peringkat klaster 1	-	-	-	2,80%	-	-	-
b. Peringkat klaster 2	-	-	-	4,00%	-	-	-
c. Peringkat klaster 3	-	-	-	6,00%	-	-	-
d. Peringkat klaster 4	-	-	-	12,00%	-	-	-
e. Peringkat klaster 5	-	-	-	15,00%	-	-	-
Tagihan Investasi				-	-	-	-
a. Investasi yang belum diterima	-	-	-	2,00%	-	-	-
b. Investasi yang gagal bayar pada tanggal	-	-	-	25,00%	-	-	-
Tagihan Hasil Investasi	-	-	-	2,00%	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-

DANA TABARRU MINIMUM BERBASIS RISIKO
RISIKO KREDIT - KEGAGALAN/KETIDAKMAMPUAN PENANGGUNG ULANG

Nomor Baris	Jenis Reasuradur	Nama Reasuradur	Penyisihan Teknis Beban Reasuradur	Deposit dan atau Kontribusi yang ditahandi Perusahaan	Eksposur Reasuransi Netto ((2)-(3))	Faktor	Jumlah Deviasi	(dalam jutaan rupiah)
1	-		-	-	-	0,00%	-	-
2	-		-	-	-	0,00%	-	-
3	-		-	-	-	0,00%	-	-
4	-		-	-	-	0,00%	-	-
5	-		-	-	-	0,00%	-	-
6	-		-	-	-	0,00%	-	-
7	-		-	-	-	0,00%	-	-
8	-		-	-	-	0,00%	-	-
9	-		-	-	-	0,00%	-	-
10	-		-	-	-	0,00%	-	-
...	-		-	-	-	0,00%	-	-
Total			-	-	-		-	-

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU MINIMUM BERBASIS RISIKO
RISIKO PASAR

Uraian	Jumlah Deviasi			PAYDI (digaransi)	Total
	Dana Perusahaan	Dana Tabarru			
Risiko Pasar (A)	-	-		-	-
Risiko Pasar (B)	-	-		-	-
Risiko Pasar (C)	-	-		-	-
Total Risiko Pasar	-	-		-	-

(dalam jutaan rupiah)

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU MINIMUM BERBASIS RISIKO
RISIKO PASAR – PERUBAHAN HARGA PASAR

Uraian	(dalam jutaan rupiah)			
	Dana Perusahaan	Jumlah AYD Dana Tabarru'	PAYDI (digaransi)	Faktor
Investasi	-	-	-	-
Saham Syariah	-	-	-	-
Termasuk IDX30 atau JII	-	-	-	15%
Saham diperdagangkan di bursa Indonesia	-	-	-	20%
Saham diperdagangkan di bursa luar negeri	-	-	-	30%
Saham penyusun indeks utama bursa utama	-	-	-	20%
Saham Lainnya	-	-	-	30%
Reksa Dana Syariah	-	-	-	-
Sepenuhnya berupa surat utang pemerintah	-	-	-	0%
Sepenuhnya berupa surat utang swasta dan	-	-	-	6%
Sepenuhnya berupa surat berharga ekuitas	-	-	-	16%
Campuran*)	-	-	-	-
Dana Perusahaan	-	-	-	-
Dana Tabarru'	-	-	-	-
PAYDI (digaransi)	-	-	-	-
Efek Beragun Aset Syariah	-	-	-	-
a. Peringkat klaster 1	-	-	-	1,60%
b. Peringkat klaster 2	-	-	-	2,80%
c. Peringkat klaster 3	-	-	-	4%
d. Peringkat klaster 4	-	-	-	6%
e. Peringkat klaster 5	-	-	-	12%
Dana Investasi Real Estat	-	-	-	10%
Penyertaan Langsung	-	-	-	-
Dalam Pengawasan OJK	-	-	-	10%
Tidak Dalam Pengawasan OJK	-	-	-	20%
Property Investasi	-	-	-	-
Hasil Investasi 4% atau lebih	-	-	-	7%
Hasil Investasi 2% - 4%	-	-	-	15%
Hasil Investasi kurang dari 2%	-	-	-	40%
Emas murni	-	-	-	3%
BUKAN INVESTASI	-	-	-	-
Property Bukan Investasi	-	-	-	4%
TOTAL	-	-	-	-

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU' MINIMUM BERBASIS RISIKO
RISIKO PASAR - PERUBAHAN NILAI TUKAR MATA UANG ASING

URAIAN	Dana Perusahaan								Dana Tabarru'								PAYDI (dijaransi)								(dalam jutaan rupiah)			
	USD	JPY	AUD	EUR	SGD	GBP	Lainnya	IDR	Jumlah	USD	JPY	AUD	EUR	SGD	GBP	Lainnya	IDR	Jumlah	USD	JPY	AUD	EUR	SGD	GBP		Lainnya	IDR	Jumlah
Aset Yang Diperkenankan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Deposito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sertifikat Deposito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Saham Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sukuk atau Obligasi Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MN Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Surat Berharga Syariah Negara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Surat Berharga Syariah yang Diperbitkan oleh Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Surat Berharga Syariah yang Diperbitkan oleh Negara Selain Negara Republik Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Surat Berharga Syariah yang Diperbitkan oleh Lembaga Multinasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Reksa Dana Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Efek Beragun Aset Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dana Investasi Real Estate Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
REPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pembayaran Melalui Kerjasama dengan Pihak lain.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pembayaan Syariah Dengan Hak Tanggungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penyertaan Langsung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Properti Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Emas murni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Investasi lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kas dan Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tagihan Kontribusi Penutupan Langsung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tagihan Kontribusi Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aset Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tagihan Klaim Kosuransi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tagihan Klaim Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tagihan Hasil Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Property Buktan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Biaya Akuisisi yang Ditanggungkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah Aset yang Diperkenankan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Liabilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Utang klaim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Utang Kosuransi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Utang Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Utang Utroh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Utang Pajak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Biaya yang Masih Harus Dibayar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Utang lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penyisihan utroh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penyisihan penjaminan pokok Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penyisihan kontribusi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penyisihan klaim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penyisihan atas risiko bencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah Liabilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah Aset Yang Diperkenankan Dalam Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah Liabilitas Dalam Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Selisih Aset Yang Diperkenankan atas Liabilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Faktor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah Deviasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU MINIMUM BERBASIS RISIKO
RISIKO PASAR - RISIKO PERUBAHAN TINGKAT HASIL INVESTASI

Uraian		Dana Perusahaan		Dana Tabarru'	
PKrf					
PKo					
Max((PKrf-PKo),0)					
PUrf					
PUo					
Max((PUrf-PUo),0)					
fPTB					
PTPI					

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU MINIMUM BERBASIS RISIKO
RISIKO ASURANSI

(dalam jutaan rupiah)	
Uraian	Jumlah Deviasi
I. Total max ((PK* - PK), 0)	-
II. Total ((PAKYBMPI - ARI)fpki	-
III. Total ((PKli - ARI)fpkli)	-
IV. Total ((PRBi - ARI)fpbi)	-
Total Deviasi	-

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU MINIMUM BERBASIS RISIKO
RISIKO ASURANSI - PENYISIHAN KONTRIBUSI

	PK	PK*	Jumlah Deviasi (dalam jutaan rupiah)
Harta Benda (Property)	-	-	-
Kendaraan Bermotor (Own Damage, Third Party)	-	-	-
Pengangkutan (Marine Cargo)	-	-	-
Rangka Kapal (Marine Hull)	-	-	-
Rangka Pesawat (Aviation Hull)	-	-	-
Satelit	-	-	-
Energi Onshore (Oil and Gas)	-	-	-
Energi Offshore (Oil and Gas)	-	-	-
Rekayasa (Engineering)	-	-	-
Tanggung Gugat (Liability)	-	-	-
Aneka	-	-	-
Kesehatan	-	-	-
Kecelakaan Diri	-	-	-
Jiwa*)	-	-	-
Total max ((PK* - PK), 0)	-	-	-

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU MINIMUM BERBASIS RISIKO
RISIKO ASURANSI - PENYISIHAN ATAS KONTRIBUSI YANG BELUM MERUPAKAN PENDAPATAN

	PAKYBMP	AR	fpk	Jumlah Deviasi PAKYBMP ((2) - (3)) x (4)	(dalam jutaan rupiah)
Harta Benda (Property)	-	-		25%	-
Kendaraan Bermotor (Own Damage, Third Party)	-	-		25%	-
Pengangkutan (Marine Cargo)	-	-		30%	-
Rangka Kapal (Marine Hull)	-	-		30%	-
Rangka Pesawat (Aviation Hull)	-	-		30%	-
Satelit	-	-		25%	-
Energi Onshore (Oil and Gas)	-	-		35%	-
Energi Offshore (Oil and Gas)	-	-		35%	-
Rekayasa (Engineering)	-	-		25%	-
Tanggung Gugat (Liability)	-	-		35%	-
Aneka	-	-		25%	-
Kesehatan	-	-		25%	-
Kecelakaan Diri	-	-		25%	-
Jiwa*)	-	-		10%	-
Total	-	-			-

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU MINIMUM BERBASIS RISIKO
RISIKO ASURANSI - PENYISIHAN KLAIM

	Penyisihan Klaim	AR	fpk	(dalam jutaan rupiah)	
				Jumlah Deviasi Penyisihan Klaim((2) - (3)) x (4)	
Harta Benda (Property)	-	-	20%	-	-
Kendaraan Bermotor (Own Damage, Third Party)	-	-	20%	-	-
Pengangkutan (Marine Cargo)	-	-	25%	-	-
Rangka Kapal (Marine Hull)	-	-	25%	-	-
Rangka Pesawat (Aviation Hull)	-	-	25%	-	-
Satelit	-	-	20%	-	-
Energi Onshore (Oil and Gas)	-	-	30%	-	-
Energi Offshore (Oil and Gas)	-	-	30%	-	-
Rekayasa (Engineering)	-	-	20%	-	-
Tanggung Gugat (Liability)	-	-	30%	-	-
Aneka	-	-	20%	-	-
Kesehatan	-	-	20%	-	-
Kecelakaan Diri	-	-	20%	-	-
Jiwa*)	-	-	10%	-	-
Total	-	-	-	-	-

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU MINIMUM BERBASIS RISIKO
RISIKO ASURANSI - PENYISIHAN ATAS RISIKO BENCANA

	Penyisihan Risiko Bencana	AR	fpk	(dalam jutaan rupiah)	
				Jumlah Deviasi Bencana ((2) - (3)) x (4)	Jumlah Penyisihan Risiko
Harta Benda (Property)	-	-	25%	-	-
Kendaraan Bermotor (Own Damage, Third Party)	-	-	25%	-	-
Pengangkutan (Marine Cargo)	-	-	30%	-	-
Rangka Kapal (Marine Hull)	-	-	30%	-	-
Rangka Pesawat (Aviation Hull)	-	-	30%	-	-
Satelit	-	-	25%	-	-
Energi Onshore (Oil and Gas)	-	-	35%	-	-
Energi Offshore (Oil and Gas)	-	-	35%	-	-
Rekayasa (Engineering)	-	-	25%	-	-
Tanggung Gugat (Liability)	-	-	35%	-	-
Aneka	-	-	25%	-	-
Kesehatan	-	-	25%	-	-
Kecelakaan Diri	-	-	25%	-	-
Jiwa*)	-	-	10%	-	-
Total	-	-	-	-	-

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU MINIMUM BERBASIS RISIKO
RISIKO OPERASIONAL

Uraian	Dana Tabarru'	Dana Perusahaan	(dalam jutaan rupiah)
Risiko Operasional Perusahaan			
a. Beban Umum dan Administrasi	-		-
b. Beban Pendidikan dan Pelatihan	-		-
c. Risiko Operasional = (1%*(a-b))	-		-
d. Saldo Biaya Akuisisi yang Ditanggunghkan	-		-
e. Risiko Opsional =(50%*d)	-		-
f. Sub Total Risiko Operasional Perusahaan (c+e)	-		-
Risiko Operasional PAYDI (ROPAYDI)			
g. Aset Dana PAYDI	-		-
h. Sub Total Risiko Operasional PAYDI (ROPAYDI	-		-
Risiko Operasional Dana Tabarru' (RODT)			
i. Investasi Dana Tabarru'	-		-
j. Sub Total RODT = (1%*i)	-		-
Total Deviasi (f+h+i)	-		-

Nomor Baris	Identitas Instrumen Investasi	Dana Jaminan	Investasi Dalam Rangka Pembiayaan Infrastruktur	Nama Penerbit / Pihak	Nama Group	Golongan Perusahaan / Penerbit	Jenis Dana	Pengawas	Jenis Investasi	Jangka Waktu	
										DD/MM/YY Mulai	DD/MM/YY Jatuh tempo
1		-	-			-	-	-	-		
2		-	-			-	-	-	-		
3		-	-			-	-	-	-		
4		-	-			-	-	-	-		
5		-	-			-	-	-	-		
6		-	-			-	-	-	-		
7		-	-			-	-	-	-		
8		-	-			-	-	-	-		
9		-	-			-	-	-	-		
10		-	-			-	-	-	-		
...		-	-			-	-	-	-		

(dalam jutaan rupiah)

Nomor Baris	Peringkat	Nama Pemeringkat	Kategori Usaha	Sektor Ekonomi	Lokasi	Hubungan Istimewa	Tujuan Kepemilikan	Bagian Kepemilikan (%)	Mata Uang	Jenis Tingkat Pengembalian
1	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-

Nomor Baris	Tingkat Pengembalian	Kolektibilitas	Saldo Buku	Saldo Penilaian SAP	AYD	Hasil Investasi Berjalan	Piutang Hasil Investasi	Piutang Hasil Investasi	Total Hasil Investasi	Hasil Investasi Yang
1	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RINCIAN A-120. Rincian Tagihan

Nomor Baris	Nama Debitur	Kategori Usaha	Jenis Tagihan	Jenis Dana	DD/MM/YY Mulai	Mata Uang	Peringkat Debitur	Saldo Buku (Juta Rp)	Saldo Penilaian SAP (Juta Rp)	AYD (Juta Rp)	(dalam jutaan rupiah)
1		-	-	-		-	-	-	-	-	-
2		-	-	-		-	-	-	-	-	-
3		-	-	-		-	-	-	-	-	-
4		-	-	-		-	-	-	-	-	-
5		-	-	-		-	-	-	-	-	-
6		-	-	-		-	-	-	-	-	-
7		-	-	-		-	-	-	-	-	-
8		-	-	-		-	-	-	-	-	-
9		-	-	-		-	-	-	-	-	-
10		-	-	-		-	-	-	-	-	-
...		-	-	-		-	-	-	-	-	-

RINCIAN A-130. Rincian Aset Lain

Nomor Baris	Nama Aset	Nilai Pasar / Apraisal	Saldo Juta (Rp)	Keterangan (dalam jutaan rupiah)
1		-	-	
2		-	-	
3		-	-	
4		-	-	
5		-	-	
6		-	-	
7		-	-	
8		-	-	
9		-	-	
...		-	-	

RINCIAN A-210. Rincian Utang

Nomor Baris	Nama	Jenis Utang	Jenis Dana	DD/MM/YY Periode Mulai	Negara	Mata Uang	Saldo Buku (Juta Rp)	Saldo Penilaian SAP (Juta Rp)	(dalam jutaan rupiah)
1		-	-		-	-	-	-	-
2		-	-		-	-	-	-	-
3		-	-		-	-	-	-	-
4		-	-		-	-	-	-	-
5		-	-		-	-	-	-	-
6		-	-		-	-	-	-	-
7		-	-		-	-	-	-	-
8		-	-		-	-	-	-	-
9		-	-		-	-	-	-	-
10		-	-		-	-	-	-	-
...		-	-		-	-	-	-	-

RINCIAN A-220 - PENYISIHAN UJROH, PENYISIHAN KONTRIBUSI, DAN
PENYISIHAN ATAS KONTRIBUSI YANG BELUM MERUPAKAN PENDAPATAN

Cabang Asuransi	Dana Perusahaan		Dana Tabarru'		Gabungan		(dalam jutaan rupiah)
	Penyisihan Ujroh	Penyisihan Ujroh atas	Jumlah	Penyisihan Risiko	Penyisihan Risiko atas	Jumlah	
I. Penyisihan Ujroh/Kontribusi	-	-	-	-	-	-	-
Harta Benda (Property)	-	-	-	-	-	-	-
Kendaraan Bermotor (Own Damage, Third Party Liability, dan Personal	-	-	-	-	-	-	-
Pengangkutan (Marine Cargo)	-	-	-	-	-	-	-
Rangka Kapal (Marine Hull)	-	-	-	-	-	-	-
Rangka Pesawat (Aviation Hull)	-	-	-	-	-	-	-
Satelit	-	-	-	-	-	-	-
Energi Onshore (Oil and Gas)	-	-	-	-	-	-	-
Energi Offshore (Oil and Gas)	-	-	-	-	-	-	-
Rekayasa (Engineering)	-	-	-	-	-	-	-
Tanggung Gugat (Liability)	-	-	-	-	-	-	-
Kecelakaan Diri	-	-	-	-	-	-	-
Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-
Kredit (Credit)	-	-	-	-	-	-	-
Suretyship	-	-	-	-	-	-	-
Aneka	-	-	-	-	-	-	-
Jiwa*)	-	-	-	-	-	-	-
II. PKYBMP	-	-	-	-	-	-	-
Harta Benda (Property)	-	-	-	-	-	-	-
Kendaraan Bermotor (Own Damage, Third Party Liability, dan Personal	-	-	-	-	-	-	-
Pengangkutan (Marine Cargo)	-	-	-	-	-	-	-
Rangka Kapal (Marine Hull)	-	-	-	-	-	-	-
Rangka Pesawat (Aviation Hull)	-	-	-	-	-	-	-
Satelit	-	-	-	-	-	-	-
Energi Onshore (Oil and Gas)	-	-	-	-	-	-	-
Energi Offshore (Oil and Gas)	-	-	-	-	-	-	-
Rekayasa (Engineering)	-	-	-	-	-	-	-
Tanggung Gugat (Liability)	-	-	-	-	-	-	-
Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-
Kecelakaan Diri	-	-	-	-	-	-	-
Kredit (Credit)	-	-	-	-	-	-	-
Suretyship	-	-	-	-	-	-	-
Aneka	-	-	-	-	-	-	-
Jiwa*)	-	-	-	-	-	-	-

RINCIAN A-221.
Penyisihan KLAIM

Cabang Asuransi	Dana Tabarru			
	Penyisihan Klaim Dalam Proses	Penyisihan Klaim IBNR	Penyisihan Klaim Pembayaran	Jumlah Penyisihan Klaim
Harta Benda (Property)	-	-	-	-
Kendaraan Bermotor (Own Damage, Third Party Liability, dan Personal	-	-	-	-
Pengangkutan (Marine Cargo)	-	-	-	-
Rangka Kapal (Marine Hull)	-	-	-	-
Rangka Pesawat (Aviation Hull)	-	-	-	-
Satelit	-	-	-	-
Energi Onshore (Oil and Gas)	-	-	-	-
Energi Offshore (Oil and Gas)	-	-	-	-
Rekayasa (Engineering)	-	-	-	-
Tanggung Gugat (Liability)	-	-	-	-
Kredit (Credit)	-	-	-	-
Suretyship	-	-	-	-
Aneka	-	-	-	-
Kesehatan	-	-	-	-
Kecelakaan Diri	-	-	-	-
Jiwa*)	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

RINCIAN A-222
Penyisihan Risiko Bencana

Cabang Asuransi	Dana Tabarru		
	Retensi Sendiri		Reasuransi
Harta Benda (Property)	-		-
Kendaraan Bermotor (Own Damage, Third Party)	-		-
Pengangkutan (Marine Cargo)	-		-
Rangka Kapal (Marine Hull)	-		-
Rangka Pesawat (Aviation Hull)	-		-
Satelit	-		-
Energi Onshore (Oil and Gas)	-		-
Energi Offshore (Oil and Gas)	-		-
Rekayasa (Engineering)	-		-
Tanggung Gugat (Liability)	-		-
Kecelakaan Diri	-		-
Kesehatan	-		-
Kredit (Credit)	-		-
Suretyship	-		-
Aneka	-		-
Jiwa*)	-		-
Total II	-		-

RINCIAN A-310
Rincian Rekapitulasi Aset dan Liabilitas Berdasarkan Mata Uang dan Umur Jatuh Tempo

Umur	Aset1)		Liabilitas1)		Total	Rasio Aset Terhadap Liabilitas2)			
	Rupiah	Valas	Rupiah	Valas		Rupiah	Valas	Total	Total
<= 1 tahun	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1 tahun < umur < 5 tahun	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5 tahun = umur < 10 tahun	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
>= 10 tahun	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RINCIAN A-310

Rincian Rekapitulasi Aset dan Liabilitas Berdasarkan Mata Uang dan Umur Jatuh Tempo

Uraian	Rupiah	Valas	(dalam presentase)	
			Total	
Rasio Aset Lancar Terhadap Aset Tidak lancar	-	-	-	-
Rasio Liabilitas Lancar Terhadap Liabilitas Tidak	-	-	-	-

RINCIAN B-110
Kontribusi dan Klaim Berdasarkan Lini Usaha

Nomor Baris	Lini Usaha		Lokasi		Mata Uang		Pemasaran		Jumlah Polis Inforce	Jumlah Peserta	Jumlah Polis Yang klaim	Jumlah Peserta Yang Klaim	Kontribusi Bruto - Langsung	
							Saluran Distribusi	Jumlah					Alokasi Untuk Ujrah	Alokasi Untuk Tabarru
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nomor Baris	Kontribusi Bruto - Tidak Langsung		Kontribusi Reasurans/retrosesi	Klaim Recovery	Penarikan Dana Investasi Peserta yang Jatuh Tempo	Penarikan/ Penebusan Dana Investasi Peserta Belum Jatuh Tempo	Beban Adjuster	Beban Komisi
	Alokasi Untuk Ujrah	Alokasi Untuk Tabarru						
1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-

C-110. LAPORAN DANA JAMINAN
Ringkasan Perkembangan Dana Jaminan dan Perhitungan Kecukupan Dana Jaminan

Catatan: *) Jumlah premi neto dan premi reasuransi adalah jumlah sebagaimana disajikan dalam

Uraian	Jumlah
1. Ringkasan Perkembangan Dana Jaminan	
Saldo Awal Dana Jaminan	-
Penempatan Dana Jaminan Baru:	
a. Dana Jaminan Dalam Bentuk Deposito	-
b. Dana Jaminan dalam Bentuk SUN/Surat Berharga Lain yang Diterbitkan Negara (SBN)	-
Total Penempatan Dana Jaminan Baru (3 + 4)	-
Pencairan Dana Jaminan:	
a. Dana Jaminan Dalam Bentuk Deposito	-
b. Dana Jaminan dalam Bentuk SUN/Surat Berharga Lain yang Diterbitkan Negara (SBN)	-
Total pencairan Dana Jaminan (7 + 8)	-
Saldo Akhir Dana Jaminan (1 + 5 – 9)	-
2. Perhitungan Kecukupan Dana Jaminan Tahunan	
Ekuitas minimum yang dipersyaratkan	-
Jumlah Kontribusi neto*)	-
Jumlah Kontribusi reasuransi*)	-
Jumlah Penyisihan atas PAYDI yang digaransi	-
Batas Minimum Dana Jaminan I (20% x 1)	-
Batas Minimum Dana Jaminan II ((1% x 2) + (0,25% x 3) + (2% x 4))	-
Batas Minimum Dana Jaminan Yang Digunakan (Nilai antara 5 dan 6 mana yang lebih besar)	-
Dana Jaminan Yang Dimiliki	-
Kelebihan (Kekurangan) Dana Jaminan (8 - 7)	-

Nomor Baris	Nama Produk		Jenis Polis (Kumpulan/Individual)	Lini Usaha	Sesuai dengan SE OJK NO. 9/SEOJK/05/2017							Peserta yang Klaim
	Jumlah Peserta Aktif pada Awal Periode Laporan	Jumlah Peserta Baru Dalam Periode Laporan			Jumlah Kepesertaan yang Diperpanjang pada Periode Laporan	Jumlah Kepesertaan yang Berakhir karena Jatuh Tempo	Jumlah Kepesertaan yang Berakhir karena Klaim	Jumlah Peserta Aktif pada Akhir Periode Laporan	Premi / Kontribusi Bruto (Rp)	Klaim Bruto (Rp)		
1			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nomor Baris	Tidak Sesuai dengan SE OJK NO. 9/SEOJK.05/2017							Peserta yang Klaim
	Jumlah Peserta Aktif pada Awal Periode Laporan	Jumlah Peserta Baru Dalam Periode Laporan	Jumlah Kepesertaan yang Diperpanjang pada Periode Laporan	Jumlah Kepesertaan yang Berakhir Karena Jatuh Tempo	Jumlah Kepesertaan yang Berakhir Karena Klaim	Premi / Kontribusi Bruto (Rp)	Klaim Bruto (Rp)	
1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

RINCIAN D-120. Kinerja Saluran Pemasaran Asuransi Mikro

Nomor Baris	Jenis Saluran Pemasaran		Wilayah Pemasaran	Pemasar Badan Hukum		Jumlah Pemasar Perorangan	Nama Produk Yang Dipasarkan	Jumlah Peserta/Tertanggung	Premi/Kontribusi Bruto (Rp)	
				Kategori Badan Hukum	Jumlah Badan Hukum					
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4		-	-	-	-	-	-	-	-	-
5		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6		-	-	-	-	-	-	-	-	-
7		-	-	-	-	-	-	-	-	-
8		-	-	-	-	-	-	-	-	-
9		-	-	-	-	-	-	-	-	-
10		-	-	-	-	-	-	-	-	-
...		-	-	-	-	-	-	-	-	-

(dalam jutaan rupiah)

FORMAT I B

BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN BULANAN/TRIWULANAN/TAHUNAN ASPEK KEUANGAN BAGI PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH DAN UNIT SYARIAH PADA PERUSAHAAN REASURANSI

Data Umum

Tanggal Pelaporan	
Kode Perusahaan	
Nama Perusahaan	
Alamat Perusahaan	
Periode Pelaporan	
Bulan Pelaporan	April
Tahun Fiskal	
Jenis Periode Pelaporan	Laporan Bulanan/Triwulanan/Tahunan
Nama Direksi	
Jabatan Direksi	

K e p a d a

Yth.Direktorat IKNB Syariah
Otoritas Jasa Keuangan

**LAPORAN BULANAN/TRIWULANAN/TAHUNAN
REASURANSI SYARIAH**

Profil Perusahaan

Per 31-Jan-1900

	Keterangan
Nama Perusahaan	
Alamat Lengkap	
Telepon dan Fax	
E-mail	
NPWP	
No. & Tanggal Izin Usaha	
Jumlah Cabang/Perwakilan	
Jumlah Tenaga Kerja	
Jumlah Tertanggung	
Auditor Eksternal	
Pengendali	
PIC Laporan Keuangan	
Penyusun Laporan	
Nama Petugas	
Divisi	
Telepon	
Fax	
Email	
Penanggung Jawab Direksi	
Nama Penanggung Jawab	
Jabatan	
Telepon	
Fax	
E-mail	

Surat Pernyataan Laporan Keuangan			
Per	31-Desember	Tahun	"Periode"
"Nama Perusahaan"			

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

- 1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan
"Nama Perusahaan"
- 2. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan telah disajikan secara lengkap sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
- 3. Laporan keuangan Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

<u>"Tempat", "Tanggal"</u> "Nama Perusahaan"

<u>"Nama Direksi"</u> "Jabatan Direksi"
--

Saya, "Nama Aktuaris" , nomor register "No Reg PAI" dengan ini menyatakan bahwa:

- 1. "Nama Perusahaan" telah menyajikan semua data secara wajar
- 2. Saya telah melakukan penelaahan terhadap laporan keuangan perusahaan berdasarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan keuangan perusahaan perasuransian

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

<u>"Tempat", "Tanggal"</u>

<u>"Nama Aktuaris"</u> "No Reg PAI"
--

Note: Untuk laporan tahunan saja

Surat Pernyataan Laporan Keuangan			
Per	"Tanggal"	Triwulan	"Periode"
"Nama Perusahaan"			

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

- 1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan
"Nama Perusahaan"
- 2. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan telah disajikan secara lengkap sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
- 3. Laporan keuangan Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

<u>"Tempat", "Tanggal"</u> "Nama Perusahaan"

<u>"Nama Direksi"</u> "Jabatan Direksi"
--

Catatan: Untuk laporan triwulanan saja

PT ...
Perusahaan Reasuransi Syariah
PERNYATAAN
DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Setelah melakukan penelitian terhadap pengelolaan kekayaan dan kewajiban Dana *Tabarru'* Dana *Tanahud*, Dana Perusahaan, dan Dana Investasi Peserta PT, maka dengan ini Dewan Pengawas Syariah PT menyatakan bahwa pengelolaan kekayaan dan kewajiban Dana *Tabarru'*, Dana *Tanahud*, Dana Perusahaan , dan Dana Investasi Peserta telah dilakukan sesuai prinsip Syariah Islam.

Jakarta,20xx

Dewan Pengawas Syariah PT

Ketua

Anggota

Catatan: Untuk laporan tahunan saja

Rincian Pemegang Saham

Per 31-Jan-1900

Nomor Baris	Pemegang Saham Pengendali		Kepemilikan Saham	
	Nama Pemegang Saham		Rupiah	Persentase
1			-	0,00%
2			-	0,00%
3			-	0,00%
4			-	0,00%
5			-	0,00%
6			-	0,00%
7			-	0,00%
8			-	0,00%
9			-	0,00%
10			-	0,00%

Rincian Pihak Utama

Per 31-Jan-1900

Nomor Baris	Nama	Jabatan	Tanggal Mulai
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Rasio Pendidikan dan Pelatihan - I

Per 31-Jan-1900

Nomor Baris	Uraian	Biaya Pendidikan dan Pelatihan			(dalam jutaan rupiah)
		Anggaran	Realisasi	Persentase	
1		-	-		0,00%
2		-	-		0,00%
3		-	-		0,00%
4		-	-		0,00%
5		-	-		0,00%
6		-	-		0,00%
7		-	-		0,00%
8		-	-		0,00%
9		-	-		0,00%
10		-	-		0,00%
...		-	-		0,00%
Total					0,00%

Rasio Pendidikan dan Pelatihan - II

Per 31-Jan-1900

Uraian	Anggaran	Realisasi	(dalam jutaan rupiah)
Biaya Pegawai dan Pengurus	-	-	-
Biaya Pendidikan dan Latihan			
a. Diklat Pegawai	-	-	-
b. Diklat Direksi	-	-	-
c. Diklat Komisaris	-	-	-
d. Diklat Dewan Pengawas Syariah	-	-	-
Total Biaya Diklat	-	-	-
Rasio Biaya Diklat dan Biaya Pegawai dan	0,00%	0,00%	0,00%

Laporan Posisi Keuangan
Per 31-Jan-1900

URAIAN	Dana Perusahaan		Dana Tabarru'		Dana Investasi Peserta		Penyesuaian		(dalam jutaan rupiah)	
	SAK	SAP	SAK	SAP	SAK	SAP	SAK	SAP	Gabungan SAK	
ASET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deposito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sertifikat Deposito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saham Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukuk atau Obligasi Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MTN Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah Negara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reksa Dana Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Efek Beragun Aset Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana Investasi Real Estate Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembiayaan Syariah Dengan Hak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyertaan Langsung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Properti Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emas murni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investasi lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bukan investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kas dan Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biaya akuisisi yang ditangguhkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Property Non Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LIABILITAS DAN EKUITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liabilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang klaim atau manfaat investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biaya yang Masih Harus Dibayar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan Teknis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan Ujroh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan PAYDI yang memberikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan kontribusi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan atas kontribusi yang belum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan klaim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan atas risiko bencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Qardh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ekuitas Dana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Modal Disetor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aglo/Disagio Saham	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Akumulasi Dana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Profit Equilization Reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Laba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Komponen Ekuitas Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selisih Saldo SAK dan Saldo SAP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kekayaan Yang Tidak Diperkenankan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Laporan Kinerja Keuangan						Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31-Jan-1900			(dalam jutaan rupiah)	
Uraian						Dana Tabarru'		Dana Investasi Peserta		Gabungan
						Dana Perusahaan	Akad Wakalah Bil Ujrah	Akad Mudharabah	Penyesuaian	
PENDAPATAN										
PENDAPATAN INVESTASI DAN UJROH										
Hasil Investasi	-					-	-	-	-	-
Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana	-					-	-	-	-	-
Jumlah Hasil Investasi	-					-	-	-	-	-
Jumlah Ujroh Pengelolaan Investasi	-					-	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Hasil Investasi dan	-					-	-	-	-	-
PENDAPATAN UNDERWRITING										
Kontribusi Bruto/Ujroh Diterima/Alokasi										
a. Alokasi Kontribusi Langsung:	-					-	-	-	-	-
b. Alokasi Kontribusi Tidak Langsung:	-					-	-	-	-	-
Jumlah Kontribusi Bruto/Ujroh	-					-	-	-	-	-
Kontribusi Reasuransi/Retrosesi	-					-	-	-	-	-
Kontribusi Neto	-					-	-	-	-	-
Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi										
a. Penurunan (kenaikan) Penyisihan	-					-	-	-	-	-
b. Penurunan (kenaikan) PAKYBMP	-					-	-	-	-	-
c. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan atas	-					-	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Kontribusi Neto	-					-	-	-	-	-
PENDAPATAN UNDERWRITING	-					-	-	-	-	-
BEBAN										
BEBAN UNDERWRITING										
Beban Klaim										
a. Klaim Bruto	-					-	-	-	-	-
b. Klaim recovery	-					-	-	-	-	-
c. Kenaikan (penurunan) Penyisihan	-					-	-	-	-	-
d. Penarikan Dana Investasi Peserta yang	-					-	-	-	-	-
e. Penarikan/Penebusan Dana Investasi	-					-	-	-	-	-
Jumlah Beban Klaim Netto	-					-	-	-	-	-
Beban Adjuster	-					-	-	-	-	-
JUMLAH BEBAN UNDERWRITING	-					-	-	-	-	-
JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING	-					-	-	-	-	-
a. Surplus underwriting untuk dana	-					-	-	-	-	-
b. Surplus underwriting untuk Peserta	-					-	-	-	-	-
BEBAN USAHA:										
a. Beban Pemasaran	-					-	-	-	-	-
b. Beban Akuisisi	-					-	-	-	-	-
c. Beban Umum dan Administrasi:	-					-	-	-	-	-
- Beban Pegawai dan Pengurus	-					-	-	-	-	-
- Beban Pendidikan dan Pelatihan	-					-	-	-	-	-
- Beban Umum dan Administrasi Lainnya	-					-	-	-	-	-
Kenaikan (penurunan) Penyisihan Ujroh	-					-	-	-	-	-
JUMLAH BEBAN USAHA	-					-	-	-	-	-
LABA (RUGI) USAHA ASURANSI	-					-	-	-	-	-
Pendapatan Lain	-					-	-	-	-	-
Beban Lain	-					-	-	-	-	-
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	-					-	-	-	-	-
Pajak Penghasilan	-					-	-	-	-	-
LABA SETELAH PAJAK	-					-	-	-	-	-
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	-					-	-	-	-	-
JUMLAH KINERJA SELURUH DANA	-					-	-	-	-	-

Laporan Arus Kas Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31-Jan-1900							(dalam jutaan rupiah)	
Uraian	Dana Perusahaan		Dana Tabarru'		Dana Investasi Peserta			
					Akad Wakalah Bil Ujrah	Akad Mudharabah	Gabungan	
SALDO AWAL	-	-	-	-	-	-	-	-
PENINGKATAN (PENURUNAN SALDO KAS)	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO AKHIR KAS	-	-	-	-	-	-	-	-
ARUS KAS DARI AKTIFITAS OPERASI								
a. Arus Kas Masuk	-	-	-	-	-	-	-	-
Kontribusi Para Peserta	-	-	-	-	-	-	-	-
Ujroh yang diterima	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Alokasi Surplus Dana Tabarru'	-	-	-	-	-	-	-	-
Klaim Reasuransi Diterima	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Distribusi Surplus	-	-	-	-	-	-	-	-
Lain - Lain	-	-	-	-	-	-	-	-
b. Arus Kas Keluar	-	-	-	-	-	-	-	-
Klaim Dibayar	-	-	-	-	-	-	-	-
Penarikan Dana Investasi Peserta yang telah	-	-	-	-	-	-	-	-
Penarikan/Penebusan Dana Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembayaran Distribusi Surplus UW ke	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembayaran Distribusi Surplus UW ke	-	-	-	-	-	-	-	-
Beban Akuisisi	-	-	-	-	-	-	-	-
Beban Pemasaran	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembayaran Ujroh Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembayaran Ujroh Asuransi	-	-	-	-	-	-	-	-
Kontribusi Reasuransi Dibayar	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembayaran Sewa	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembayaran Zakat	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembayaran Pajak	-	-	-	-	-	-	-	-
Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-
ARUS KAS DARI AKTIFITAS INVESTASI								
a. Arus Kas Masuk	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Hasil Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Bagi Hasil Investasi Dana	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Bagi Hasil Investasi Dana	-	-	-	-	-	-	-	-
Pencairan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Penjualan Aktiva Tetap	-	-	-	-	-	-	-	-
Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-
b. Arus Kas Keluar	-	-	-	-	-	-	-	-
Penempatan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembayaran ujroh/fee kepada Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembelian Aktiva Tetap	-	-	-	-	-	-	-	-
Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-
ARUS KAS DARI AKTIFITAS PENDANAAN								
a. Arus Kas Masuk	-	-	-	-	-	-	-	-
Setoran Modal/Modal Kerja	-	-	-	-	-	-	-	-
Pinjaman Subordinasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Qardh	-	-	-	-	-	-	-	-
Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-
b. Arus Kas Keluar	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembayaran Pinjaman Subordinasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembayaran Dividen	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembayaran Qardh	-	-	-	-	-	-	-	-
Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-

LAPORAN PERUBAHAN DANA

Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31-Jan-1900

URAIAN	Dana Perusahaan	Dana Tabarru'	Gabungan
I. Saldo Dana Awal	-	-	-
III. Penambahan	-	-	-
Modal Disetor	-	-	-
Laba komprehensif periode berjalan	-	-	-
Kenaikan akumulasi dana tabarru' / dana	-	-	-
Penambahan lainnya	-	-	-
III. Pengurangan	-	-	-
Rugi komprehensif periode berjalan	-	-	-
Penurunan akumulasi dana tabarru' / dana	-	-	-
Pembayaran Deviden	-	-	-
Pengurangan lainnya	-	-	-
IV. Saldo Akhir Dana	-	-	-

ANALISIS DANA PERUSAHAAN
PERHITUNGAN ASET DAN LIABILITAS DANA PERUSAHAAN
Per 31-Jan-1900

Uraian	Saldo Buku Besar (SAK)	Penilaian Berdasarkan SAP	Selisih Berdasarkan Penilaian Berdasarkan SAK dan SAP	AYD Setelah Batasan Per Perusahaan	AYD Setelah Batasan Per Jenis Aset	AYD Setelah Batasan Afiliasi	AYD Setelah Batasan Luar Negeri
I. Investasi	-	-	-	-	-	-	-
Deposito	-	-	-	-	-	-	-
Sertifikat Deposito	-	-	-	-	-	-	-
Saham Syariah	-	-	-	-	-	-	-
Sukuk atau Obligasi Syariah	-	-	-	-	-	-	-
MTN Syariah	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah Negara RI	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah Negara Selain RI	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah Lembaga Multinasional	-	-	-	-	-	-	-
Reksa Dana Syariah	-	-	-	-	-	-	-
Efek Beragun Aset Syariah	-	-	-	-	-	-	-
Dana Investasi Real Estat Syariah	-	-	-	-	-	-	-
REPO	-	-	-	-	-	-	-
Pembiayaan Melalui Kerjasama Dengan Pihak	-	-	-	-	-	-	-
Pembiayaan Syariah Dengan Hak Tanggungan	-	-	-	-	-	-	-
Penyertaan Langsung	-	-	-	-	-	-	-
Properti Investasi	-	-	-	-	-	-	-
Emas Murni	-	-	-	-	-	-	-
Investasi Lain	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Investasi	-	-	-	-	-	-	-
II. Bukan Investasi	-	-	-	-	-	-	-
Kas dan Bank	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Ujrah Penutupan Langsung	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Ujrah Penutupan Tidak Langsung	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Hasil Investasi	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Investasi	-	-	-	-	-	-	-
Aset Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-
Biaya Akuisisi Ditangguhkan	-	-	-	-	-	-	-
Property Bukan Investasi	-	-	-	-	-	-	-
Aset Lain	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Bukan Investasi	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH KEKAYAAN (I+II)	-	-	-	-	-	-	-

ANALISIS DANA PERUSAHAAN
PERHITUNGAN LIABILITAS DANA PERUSAHAAN
Per 31-Jan-1900

Uraian	Saldo Buku Besar (SAK)	Penilaian Berdasarkan SAP	Selisih Penilaian SAK dan SAP
I. Utang	-	-	-
II. Penyisihan Ujrah	-	-	-
III. Penyisihan untuk Penjaminan Atas Pokok	-	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN (I+II+III)	-	-	-

(dalam jutaan rupiah)

ANALISIS DANA TABARRU
PERHITUNGAN ASET DAN LIABILITAS DANA TABARRU'
Per 31-Jan-1900

Uraian	Saldo Buku Besar (SAK)	Penilaian Berdasarkan SAP	Selisih Berdasarkan Penilaian Berdasarkan SAK dan SAP	AYD Setelah Batasan Per Perusahaan	AYD Setelah Batasan Per Jenis Aset	AYD Setelah Batasan Afiliasi	AYD Setelah Batasan Luar Negeri	(dalam jutaan rupiah)
I. Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Deposito	-	-	-	-	-	-	-	-
Sertifikat Deposito	-	-	-	-	-	-	-	-
Saham Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukuk atau Obligasi Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
MTN Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah Negara RI	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah Negara Selain RI	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah Lembaga Multinasional	-	-	-	-	-	-	-	-
Reksa Dana Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Efek Beragun Aset Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana Investasi Real Estat Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
REPO	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembiayaan Melalui Kerjasama Dengan Pihak	-	-	-	-	-	-	-	-
Emas Murni	-	-	-	-	-	-	-	-
Investasi Lain	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Bukan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Kas dan Bank	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Kontribusi Koasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Recovery Klaim Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Hasil Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Lain	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Bukan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH KEKAYAAN (I+II)	-	-	-	-	-	-	-	-

ANALISIS DANA TABARRU
PERHITUNGAN LIABILITAS DANA TABARRU"
Per 31-Jan-1900

Uraian	Saldo Buku Besar (SAK)	Penilaian Berdasarkan SAP	Selisih Penilaian SAK dan SAP
Utang	-	-	-
Penyisihan Kontribusi	-	-	-
Penyisihan Kontribusi Yang Belum Merupakan	-	-	-
Penyisihan Klaim	-	-	-
Penyisihan atas Risiko Bencana (Catastrophic	-	-	-
JUMLAH LIABILITAS	-	-	-

(dalam jutaan rupiah)

RASIO KEUANGAN
PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS
Per 31-Jan-1900

Uraian	Dana Tabarru'	Dana Perusahaan	(dalam jutaan rupiah)
Tingkat Solvabilitas	-	-	-
A. Aset yang diperkenankan (AYD)	-	-	-
B. Liabilitas selain Qardh dari Dana Perusahaan	-	-	-
DTMBR/MMBR	-	-	-
A. Risiko Kredit	-	-	-
B. Risiko Likuiditas	-	-	-
C. Risiko Pasar	-	-	-
D. Risiko Asuransi	-	-	-
E. Risiko Operasional	-	-	-
F. MMBR atas PAYDI Digaransi	-	-	-
1. Risiko PAYDI Digaransi	-	-	-
a. Risiko Kredit	-	-	-
b. Risiko Likuiditas	-	-	-
c. Risiko Pasar	-	-	-
2. Aset PAYDI Digaransi	-	-	-
3. Liabilitas PAYDI Digaransi	-	-	-
Rasio Tingkat Solvabilitas sebelum memperhitungkan Aset	0,00%	0,00%	0,00%
Rasio Target Tingkat Solvabilitas Internal (tahunan)	0,00%	0,00%	0,00%
Rasio Tingkat Solvabilitas dengan DTMBR/MMBR yang	0,00%	0,00%	0,00%
Aset yang Tersedia Untuk Qardh yang Diperhitungkan	-	-	-
A. Kekurangan (kelebihan) tingkat solvabilitas dari target	-	-	-
B. Ketidakcukupan investasi, kas dan bank	-	-	-
Rasio Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' dan Dana Tanahud	0,00%	0,00%	0,00%

RASIO KEUANGAN
SELAIN TINGKAT SOLVABILITAS
Per 31-Jan-1900

Uraian	Indikator			(dalam jutaan rupiah)
	Dana Tabarru'	Dana Perusahaan	Gabungan	
Rasio Likuiditas				-
A. Kekayaan lancar	-	-		-
B. Kewajiban lancar	-	-		-
C. Rasio (a:b)	0,00%	0,00%		0,00%
Rasio perimbangan investasi dengan liabilitas				-
A. Investasi, kas dan bank	-	-		-
B. Penyisihan teknis	-	-		-
C. Utang klaim retensi sendiri	-	-		-
D. Rasio [a:(b+c)]	0,00%	-		0,00%
Rasio Pendapatan investasi neto				-
A. Pendapatan investasi netto	-	-		-
B. Rata-rata investasi	-	-		-
C. Rasio (a:b)	0,00%	0,00%		0,00%
Rasio beban klaim				-
A. Beban klaim netto	-	-		-
B. Kontribusi netto	-	-		-
C. Rasio (a:b)	0,00%	-		0,00%
Rasio perubahan dana				-
A. Dana tahun/triwulan/bulan berjalan	-	-		-
B. Dana tahun/triwulan/bulan lalu	-	-		-
C. Perubahan dana (a-b)	-	-		-
D. Rasio (c:b)	0,00%	0,00%		0,00%
Rasio Aset Unit Syariah				-
A. Aset Dana Tabarru	-	-		-
B. Aset Dana Investasi Peserta	-	-		-
C. Aset Dana Asuransi Perusahaan	-	-		-
D. Rasio (a+b) : (a+b+c)	0,00%	0,00%		0,00%
Penghitungan Qardh yang Diperlukan Dana				-
A. Jumlah Kewajiban selain Qardh	-	-		-
B. Jumlah Aset	-	-		-
Jumlah Qardh yang Diperlukan (a-b)	-	-		-

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU' MINIMUM BERBASIS RISIKO
RISIKO KREDIT
Per 31-Jan-1900

Uraian	Jumlah Deviasi		(dalam jutaan rupiah)
	Dana Tabarru	Dana Perusahaan	
Risiko Kredit (a)	-	-	-
Risiko Kredit (b)	-	-	-
Total Risiko Kredit	-	-	-

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU' MINIMUM BERBASIS RISIKO
RISIKO KREDIT - RISIKO KEGAGALAN ATAU KETIDAKMAMPUAN DEBITUR ATAU PIHAK LAIN

Per 31-Jan-1900

Uraian	Jumlah AYD		PAYDI (digaransi)	Faktor	Jumlah Deviasi	
	Dana Tabarru	Dana Perusahaan			Dana Tabarru	Dana Perusahaan
Investasi						
Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito	-	-	-	-	-	-
Kategori Khusus (sampai dengan 2 milyar per	-	-	-	-	-	-
Kategori Lain, sesuai peringkat Bank:	-	-	-	-	-	-
a. Peringkat klaster 1	-	-	-	1,20%	-	-
b. Peringkat klaster 2	-	-	-	2,10%	-	-
c. Peringkat klaster 3	-	-	-	3,00%	-	-
d. Peringkat klaster 4	-	-	-	4,50%	-	-
e. Peringkat klaster 5	-	-	-	9,00%	-	-
Sukuk / Obligasi Korporasi Syariah	-	-	-	-	-	-
a. Peringkat klaster 1	-	-	-	1,60%	-	-
b. Peringkat klaster 2	-	-	-	2,80%	-	-
c. Peringkat klaster 3	-	-	-	4,00%	-	-
d. Peringkat klaster 4	-	-	-	6,00%	-	-
e. Peringkat klaster 5	-	-	-	12,00%	-	-
MTN Syariah	-	-	-	-	-	-
a. Peringkat klaster 1	-	-	-	1,60%	-	-
b. Peringkat klaster 2	-	-	-	2,80%	-	-
c. Peringkat klaster 3	-	-	-	4,00%	-	-
d. Peringkat klaster 4	-	-	-	6,00%	-	-
e. Peringkat klaster 5	-	-	-	12,00%	-	-
Surat Berharga Syariah Negara	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Yang Diterbitkan oleh Bank	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Yang Diterbitkan oleh Negara	-	-	-	-	-	-
a. Peringkat klaster 1	-	-	-	1,60%	-	-
b. Peringkat klaster 2	-	-	-	2,80%	-	-
c. Peringkat klaster 3	-	-	-	4,00%	-	-
d. Peringkat klaster 4	-	-	-	6,00%	-	-
e. Peringkat klaster 5	-	-	-	12,00%	-	-
Surat Berharga yang diterbitkan oleh Lembaga	-	-	-	-	-	-
REPO	-	-	-	1,00%	-	-
Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak	-	-	-	-	-	-
a. Sangat sehat	-	-	-	1,60%	-	-
b. Sehat	-	-	-	2,80%	-	-
c. Kurang sehat	-	-	-	4,00%	-	-
d. Tidak sehat	-	-	-	6,00%	-	-
Pinjaman yang Dijamin dengan Hak	-	-	-	-	-	-
Properti residensial	-	-	-	-	-	-
a. LTV < 65%	-	-	-	2,80%	-	-
b. 65% < LTV < 75%	-	-	-	4,00%	-	-
Properti komersial lainnya	-	-	-	-	-	-
a. LTV < 65%	-	-	-	5,60%	-	-
b. 65% < LTV < 75%	-	-	-	8,00%	-	-
Properti yang tidak digunakan	-	-	-	12,00%	-	-
Bukan Investasi	-	-	-	-	-	-
Kas dan Bank	-	-	-	-	-	-
Tagihan Kontribusi Penutupan Langsung	-	-	-	8,00%	-	-
Aset Reasuransi	-	-	-	-	-	-
a. aset yang bersumber dari nilai estimasi	-	-	-	-	-	-
b. aset yang bersumber dari perjanjian	-	-	-	30,00%	-	-
Tagihan Klaim Koasuransi	-	-	-	-	-	-
Dalam Negeri	-	-	-	2,80%	-	-
Luar Negeri:	-	-	-	-	-	-
a. Peringkat klaster 1	-	-	-	2,80%	-	-
b. Peringkat klaster 2	-	-	-	4,00%	-	-
c. Peringkat klaster 3	-	-	-	6,00%	-	-
d. Peringkat klaster 4	-	-	-	12,00%	-	-
e. Peringkat klaster 5	-	-	-	15,00%	-	-
Tagihan Kontribusi Reasuransi	-	-	-	-	-	-
Dalam Negeri	-	-	-	2,80%	-	-
Luar Negeri:	-	-	-	-	-	-
Peringkat Klaster 1	-	-	-	2,80%	-	-
Peringkat Klaster 2	-	-	-	4,00%	-	-
Peringkat Klaster 3	-	-	-	6,00%	-	-
Peringkat Klaster 4	-	-	-	12,00%	-	-
Peringkat Klaster 5	-	-	-	15,00%	-	-
Tagihan Klaim Reasuransi	-	-	-	-	-	-
Dalam Negeri	-	-	-	2,80%	-	-
Luar Negeri:	-	-	-	-	-	-
a. Peringkat klaster 1	-	-	-	2,80%	-	-
b. Peringkat klaster 2	-	-	-	4,00%	-	-
c. Peringkat klaster 3	-	-	-	6,00%	-	-
d. Peringkat klaster 4	-	-	-	12,00%	-	-
e. Peringkat klaster 5	-	-	-	15,00%	-	-
Tagihan Investasi	-	-	-	-	-	-
a. Investasi yang belum diterima	-	-	-	2,00%	-	-
b. Investasi yang gagal bayar pada tanggal	-	-	-	25,00%	-	-
Tagihan Hasil Investasi	-	-	-	2,00%	-	-
Total	-	-	-	-	-	-

(dalam jutaan rupiah)

DANA TABARRU MINIMUM BERBASIS RISIKO
RISIKO KREDIT - KEGAGALAN/KETIDAKMAMPUAN PENANGGUNG ULANG
Per 31-Jan-1900

Nomor Baris	Jenis Reasuradur	Nama Reasuradur	Penyisihan Teknis Beban Reasuradur	Deposit dan atau Kontribusi yang ditahandi	Eksposur Reasuransi Netto ((2)-(3))	Faktor	Jumlah Deviasi
1	-		-	-	-	0,00%	-
2	-		-	-	-	0,00%	-
3	-		-	-	-	0,00%	-
4	-		-	-	-	0,00%	-
5	-		-	-	-	0,00%	-
6	-		-	-	-	0,00%	-
7	-		-	-	-	0,00%	-
8	-		-	-	-	0,00%	-
9	-		-	-	-	0,00%	-
10	-		-	-	-	0,00%	-

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU MINIMUM BERBASIS RISIKO
RISIKO PASAR
Per 31-Jan-1900

Uraian	Jumlah Deviasi				Total
	Dana Perusahaan	Dana Tabarru	PAYDI (digaransi)		
Risiko Pasar (A)	-	-	-	-	-
Risiko Pasar (B)	-	-	-	-	-
Risiko Pasar (C)	-	-	-	-	-
Total Risiko Pasar	-	-	-	-	-

(dalam jutaan rupiah)

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU MINIMUM BERBASIS RISIKO
RISIKO PASAR - PERUBAHAN HARGA PASAR
Per 31-Jan-1900

Uraian	Jumlah AYD			Faktor	Jumlah Deviasi		
	Dana Perusahaan	Dana Tabarru'	PAYDI (digaransi)		Dana Perusahaan	Dana Tabarru'	PAYDI (digaransi)
Investasi	-	-	-	-	-	-	-
Saham Syariah	-	-	-	-	-	-	-
Termasuk IDX30 atau JII	-	-	-	15%	-	-	-
Saham diperdagangkan di bursa Indonesia	-	-	-	20%	-	-	-
Saham diperdagangkan di bursa luar negeri	-	-	-	-	-	-	-
Saham penyusun indeks utama bursa utama	-	-	-	20%	-	-	-
Saham Lainnya	-	-	-	30%	-	-	-
Reksa Dana Syariah	-	-	-	-	-	-	-
Sepenuhnya berupa surat utang pemerintah	-	-	-	0%	-	-	-
Sepenuhnya berupa surat utang swasta dan	-	-	-	6%	-	-	-
Sepenuhnya berupa surat berharga ekuitas	-	-	-	16%	-	-	-
Campuran *)	-	-	-	-	-	-	-
Dana Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-
Dana Tabarru'	-	-	-	-	-	-	-
PAYDI (digaransi)	-	-	-	-	-	-	-
Efek Beragun Aset Syariah	-	-	-	-	-	-	-
a. Peringkat klaster 1	-	-	-	1,6%	-	-	-
b. Peringkat klaster 2	-	-	-	2,8%	-	-	-
c. Peringkat klaster 3	-	-	-	4%	-	-	-
d. Peringkat klaster 4	-	-	-	6%	-	-	-
e. Peringkat klaster 5	-	-	-	12%	-	-	-
Dana Investasi Real Estat	-	-	-	10%	-	-	-
Penyertaan Langsung	-	-	-	-	-	-	-
Dalam Pengawasan OJK	-	-	-	10%	-	-	-
Tidak Dalam Pengawasan OJK	-	-	-	20%	-	-	-
Property Investasi	-	-	-	-	-	-	-
Hasil Investasi 4% atau lebih	-	-	-	7%	-	-	-
Hasil Investasi 2% - 4%	-	-	-	15%	-	-	-
Hasil Investasi kurang dari 2%	-	-	-	40%	-	-	-
Emas murni	-	-	-	3%	-	-	-
BUKAN INVESTASI	-	-	-	-	-	-	-
Property Bukan Investasi	-	-	-	4%	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-

(dalam jutaan rupiah)

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU MINIMUM BERBASIS RISIKO
RISIKO PASAR - RISIKO PERUBAHAN TINGKAT HASIL INVESTASI
Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)		
Uraian	Dana Perusahaan	Dana Tabarru'
PKrf		-
PKo		-
Max((PKrf-PKo),0)		-
PUrf	-	
PUo	-	
Max(((PUrf-PUo),0)	-	
fPTB	15%	15%
PTPI	-	-

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU MINIMUM BERBASIS RISIKO
RISIKO ASURANSI
Per 31-Jan-1900

Uraian	Jumlah Deviasi
I. Total max ((PK* - PK), 0)	-
II. Total ((PAKYBMPI - ARI)fpki	-
III. Total ((PKli - ARI)fpkli)	-
IV. Total ((PRBi - ARI)fpbi)	-
Total Deviasi	-

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU MINIMUM BERBASIS RISIKO
 RISIKO ASURANSI - PENYISIHAN KONTRIBUSI
 Per 31-Jan-1900

	PK	PK*	Jumlah Deviasi	(dalam jutaan rupiah)
Harta Benda (Property)	-	-	-	-
Kendaraan Bermotor (Own Damage, Third Party Liability, dan Personal Accident)	-	-	-	-
Pengangkutan (Marine Cargo)	-	-	-	-
Rangka Kapal (Marine Hull)	-	-	-	-
Rangka Pesawat (Aviation Hull)	-	-	-	-
Satelit	-	-	-	-
Energi Onshore (Oil and Gas)	-	-	-	-
Energi Offshore (Oil and Gas)	-	-	-	-
Rekayasa (Engineering)	-	-	-	-
Tanggung Gugat (Liability)	-	-	-	-
Aneka	-	-	-	-
Kesehatan	-	-	-	-
Kecelakaan Diri	-	-	-	-
Jiwa *)	-	-	-	-
I. Total max ((PK* - PK), 0)	-	-	-	-

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU MINIMUM BERBASIS RISIKO
RISIKO ASURANSI - PENYISIHAN ATAS KONTRIBUSI YANG BELUM MERUPAKAN PENDAPATAN
Per 31-Jan-1900

	PAKYBMP	AR	fpk	Jumlah Deviasi PAKYBMP ((2) - (3)) x (4)	(dalam jutaan rupiah)
Harta Benda (Property)	-	-	25%	-	-
Kendaraan Bermotor (Own Damage, Third Party Liability, dan Personal Accident)	-	-	25%	-	-
Pengangkutan (Marine Cargo)	-	-	30%	-	-
Rangka Kapal (Marine Hull)	-	-	30%	-	-
Rangka Pesawat (Aviation Hull)	-	-	30%	-	-
Satelit	-	-	25%	-	-
Energi Onshore (Oil and Gas)	-	-	35%	-	-
Energi Offshore (Oil and Gas)	-	-	35%	-	-
Rekayasa (Engineering)	-	-	25%	-	-
Tanggung Gugat (Liability)	-	-	35%	-	-
Aneka	-	-	25%	-	-
Kesehatan	-	-	25%	-	-
Kecelakaan Diri	-	-	25%	-	-
Jiwa*)	-	-	10%	-	-
Total	-	-	-	-	-

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU MINIMUM BERBASIS RISIKO
RISIKO ASURANSI - PENYISIHAN KLAIM
Per 31-Jan-1900

	Penyisihan Klaim	AR	fpk	Jumlah Deviasi Penyisihan Klaim ((2) - (3)) x (4)	(dalam jutaan rupiah)
Harta Benda (Property)	-	-	20%	-	-
Kendaraan Bermotor (Own Damage, Third Party Liability, dan Personal Accident)	-	-	20%	-	-
Pengangkutan (Marine Cargo)	-	-	25%	-	-
Rangka Kapal (Marine Hull)	-	-	25%	-	-
Rangka Pesawat (Aviation Hull)	-	-	25%	-	-
Satelit	-	-	20%	-	-
Energi Onshore (Oil and Gas)	-	-	30%	-	-
Energi Offshore (Oil and Gas)	-	-	30%	-	-
Rekayasa (Engineering)	-	-	20%	-	-
Tanggung Gugat (Liability)	-	-	30%	-	-
Aneka	-	-	20%	-	-
Kesehatan	-	-	20%	-	-
Kecelakaan Diri	-	-	20%	-	-
Jiwa*)	-	-	10%	-	-
Total	-	-	-	-	-

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU MINIMUM BERBASIS RISIKO
RISIKO ASURANSI - PENYISIHAN ATAS RISIKO BENCANA
Per 31-Jan-1900

	Penyisihan Risiko Bencana	AR	fpk	Jumlah Deviasi Penyisihan Risiko Bencana ((2) - (3)) x (4)	(dalam jutaan rupiah)
Harta Benda (Property)	-	-	25%	-	-
Kendaraan Bermotor (Own Damage, Third Party Liability, dan Personal Accident)	-	-	25%	-	-
Pengangkutan (Marine Cargo)	-	-	30%	-	-
Rangka Kapal (Marine Hull)	-	-	30%	-	-
Rangka Pesawat (Aviation Hull)	-	-	30%	-	-
Satelit	-	-	25%	-	-
Energi Onshore (Oil and Gas)	-	-	35%	-	-
Energi Offshore (Oil and Gas)	-	-	35%	-	-
Rekayasa (Engineering)	-	-	25%	-	-
Tanggung Gugat (Liability)	-	-	35%	-	-
Aneka	-	-	25%	-	-
Kesehatan	-	-	25%	-	-
Kecelakaan Diri	-	-	25%	-	-
Jiwa*)	-	-	10%	-	-
Total	-	-		-	-

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU MINIMUM BERBASIS RISIKO
RISIKO OPERASIONAL
Per 31-Jan-1900

Uraian	Dana Tabarru	Dana Perusahaan
Risiko Operasional Perusahaan		
a. Beban Umum dan Administrasi		-
b. Beban Pendidikan dan Pelatihan		-
c. Risiko Operasional = (1%*(a-b))		-
d. Saldo Biaya Akuisisi yang Ditangguhkan		-
e. Risiko Operasional =(50%*d)		-
f. Sub Total Risiko Operasional Perusahaan (c+e)		-
Risiko Operasional PAYDI (ROPAYDI)		
g. Aset Dana PAYDI		-
h. Sub Total Risiko Operasional PAYDI (ROPAYDI		-
Risiko Operasional Dana Tabarru' (RODT)		
i. Investasi Dana Tabarru'	-	-
j. Sub Total RODT = (1%*i)	-	-
Total Deviasi (f+h+j)	-	-

RINCIAN A-110. Rincian Investasi dan Properti
Per 31-Jan-1900

Nomor Baris	(dalam jutaan rupiah)					
	Identitas Instrumen	Dana Jaminan	Investasi Dalam Rangka	Nama Penerbit / Pihak	Nama Group	Golongan Perusahaan /
						Jenis Dana
						Pengawas
						Jenis Investasi
						DD/MM/YY Mulai
						Jangka Waktu
						DD/MM/YY Jatuh
1		-	-			-
2		-	-			-
3		-	-			-
4		-	-			-
5		-	-			-
6		-	-			-
7		-	-			-
8		-	-			-
9		-	-			-
10		-	-			-

Nomor Baris										
	Peringkat	Nama Pemeringkat	Kategori Usaha	Sektor Ekonomi	Lokasi	Hubungan Istimewa	Tujuan Kepemilikan	Bagian Kepemilikan (%)	Mata Uang	Jenis Tingkat
								0,00%	-	Tingkat Pengembalian (%)
1	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
2	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
3	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
4	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
5	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
6	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
7	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
8	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
9	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
10	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%

Nomor Baris						Hasil Investasi Yang Siap Didistribusi	
	Kolektibilitas	Saldo Buku	Saldo Penilaian SAP	AYD	Hasil Investasi Berjalan Diterima Kas	Plutang Hasil Investasi	Total Hasil Investasi
						Plutang Hasil Investasi Periode Sebelumnya Diterima Kas Periode Berjalan	
1	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-

RINCIAN A-120. Rindian Tagihan

Per 31-Jan-1900

Nomor Baris	Nama Debitur	Kategori Usaha	Jenis Tagihan	Jenis Dana	DD/MM/YY Mulai	Mata Uang	Peringkat Debitur	Saldo Buku (Juta Rp)	Saldo Penilaian SAP (Juta Rp)	AYD (Juta Rp)
1		-	-	-		-	-	-	-	-
2		-	-	-		-	-	-	-	-
3		-	-	-		-	-	-	-	-
4		-	-	-		-	-	-	-	-
5		-	-	-		-	-	-	-	-
6		-	-	-		-	-	-	-	-
7		-	-	-		-	-	-	-	-
8		-	-	-		-	-	-	-	-
9		-	-	-		-	-	-	-	-
10		-	-	-		-	-	-	-	-

RINCIAN A-130. Rincian Aset Lain

Per 31-Jan-1900

Nomor Baris	Nama Aset	Nilai Pasar / Apraisal	Saldo Juta (Rp)	Keterangan
1		-	-	
2		-	-	
3		-	-	
4		-	-	
5		-	-	
6		-	-	
7		-	-	
8		-	-	
9		-	-	
10		-	-	

RINCIAN A-210. Rincian Utang

Per 31-Jan-1900

		(dalam jutaan rupiah)									
Nomor Baris	Nama	Jenis Utang	Jenis Dana	DD/MM/YY Periode Mulai	Negara	Mata Uang	Saldo Buku (Juta Rp)	Saldo Penilaian SAP (Juta Rp)			
1		-	-		-	-	-	-			
2		-	-		-	-	-	-			
3		-	-		-	-	-	-			
4		-	-		-	-	-	-			
5		-	-		-	-	-	-			
6		-	-		-	-	-	-			
7		-	-		-	-	-	-			
8		-	-		-	-	-	-			
9		-	-		-	-	-	-			
10		-	-		-	-	-	-			

RINCIAN A-220. PENYISIHAN UIROH, PENYISIHAN KONTRIBUSI, DAN
PENYISIHAN ATAS KONTRIBUSI YANG BELUM MERUPAKAN PENDAPATAN
Tnwlanaan

Cabang Asuransi	Dana Perusahaan		Dana Tabarru'		Gabungan		(dalam jutaan rupiah)
	Penyisihan Ujroh	Penyisihan Ujroh atas	Jumlah	Penyisihan Risiko	Penyisihan Risiko atas	Jumlah	
I. Penyisihan Ujroh/Kontribusi	-	-	-	-	-	-	-
Harta Benda (Property)	-	-	-	-	-	-	-
Kendaraan Bermotor (Own Damage, Third Party Liability, dan Personal Accident)	-	-	-	-	-	-	-
Pengangkutan (Marine Cargo)	-	-	-	-	-	-	-
Rangka Kapal (Marine Hull)	-	-	-	-	-	-	-
Rangka Pesawat (Aviation Hull)	-	-	-	-	-	-	-
Satelit	-	-	-	-	-	-	-
Energi Onshore (Oil and Gas)	-	-	-	-	-	-	-
Energi Offshore (Oil and Gas)	-	-	-	-	-	-	-
Rekayasa (Engineering)	-	-	-	-	-	-	-
Tanggung Gugat (Liability)	-	-	-	-	-	-	-
Kecelakaan Diri	-	-	-	-	-	-	-
Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-
Kredit (Credit)	-	-	-	-	-	-	-
Suretyship	-	-	-	-	-	-	-
Aneka	-	-	-	-	-	-	-
Jiwa *)	-	-	-	-	-	-	-
II. PKYBMP	-	-	-	-	-	-	-
Harta Benda (Property)	-	-	-	-	-	-	-
Kendaraan Bermotor (Own Damage, Third Party Liability, dan Personal Accident)	-	-	-	-	-	-	-
Pengangkutan (Marine Cargo)	-	-	-	-	-	-	-
Rangka Kapal (Marine Hull)	-	-	-	-	-	-	-
Rangka Pesawat (Aviation Hull)	-	-	-	-	-	-	-
Satelit	-	-	-	-	-	-	-
Energi Onshore (Oil and Gas)	-	-	-	-	-	-	-
Energi Offshore (Oil and Gas)	-	-	-	-	-	-	-
Rekayasa (Engineering)	-	-	-	-	-	-	-
Tanggung Gugat (Liability)	-	-	-	-	-	-	-
Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-
Kecelakaan Diri	-	-	-	-	-	-	-
Kredit (Credit)	-	-	-	-	-	-	-
Suretyship	-	-	-	-	-	-	-
Aneka	-	-	-	-	-	-	-
Jiwa *)	-	-	-	-	-	-	-

RINCIAN A-221.
Penyisihan KLAIM
Per 31-Jan-1900

Cabang Asuransi	Dana Tabarru				
	Penyisihan Klaim Dalam Proses	Penyisihan Klaim IBNR	Penyisihan Klaim Pembayaran Berkala	Jumlah Penyisihan Klaim	
Harta Benda (Property)	-	-	-	-	-
Kendaraan Bermotor (Own Damage, Third Party Liability, dan Personal Accident)	-	-	-	-	-
Pengangkutan (Marine Cargo)	-	-	-	-	-
Rangka Kapal (Marine Hull)	-	-	-	-	-
Rangka Pesawat (Aviation Hull)	-	-	-	-	-
Satelit	-	-	-	-	-
Energi Onshore (Oil and Gas)	-	-	-	-	-
Energi Offshore (Oil and Gas)	-	-	-	-	-
Rekayasa (Engineering)	-	-	-	-	-
Tanggung Gugat (Liability)	-	-	-	-	-
Kredit (Credit)	-	-	-	-	-
Suretyship	-	-	-	-	-
Aneka	-	-	-	-	-
Kesehatan	-	-	-	-	-
Kecelakaan Diri	-	-	-	-	-
Jiwa*)	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-

RINCIAN A-222
Penyisihan Risiko Bencana
Per 31-Jan-1900

Cabang Asuransi	Dana Tabarru	
	Retensi Sendiri	Reasuransi
Harta Benda (Property)	-	-
Kendaraan Bermotor (Own Damage, Third Party)	-	-
Pengangkutan (Marine Cargo)	-	-
Rangka Kapal (Marine Hull)	-	-
Rangka Pesawat (Aviation Hull)	-	-
Satelit	-	-
Energi Onshore (Oil and Gas)	-	-
Energi Offshore (Oil and Gas)	-	-
Rekayasa (Engineering)	-	-
Tanggung Gugat (Liability)	-	-
Kecelakaan Diri	-	-
Kesehatan	-	-
Kredit (Credit)	-	-
Suretyship	-	-
Aneka	-	-
Jiwa*)	-	-
Total	-	-

RINCIAN A-310

Rincian Rekapitulasi Aset dan Liabilitas Berdasarkan Mata Uang dan Umur Jatuh Tempo

Per 31-Jan-1900

Umur	Aset		Total	Liabilitas		Rasio Aset Terhadap Liabilitas		
	Rupiah	Valas		Rupiah	Valas	Rupiah	Valas	Total
<= 1 tahun	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
1 tahun < umur < 5 tahun	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
5 tahun = umur < 10 tahun	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
>= 10 tahun	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Total	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Rincian A310-1

Rincian Rekapitulasi Aset dan Liabilitas Berdasarkan Mata Uang dan Umur Jatuh Tempo

Per 31-Jan-1900

Uraian	(dalam presentase)		
	Rupiah	Valas	Total
Rasio Aset Lancar Terhadap Aset Tidak lancar	0,00%	0,00%	0,00%
Rasio Liabilitas Lancar Terhadap Liabilitas Tidak	0,00%	0,00%	0,00%

RINCIAN B-110
Kontribusi dan Klaim Berdasarkan Lini Usaha
Per 31-Jan-1900

Nomor Baris	Lini Usaha		Lokasi		Mata Uang		Pemasaran		Jumlah		Jumlah Polis Inforce		Jumlah Peserta		Jumlah Polis Yang klaim		Jumlah Peserta Yang	
	Alokasi Untuk Ujrah	Alokasi Untuk Tabarru	Alokasi Untuk Ujrah	Alokasi Untuk Tabarru	Alokasi Untuk Ujrah	Alokasi Untuk Tabarru	Saluran Distribusi	Jumlah										
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nomor Baris	Kontribusi Bruto - Langsung				Kontribusi Bruto - Tidak Langsung				Klaim Recovery				Beban Komisi			
	Alokasi Untuk Ujrah	Alokasi Untuk Tabarru	Alokasi Untuk DIP	Alokasi Untuk Ujrah	Alokasi Untuk Tabarru	Alokasi Untuk Ujrah	Alokasi Untuk Tabarru	Kontribusi	Klaim Bruto	Klaim Recovery	Beban Adjuster	Beban Komisi				
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C-110. LAPORAN DANA JAMINAN

Ringkasan Perkembangan Dana Jaminan dan Perhitungan Kecukupan Dana Jaminan

Per 31-Jan-1900

Uraian	Jumlah
1. Ringkasan Perkembangan Dana Jaminan	
Saldo Awal Dana Jaminan	-
Penempatan Dana Jaminan Baru:	
a. Dana Jaminan Dalam Bentuk Deposito	-
b. Dana Jaminan dalam Bentuk SUN/Surat	-
Total Penempatan Dana Jaminan Baru (3 + 4)	-
Pencairan Dana Jaminan:	
a. Dana Jaminan Dalam Bentuk Deposito	-
b. Dana Jaminan dalam Bentuk SUN/Surat	-
Total pencairan Dana Jaminan (7 + 8)	-
Saldo Akhir Dana Jaminan (1 + 5 – 9)	-
2. Perhitungan Kecukupan Dana Jaminan Tahunan	
Ekuitas minimum yang dipersyaratkan	-
Jumlah Kontribusi neto *)	-
Jumlah Kontribusi reasuransi*)	-
Jumlah Penyisihan atas PAYDI yang digaransi	-
Batas Minimum Dana Jaminan I (20% x 1)	-
Batas Minimum Dana Jaminan II ((1% x 2) +	-
Batas Minimum Dana Jaminan Yang Digunakan (	-
Dana Jaminan Yang Dimiliki	-
Kelebihan (Kekurangan) Dana Jaminan (8 - 7)	-

Nomor Baris	Sesuai SEOJK No. 9/SEOJK.05/2017			Sesuai SEOJK No. 9/SEOJK.05/2017			Sesuai SEOJK No. 9/SEOJK.05/2017			Sesuai SEOJK No. 9/SEOJK.05/2017			Sesuai SEOJK No. 9/SEOJK.05/2017			Sesuai SEOJK No. 9/SEOJK.05/2017		
	Nama Produk	Jenis Polis (Kumpulan/Individual)	Lini Usaha	Jumlah Peserta Aktif pada Awal Periode	Jumlah Peserta Baru Dalam Periode Laporan	Jumlah Kepesertaan yang Diperpanjang pada	Jumlah Kepesertaan yang Berakhir Karena Jatuh	Jumlah Kepesertaan yang Dibatalkan	Jumlah Kepesertaan yang Berakhir Karena Klaim	Jumlah Peserta Aktif pada Akhir Periode	Premi / Kontribusi Bruto (Rp)	Klaim Bruto (Rp)	Jumlah Peserta Klaim	Jumlah Peserta Klaim	Jumlah Peserta Klaim	Premi / Kontribusi Bruto (Rp)	Klaim Bruto (Rp)	Jumlah Peserta Klaim
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nomor Baris	Tidak Sesuai SEOJK No. 9/SEOJK.05/2017			Tidak Sesuai SEOJK No. 9/SEOJK.05/2017			Tidak Sesuai SEOJK No. 9/SEOJK.05/2017			Tidak Sesuai SEOJK No. 9/SEOJK.05/2017			Tidak Sesuai SEOJK No. 9/SEOJK.05/2017			Tidak Sesuai SEOJK No. 9/SEOJK.05/2017		
	Nama Produk	Jenis Polis (Kumpulan/Individual)	Lini Usaha	Jumlah Peserta Aktif pada Awal Periode	Jumlah Peserta Baru Dalam Periode Laporan	Jumlah Kepesertaan yang Diperpanjang pada	Jumlah Kepesertaan yang Berakhir Karena Jatuh	Jumlah Kepesertaan yang Dibatalkan	Jumlah Kepesertaan yang Berakhir Karena Klaim	Jumlah Peserta Aktif pada Akhir Periode	Premi / Kontribusi Bruto (Rp)	Klaim Bruto (Rp)	Jumlah Peserta Klaim	Jumlah Peserta Klaim	Jumlah Peserta Klaim	Premi / Kontribusi Bruto (Rp)	Klaim Bruto (Rp)	Jumlah Peserta Klaim
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RINCIAN D-120. Kinerja Saluran Pemasaran Asuransi Mikro

Per 31-Jan-1900

Nomor Baris	Pemasar Badan Hukum			(dalam jutaan rupiah)				
	Jenis Saluran Pemasaran	Wilayah Pemasaran	Kategori Badan Hukum	Jumlah Badan Hukum	Jumlah Pemasar Perorangan	Nama Produk Yang Dipasarkan	Jumlah Peserta/Tertanggung	Premi/Kontribusi Bruto (Rp)
1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

FORMAT I C

BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN BULANAN/TRIWULANAN/TAHUNAN ASPEK KEUANGAN BAGI PERUSAHAAN ASURANSI Jiwa SYARIAH DAN UNIT SYARIAH PADA PERUSAHAAN ASURANSI Jiwa

Data Umum

Tanggal Pelaporan	
Kode Perusahaan	
Nama Perusahaan	
Alamat Perusahaan	
Periode Pelaporan	
Bulan Pelaporan	Laporan Bulanan/Triwulanan/Tahunan
Tahun Fiskal	
Jenis Periode Pelaporan	
Nama Direksi	
Jabatan Direksi	

K e p a d a

Yth.Direktorat IKNB Syariah
Otoritas Jasa Keuangan

LAPORAN BULANAN/TRIWULANAN/TAHUNAN
PERUSAHAAN ASURANSI JIWA SYARIAH
Bulan Tahun 1900

Profil Perusahaan

	Keterangan
Nama Perusahaan	
Alamat Lengkap	
Telepon dan Fax	
E-mail	
NPWP	
No. & Tanggal Izin Usaha	
Jumlah Cabang/Perwakilan	
Jumlah Tenaga Kerja	
Jumlah Tertanggung	
Auditor Eksternal	
Pengendali	
PIC Laporan Keuangan	
Penyusun Laporan	
Nama Petugas	
Divisi	
Telepon	
Fax	
Email	
Penanggung Jawab Direksi	
Nama Penanggung Jawab	
Jabatan	
Telepon	
Fax	
E-mail	

Surat Pernyataan
Laporan Keuangan

Per

31-Desember

Tahun

"Periode"

"Nama Perusahaan"

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan

"Nama Perusahaan"
2. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan telah disajikan secara lengkap sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
3. Laporan keuangan Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

"Tempat", "Tanggal"

"Nama Perusahaan"

"Nama Direksi"

"Jabatan Direksi"

Saya,

"Nama Aktuaris"

, nomor register

"No Reg PAI"

 dengan ini menyatakan bahwa:

1.

"Nama Perusahaan"

 telah menyajikan semua data secara wajar
2. Saya telah melakukan penelaahan terhadap laporan keuangan perusahaan berdasarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan keuangan perusahaan perasuransian

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

"Tempat", "Tanggal"

"Nama Aktuaris"

"No Reg PAI"

Catatan: Untuk laporan tahunan saja

Surat Pernyataan
Laporan Keuangan

Per

"Tanggal"

Triwulan

"Periode"

"Nama Perusahaan"

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan

"Nama Perusahaan"
2. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan telah disajikan secara lengkap sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
3. Laporan keuangan Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

"Tempat", "Tanggal"

"Nama Perusahaan"

"Nama Direksi"

"Jabatan Direksi"

Catatan: Untuk laporan tahunan saja

PT ...
Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah
PERNYATAAN
DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Setelah melakukan penelitian terhadap pengelolaan kekayaan dan kewajiban Dana *Tabarru'* Dana *Tanahud*, Dana Perusahaan, dan Dana Investasi Peserta PT, maka dengan ini Dewan Pengawas Syariah PT menyatakan bahwa pengelolaan kekayaan dan kewajiban Dana *Tabarru'*, Dana *Tanahud*, Dana Perusahaan , dan Dana Investasi Peserta telah dilakukan sesuai prinsip Syariah Islam.

Jakarta,20xx

Dewan Pengawas Syariah PT

Ketua

Anggota

Catatan: Untuk laporan tahunan saja

Rincian Pemegang Saham

No	Nama Pemegang Saham	Pemegang Saham	Kepemilikan Saham	
			Rupiah	Persentase
1			-	0,00%
2			-	0,00%
3			-	0,00%
4			-	0,00%
5			-	0,00%
6			-	0,00%
7			-	0,00%
8			-	0,00%
9			-	0,00%
10			-	0,00%

Rincian Pihak Utama

No	Nama	Jabatan	Tanggal Mulai
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Rasio Pendidikan dan Pelatihan - I

No	Uraian	Biaya Pendidikan dan Pelatihan			Persentase
		Anggaran	Realisasi		
1		-	-		0,00%
2		-	-		0,00%
3		-	-		0,00%
4		-	-		0,00%
5		-	-		0,00%
6		-	-		0,00%
7		-	-		0,00%
8		-	-		0,00%
9		-	-		0,00%
10		-	-		0,00%

(dalam jutaan rupiah)

Rasio Pendidikan dan Pelatihan - II

Uraian	Anggaran	Realisasi
Biaya Pegawai dan Pengurus	-	-
Biaya Pendidikan dan Latihan		
a. Diklat Pegawai	-	-
b. Diklat Direksi	-	-
c. Diklat Komisaris	-	-
d. Diklat Dewan Pengawas Syariah	-	-
Total Biaya Diklat	-	-
Rasio Biaya Diklat dan Biaya Pegawai	0,00%	0,00%

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan rupiah)

[illegible]

Laporan Kinerja Keuangan
Untuk Periode Yang Berakhir Pada

(dalam jutaan rupiah)

Uraian				Dana Investasi Peserta		Penyesuaian	Gabungan
	Dana Perusahaan	Dana Tabarru'	Dana Tanahud	Akad Wakalah Bil Ujrah	Akad Mudharabah		
PENDAPATAN							
PENDAPATAN INVESTASI DAN UJROH PENGELOLAAN							
Hasil Investasi	-	-	-	-	-	-	-
Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Hasil Investasi	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Ujroh Pengelolaan Investasi	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Hasil Investasi dan Ujroh	-	-	-	-	-	-	-
PENDAPATAN UNDERWRITING							
Kontribusi Tabarru' /	-	-	-	-	-	-	-
Kontribusi Tanahud / Ujroh /	-	-	-	-	-	-	-
Kontribusi Reasuransi /	-	-	-	-	-	-	-
Retrosesi	-	-	-	-	-	-	-
Kontribusi Neto	-	-	-	-	-	-	-
Penurunan (Kenaikan)							
Penvisihan Kontribusi dan							
a. Penurunan (kenaikan)	-	-	-	-	-	-	-
Penvisihan Kontribusi							
b. Penurunan (kenaikan)	-	-	-	-	-	-	-
PAKYBMP							
c. Penurunan (Kenaikan)	-	-	-	-	-	-	-
Penvisihan atas Risiko							
Jumlah Pendapatan	-	-	-	-	-	-	-
Kontribusi Neto	-	-	-	-	-	-	-
PENDAPATAN	-	-	-	-	-	-	-
BEBAN							
BEBAN UNDERWRITING							
Beban Klaim							
a. Klaim Bruto	-	-	-	-	-	-	-
b. Klaim recovery	-	-	-	-	-	-	-
c. Kenaikan (Penurunan)	-	-	-	-	-	-	-
Penvisihan Klaim							
d. Penarikan Dana Investasi	-	-	-	-	-	-	-
Peserta yang telah iatuh							
e. Penarikan / Penebusan	-	-	-	-	-	-	-
Dana Investasi Peserta							
Jumlah Beban Klaim Netto	-	-	-	-	-	-	-
Beban Adjuster	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH BEBAN	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH SURPLUS (DEFISIT)	-	-	-	-	-	-	-
UNDERWRITING							
a. Surplus underwriting	-	-	-	-	-	-	-
untuk dana Perusahaan							
b. Surplus underwriting	-	-	-	-	-	-	-
untuk Peserta							
BEBAN USAHA:							
a. Beban Pemasaran	-	-	-	-	-	-	-
b. Beban Akuisisi	-	-	-	-	-	-	-
c. Beban Umum dan	-	-	-	-	-	-	-
Administrasi:							
- Beban Pegawai dan	-	-	-	-	-	-	-
- Beban Pendidikan dan	-	-	-	-	-	-	-
Pelatihan							
- Beban Umum dan	-	-	-	-	-	-	-
Administrasi Lainnya							
Kenaikan (penurunan)	-	-	-	-	-	-	-
Penvisihan Ujroh							
Kenaikan (penurunan)	-	-	-	-	-	-	-
Penvisihan PAYDI yang							
JUMLAH BEBAN USAHA	-	-	-	-	-	-	-
LABA (RUGI) USAHA ASURANSI	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Lain	-	-	-	-	-	-	-
Beban Lain	-	-	-	-	-	-	-
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	-	-	-	-	-	-	-
Pajak Penghasilan	-	-	-	-	-	-	-
LABA SETELAH PAJAK	-	-	-	-	-	-	-
PENDAPATAN KOMPREHENSIF	-	-	-	-	-	-	-
LAIN							
JUMLAH KINERJA SELURUH	-	-	-	-	-	-	-

PERHITUNGAN ARUS KAS

Untuk Periode Yang Berakhir Pada

(dalam jutaan rupiah)

Uraian				Dana Investasi Peserta		Gabungan
	Dana Perusahaan	Dana Tabarru'	Dana Tanahud	Akad Wakalah Bil Ujrah	Akad Mudharabah	
SALDO AWAL	-	-	-	-	-	-
PENINGKATAN (PENURUNAN)	-	-	-	-	-	-
SALDO KAS						
SALDO AKHIR KAS	-	-	-	-	-	-
ARUS KAS DARI AKTIFITAS OPERASI	-	-	-	-	-	-
Arus Kas Masuk	-	-	-	-	-	-
Kontribusi Para Peserta	-	-	-	-	-	-
Ujroh yang diterima	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Alokasi Surplus Dana Tabarru'	-	-	-	-	-	-
Klaim Reasuransi Diterima	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Distribusi Surplus Underwriting	-	-	-	-	-	-
Lain - Lain	-	-	-	-	-	-
Arus Kas Keluar	-	-	-	-	-	-
Klaim Dibayar	-	-	-	-	-	-
Penarikan Dana Investasi Peserta yang telah jatuh tempo	-	-	-	-	-	-
Penarikan / Penebusan Dana Investasi Peserta belum jatuh	-	-	-	-	-	-
Pembayaran Distribusi Surplus UW ke Perusahaan	-	-	-	-	-	-
Pembayaran Distribusi Surplus UW ke Peserta / Pemegang	-	-	-	-	-	-
Beban Akuisisi	-	-	-	-	-	-
Beban Pemasaran	-	-	-	-	-	-
Pembayaran Ujroh Reasuransi	-	-	-	-	-	-
Pembayaran Ujroh Asuransi	-	-	-	-	-	-
Kontribusi Reasuransi Dibayar	-	-	-	-	-	-
Pembayaran Sewa	-	-	-	-	-	-
Pembayaran Zakat	-	-	-	-	-	-
Pembayaran Pajak	-	-	-	-	-	-
Lain-lain	-	-	-	-	-	-
ARUS KAS DARI AKTIFITAS INVESTASI	-	-	-	-	-	-
Arus Kas Masuk	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Hasil Investasi	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Bagi Hasil Investasi Dana Tabaru'	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Bagi Hasil Investasi Dana Investasi	-	-	-	-	-	-
Pencairan Investasi	-	-	-	-	-	-
Penjualan Aktiva Tetap	-	-	-	-	-	-
Lain-lain	-	-	-	-	-	-
Arus Kas Keluar	-	-	-	-	-	-
Penempatan Investasi	-	-	-	-	-	-
Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana Perusahaan	-	-	-	-	-	-
Pembayaran ujroh/fee kepada Perusahaan	-	-	-	-	-	-
Pembelian Aktiva Tetap	-	-	-	-	-	-
Lain-lain	-	-	-	-	-	-
ARUS KAS DARI AKTIFITAS PENDANAAN	-	-	-	-	-	-
Arus Kas Masuk	-	-	-	-	-	-
Setoran Modal / Modal Kerja	-	-	-	-	-	-
Pinjaman Subordinasi	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Qardh	-	-	-	-	-	-
Lain-lain	-	-	-	-	-	-
Arus Kas Keluar	-	-	-	-	-	-
Pembayaran Pinjaman Subordinasi	-	-	-	-	-	-
Pembayaran Dividen	-	-	-	-	-	-
Pembayaran Qardh	-	-	-	-	-	-
Lain-lain	-	-	-	-	-	-

LAPORAN PERUBAHAN DANA

Untuk Periode Yang Berakhir Pada

Uraian	Dana Perusahaan	Dana Tabarru'	Dana Tanahud	Dana Investasi Peserta	Gabungan
I. Saldo Dana Awal	-	-	-	-	-
II. Penambahan	-	-	-	-	-
Modal Disetor	-	-	-	-	-
Laba komprehensif periode berjalan	-	-	-	-	-
Kenaikan akumulasi dana tabarru' /	-	-	-	-	-
Penambahan lainnya	-	-	-	-	-
III. Pengurangan	-	-	-	-	-
Rugi komprehensif periode berjalan	-	-	-	-	-
Penurunan akumulasi dana tabarru'	-	-	-	-	-
Pembayaran Deviden	-	-	-	-	-
Pengurangan lainnya	-	-	-	-	-
IV. Saldo Akhir Dana	-	-	-	-	-

(dalam jutaan rupiah)

ANALISIS DANA PERUSAHAAN
PERHITUNGAN ASET DAN LIABILITAS SAP DANA PERUSAHAAN

Uraian	Saldo Buku Besar (SAK)	Penilaian Berdasarkan SAP	Selisih Berdasarkan Penilaian Berdasarkan SAK dan SAP	AYD Setelah Batasan Per Perusahaan	AYD Setelah Batasan Per Jenis Aset	AYD Setelah Batasan Afiliasi	(dalam jutaan rupiah)	
							AYD Setelah Batasan Luar Negeri (Saldo SAP)	
I. Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Deposito	-	-	-	-	-	-	-	-
Sertifikat Deposito	-	-	-	-	-	-	-	-
Saham Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukuk atau Obligasi Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
MTN Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Negara RI	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah Negara Selain RI	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah Lembaga Multinasional	-	-	-	-	-	-	-	-
Reksa Dana Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Efek Beragun Aset Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana Investasi Real Estat	-	-	-	-	-	-	-	-
REPO	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembiayaan Melalui Kerjasama Dengan Pihak Lain (Executing)	-	-	-	-	-	-	-	-
Emas Murni	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembiayaan dengan Hak Tanggungan	-	-	-	-	-	-	-	-
Properti Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyertaan Langsung	-	-	-	-	-	-	-	-
Investasi Lain	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Bukan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Kas dan Bank	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Ujrah Penutupan	-	-	-	-	-	-	-	-
Langsung	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Recovery Klaim	-	-	-	-	-	-	-	-
Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Hasil Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-
Biaya Akuisisi Ditangguhkan	-	-	-	-	-	-	-	-
Property Bukan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Lain	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Bukan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH KEKAYAAN (I+II)	-	-	-	-	-	-	-	-

ANALISIS DANA PERUSAHAAN
 PERHITUNGAN LIABILITAS SAP DANA PERUSAHAAN

Uraian	Saldo Buku Besar (SAK)	Penilaian Berdasarkan SAP	Selisih Penilaian SAK dan SAP	(dalam jutaan rupiah)
I. Utang	-	-		-
II. Penyisihan Ujrah	-	-		-
III. Penyisihan untuk Penjaminan Atas	-	-		-
JUMLAH KEWAJIBAN (I+II+III)	-	-		-

ANALISIS DANA TABARRU' DAN TANAHUD
PERHITUNGAN ASET DAN LIABILITAS DANA TABARRU' DAN TANAHUD

Uraian	Saldo Buku Besar (SAK)	Penilaian Berdasarkan SAP	Selisih Berdasarkan Penilaian Berdasarkan SAK dan SAP	AYD Setelah Batasan Per Perusahaan	AYD Setelah Batasan Per Jenis Aset	AYD Setelah Batasan Afiliasi	(dalam jutaan rupiah)	
							AYD Setelah Batasan Luar Negeri (Saldo SAP)	
I. Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Deposito	-	-	-	-	-	-	-	-
Sertifikat Deposito	-	-	-	-	-	-	-	-
Saham Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukuk atau Obligasi Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
MTN Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah Negara RI	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah Negara Selain RI	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah Lembaga	-	-	-	-	-	-	-	-
Reksa Dana Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Efek Beragun Aset Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana Investasi Real Estat Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
REPO	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembiayaan Melalui Kerjasama Dengan Pihak Lain (Executing)	-	-	-	-	-	-	-	-
Emas Murni	-	-	-	-	-	-	-	-
Investasi Lain	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Bukan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Kas dan Bank	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Kontribusi Penutupan Langsung	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Kontribusi Koasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Recovery Klaim Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Hasil Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Lain	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Bukan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH KEKAYAAN	-	-	-	-	-	-	-	-

ANALISIS DANA TABARRU' DAN TANAHUD
 PERHITUNGAN ASET DAN LIABILITAS DANA TABARRU'

		(dalam jutaan rupiah)		
Uraian	Saldo Buku Besar (SAK)	Penilaian Berdasarkan SAP	Selisih Penilaian SAK dan SAP	
Utang	-	-		-
Penyisihan Kontribusi	-	-		-
Penyisihan Kontribusi yang Belum Merupakan Pendapatan	-	-		-
Penyisihan Klaim	-	-		-
Penyisihan atas Risiko Bencana (Catastrophic Risks)	-	-		-
Jumlah Liabilitas	-	-		-

ANALISIS DANA INVESTASI PESERTA
PERHITUNGAN ASET DAN LIABILITAS DANA INVESTASI PESERTA PADA PAYDI YANG DIGARANSI

Uraian	Saldo Buku Besar (SAK)	Penilaian Berdasarkan SAP	(dalam jutaan rupiah)	
			Selisih Penilaian Berdasarkan SAK dan SAP	Aset PAYDI Digaransi
I. Investasi	-	-	-	-
Deposito	-	-	-	-
Sertifikat Deposito	-	-	-	-
Saham Syariah	-	-	-	-
Sukuk atau Obligasi Syariah	-	-	-	-
MTN Syariah	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah Negara RI	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah Bank Indonesia	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah Negara Selain RI	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah Lembaga Multinasional	-	-	-	-
Reksa Dana Syariah	-	-	-	-
Efek Beragun Aset Syariah	-	-	-	-
Dana Investasi Real Estat Syariah	-	-	-	-
REPO	-	-	-	-
Pembiayaan Melalui Kerjasama Dengan Pihak Lain (Executing)	-	-	-	-
Emas Murni	-	-	-	-
Pembiayaan dengan Hak Tanggungan	-	-	-	-
Properti Investasi	-	-	-	-
Penyertaan Langsung	-	-	-	-
Investasi Lain	-	-	-	-
Jumlah Investasi	-	-	-	-
II. Bukan Investasi	-	-	-	-
Kas dan Bank	-	-	-	-
Tagihan Ujrah Penutupan Langsung	-	-	-	-
Tagihan Recovery Klaim Reasuransi	-	-	-	-
Tagihan Hasil Investasi	-	-	-	-
Tagihan Investasi	-	-	-	-
Aset Reasuransi	-	-	-	-
Biaya Akuisisi Ditangguhkan	-	-	-	-
Property Bukan Investasi	-	-	-	-
Aset Lain	-	-	-	-
Jumlah Bukan Investasi	-	-	-	-
JUMLAH KEKAYAAN (I+II)	-	-	-	-

ANALISIS DANA INVESTASI PERSERTA
 PERHITUNGAN LIABILITAS DIP PADA PAYDI YANG DIGARANSI

		(dalam jutaan rupiah)	
Uraian	Saldo Buku Besar (SAK)	Penilaian Berdasarkan SAP	Selisih Penilaian SAK dan SAP
Utang	-	-	-
Akumulasi Dana Investasi Peserta	-	-	-
Penyisihan PAYDI yang memberikan garansi pokok investasi	-	-	-
JUMLAH LIABILITAS	-	-	-

PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS
LAPORAN KEUANGAN

(dalam jutaan rupiah)		
Keterangan	Dana Tabarru' dan Dana Tanahud	Dana Perusahaan
Tingkat Solvabilitas	-	-
A. Aset yang diperkenankan (AYD)	-	-
B. Liabilitas selain Qardh dari Dana Perusahaan	-	-
Dana Tabarru dan dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko (DTMBR)	-	-
A. Risiko Kredit	-	-
B. Risiko Likuiditas	-	-
C. Risiko Pasar	-	-
D. Risiko Asuransi	-	-
E. Risiko Operasional	-	-
F. MMBR atas PAYDI Digaransi	-	-
1. Risiko PAYDI Digaransi	-	-
a. Risiko Kredit	-	-
b. Risiko Likuiditas	-	-
c. Risiko Pasar	-	-
2. Aset PAYDI Digaransi	-	-
3. Liabilitas PAYDI Digaransi	-	-
Rasio Tingkat Solvabilitas sebelum memperhitungkan Aset yang Tersedia untuk Qardh (dalam %)	0,00%	0,00%
Rasio Target Tingkat Solvabilitas Internal (tahunan) (persentase sesuai POJK 72)	0,00%	0,00%
Rasio Tingkat Solvabilitas dengan DTMBR/MMBR yang Diperkirakan Peraturan (persentase sesuai POJK 72)	0,00%	0,00%
Aset yang Tersedia Untuk Qardh yang Diperhitungkan sebagai Penambah AYD Dana Tabarru' dan Tanahud	-	-
A. Kekurangan (kelebihan) tingkat solvabilitas dari target internal	-	-
B. Ketidacukupan investasi, kas dan bank	-	-
Rasio Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' dan Dana Tanahud, dan Dana Perusahaan	0,00%	0,00%

RASIO KEUANGAN SELAIN TINGKAT SOLVABILITAS
LAPORAN KEUANGAN

Uraian	Indikator			
	Dana Tabarru' dan Dana Tanahud	Dana Perusahaan	Dana Investasi Peserta	Gabungan
Rasio Likuiditas				
A. Kekayaan lancar	-	-	-	-
B. Kewajiban lancar	-	-	-	-
C. Rasio (a:b)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Rasio perimbangan investasi dengan liabilitas				
A. Investasi, kas dan bank	-	-	-	-
B. Penyisihan teknis	-	-	-	-
C. Utang klaim retensi sendiri	-	-	-	-
D. Rasio [a:(b+c)]	-	-	-	-
Rasio Pendapatan investasi netto				
A. Pendapatan investasi netto	-	-	-	-
B. Rata-rata investasi	-	-	-	-
C. Rasio (a:b)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Rasio beban klaim				
A. Beban klaim netto	-	-	-	-
B. Kontribusi netto	-	-	-	-
C. Rasio (a:b)	0,00%	-	-	-
Rasio perubahan dana				
A. Dana tahun/triwulan/bulan berjalan	-	-	-	-
B. Dana tahun/triwulan/bulan lalu	-	-	-	-
C. Perubahan dana (a-b)	-	-	-	-
D. Rasio (c:b)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Rasio Aset Unit Syariah				
A. Aset Dana Tabarru dan Dana Tanahud	-	-	-	-
B. Aset Dana Investasi Peserta	-	-	-	-
C. Aset Dana Asuransi Perusahaan (Konvensional)	-	-	-	-
D. Rasio (a+b) : (a+b+c)	-	-	-	0,00%
Penghitungan Qardh yang Diperlukan Dana Tabarru				
A. Jumlah Kewajiban selain Qardh	-	-	-	-
B. Jumlah Aset	-	-	-	-
Jumlah Qardh yang Diperlukan (a-b)	-	-	-	-
Penghitungan Qardh yang Diperlukan Dana Tanahud				
A. Jumlah Kewajiban selain Qardh	-	-	-	-
B. Jumlah Aset	-	-	-	-
Jumlah Qardh yang Diperlukan (a-b)	-	-	-	-

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU MINIMUM BERBASIS RISIKO
RISIKO KREDIT

Uraian	(dalam jutaan rupiah)		
	Jumlah Deviasi		PAYDI (digaransi)
	Dana Tabarru dan Tanahud	Dana Perusahaan	
Risiko Kredit (a)	-	-	-
Risiko Kredit (b)	-		-
Total Risiko Kredit	-	-	-

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU MINIMUM BERBASIS RISIKO
RISIKO KREDIT - RISIKO KEGAGALAN ATAU KETIDAKMAMPUAN DEBTUR ATAU PIHAK LAIN

Uraian	Dana Tabarru dan Tanahud	Jumlah AYD Dana Perusahaan	PAYDI (digaransi)	Faktor	Dana Tabarru dan Tanahud	Jumlah Deviasi Dana Perusahaan	(dalam jutaan rupiah)	
							PAYDI (digaransi)	PAYDI (digaransi)
Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Deposito Berjangka dan Sertifikat	-	-	-	-	-	-	-	-
Kategori Khusus (sampai dengan 2 milyar per bank)	-	-	-	0,0%	-	-	-	-
Kategori Lain, sesuai peringkat Bank:	-	-	-	-	-	-	-	-
a. Peringkat klaster 1	-	-	-	1,2%	-	-	-	-
b. Peringkat klaster 2	-	-	-	2,1%	-	-	-	-
c. Peringkat klaster 3	-	-	-	3,0%	-	-	-	-
d. Peringkat klaster 4	-	-	-	4,5%	-	-	-	-
e. Peringkat klaster 5	-	-	-	9,0%	-	-	-	-
Sukuk / Obligasi Korporasi Svariiah	-	-	-	-	-	-	-	-
a. Peringkat klaster 1	-	-	-	1,6%	-	-	-	-
b. Peringkat klaster 2	-	-	-	2,8%	-	-	-	-
c. Peringkat klaster 3	-	-	-	4,0%	-	-	-	-
d. Peringkat klaster 4	-	-	-	12,0%	-	-	-	-
e. Peringkat klaster 5	-	-	-	-	-	-	-	-
MTN Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
a. Peringkat klaster 1	-	-	-	1,6%	-	-	-	-
b. Peringkat klaster 2	-	-	-	2,8%	-	-	-	-
c. Peringkat klaster 3	-	-	-	4,0%	-	-	-	-
d. Peringkat klaster 4	-	-	-	6,0%	-	-	-	-
e. Peringkat klaster 5	-	-	-	12,0%	-	-	-	-
Surat Berharga Svariiah Negara	-	-	-	0,0%	-	-	-	-
Surat Berharga Yang Diterbitkan oleh	-	-	-	0,0%	-	-	-	-
a. Peringkat klaster 1	-	-	-	1,6%	-	-	-	-
b. Peringkat klaster 2	-	-	-	2,8%	-	-	-	-
c. Peringkat klaster 3	-	-	-	4,0%	-	-	-	-
d. Peringkat klaster 4	-	-	-	6,0%	-	-	-	-
e. Peringkat klaster 5	-	-	-	12,0%	-	-	-	-
Surat Berharga yang diterbitkan oleh	-	-	-	0,0%	-	-	-	-
a. Peringkat klaster 1	-	-	-	1,0%	-	-	-	-
b. Peringkat klaster 2	-	-	-	-	-	-	-	-
c. Peringkat klaster 3	-	-	-	1,6%	-	-	-	-
d. Peringkat klaster 4	-	-	-	2,8%	-	-	-	-
e. Peringkat klaster 5	-	-	-	4,0%	-	-	-	-
REPO	-	-	-	8,0%	-	-	-	-
Pembinaan Melalui Kertiasama dengan	-	-	-	12,0%	-	-	-	-
a. Sangat sehat	-	-	-	-	-	-	-	-
b. Sehat	-	-	-	-	-	-	-	-
c. Kurang sehat	-	-	-	1,6%	-	-	-	-
d. Tidak sehat	-	-	-	2,8%	-	-	-	-
Pinjaman yang Dilaumin dengan Hak	-	-	-	4,0%	-	-	-	-
a. Properti residensial	-	-	-	6,0%	-	-	-	-
i. LTV < 65%	-	-	-	-	-	-	-	-
ii. LTV < 65% < 75%	-	-	-	2,8%	-	-	-	-
iii. LTV < 65% < 75% < 80%	-	-	-	4,0%	-	-	-	-
iv. LTV < 65% < 75% < 80% < 85%	-	-	-	5,6%	-	-	-	-
v. LTV < 65% < 75% < 80% < 85% < 90%	-	-	-	8,0%	-	-	-	-
vi. LTV < 65% < 75% < 80% < 85% < 90% < 95%	-	-	-	12,0%	-	-	-	-
vii. LTV < 65% < 75% < 80% < 85% < 90% < 95% < 100%	-	-	-	-	-	-	-	-
b. Properti yang tidak digunakan	-	-	-	-	-	-	-	-
i. LTV < 65%	-	-	-	0,0%	-	-	-	-
ii. LTV < 65% < 75%	-	-	-	8,0%	-	-	-	-
iii. LTV < 65% < 75% < 80%	-	-	-	12,0%	-	-	-	-
iv. LTV < 65% < 75% < 80% < 85%	-	-	-	-	-	-	-	-
v. LTV < 65% < 75% < 80% < 85% < 90%	-	-	-	0,0%	-	-	-	-
vi. LTV < 65% < 75% < 80% < 85% < 90% < 95%	-	-	-	8,0%	-	-	-	-
vii. LTV < 65% < 75% < 80% < 85% < 90% < 95% < 100%	-	-	-	-	-	-	-	-
Bukan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Kas dan Bank	-	-	-	0,0%	-	-	-	-
Taahhan Kontribusi Penutupan Langsung	-	-	-	8,0%	-	-	-	-
Aset Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-
a. aset yang bersumber dari nilai	-	-	-	0,0%	-	-	-	-
b. aset yang bersumber dari pembelian	-	-	-	30,0%	-	-	-	-
Taahhan Klaim Konasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam Negeri	-	-	-	2,8%	-	-	-	-
Luar Negeri	-	-	-	-	-	-	-	-
a. Peringkat klaster 1	-	-	-	2,8%	-	-	-	-
b. Peringkat klaster 2	-	-	-	4,0%	-	-	-	-
c. Peringkat klaster 3	-	-	-	6,0%	-	-	-	-
d. Peringkat klaster 4	-	-	-	12,0%	-	-	-	-
e. Peringkat klaster 5	-	-	-	15,0%	-	-	-	-
Taahhan Klaim Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam Negeri	-	-	-	2,8%	-	-	-	-
Luar Negeri	-	-	-	-	-	-	-	-
a. Peringkat klaster 1	-	-	-	2,8%	-	-	-	-
b. Peringkat klaster 2	-	-	-	4,0%	-	-	-	-
c. Peringkat klaster 3	-	-	-	6,0%	-	-	-	-
d. Peringkat klaster 4	-	-	-	12,0%	-	-	-	-
e. Peringkat klaster 5	-	-	-	15,0%	-	-	-	-
Taahhan Hasil Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-
a. Investasi yang belum diterima	-	-	-	2,0%	-	-	-	-
b. Investasi yang sudah bayar pada	-	-	-	25,0%	-	-	-	-
Taahhan Hasil Investasi	-	-	-	2,0%	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-

DANA TABARRU MINIMUM BERBASIS RISIKO
RISIKO KREDIT - KEGAGALAN/KETIDAKMAMPUAN PENANGGUNG ULANG

No	Jenis Reasuradur	Nama Reasuradur	Penyisihan Teknis Beban Reasuradur	Deposit dan atau Kontribusi yang ditahan di Perusahaan	Eksposur Reasuransi Netto ((2)-(3))	(dalam jutaan rupiah)	
						Faktor	Jumlah Deviasi
1	-		-	-	-	0,00%	-
2	-		-	-	-	0,00%	-
3	-		-	-	-	0,00%	-
4	-		-	-	-	0,00%	-
5	-		-	-	-	0,00%	-
6	-		-	-	-	0,00%	-
7	-		-	-	-	0,00%	-
8	-		-	-	-	0,00%	-
9	-		-	-	-	0,00%	-
10	-		-	-	-	0,00%	-

Urutan	Dana Perusahaan																	Dana Tabung dan Dana Tanah				PAYD (dggaransi)		Jumlah	Jumlah
	Sampai dengan 1 tahun	Lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun	Lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun	Lebih dari 5 tahun sampai dengan 10 tahun	Lebih dari 10 tahun	Jumlah	Sampai dengan 1 tahun	Lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun	Lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun	Lebih dari 5 tahun sampai dengan 10 tahun	Lebih dari 10 tahun	Jumlah	Sampai dengan 1 tahun	Lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun	Lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun	Lebih dari 5 tahun sampai dengan 10 tahun									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)							
Aset	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Diposito Berjangka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Sertifikat Deposito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Saham Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Sukuk / Obligasi Korporasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
MTN Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Reksa Dana Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Efek Beragun Aset Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Dana Investasi Real Estat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
REPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Pembayaan Melalui Jasa sama dengan Pihak Lain (Executing)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Pembiayaan Syariah Dengan Hak Tanggungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Penertuan Langgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Property Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Pinas Murni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Investasi Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Bahan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Kas dan Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Tagihan Kontribusi/Ajroh Penutupan Langgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Aset Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Tagihan Klaim Koasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Tagihan Klaim Recovery Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Tagihan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Tagihan Hasil Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Property Bulet Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Biaya Akuisisi yang Ditangguhkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Aset Triup Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Aset Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Liabilitas dan Ekuitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Utang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Utang Klaim dan manfaat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Utang Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Utang Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Utang Ujroh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Utang Pajak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Biaya yang Masih Harus Dibayar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Utang Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Penyisihan Teknis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Penyisihan ujroh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Penyisihan prajaminan pokok investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Penyisihan kontribusi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Penyisihan kontribusi yang belum merupakan pendapatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Penyisihan klaim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Penyisihan atas risiko bencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Akumulasi Dana Investasi Peserta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
SEKSIH LIAHILITAS DAN ASET DEVIASI (4% X Makes (Li - AYD)0, 0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU MINIMUM BERBASIS RISIKO
RISIKO PASAR

Uraian	Jumlah Deviasi			(dalam jutaan rupiah)
	Dana Perusahaan	Dana Tabarru dan Dana Tanahud	PAYDI (digaransi)	
Risiko Pasar (A)	-	-	-	
Risiko Pasar (B)	-	-	-	
Risiko Pasar (C)	-	-	-	
Total Risiko Pasar	-	-	-	

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU MINIMUM BERBASIS RISIKO
RISIKO PASAR - PERUBAHAN HARGA PASAR

Uraian	(dalam jutaan rupiah)						
	Dana Perusahaan	Jumlah AYD Dana Tabarru' dan Dana Tanahud	PAYDI (digaransi)	Faktor	Dana Perusahaan	Jumlah Deviasi Dana Tabarru' dan Dana Tanahud	PAYDI (digaransi)
Investasi							
Saham Syariah	-	-	-		-	-	-
Terasuk IDX30 atau JII	-	-	-	15,0%	-	-	-
Saham diperdagangkan di bursa Indonesia	-	-	-	20,0%	-	-	-
Saham diperdagangkan di bursa luar negeri	-	-	-	30,0%	-	-	-
Saham penyusun indeks utama bursa utama negara Asia Pasifik dan Eropa anggota World Federation of Exchanges	-	-	-	20,0%	-	-	-
Saham Lainnya	-	-	-	30,0%	-	-	-
Reksa Dana Syariah	-	-	-		-	-	-
Sepenuhnya berupa surat berharga syariah negara (SBSN)	-	-	-	0,0%	-	-	-
Sepenuhnya berupa surat utang swasta dan atau surat berharga pasar uang (SBPU)	-	-	-	6,0%	-	-	-
Sepenuhnya berupa surat berharga ekuitas atau indeks syariah	-	-	-	16,0%	-	-	-
Campuran*)	-	-	-		-	-	-
Dana Perusahaan	-	-	-	0,0%	-	-	-
Dana Tabarru'	-	-	-	0,0%	-	-	-
PAYDI (digaransi)	-	-	-	0,0%	-	-	-
Efek Beragun Aset Syariah	-	-	-		-	-	-
a. Peringkat klaster 1	-	-	-	1,6%	-	-	-
b. Peringkat klaster 2	-	-	-	2,8%	-	-	-
c. Peringkat klaster 3	-	-	-	4,0%	-	-	-
d. Peringkat klaster 4	-	-	-	6,0%	-	-	-
e. Peringkat klaster 5	-	-	-	12,0%	-	-	-
Dana Investasi Real Estat	-	-	-	10,0%	-	-	-
Penyertaan Langsung	-	-	-		-	-	-
Dalam Pengawasan OJK	-	-	-	10,0%	-	-	-
Tidak Dalam Pengawasan OJK	-	-	-	20,0%	-	-	-
Penyertaan langsung pada Perusahaan dengan tujuan khusus (SPV)	-	-	-	0,0%	-	-	-
Property Investasi	-	-	-		-	-	-
Hasil Investasi 4% atau lebih	-	-	-	7,0%	-	-	-
Hasil Investasi 2% - 4%	-	-	-	15,0%	-	-	-
Hasil Investasi kurang dari 2%	-	-	-	40,0%	-	-	-
Enas murni	-	-	-	3,0%	-	-	-
BUKAN INVESTASI							
Property Bukan Investasi	-	-	-	4,0%	-	-	-
TOTAL	-	-	-		-	-	-

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU MINIMUM BERBASIS RISIKO
RISIKO PASAR - RISIKO PERUBAHAN TINGKAT HASIL INVESTASI

Uraian		(dalam jutaan rupiah)	
		Dana Perusahaan	Dana Tabarru'
PKrf		-	-
PKo		-	-
Max((PKrf-PKo),0)		-	-
PUrf		-	-
PUo		-	-
Max((PUrf-PUo),0)		-	-
fPHI		15%	15%
PHI		-	-

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU
RISIKO ASURANSI

(dalam jutaan rupiah)	
Uraian	Jumlah Deviasi
I. Total max ((PK* - PK), 0)	-
II. Total ((PAKYBMPi - ARi)fpki	-
III. Total ((PKli - ARi)fpkli)	-
IV. Total ((PRBi - ARi)fpbi)	-
Total Deviasi	-

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU MINIMUM BERBASIS
RISIKO ASURANSI - PENYISIHAN KONTRIBUSI

(dalam jutaan rupiah)			
Cabang Asuransi	PK	PK*	Jumlah Deviasi
Kematian Jangka Warsa	-	-	-
Endowment dan /atau Kombinasi	-	-	-
Seumur Hidup	-	-	-
Anuitas	-	-	-
Kematian Ekawarsa	-	-	-
Kesehatan	-	-	-
Kecelakaan Diri	-	-	-
Lainnya	-	-	-
I. Total max ((PK* - PK), 0)	-	-	-

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU MINIMUM BERBASIS RISIKO
RISIKO ASURANSI - PENYISIHAN ATAS KONTRIBUSI YANG BELUM MERUPAKAN PENDAPATAN

Cabang Asuransi		PAKYMBP <i>i</i>	AR <i>i</i>	fp <i>ki</i>	Jumlah Deviasi PAKYBMP <i>i</i>	
Kematian Jangka Warsa		-	-	10%	-	-
Endowment dan/atau Kombinasi		-	-	10%	-	-
Seumur Hidup		-	-	10%	-	-
Anuitas		-	-	10%	-	-
Kematian Ekawarsa		-	-	10%	-	-
Kesehatan		-	-	25%	-	-
Kecelakaan Diri		-	-	25%	-	-
Lainnya		-	-	10%	-	-
II. Total ((PAKYBMP <i>i</i> - AR <i>iki</i>		-	-	-	-	-

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU MINIMUM BERBASIS RISIKO
RISIKO ASURANSI - PENYISIHAN KLAIM

Cabang Asuransi	(dalam jutaan rupiah)			
	Jumlah Deviasi PKli	ARi	fpkli	Jumlah Deviasi PKli
Kematian Jangka Warsa	-	-	10%	-
Endowment dan /atau Kombinasi	-	-	10%	-
Seumur Hidup	-	-	10%	-
Anuitas	-	-	10%	-
Kematian Ekawarsa	-	-	10%	-
Kesehatan	-	-	20%	-
Kecelakaan Diri	-	-	20%	-
Lainnya	-	-	10%	-
III. Total ((PKli - ARi)fpkli)	-	-	-	-

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU MINIMUM BERBASIS RISIKO
RISIKO ASURANSI - PENYISIHAN ATAS RISIKO BENCANA

Cabang Asuransi	PRBi (Gross)	ARi	fcbi	(dalam jutaan rupiah)	
Kematian Jangka Warsa	-	-	10%	Jumlah Deviasi PRBi	-
Endowment dan/atau Kombinasinya	-	-	10%		-
Seumur Hidup	-	-	10%		-
Anuitas	-	-	10%		-
Kematian Ekawarsa	-	-	10%		-
Kesehatan	-	-	25%		-
Kecelakaan Diri	-	-	25%		-
Lainnya	-	-	10%		-
IV. Total ((PRBi - ARi)/fpbi)	-	-	-		-

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU MINIMUM BERBASIS RISIKO
RISIKO OPERASIONAL

Uraian		(dalam jutaan rupiah)	
	Dana Tabarru dan Dana Tanahud	Dana Perusahaan	
I.Risiko Operasional Perusahaan	-		
a. Beban Umum dan Administrasi	-		-
b. Beban Pendidikan dan Pelatihan	-		-
c. Risiko Operasional = (1%*(a-b))	-		-
d. Saldo Biaya Akuisisi yang Ditangguhkan	-		-
e. Risiko Operasional =(50%*d)	-		-
f. Sub Total Risiko Operasional Perusahaan (c+e)	-		-
II.Risiko Operasional PAYDI (ROPAYDI)	-		
g. Aset Dana PAYDI	-		-
h. Sub Total Risiko Operasional PAYDI (ROPAYDI = (1%o *g))	-		-
III.Risiko Operasional Dana Tabarru' (RODT)	-		-
i. Investasi Dana Tabarru' dan Dana Tanahud	-		-
j. Sub Total RODT = (1%o *i)	-		-

RINCIAN A-110. Rincian Investasi dan Property

No	Identitas Instrumen Investasi	Dana Jaminan	Investasi Dalam Rangka Pembiayaan Infrastruktur	Nama Penerbit / Pihak	Nama Group	Golongan Perusahaan / Penerbit	Jenis Dana	Pengawas	Jenis Investasi	Jangka Waktu		Peringkat	Nama Peningkat	Kategori Usaha	Sektor Ekonomi	Lokasi
										DD/MM/YY Mulai	DD/MM/YY Jatuh Tempo					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Hubungan Istimewa	Tujuan Kepemilikan	Bagian Kepemilikan (%)	Mata Uang	Jenis Tingkat Pengembalian	Tingkat Pengembalian (%)	Kolektibilitas	Saldo Buku	Saldo Penilaian SAP	AYD	Hasil Investasi Periode Berjalan Diterima Kas	Piutang Hasil Investasi	Piutang Hasil Investasi Periode Sebelumnya Diterima Kas Periode	Total Hasil Investasi	Hasil Investasi Yang Siap Didistribusi
(1)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)
1	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RINCIAN A-120. Rincian Tagihan

No	Nama Debitur	Kategori Usaha	Jenis Tagihan	Jenis Dana	DD/MM/YY Mulai	Mata Uang	Peringkat Debitur	Saldo Buku (Juta Rp)	Saldo Penilaian SAP (Juta Rp)	(dalam jutaan rupiah)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1		-	-	-		-	-	-	-	-	-
2		-	-	-		-	-	-	-	-	-
3		-	-	-		-	-	-	-	-	-
4		-	-	-		-	-	-	-	-	-
5		-	-	-		-	-	-	-	-	-
6		-	-	-		-	-	-	-	-	-
7		-	-	-		-	-	-	-	-	-
8		-	-	-		-	-	-	-	-	-
9		-	-	-		-	-	-	-	-	-
10		-	-	-		-	-	-	-	-	-

RINCIAN A-130. Rincian Aset Lain

(dalam jutaan rupiah)					
No	Nama Aset	Dasar Penilaian	Jenis Dana	Saldo Juta (Rp)	Keterangan
1		-	-	-	
2		-	-	-	
3		-	-	-	
4		-	-	-	
5		-	-	-	
6		-	-	-	
7		-	-	-	
8		-	-	-	
9		-	-	-	
10		-	-	-	

RINCIAN A-210. Rincian Utang
Laporan Keuangan

(dalam jutaan rupiah)									
No	Nama	Jenis Utang	Jenis Dana	DD/MM/YY Periode Mulai	Mata Uang	Saldo Buku	Saldo Penilaian SAP		
1		-	-		-	-	-		
2		-	-		-	-	-		
3		-	-		-	-	-		
4		-	-		-	-	-		
5		-	-		-	-	-		
6		-	-		-	-	-		
7		-	-		-	-	-		
8		-	-		-	-	-		
9		-	-		-	-	-		
10		-	-		-	-	-		

RINCIAN A-220. Penyisihan Kontribusi
Laporan Keuangan

Cabang Asuransi	Penyisihan Kontribusi Polis-polis Kontribusi Tunggal						Penyisihan Kontribusi Polis-polis Paid-up				Penyisihan Kontribusi Polis-polis Regular (Cicilan)			(dalam jutaan rupiah)	
	Penyisihan Risiko	Penyisihan Risiko atas PAYDI (3)	Penyisihan Risiko atas Akumulasi Dana (4)	Penyisihan Risiko (5)	Penyisihan Risiko atas PAYDI (6)	Penyisihan Risiko atas Akumulasi Dana (7)	Penyisihan Risiko (8)	Penyisihan Risiko atas PAYDI (9)	Penyisihan Risiko atas Akumulasi Dana (10)	TOTAL (11)	Penyisihan Kontribusi Polis-polis Yang Akan Jatuh Tempo < 1 tahun (12)	Periode..... Sebelumnya (13)			
A. Asuransi Jiwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1. Kematian Jangka Warsa (Term Life)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2. Dwiguna (Endowment) dan / atau Kombinasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3. Seumur Hidup (Whole Life)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4. Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5. Kecelakaan Diri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6. Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Sub Jumlah A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
B. Anuitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Sub Jumlah B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Total Penyisihan Kontribusi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

A-230 Penyisihan Atas Kontribusi Yang Belum Merupakan Pendapatan
Laporan Keuangan

Cabang Asuransi	(dalam jutaan rupiah)					
	Penyisihan Kontribusi Polis- polis Kontribusi Tunggal	Penyisihan Kontribusi Polis- polis Paid-up	Penyisihan Kontribusi (Polis-polis Reguler (Cicilan))	Total	Penyisihan Kontribusi Polis- polis Yang Akan Jatuh Tempo	Total PAKYBMP Periode Sebelumnya
I. Kematian Ekawarsa (Masukkan semua produk asuransi jiwa)				-		
Kematian Ekawarsa	-	-	-	-	-	-
Dwiguna / Dwiguna Kombinasi	-	-	-	-	-	-
Kecelakaan Diri	-	-	-	-	-	-
Kesehatan	-	-	-	-	-	-
II Penyisihan Atas Risiko Yang Belum Dijalani	-		-	-	-	
Kematian Ekawarsa	-	-	-	-	-	-
Kecelakaan Diri	-	-	-	-	-	-
Kesehatan	-	-	-	-	-	-
Total PAKYBMP	-	-	-	-	-	-
Total PARYBD	-	-	-	-	-	-
Maks (PAKYBMP.PARYBD)	-	-	-	-	-	-

A-240. Penyisihan Klaim

(dalam jutaan rupiah)								
Cabang Asuransi	Penyisihan Klaim dalam Proses		Penyisihan Klaim IBNR		Penyisihan Pembayaran Klaim Berkala		Triwulan ... / Tahun ...	
	Total	Retensi Sendiri	Total	Retensi Sendiri	Total	Retensi Sendiri	Total Penyisihan Klaim	Triwulan ... / Tahun ... (Periode)
Kematian Ekawarsa	-	-	-	-	-	-	-	-
Kematian Jangka	-	-	-	-	-	-	-	-
Kecelakaan Diri	-	-	-	-	-	-	-	-
Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-
Anuitas	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-

RINCIAN A-250.
PENYISIHAN ATAS RISIKO BENCANA (CATASTROPHIC RISK)

Cabang Asuransi	Penyisihan Atas Risiko Bencana			(dalam jutaan rupiah)	
	Tradisional	PAYDI	Total	Penyisihan Atas Risiko Bencana untuk polis-polis yang Akan Jatuh Tempo < 1 tahun	Periode Sebelumnya
A. Asuransi Jiwa			-		
1. Kematian Jangka Warsa (Term Life)	-	-	-	-	-
2. Dwiguna (Endowment) dan/atau Kombinasinya	-	-	-	-	-
3. Seumur Hidup (Whole Life)	-	-	-	-	-
4. Kesehatan	-	-	-	-	-
5. Kecelakaan Diri	-	-	-	-	-
6. Lainnya	-	-	-	-	-
Sub Jumlah A	-	-	-	-	-
B. Anuitas	-	-	-	-	-
Sub Jumlah B	-	-	-	-	-
Total Penyisihan Atas Risiko	-	-	-	-	-

RINCIAN A-310

Rincian Rekapitulasi Aset dan Liabilitas Berdasarkan Mata Uang dan Umur Jatuh Tempo

Umur	Aset1)			Liabilitas1)			Rasio Aset Terhadap		
	Rupiah	Valas	Total	Rupiah	Valas	Total	Rupiah	Valas	Total
Dana Tabaru dan Tanahud			-			-	-	-	-
<= 1 tahun	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
1 tahun < umur < 5 tahun	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
5 tahun = umur < 10 tahun	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
>= 10 tahun	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
Total	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
Rasio Aset (Liabilitas) Lancar	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Dana Perusahaan			-			-	-	-	-
<= 1 tahun	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
1 tahun < umur < 5 tahun	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
5 tahun = umur < 10 tahun	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
>= 10 tahun	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
Total	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
Rasio Aset (Liabilitas) Lancar	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Dana Investasi Perusahaan			-			-	-	-	-
<= 1 tahun	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
1 tahun < umur < 5 tahun	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
5 tahun = umur < 10 tahun	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
>= 10 tahun	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
Total	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
Rasio Aset (Liabilitas) Lancar	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RINCIAN B-110
Kontribusi dan Klaim Berdasarkan Lini Usaha

No	Pemasaran			Kontribusi Bruto - Langsung									
	Lini Usaha	Lokasi	Mata Uang	Saluran Distribusi	Jumlah	Jumlah Polis Inforce	Jumlah Peserta	Jumlah Polis Yang klaim	Jumlah Peserta Yang Klaim	Alokasi Untuk Ujrah	Alokasi Untuk Tabarru	Alokasi Untuk DIP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No	Kontribusi							Penarikan Dana Investasi			Beban Adjuster	Beban Komisi
	Alokasi Untuk Ujrah	Alokasi Untuk Tabarru	Kontribusi Reasuransi/retribusi	Klaim Bruto	Klaim Recovery	Penarikan Dana Investasi Peserta yang Jatuh Tempo	Penarikan Sebagian (Withdrawal)	Penarikan Seluruhnya (Surrender)				
(1)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

C-110. LAPORAN DANA JAMINAN

Ringkasan Perkembangan Dana Jaminan dan Perhitungan

Uraian	Jumlah
I. Ringkasan Perkembangan Dana	
1. Saldo Awal Dana Jaminan	-
2. Penempatan Dana Jaminan Baru:	-
a. Dana Jaminan Dalam Bentuk	-
b. Dana Jaminan dalam Bentuk	-
3. Pencairan Dana Jaminan:	-
a. Dana Jaminan Dalam Bentuk	-
b. Dana Jaminan dalam Bentuk	-
4. Saldo Akhir Dana Jaminan (1 + 2)	-
II. Perhitungan Kecukupan Dana	
1. Ekuitas minimum yang	-
2. Penyisihan kontribusi tabarru'	-
3. Penyisihan kontribusi tabarru'	-
4. Jumlah Penyisihan (2+3)	-
5. Penyisihan atas PAYDI	-
6. Batas Minimum Dana Jaminan I	-
7. Batas Minimum Dana Jaminan II	-
8. Batas Minimum Dana Jaminan	-
9. Dana Jaminan Yang Dimiliki	-
10. Kelebihan (Kekurangan) Dana	-

RINCIAN D-110

[illegible]

RINCIAN D-120
KOMPOSISI KONTRIBUSI DAN LOADING PRODUK ASURANSI DENGAN INVESTASI

No	Jenis Pertanggungan (2)	Nama Produk Investasi (3)	Mata Uang (4)	Cara Bayar (5)	Kontribusi Pertanggungan Baru (6)	Kontribusi Lanjutan (7)	Kontribusi Top Up (8)	Kontribusi Risiko (9)	Kontribusi Investasi (10)
1	-		-	-	-	-	-	-	-
2	-		-	-	-	-	-	-	-
3	-		-	-	-	-	-	-	-
4	-		-	-	-	-	-	-	-
5	-		-	-	-	-	-	-	-
6	-		-	-	-	-	-	-	-
7	-		-	-	-	-	-	-	-
8	-		-	-	-	-	-	-	-
9	-		-	-	-	-	-	-	-
10	-		-	-	-	-	-	-	-

No	Biaya Yang Diasumsikan							Total Kontribusi	
	Ujroh Pertanggungan Baru (11)	Ujroh Lanjutan (12)	Biaya Akuisisi Lainnya (13)	Biaya Pemeliharaan n Polis (14)	Biaya Lainnya (15)	Biaya Pengelolaan Investasi (16)	Total Biaya (17)		
(1)								(18)	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RINCIAN D-130. Perkembangan Portofolio Pertanggungan Perorangan

	Ekawarsa		Kematian		Dwiguna		Dwiguna		Seumur Hidup		Seumur Hidup		Seumur Hidup		Anuitas Umum		Anuitas Dana		Kecelakaan Diri		Kesehatan		Produk Investasi		Dalam Jutaan Rupiah		
	Jml Polis	JUP	Jml Polis	JUP	Jml Polis	JUP	Jml Polis	JUP	Jml Polis	JUP	Jml Polis	JUP	Jml Polis	JUP	Jml Polis	JUP	Jml Polis	JUP	Jml Polis	JUP	Jml Polis	JUP	Jml Polis	JUP	Jml Polis	JUP	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)			
1. Pertanggungan Yang Masih Berjalan Pada Awal Tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Pertanggungan Baru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Pemulihan Kembali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Perubahan Dari Cabang Asuransi Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Jumlah I (1+2+3+4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Meninggal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Habis Kontrak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Pemutusan Kontrak Produk Yang Dihilaskan Pada Tahun Bersangkutan (xxxx)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Pemutusan Kontrak Produk Yang Dihilaskan Sebelum Tahun Lalu (xxxx-1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Pemutusan Kontrak Produk Yang Dihilaskan Sebelum Tahun lalu (xxxx-1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Perubahan Ke Cabang Asuransi Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Jumlah II (6+7+8+9+10+11)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Pertanggungan Pada Akhir tahun (5-12)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RINCIAN E-110
Penyisihan Kontribusi Pertanggungan

No	(Dalam Jutaan Rupiah)														
	Jenis Pertanggungan	Mata Uang	Lini Usaha	Uraian Nama Produk	Penyisihan Kontribusi Tahun			Penyisihan Kontribusi Tahun			Penyisihan Kontribusi Tahun			Jumlah Peserta Tahun Berjalan	Tahun Lalu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)			
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															

No	Jumlah UP		Tahun Lalu	Kontribusi i Murni	Kontribusi Bruto	Rata-Rata Masa Kontrak	Rata-Rata Usia Peserta	Rata-Rata Usia Polis	Tabel Mortalita	Tingkat Diskonto	Metode Perhitun gan
	Tahun Berjalan	(14)				(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
(1)		(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											

Rincian E-130. Penyisihan Kontribusi Produk Investasi

No							Penyisihan Kontribusi				(dalam jutaan rupiah)	
	Masa Pertanggungan	Jenis Polis	Jenis Produk	Jumlah Polis	Jumlah Peserta	Jumlah Uang Pertanggungan	Term	P.A	Health	Akumulasi Dana		
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10		-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No	Nama Produk	Jenis Polis	Lini Usaha	Sesuai dengan SE OJK NO. 9/SEOJK.05/2017									Premi / Kontribusi Bruto (Rp)	Klaim Bruto (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	Jumlah Peserta Aktif pada Awal Periode Laporan	Jumlah Peserta Baru Dalam Periode Laporan	Jumlah Kepesertaan yang Diperpanjang pada Periode Laporan	Jumlah Kepesertaan yang Berakhir Karena Jatuh Tempo	Jumlah Kepesertaan yang Dibatalkan	Jumlah Kepesertaan yang Berakhir Karena Klaim	Jumlah Peserta Aktif pada Akhir Periode Laporan	(12)	(13)		
1				-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2				-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3				-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4				-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5				-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6				-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7				-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8				-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9				-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10				-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No	Tidak Sesuai dengan SE OJK NO. 9/SEOJK.05/2017							Premi / Kontribusi Bruto (Rp)	Klaim Bruto (Rp)
	Jumlah Peserta Aktif pada Awal Periode Laporan (14)	Jumlah Peserta Baru Dalam Periode Laporan (15)	Jumlah Kepesertaan yang Diperpanjang pada Periode Laporan (16)	Jumlah Kepesertaan yang Berakhir Karena Jatuh Tempo (17)	Jumlah Kepesertaan yang Dibatalkan (18)	Jumlah Kepesertaan yang Berakhir Karena Klaim (19)	Jumlah Peserta Aktif pada Akhir Periode Laporan (20)	(21)	(22)
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RINCIAN G-120. Kinerja Saluran Pemasaran Asuransi Mikro

No	Pemasar Badan Hukum					(dalam jutaan rupiah)		
	Jenis Saluran Pemasaran (2)	Wilayah Pemasaran (3)	Kategori Badan Hukum (4)	Jumlah Badan Hukum (5)	Jumlah Pemasar Perorangan (6)	Nama Produk Yang Dipasarkan (7)	Jumlah Peserta/Tertanggung (8)	Premi/Kontribusi Bruto (Rp) (9)
1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

FORMAT I D

BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN TAHUNAN ASPEK MANAJEMEN BAGI PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH, DAN UNIT SYARIAH

I. Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah

1. Transparansi Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

a. Pelaksanaan RUPS

Pelaksanaan RUPS tahunan dan RUPS luar biasa serta keputusan yang dihasilkan pada masing-masing RUPS

No.	Waktu Pelaksanaan	Agenda	Peserta	Keputusan RUPS	Nomor Akta Notaris	Ket
1.						
2.						
Dst.						

b. Direksi

1) Jumlah, nama jabatan, kriteria, tanggal pengangkatan oleh RUPS, masa jabatan, kewarganegaraan, dan domisili anggota Direksi

No	Nama	Jabatan	Kriteria		Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Masa Jabatan	Kewarganegaraan	Domisili
			Pendidikan Formal Terakhir dan gelar profesi	Uji Kemampuan dan Kepatutan				
1.								
2.								
Dst.								

2) Dalam hal selama tahun pelaporan terdapat perubahan susunan anggota Direksi, harus dicantumkan susunan keanggotaan Direksi sebelumnya dengan tabel sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Tanggal Pemberhentian oleh RUPS

3) Rangkap jabatan Direksi

No.	Nama	Posisi di Perusahaan	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain dimaksud	Bidang Usaha
1.			1.		
			2.		
			Dst.		
2.			1.		

No.	Nama	Posisi di Perusahaan	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain dimaksud	Bidang Usaha
			2.		
			Dst.		
Dst					

4) Frekuensi rapat Direksi yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun.

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Direksi (... kali rapat)		% Kehadiran
			Jumlah Kehadiran		
			Fisik	Telekonferensi/Video/ Konferensi/Sarana Media Elektronik Lainnya	
1.					
2.					
Dst					

5) Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham.

[illegible]

Keterangan:

- A. Perusahaan yang bersangkutan;
B. perusahaan perasuransian lain;
C. perusahaan jasa keuangan selain perusahaan perasuransian; dan
D. perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek.

6) Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan/atau pemegang saham Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.

[illegible]

No.	Nama	Hubungan Keluarga Dengan											
		Direksi Lainnya			Dewan Komisaris			Dewan Pengawas Syariah			Pemegang Saham		
		Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*
1.													
2.													
Dst													

Keterangan:

*) Bentuk hubungan keuangan: hutang-piutang, kerjasama bisnis, dsb

**) Bentuk hubungan keluarga: suami/istri/anak/orang tua/saudara kandung/ipar,dsb

c. Dewan Komisaris

- 1) Jumlah, nama jabatan, kriteria, tanggal pengangkatan oleh RUPS, masa jabatan, kewarganegaraan, dan domisili anggota Dewan Komisaris

No	Nama	Jabatan	Kriteria		Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Masa Jabatan	Kewarganegaraan	Domisili
			Pendidikan Formal Terakhir dan gelar profesi	Uji Kemampuan dan Keputusan				
1.								
2.								
Dst.								

- 2) Dalam hal selama tahun pelaporan terdapat perubahan susunan anggota Dewan Komisaris, harus dicantumkan susunan keanggotaan Dewan Komisaris sebelumnya dengan tabel sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Tanggal Pemberhentian oleh RUPS

- 3) Rangkap jabatan Dewan Komisaris

No.	Nama	Posisi di Perusahaan	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain dimaksud	Bidang Usaha
1.			1.		
			2.		
			Dst.		
2.			1.		
			2.		
			Dst.		
Dst.					

4) Frekuensi rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun.

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Direksi (... kali rapat)		% Kehadiran
			Jumlah Kehadiran		
			Fisik	Telekonferensi/Video/ Konferensi/Sarana Media Elektronik Lainnya	
1.					
2.					
Dst					

5) Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Komisaris (... kali rapat)		% Kehadiran
			Jumlah Kehadiran		
			Fisik	Telekonferensi/Video/ Konferensi/Sarana Media Elektronik Lainnya	
1.					
2.					
Dst					

6) Pengungkapan kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham.

No	Nama	Jabatan	Kepemilikan saham anggota Direksi yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor									
			A		B		C		D		Ket: Indonesia/ Luar Negeri	
			Jumlah Nominal Saham	% Kepem ilikan	Jumlah Nominal Saham	% Kepem ilikan	Jumlah Nominal Saham	% Kepem ilikan	Jumlah Nominal Saham	% Kepem ilikan		
1.												
2.												
Dst.												

Keterangan:

- A. Perusahaan yang bersangkutan; B. perusahaan perasuransian lain;
C. perusahaan jasa keuangan selain perusahaan perasuransian; dan
D. perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek.

7) Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan/atau pemegang saham Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat

	Nama	Hubungan Keuangan Dengan											
		Dewan Komisaris Lainnya			Direksi			Dewan Pengawas Syariah			Pemegang Saham		
		Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*
1.													
2.													
Dst													

No.	Nama	Hubungan Keluarga Dengan											
		Dewan Komisaris Lainnya			Direksi			Dewan Pengawas Syariah			Pemegang Saham		
		Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*
1.													
2.													
Dst													

Keterangan:

*) Bentuk hubungan keuangan: hutang-piutang, kerjasama bisnis, dsb

**) Bentuk hubungan keluarga: suami/istri/anak/orang tua/saudara kandung/ipar,dsb

d. Dewan Pengawas Syariah

- 1) Jumlah, nama jabatan, kriteria, tanggal pengangkatan oleh RUPS, masa jabatan, kewarganegaraan, dan domisili anggota Dewan Pengawas Syariah

No	Nama	Jabatan	Kriteria		Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Masa Jabatan	Kewarganegaraan	Domisili
			Pendidikan Formal Terakhir dan gelar profesi	Uji Kemampuan dan Kepatuhan				
1.								
2.								
Dst								

- 2) Dalam hal selama tahun pelaporan terdapat perubahan susunan anggota Dewan Pengawas Syariah, harus dicantumkan susunan keanggotaan Dewan Pengawas Syariah sebelumnya dengan tabel sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Tanggal Pemberhentian oleh RUPS

3) Rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah

No.	Nama	Posisi di Perusahaan	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain dimaksud	Bidang Usaha
1.			1.		
			2.		
			Dst.		
2.			1.		
			2.		
			Dst.		
Dst.					

4) Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun.

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Direksi (... kali rapat)		% Kehadiran
			Jumlah Kehadiran		
			Fisik	Telekonferensi/Video/Konferensi/Sarana Media Elektronik Lainnya	
1.					
2.					
Dst					

e. Laporan Hasil Pengawasan Dewan Komisaris dan Komisaris Independen

1) Laporan kegiatan Dewan Komisaris (termasuk hasil pengawasan atas realisasi rencana bisnis)

Ringkasan Hasil Pengawasan	Rekomendasi

2) Laporan kegiatan Komisaris Independen

Ringkasan Hasil Pengawasan	Rekomendasi

f. Komite-Komite

1) Komite di bawah Direksi

No.	Nama komite	Nama Anggota	Jabatan*	Masa kerja	SK Pengangkatan	Jumlah Rapat dalam Setahun
1.	Komite Investasi	1.				
		2.				
		Dst				
2.	Komite Pengembangan Produk	1.				
		2.				
		Dst				
Dst						

2) Komite di bawah Dewan Komisaris

No.	Nama komite	Nama Anggota	Jabatan*	Masa kerja	SK Pengangkatan	Jumlah Rapat dalam Setahun
1.	Komite Audit	1.				
		2.				
		Dst				
2.	Komite Pemantau Risiko	1.				
		2.				
		Dst				
Dst						

g. Penerapan fungsi auditor eksternal.

No.	Uraian	Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n
1.	Nama Kantor Akuntan Publik			
2.	Nama Akuntan Publik			
3.	Periode Audit			
4.	Nomor RUPS			

h. Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah

Jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan pegawai yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi perorang dalam 1 tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Komisaris	Jumlah Dewan Pengawas Syariah	Pegawai
Di atas Rp2 miliar				
Di atas Rp1 miliar s.d Rp2 miliar				
Di atas Rp500juta s.d Rp1 miliar				

Rp500juta ke bawah				
--------------------	--	--	--	--

Keterangan:*) yang diminta secara tunai

i. Alih Daya Pengelolaan Investasi

No.	Jenis Investasi	Nama Perusahaan Alih Daya	Nilai Investasi	No. Perjanjian	% dari total Portofolio Investasi
1.					
2.					
Dst					

j. Fungsi Perusahaan yang dialihdayakan kepada pihak lain (*outsourcing*)

No	Fungsi yg dialihdayakan	Nama Pihak lain	Izin Usaha	Jangka waktu kotrak
1.				
2.				
Dst.				

k. Pengungkapan hal-hal penting lainnya
Pengungkapan hal-hal penting lainnya

No.	Uraian	Ceklis *)		Jika Ya, Jelaskan.
		Ya	Tidak	
1.	Pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal			
2.	Transaksi material dengan pihak terkait**			
3.	Klaim material yang diajukan oleh dan/atau terhadap Perusahaan Perasuransian			
4.	Benturan Kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi			
5.	Informasi material lain mengenai Perusahaan Perasuransian			
6.	Perusahaan memiliki fungsi kepatuhan			
7.	Perusahaan memiliki auditor internal			
8.	Perusahaan memiliki fungsi manajemen risiko			
9.	Perusahaan memiliki fungsi/satuan kerja pengelolaan investasi			
10.	Perusahaan memiliki unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat PJK yang bertanggung jawab atas penerapan program APU dan PPT			

*) pilih salah satu jawaban dengan membubuhkan tanda “√”

**) Pihak Terkait adalah perseorangan atau perusahaan/badan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan Perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan atau keuangan

2. Penilaian Sendiri (Self Assessment) atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pengisian kuesioner Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan dilakukan oleh Perusahaan yang bersangkutan. Pengisian kuesioner ini dilakukan dengan cara memberikan jawaban atas pertanyaan/ Pernyataan dalam kuesioner dimaksud.

Cara Pengisian:

Secara Umum jawaban atas Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud terdiri dari 5 kriteria sebagai berikut (kecuali untuk jawaban yang membutuhkan kriteria berbeda) :

- A= Perusahaan yang bersangkutan TIDAK MEMILIKI kebijakan tertulis mengenai Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud.
- B= Perusahaan yang bersangkutan MEMILIKI kebijakan tertulis mengenai Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud, namun kebijakan tersebut BELUM dilaksanakan.
- C= Perusahaan yang bersangkutan MEMILIKI kebijakan tertulis mengenai Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud, namun kebijakan tersebut BELUM dilaksanakan secara KONSISTEN.
- D= Perusahaan yang bersangkutan MEMILIKI kebijakan tertulis mengenai Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud, kebijakan tersebut DILAKSANAKAN secara KONSISTEN namun BELUM DIUPDATE secara berkala.
- E= Perusahaan yang bersangkutan MEMILIKI kebijakan tertulis mengenai Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud dan kebijakan tersebut DILAKSANAKAN secara KONSISTEN serta DIUPDATE secara berkala.

Penafsiran Hasil

Suatu penilaian diperlukan untuk menafsirkan angka yang diperoleh dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan Kuesioner ini, yang sebagian besar jawabannya adalah terdiri dari 5 (lima) skala mulai dari penilaian terendah (A/ Tidak), sampai dengan penilaian tertinggi (E/ Ya).

Khusus untuk jawaban " A/Tidak" pada kriteria penilaian yang telah dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan (bersifat wajib), diberikan angka minus.

Untuk kelompok Pertanyaan/Pernyataan yang dilewatkan karena "Tidak ada" dan yang bukan bersifat "tidak applicable", dalam penafsiran hasil harus tetap diperhitungkan dengan memberikan score yang sama dengan jawaban " A/Tidak ".

I. ETIKA BISNIS DAN PEDOMAN PERILAKU

1. Perusahaan memiliki Visi, Misi dan Nilai-nilai Perusahaan	A	B	C	D	E
2. Perusahaan memiliki Kebijakan Etika Bisnis yang antara lain meliputi :					
2.1. Kebijakan umum yang mengarah kepada peraturan perundang-undangan dan kode etik yang berlaku	A	B	C	D	E
2.2. Kebijakan bagi organ perusahaan	A	B	C	D	E
2.3. Kebijakan bagi pegawai	A	B	C	D	E
2.4. Kebijakan bagi pemegang polis	A	B	C	D	E
2.5. Kebijakan bagi mitra usaha	A	B	C	D	E
2.6. Kebijakan bagi sesama perusahaan asuransi dan perusahaan	A	B	C	D	E

reasuransi					
3. Perusahaan memiliki Pedoman Perilaku yang merupakan penjabaran Nilai-nilai Perusahaan dan Etika Bisnis	A	B	C	D	E
4. Pedoman Perilaku mencakup panduan tentang :					
4.1. Benturan kepentingan	A	B	C	D	E
4.2 Pemberian hadiah dan donasi	A	B	C	D	E
4.3. Kepatuhan terhadap peraturan	A	B	C	D	E
4.4 Kerahasiaan informasi	A	B	C	D	E
4.5. Pelaporan atas pelanggaran dan perlindungan bagi pelapor	A	B	C	D	E
5. Dalam menjalankan tugasnya, anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai perusahaan:					
5.1. Membuat pernyataan "tidak memiliki benturan kepentingan" terhadap setiap keputusan yang diambil oleh pihak yang berwenang mengambil keputusan	Tidak				Ya
5.2 Membuat pernyataan setiap tahun mengenai pelaksanaan pedoman perilaku yang ditetapkan perusahaan	Tidak				Ya
5.3 Membuat pernyataan setiap tahunnya untuk tidak menerima dan atau memberikan sesuatu yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan	Tidak				Ya
6. Perusahaan melakukan pencatatan atas harta, utang dan modal sendiri (ekuitas) secara benar dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum maupun prinsip akuntansi yang berlaku khusus bagi perusahaan	Tidak				Ya
7. Mempunyai sistem pengaduan tentang pelanggaran terhadap pedoman perilaku, peraturan perusahaan dan ketentuan peraturan perundangan-undangan serta hal-hal yang berkaitan dengan Pemegang Polis.yang menjamin perlindungan bagi Pelapor.	A	B	C	D	E

II. ORGAN PERUSAHAAN

A.Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

1. Setiap Pemegang Saham berhak memperoleh informasi yang akurat mengenai prosedur yang harus dipenuhi berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS	A	B	C	D	E
2. Kebijakan perusahaan tentang penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai prosedur RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	A	B	C	D	E
3. Setiap Pemegang Saham berhak memperoleh penjelasan lengkap mengenai prosedur yang harus dipenuhi berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS	Tidak				Ya
4. Penjelasan lengkap dan informasi tersebut meliputi hal-hal berikut ini:					
4.1 Panggilan RUPS	Tidak				Ya
4.2 Informasi mengenai setiap mata acara dalam agenda RUPS	Tidak				Ya
4.3 Tersedianya informasi di kantor pusat perusahaan	Tidak				Ya
4.4 Komitmen diselenggarakannya RUPS secara transparan.	Tidak				Ya
4.5 Pemberitahuan kepada setiap pemegang saham mengenai hasil RUPS	Tidak				Ya
5. Dalam pengambilan keputusan RUPS :					
5.1 Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat telah lulus Fit and Proper Test bagi perusahaan	Tidak				Ya
5.2 Mempertimbangkan pendapat Komite Nominasi dan Remunerasi atau fungsi yang menangani Nominasi dan Remunerasi dalam	A	B	C	D	E

pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi					
5.3 Mempertimbangkan kualitas laporan yang berhubungan dengan GCG dalam mengambil keputusan menerima atau menolak laporan	A	B	C	D	E
5.4 Melakukan penetapan auditor eksternal	Tidak				Ya
5.5 Keputusan yang diambil memperhatikan kepentingan wajar dari para pemangku kepentingan.	A	B	C	D	E
5.6 Memperhatikan kondisi keuangan perusahaan dalam hal pemberian bonus , tantiem dan dividen	A	B	C	D	E

B.Dewan Komisaris dan Direksi

1. Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah secara bersama-sama sesuai dengan fungsinya masing-masing telah melaksanakan hal-hal di bawah ini:					
1.1. Internal kontrol	A	B	C	D	E
1.2. manajemen risiko.	A	B	C	D	E
1.3. imbal hasil (return) yang wajar bagi Pemegang Saham.	A	B	C	D	E
1.4 kebijakan yang terkait kepentingan stakeholders	A	B	C	D	E
1.5. suksesi kepemimpinan dan kontinuitas manajemen di semua lini organisasi.	A	B	C	D	E
1.6. implementasi GCG.	A	B	C	D	E
2. Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah bersama-sama menyepakati hal-hal tersebut di bawah ini:					
2.1 Sasaran usaha perusahaan	A	B	C	D	E
2.2. Rencana jangka panjang perusahaan	A	B	C	D	E
2.3 Rencana kerja dan anggaran tahunan perusahaan	A	B	C	D	E
2.4. Kebijakan dalam memenuhi ketentuan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan	A	B	C	D	E
2.5. Kebijakan dalam menghindari segala bentuk benturan kepentingan (conflict of interest).	A	B	C	D	E
2.6. Kebijakan dan metode penilaian perusahaan	A	B	C	D	E
2.7. Kebijakan dan metode penilaian unit-unit dalam perusahaan	A	B	C	D	E
2.8. Struktur organisasi pada tingkat eksekutif	A	B	C	D	E

C.Dewan Komisaris

1. Komposisi, Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris

1.1 Jumlah anggota Dewan Komisaris telah disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan namun tetap memperhatikan efektivitas pengambilan keputusan.	Tidak	Ya
1.2 Dalam komposisi Dewan Komisaris termasuk komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi yang dikenal sebagai Komisaris Independen	Tidak	Ya
1.3. Pengangkatan Komisaris Independen sesuai ketentuan yang berlaku	Tidak	Ya
1.4. Dewan Komisaris terdiri dari anggota-anggota yang secara keseluruhan memiliki kompetensi seperti *):		
a. bidang asuransi	Tidak	Ya
b. bidang keuangan	Tidak	Ya
c. bidang manajemen.	Tidak	Ya
1.5. Mempunyai Komisaris Utusan, selain Komisaris Independen	Tidak	Ya
1.6. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS	Tidak	Ya

sesuai proses yang transparan berdasarkan alasan yang wajar dan diberi kesempatan membela diri						
1.7	Tidak merangkap sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan Prinsip Syariah yang sama	Tidak				Ya
1.8	Tidak merangkap jabatan lebih dari 4 (empat) Lembaga Jasa Keuangan lainnya	Tidak				Ya
1.9	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau anggota DPS pada Perusahaan Perasuransian yang memilki bidang usaha yang sama	Tidak				Ya
2. Kemampuan dan Integritas Dewan Komisaris						
2.1.	Memenuhi persyaratan Fit and Proper Test	Tidak				Ya
2.2.	Mematuhi dan memahami Anggaran Dasar Perusahaan	A	B	C	D	E
2.3.	Mematuhi dan melaksanakan GCG	A	B	C	D	E
2.4.	Tidak memanfaatkan perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok usahanya atau pihak lain yang dapat merugikan perusahaan.	Tidak				Ya
3. Kemampuan dan Integritas DPS						
3.1	Mendapatkan rekomendasi Dewan Syariah Nasional?	Tidak				Ya
3.2	DPS telah mendapat persetujuan dari OJK	Tidak				Ya
3.3	Mematuhi dan memahami Anggaran Dasar Perusahaan	Tidak				Ya
3.4	Mematuhi dan melaksanakan GCG	Tidak				Ya
3.5	Tidak memanfaatkan perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok usahanya atau pihak lain yang dapat merugikan perusahaan.	Tidak				Ya
3.6	50% atau lebih anggota DPS berkewarganegaraan Indonesia.	Tidak				Ya
4. Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris						
4.1.	Dewan Komisaris mengawasi kepengurusan perusahaan oleh Direksi	A	B	C	D	E
4.2.	Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan operasional	A	B	C	D	E
4.3	Dewan Komisaris dapat mengenakan sanksi pada Direksi dalam bentuk pemberhentian sementara , dengan ketentuan harus ditindaklanjuti dengan pelaksanaan RUPS	A	B	C	D	E
4.4	Dewan Komisaris memperoleh informasi tentang perusahaan secara lengkap dan tepat waktu	A	B	C	D	E
4.5.	Dewan Komisaris memiliki Tata tertib dan Pedoman Kerja (charter)	A	B	C	D	E
4.6.	Dalam melaksanakan tugasnya , Dewan Komisaris membentuk Komite Audit dan komite-komite lainnya.	A	B	C	D	E
4.7.	Dewan Komisaris melaporkan tanggung jawab pengawasannya dan mendapatkan acquid et decharge dari RUPS	A	B	C	D	E
4.8.	Dewan Komisaris mengadakan rapat secara berkala	Tidak				Ya
4.9.	Setiap rapat Dewan Komisaris dibuat risalah rapat	Tidak				Ya
4.10	Risalah rapat mencantumkan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) dengan keputusan yang diambil dalam rapat	A	B	C	D	E
4.11	Setiap anggota Dewan Komisaris baik yang menghadiri rapat atau	Tidak				Ya

tidak berhak menerima risalah rapat Dewan Komisaris.

5. Fungsi Pengawasan Dewan Syariah

5.1 Informasi yang diberikan oleh Direksi kepada DPS disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.	Tidak	Ya
5.2 DPS melakukan pengawasan dan pemberian nasihat dan saran terhadap kegiatan usaha sesuai dengan Prinsip Syariah.	Tidak	Ya
5.3 DPS mengadakan rapat secara berkala	Tidak	Ya
5.4 Setiap rapat DPS dibuat risalah rapat	Tidak	Ya
5.5 Risalah rapat mencantumkan pendapat yang berbeda (dissenting opinions) dengan keputusan yang diambil dalam rapat	Tidak	Ya
5.6 Setiap anggota DPS baik yang menghadiri rapat atau tidak berhak menerima risalah rapat DPS	Tidak	Ya

6. Komite-Komite Dewan Komisaris (dijawab jika ada)

		lanjutkan ke			
		Tidak	6.1.8.		
6.1. Komite Audit		Ada			
Komite Audit bertugas sebagai fasilitator bagi Dewan Komisaris untuk memastikan hal-hal berikut ini:					
6.1.1. Struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik	A	B	C	D	E
6.1.2. Audit internal dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku	A	B	C	D	E
6.1.3. Tindaklanjut temuan hasil audit internal dilaksanakan oleh manajemen.	A	B	C	D	E
6.1.4. Pelaksanaan audit eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku	Tidak		Ya		
6.1.5. Tindaklanjut temuan hasil audit eksternal dilaksanakan oleh manajemen.	A	B	C	D	E
6.1.6. Meningkatnya kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan	A	B	C	D	E
6.1.7. Anggota Komite Audit terdiri dari :					
a. seorang Komisaris Independen sebagai Ketua	Tidak		Ya		
b. anggota Dewan Komisaris	Tidak		Ya		
c. pihak luar yang independen yang memiliki keahlian, pengalaman, serta kualitas lain yang diperlukan	Tidak		Ya		
6.1.8. Bagi Perusahaan yang tidak memiliki Komite Audit, maka terdapat anggota komisaris yang secara khusus bertugas untuk memastikan hal-hal sebagai berikut:					
a. Struktur pengendalian internal perusahaan telah dapat dilaksanakan dengan baik	A	B	C	D	E
b. Pelaksanaan audit internal dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku	A	B	C	D	E
c. Tindak lanjut temuan hasil audit internal dilaksanakan oleh manajemen.	A	B	C	D	E
d. Pelaksanaan audit eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku	Tidak		Ya		
e.Tindaklanjut temuan hasil audit eksternal dilaksanakan oleh manajemen.	A	B	C	D	E
f. Meningkatnya kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan	A	B	C	D	E

6.2. Komite Kebijakan Risiko	Tidak Ada	lanjutkan ke 6.2.4.			
Komite Kebijakan Risiko bertugas sebagai fasilitator bagi Dewan Komisaris untuk hal-hal berikut ini:					
6.2.1. Menilai kualitas kebijakan manajemen risiko	A	B	C	D	E
6.2.2. Menilai efektivitas manajemen risiko yang diterapkan Perusahaan, termasuk menilai toleransi risiko yang diambil oleh Direksi.	A	B	C	D	E
6.2.3. Anggota Komite Kebijakan Risiko terdiri dari:					
a. anggota Dewan Komisaris	Tidak				Ya
b. pihak luar yang independen yang memiliki keahlian, pengalaman dan kualitas lain dalam mengelola manajemen risiko.	Tidak				Ya
6.2.4. Bagi Perusahaan yang tidak memiliki Komite Kebijakan Risiko, terdapat anggota komisaris yang secara khusus bertugas untuk hal-hal sebagai berikut:					
a. Menilai kualitas kebijakan manajemen risiko	A	B	C	D	E
b. Menilai efektivitas manajemen risiko yang diterapkan perusahaan, termasuk menilai toleransi risiko yang diambil oleh Direksi.	A	B	C	D	E
6.3. Komite Nominasi dan Remunerasi	Tidak Ada	lanjutkan ke 6.3.11.			
Komite Nominasi dan remunerasi bertugas sebagai fasilitator bagi Dewan Komisaris untuk hal-hal berikut ini:					
6.3.1. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi Dewan Komisaris	A	B	C	D	E
6.3.2. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi Direksi	A	B	C	D	E
6.3.3. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi pejabat senior Perusahaan.	A	B	C	D	E
6.3.4. Membantu Dewan Komisaris dan atau pemegang saham dalam memilih komisaris sehingga memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan.	A	B	C	D	E
6.3.5. Membantu Dewan Komisaris dan atau pemegang saham dalam memilih anggota direksi sehingga memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan.	A	B	C	D	E
6.3.6. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem penilaian kinerja Komisaris	A	B	C	D	E
6.3.7. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem penilaian kinerja Direksi.	A	B	C	D	E
6.3.8. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem remunerasi bagi Dewan Komisaris	A	B	C	D	E
6.3.9. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem remunerasi bagi Direksi.	A	B	C	D	E
6.3.10. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari:					
a. anggota Dewan Komisaris	Tidak				Ya

b.pihak luar yang independen yang memiliki keahlian,pengalaman dan kualitas lain yang diperlukan.	Tidak				Ya
6.3.11. Bagi Perusahaan yang tidak memiliki Komite Nominasi dan remunerasi, terdapat anggota Komisaris yang secara khusus bertugas untuk hal-hal sebagai berikut :					
a. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi Dewan Komisaris	A	B	C	D	E
b. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi Direksi	A	B	C	D	E
c. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi pejabat senior Perusahaan.	A	B	C	D	E
d. Membantu Dewan Komisaris dan atau pemegang saham dalam memilih komisaris sehingga memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan.	A	B	C	D	E
e. Membantu Dewan Komisaris dan atau pemegang saham dalam memilih anggota direksi sehingga memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan.	A	B	C	D	E
f. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem penilaian kinerja Komisaris	A	B	C	D	E
g. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem penilaian kinerja Direksi.	A	B	C	D	E
h. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem remunerasi bagi Dewan Komisaris	A	B	C	D	E
i. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem remunerasi bagi Direksi.	A	B	C	D	E

6.4. Komite Kebijakan Corporate Governance

Tidak lanjutkan ke Ada 6.4.4.

Komite Kebijakan Corporate Governance (yang berdiri sendiri maupun yang tergabung dalam Komite Nominasi dan Remunerasi) bertugas membantu Dewan Komisaris dalam hal-hal berikut:

6.4.1. Membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji kebijakan GCG secara menyeluruh yang disusun Direksi	A	B	C	D	E
6.4.2. Menilai kesesuaian penerapan GCG di perusahaan terhadap kebijakan GCG yang disusun Direksi, termasuk yang berkaitan dengan Etika Bisnis dan CSR	A	B	C	D	E
6.4.3. Anggota Komite Kebijakan Corporate Governance terdiri dari :					
a. Anggota Dewan Komisaris	Tidak			Ya	
b. Pihak luar yang independen yang mempunyai keahlian, pengalaman dan kualitas di bidang corporate governance	Tidak			Ya	
6.4.4. Bagi Perusahaan yang tidak memiliki Komite Kebijakan Corporate Governance, terdapat anggota Komisaris yang secara khusus bertugas untuk hal-hal sebagai berikut:					
a. Mengkaji kebijakan GCG secara menyeluruh yang disusun Direksi	A	B	C	D	E
b. Menilai kesesuaian penerapan GCG di perusahaan terhadap kebijakan GCG yang disusun Direksi, termasuk yang	A	B	C	D	E

berkaitan dengan Etika Bisnis dan CSR

7. Komisaris Independen

Perusahaan memiliki Komisaris Independen dengan kriteria-kriteria berikut ini :

7.1 Tidak memiliki hubungan afiliasi *) dengan Pemegang Saham pengendali perusahaan	Tidak	Ya			
7.2. Tidak memiliki hubungan afiliasi *) dengan Direktur Perusahaan	Tidak	Ya			
7.3. Tidak memiliki hubungan afiliasi *) dengan Komisaris lainnya	Tidak	Ya			
7.4. Tidak pernah menduduki jabatan Eksekutif pada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang sama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir	Tidak	Ya			
7.5 Tidak menduduki jabatan eksekutif di perusahaan yang mempunyai hubungan bisnis dengan perusahaan	Tidak	Ya			
7.6. tidak pernah menduduki jabatan Eksekutif pada Perusahaan lain yang terafiliasi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir	Tidak	Ya			
7.7. Tidak menjadi partner atau principal di perusahaan konsultan yang memberikan jasa pelayanan profesional pada perusahaan dan perusahaan -perusahaan lain yang terafiliasi	Tidak	Ya			
7.8. Tidak menjadi pemasok signifikan atau menduduki jabatan eksekutif dan komisaris perusahaan pemasok	Tidak	Ya			
7.9. Tidak menjadi pelanggan signifikan atau menduduki jabatan eksekutif dan komisaris perusahaan pelanggan signifikan dari Perusahaan	Tidak	Ya			
7.10. Tidak menjadi pemasok signifikan perusahaan-perusahaan yang terafiliasi atau menduduki jabatan eksekutif dan komisaris perusahaan pemasok dari Perusahaan yang terafiliasi.	Tidak	Ya			
7.11. Tidak menjadi pelanggan signifikan perusahaan-perusahaan yang terafiliasi atau menduduki jabatan eksekutif dan Komisaris Perusahaan pelanggan dari Perusahaan yang terafiliasi.	Tidak	Ya			
7.12. Bebas dari segala kepentingan dan kegiatan bisnis atau hubungan lain dengan perusahaan yang dapat diinterpretasikan akan menghalangi atau mengurangi kemampuan Komisaris Independen untuk bertindak dan berpikir independen demi kepentingan Perusahaan.	Tidak	Ya			
7.13. Memahami Undang-Undang Perseroan Terbatas	A	B	C	D	E
7.14. Memahami Undang-Undang Perasuransian serta peraturan pelaksanaannya.	A	B	C	D	E
7.15 Tidak bekerja rangkap sebagai Komisaris, Direktur, dan Dewan Pengawas Syariah pada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang memiliki bidang usaha yang sama.	A	B	C	D	E

D. Direksi

1. Komposisi Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi

1.1. Direksi terdiri dari anggota-anggota yang secara keseluruhan memiliki kompetensi *)seperti :		
1.1.a Bidang Asuransi	Tidak	Ya
1.1.b Bidang Keuangan	Tidak	Ya
1.1.c Bidang Manajemen.	Tidak	Ya
1.2. Domisili Anggota Direksi diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif.	Tidak	Ya
1.3. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS melalui	Tidak	Ya

mekanisme yang transparan

2. Persyaratan Anggota Direksi

2.1 Anggota Direksi memenuhi ketentuan anggaran dasar	Tidak					Ya
2.2 Anggota Direksi memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan sesuai peraturan otoritas pembina dan pengawas	Tidak					Ya
2.3 Anggota Direksi memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perusahaan	A	B	C	D	E	
2.4 Anggota Direksi harus memahami dan melaksanakan GCG	A	B	C	D	E	
2.5 Anggota Direksi dilarang memanfaatkan perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok usaha dan atau pihak lain yang merugikan kepentingan perusahaan	Tidak					Ya
2.6 Direktur Utama tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada lebih dari 1 (satu) Perusahaan Perasuransian dengan bidang usaha yang berbeda	Tidak					Ya
2.7 Selain Direktur Utama tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada lebih dari 1 (satu) Perusahaan Perasuransian dengan bidang usaha yang berbeda yang bukan merupakan Perusahaan anak	Tidak					Ya
2.8 Direksi tidak merangkap jabatan pada perusahaan yang bukan Perusahaan Perasuransian	Tidak					Ya

3. Fungsi Direksi

3.1. Kepengurusan

3.1.1. Direksi menyusun Visi, Misi dan Nilai2 perusahaan serta program jangka panjang dan jangka pendek perusahaan	A	B	C	D	E	
3.1.2. Direksi mengelola sumber daya yang dimiliki , secara efektif dan efisien, termasuk memastikan dimilikinya sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi tertentu untuk menjalankan fungsinya.	A	B	C	D	E	
3.1.3. Direksi memperhatikan kepentingan yang wajar dari pemangku kepentingan	A	B	C	D	E	
3.1.4. Direksi membentuk Komite untuk mendukung pelaksanaan tugasnya	A	B	C	D	E	
3.1.5. Direksi memiliki dan mematuhi tata tertib dan pedoman kerja (<i>charter</i>)	A	B	C	D	E	

3.2. Manajemen Risiko

3.2.1. Direksi menyusun dan melaksanakan Sistem Manajemen Risiko yang mencakup seluruh aspek kegiatan perusahaan	A	B	C	D	E	
3.2.2. Perusahaan memiliki Komite Kebijakan Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko	Tidak					Ya

3.3. Pengendalian Internal

3.3.1. Perusahaan memiliki fungsi pengawasan internal	Tidak					Ya
3.3.2. Bertanggung jawab kepada Direktur Utama atau Direktur yang membawahi tugas pengawasan internal	Tidak					Ya
3.3.3. Menembuskan laporannya kepada Dewan Komisaris/Komite Audit.	Tidak					Ya
3.3.4. Kepala Satuan Kerja Auditor Internal diangkat Direksi, berdasarkan kriteria yang jelas	Tidak					Ya
3.3.5. Pengangkatan Kepala Satuan Kerja Auditor Internal mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris	Tidak					Ya

3.3.6. Satuan Kerja Auditor Internal bertugas untuk memastikan sistem pengendalian internal berfungsi secara efektif dan efisien	A	B	C	D	E
3.3.7. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program perusahaan	A	B	C	D	E
3.3.8. Memastikan Sistem Pengendalian Internal berfungsi secara efektif dan efisien	A	B	C	D	E
3.3.9. Memberikan saran dalam upaya memperbaiki efektivitas proses pengendalian risiko	A	B	C	D	E
3.3.10. Melakukan evaluasi kepatuhan terhadap peraturan perundangan, pelaksanaan GCG dan peraturan perusahaan	A	B	C	D	E
3.3.11. Memfasilitasi kelancaran pelaksanaan audit oleh Auditor Eksternal.	A	B	C	D	E
3.4. Komunikasi					
3.4.1. Perusahaan memiliki Sekretaris Perusahaan yang melaksanakan komunikasi antara perusahaan dengan stakeholders	Tidak Ada lanjutan ke 3.4.2				Ya
3.4.2. Dalam hal kompleksitas perusahaan belum mengharuskan diangkatnya Sekretaris Perusahaan, maka fungsi komunikasi dijabat oleh salah seorang anggota Direksi	Tidak				Ya
3.4.3. Sekretaris Perusahaan harus mampu :					
a. Memastikan perusahaan telah memenuhi ketentuan penyampaian informasi sesuai peraturan perundang-undangan	A	B	C	D	E
b. Memberikan pelayanan kepada para pemangku kepentingan atas setiap informasi relevan yang dibutuhkan.	A	B	C	D	E
3.4.4. Laporan Pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris	Tidak				Ya
3.4.5. Sekretaris Perusahaan melaksanakan fungsi untuk menjamin kepatuhan pada peraturan perundangan dalam hal perusahaan tidak memiliki satuan kerja kepatuhan (compliance committee) tersendiri.	Tidak				Ya
3.5. Aktuaria					
3.5.1. Perusahaan memiliki Aktuaris yang memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut					
a. Aktuaris yang ditunjuk memiliki kualifikasi dan standar sesuai yang ditetapkan yang dibuktikan dengan adanya pengakuan dari Lembaga Profesi Aktuaris.	Tidak				Ya
b. Aktuaris Perusahaan memenuhi kualifikasi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.	Tidak				Ya
c. Aktuaris yang ditunjuk dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada standar praktik dan kode etik profesi yang berlaku.	Tidak				Ya
3.5.2. Perusahaan harus menunjuk perusahaan konsultan aktuaria untuk melakukan evaluasi kewajiban perusahaan	Tidak				Ya
3.6. Investasi					
3.6.1. Investasi dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dengan hasil yang optimal, mudah dicairkan dan aman bagi Perusahaan.	A	B	C	D	
3.6.2. Perusahaan memiliki Komite Investasi untuk membantu Direksi	Tidak				Ya
3.6.3. Komite Investasi menjalankan tugas secara obyektif berdasarkan arahan Direksi	A	B	C	D	E
3.6.4. Komite Investasi membantu Direksi dalam menilai dan	A	B	C	D	E

menetapkan strategi investasi yang direncanakan					
3.6.5. Komite Investasi membantu Direksi dalam menjaga likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban	A	B	C	D	E
3.6.6. Perusahaan memiliki fungsi pengelolaan Investasi	Tidak				Ya
3.7. Pemasaran					
3.7.1. Perusahaan memiliki Program Promosi (media plan) yang intinya mengungkapkan informasi yang jelas dan relevan, tidak menyesatkan serta mematuhi kode etik dan peraturan perundangan yang berlaku	Tidak				Ya
3.7.2. Perusahaan menerbitkan brosur yang memuat penjelasan lengkap dan jelas tentang produk yang dijual ke masyarakat luas	Tidak				Ya
3.7.3. Perusahaan memiliki agen dan sistem keagenan	Tidak				Ya
3.7.4. Perusahaan memiliki kontrak keagenan yang baku	Tidak				Ya
3.7.5. Perusahaan memastikan bahwa seluruh agen wajib memiliki sertifikasi keagenan dan pelatihan seperti yang dipersyaratkan	A	B	C	D	E
3.7.6. Perusahaan memiliki dan menerapkan Kode Etik Keagenan dalam pemasaran produknya	Tidak				Ya
3.7.7. Perusahaan memiliki kerjasama dengan broker asuransi	Tidak				Ya
3.7.8. Perusahaan telah memanfaatkan media elektronik untuk melaksanakan kegiatan pemasaran.	Tidak				Ya
3.8. Teknologi Informasi (TI)					
3.8.1. Perusahaan memiliki sistem komputerisasi administrasi secara terpadu	A	B	C	D	E
3.8.2. Perusahaan memiliki sistem komputerisasi untuk menghitung besarnya akumulasi risiko dan cadangan teknis.	A	B	C	D	E
3.8.3. Perusahaan memiliki unit khusus untuk menangani TI yang berdiri sendiri dibawah supervisi seorang Direktur	Tidak				Ya
3.8.4. Perusahaan memiliki Standard Operating Procedures untuk bagian TI	A	B	C	D	E
3.8.5. Perusahaan melakukan audit TI secara berkala	Tidak				Ya
3.8.6. Perusahaan memiliki pengaturan tanggung jawab yang jelas atas penggunaan Teknologi Informasi.	A	B	C	D	E
3.9. Tanggung Jawab Sosial					
3.9.1. Perusahaan mempunyai program tanggung jawab sosial secara berkelanjutan	A	B	C	D	E
3.9.2. Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial disampaikan Direksi dalam Laporan Tahunan	Tidak				Ya
4. Pertanggungjawaban Direksi					
4.1. Direksi menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan perusahaan dalam bentuk Laporan Tahunan	Tidak				Ya
4.2. Kriteria Laporan Tahunan antara lain :					
4.2.1. Memuat sekurang-kurangnya :					
a. Laporan keuangan	Tidak				Ya
b. Laporan kegiatan perusahaan	Tidak				Ya
c. Laporan pelaksanaan GCG	Tidak				Ya
4.2.2. Mendapat persetujuan RUPS	Tidak				Ya

4.2.3. Khusus laporan keuangan harus mendapat pengesahan RUPS	Tidak	Ya				
4.2.4. Harus tersedia sebelum RUPS dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga Pemegang Saham dapat melakukan penilaian.	Tidak	Ya				
4.3. Rapat Direksi						
4.3.1. Direksi mengadakan rapat secara berkala	Tidak	Ya				
4.3.2. Direksi menetapkan tata tertib rapat	Tidak	Ya				
4.3.3. Setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat	Tidak	Ya				
4.3.4. Risalah rapat mencantumkan pendapat yang berbeda (<i>dissenting opinion</i>) dengan keputusan yang diambil dalam rapat (bila ada)	A	B	C	D	E	
4.3.5. Setiap anggota Direksi baik yang menghadiri rapat atau tidak berhak menerima Risalah Rapat Direksi	Tidak	Ya				
III. PEMEGANG SAHAM						
1. Persyaratan Pemegang Saham						
1.1. Pemegang Saham pengendali setiap saat wajib memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan	Tidak	Ya				
1.2. Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan setiap saat apabila Pemegang Saham pengendali tersebut patut diduga tidak lagi memenuhi ketentuan persyaratan kemampuan dan kepatutan berdasarkan hasil analisis, hasil pemeriksaan, dan atau pengaduan	Tidak	Ya				
1.3. PSP tidak menjadi PSP pada 1 (satu) Perusahaan lain yang merupakan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang memiliki bidang usaha yang sama	Tidak	Ya				
2. Hak dan Tanggung Jawab Pemegang Saham						
2.1. Perusahaan menjamin hak-hak Pemegang Saham, sehingga Pemegang Saham dapat menggunakannya berdasarkan prosedur yang benar	Tidak	Ya				
2.2. Apakah hak-hak Pemegang Saham yang dijamin oleh Perusahaan meliputi namun tidak terbatas kepada hal-hal berikut ini:						
a. Hak untuk hadir dalam RUPS	Tidak	Ya				
b. Hak untuk memberikan suara dalam suatu RUPS	Tidak	Ya				
c. Hak untuk memperoleh informasi material secara tepat waktu	Tidak	Ya				
d. Hak untuk memperoleh informasi material secara teratur	Tidak	Ya				
e. Hak untuk menerima sebagian dari laba yang diperuntukkan bagi Pemegang Saham, sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya	Tidak	Ya				
3. Kewajiban Pemegang Saham						
3.1. Pemegang Saham mematuhi ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan	A	B	C	D	E	
3.2. Pemegang Saham tidak melakukan kegiatan pengawasan Perusahaan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris	A	B	C	D	E	
3.3. Pemegang Saham tidak melakukan kegiatan kepengurusan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi	A	B	C	D	E	
3.4. Pemegang Saham diwajibkan untuk tidak memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan pribadi dengan semangat dan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan	A	B	C	D	E	

praktik-praktik yang sehat di industri perasuransian					
3.5. Pemegang Saham diwajibkan untuk tidak memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan keluarga dengan semangat dan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan praktik-praktik yang sehat semangat dan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan praktik-praktik yang sehat	A	B	C	D	E
3.6. Pemegang Saham diwajibkan untuk tidak memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dengan	A	B	C	D	E
3.7. Pemegang Saham diwajibkan untuk tidak memanfaatkan perusahaan untuk kepentingan kelompok usahanya dengan semangat dan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan praktik-praktik yang sehat	A	B	C	D	E
3.8. Pemegang Saham melakukan evaluasi kinerja Dewan Komisaris melalui mekanisme RUPS	Tidak			Ya	
3.9. Pemegang Saham melakukan evaluasi kinerja Direksi melalui mekanisme RUPS	Tidak			Ya	
4. Tanggung Jawab Perusahaan terhadap Hak dan Kewajiban Pemegang Saham					
4.1. Perusahaan melindungi hak pemegang saham sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundangan lainnya	A	B	C	D	E
4.2. Perusahaan menyelenggarakan daftar pemegang saham sesuai anggaran dasar Perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan	A	B	C	D	E
4.3. Perusahaan menyediakan informasi mengenai perusahaan secara tepat waktu, benar dan teratur bagi pemegang saham, kecuali hal-hal yang bersifat rahasia	A	B	C	D	E
4.4. Perusahan tidak memihak pemegang saham tertentu dengan memberikan informasi yang tidak diungkapkan ke pemegang saham lainnya	A	B	C	D	E
4.5. Perusahaan memberikan penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai penyelenggaraan RUPS	A	B	C	D	E
IV.PEMANGKU KEPENTINGAN					
A.Pemegang Polis					
1. Perusahaan harus memenuhi dan melaksanakan :					
1.1. Kewajiban sesuai yang diperjanjikan dengan pemegang polis.	Tidak			Ya	
1.2. Perlindungan kepentingan pemegang polis.	Tidak			Ya	
1.3. Perlindungan kerahasiaan pemegang polis.	Tidak			Ya	
1.4. Evaluasi kebutuhan pemegang polis.	A	B	C	D	E
1.5. Pengungkapan informasi yang material dan relevan bagi pemegang polis.	A	B	C	D	E
1.6. Pelayanan terhadap pemegang polis berdasarkan prinsip utmost good faith dengan integritas dan kompetensi yang tinggi	A	B	C	D	E
1.7. Penunjukan adjuster bersama-sama pemegang polis bila diperlukan.	Tidak			Ya	
2. Perusahaan memastikan bahwa pemegang polis					
2.1. Menyampaikan informasi kepada perusahaan secara jujur terkait data tertanggung dan obyek risiko	Tidak			Ya	
2.2. Membayar premi tepat waktu	Tidak			Ya	

2.3. Melaporkan klaim ke perusahaan sesuai prosedur	Tidak					Ya				
2.4. Memberi kesempatan untuk melakukan survey dan bekerjasama dengan adjuster	Tidak					Ya				
B.Pegawai										
1. Pegawai harus memenuhi dan melaksanakan :										
1.1. Penerimaan pegawai atas dasar kemampuan bekerja dan kriteria yang terkait sifat pekerjaan secara taat azas	A	B	C	D	E					
1.2. Hal-hal berikut secara obyektif tanpa membedakan SARA, jenis kelamin dan kondisi fisik seseorang :										
1.2.1. Pola penetapan remunerasi	A	B	C	D	E					
1.2.2. Mengikutsertakan dalam pelatihan	A	B	C	D	E					
1.2.3. Penetapan jenjang karir	A	B	C	D	E					
1.2.4. Penetapan persyaratan kerja	A	B	C	D	E					
1.3. Mempunyai peraturan tertulis yang mengatur pola rekrutmen serta hak dan kewajiban pegawai	A	B	C	D	E					
1.4. Menyediakan lingkungan kerja yang kondusif, termasuk kesehatan dan keselamatan kerja	A	B	C	D	E					
1.5. Menyediakan sarana komunikasi untuk penyampaian informasi bagi pegawai	A	B	C	D	E					
1.6. Memberikan peluang kepada pegawai untuk membentuk Serikat Pekerja dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan	A	B	C	D	E					
2. Perusahaan harus memenuhi dan melaksanakan :										
2.1 Kewajiban sebagaimana diatur jelas dalam peraturan perusahaan dan atau Perjanjian Kerja Bersama	A	B	C	D	E					
2.2. Larangan untuk tidak menggunakan nama, fasilitas, atau hubungan baik perusahaan dengan pihak eksternal untuk kepentingan pribadi	A	B	C	D	E					
2.3. Hak untuk menyampaikan pendapat dan usul mengenai lingkungan kerja dan kesejahteraan pegawai	A	B	C	D	E					
2.4. Pelaporan pelanggaran atas Etika Bisnis dan Pedoman Perilaku serta peraturan perundangan yang terkait dengan perusahaan dengan hak mendapat perlindungan sebagai pelapor.	A	B	C	D	E					
C. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Lain										
1. Perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi melakukan persaingan usaha secara sehat	A	B	C	D	E					
2. Dalam hal terjadi hubungan bisnis, para pihak harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing yang meliputi namun tidak terbatas pada :										
2.1. Ada perjanjian tertulis antara kedua belah pihak	A	B	C	D	E					
2.2. Pengungkapan dan penyampaian informasi dan data yang relevan dan akurat	A	B	C	D	E					
2.3. Pelaksanaan komitmen dalam memenuhi kewajiban masing-masing pihak sesuai perjanjian dan peraturan perundangan	A	B	C	D	E					
3. Perusahaan memiliki coverage otomatis dari perusahaan reasuransi	A	B	C	D	E					
4. Perusahaan memiliki retensi sendiri untuk setiap penutupan risiko yang besarnya didasarkan atas modal sendiri (ekuitas) dan profil risiko yang bersangkutan	A	B	C	D	E					
5. Setiap penutupan reasuransi yang bersifat otomatis (treaty) didasarkan pada perjanjian yang disepakati oleh perusahaan dan	A	B	C	D	E					

perusahaan reasuransi yang bersangkutan

D.Perusahaan Penunjang

1. Hubungan dengan Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi

Dalam hubungan dengan pialang asuransi dan pialang reasuransi, perusahaan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut :

- 1.1. Perusahaan melaksanakan akseptasi sesuai dengan prinsip kehati-hatian (prudent) dan menyelesaikan klaim sesuai perjanjian.

A

B

C

D

E
- 1.2. Perusahaan memastikan bahwa pialang :

1.2.1. memiliki izin usaha dari otoritas dan kompetensi yang dibuktikan dengan adanya pengakuan dari lembaga profesi pialang

Tidak

Ya

1.2.2. menyampaikan semua informasi yang relevan kepada perusahaan secara benar, jujur dan lengkap.

Tidak

Ya

1.2.3. melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kesepakatan, perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tidak

Ya
2. Hubungan dengan Penilai Kerugian Asuransi
- Dalam berhubungan dengan penilai kerugian asuransi (adjuster), perusahaan berpedoman pada hak-hak sebagai berikut:
- 2.1 Perusahaan harus mengungkapkan informasi tentang kondisi polis dan memberikan data secara lengkap dan akurat berkaitan dengan terjadinya suatu klaim

A

B

C

D

E

2.2. Perusahaan memastikan bahwa penilai kerugian :

2.2.1. Mengetahui dan memahami persyaratan polis yang diperjanjikan antara perusahaan dengan pemegang polis

Tidak

Ya

2.2.2. Menggunakan persyaratan dan kondisi polis sebagai dasar untuk menentukan dijamin atau tidaknya kerugian yang terjadi

Tidak

Ya

2.2.3. Mengambil kesimpulan atas pemeriksaaan dan penelitian secara kompeten dan independen mewakili kepentingan perusahaan dan pemegang polis

Tidak

Ya

2.2.4. Mengungkapkan semua informasi yang penting mengenai terjadinya kerugian dan penyebabnya, sesuai fakta yang diketahui secara wajar tanpa berpihak ke kedua belah pihak

Tidak

Ya

2.2.5. Melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kesepakatan, perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan

Tidak

Ya

3. Hubungan dengan Konsultan Aktuaria

Dalam berhubungan dengan konsultan aktuaria, perusahaan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

3.1. Perusahaan mengungkapkan data dan informasi yang akurat sebagaimana diperlukan oleh konsultan aktuaria dalam melaksanakan tugasnya serta melaksanakan kewajiban sesuai kesepakatan.

A

B

C

D

E

3.2. Perusahaan memastikan konsultan aktuaria yang ditunjuk :

3.2.1. Memiliki integritas dan reputasi yang baik dan diakui lembaga yang berwenang

Tidak

Ya

3.2.2. Independen terhadap perusahaan dan bebas dari kepentingan

Tidak

Ya

pemegang saham.

- 3.2.3. Membuat laporan dan rekomendasi kepada Direksi berdasarkan standar praktek dan kode etik profesi yang berlaku

Tidak

Ya
- 3.2.4. Melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kesepakatan

Tidak

Ya

4. **Hubungan dengan Agen Asuransi**

Dalam berhubungan dengan agen asuransi, perusahaan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

- 4.1. Perusahaan melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian keagenan

A

B

C

D

E
- 4.2. Mencantumkan kode etik yang ditetapkan oleh asosiasi asuransi yang bersangkutan dalam perjanjian keagenan berikut sangsi yang dikenakan terhadap setiap pelanggaran.

Tidak

Ya
- 4.3. Memastikan bahwa agen yang ditunjuk :
- 4.3.1. Kompeten dalam mewakili perusahaan dalam menjual produk dan memberikan pelayanan asuransi yang dibuktikan dari adanya sertifikat dari lembaga yang berwenang

Tidak

Ya
- 4.3.2. Menerima pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan dari perusahaan agar dapat mempertahankan dan meningkatkan kompetensinya.

Tidak

Ya
- 4.3.3. Menandatangani , melaksanakan dan mematuhi perjanjian keagenan dengan Perusahaan

Tidak

Ya
- 4.3.4. Melaksanakan pembayaran premi pemegang polis kepada Perusahaan sesuai perjanjian

Tidak

Ya
- 4.3.5. Melaksanakan hak dan kewajiban sesuai perjanjian.

Tidak

Ya
- 4.4. Perusahaan menyediakan alat bantu pengawasan, meliputi namun tidak terbatas pada:
- 4.4.1. Mewajibkan semua Agen untuk menandatangani surat pernyataan bahwa mereka telah membaca dan memahami kode etik yang berlaku.

A

B

C

D

E
- 4.4.2. Membentuk sales compliance department yang terkait dengan penjualan produk, langsung di bawah pengawasan salah seorang Direktur.

A

B

C

D

E
- 4.4.3. Mewajibkan sales compliance department memberikan laporan secara berkala kepada Direksi.

A

B

C

D

E
- 4.4.4 Direksi wajib melaporkan kepada asosiasi terkait setiap pelanggaran kode etik yang terjadi.

A

B

C

D

E

5. **Mitra Bisnis**

Mitra Bisnis adalah pemasok, distributor, kreditor, debitur dan pihak lain yang melakukan transaksi usaha dengan perusahaan.

Dalam hubungan dengan mitra bisnis, perusahaan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

- 5.1. Memiliki peraturan yang dapat menjamin dilaksanakannya hak dan kewajiban mitra bisnis sesuai dengan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan

A

B

C

D

E
- 5.2. Memastikan bahwa perusahaan dan mitra bisnis :
- 5.2.1. Saling memperoleh informasi yang relevan sesuai hubungan bisnis yang dilakukan, sehingga masing-masing pihak dapat membuat keputusan atas dasar pertimbangan yang adil dan wajar.

Tidak

Ya

5.2.2. Saling merahasiakan informasi dan melindungi kepentingan masing-masing pihak , kecuali dipersyaratkan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan	Tidak	Ya
5.2.3. Saling melaksanakan hubungan kerja sesuai nilai-nilai etika dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tidak	Ya
6. Masyarakat		
Dalam berhubungan dengan masyarakat, Perusahaan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut :		
6.1. Memiliki peraturan yang dapat menjamin terjaganya keselarasan hubungan antara Perusahaan dengan masyarakat , termasuk program kemitraan dan bina lingkungan	A	B C D E
6.2. Perusahaan bertanggung jawab atas dampak negatif yang ditimbulkan kegiatan perusahaan terhadap masyarakat.	A	B C D E
V.PRAKTIK-PRAKTIK USAHA YANG SEHAT		
A.Underwriting		
1. Perusahaan memiliki kebijakan <i>underwriting</i> yang dituangkan secara rinci dalam Pedoman <i>Underwriting</i>	A	B C D E
2. Pedoman <i>Underwriting</i> memuat kebijakan teknis akseptasi, batasan kewenangan untuk setiap underwriter , pricing serta kapasitas pertanggungan asuransi	A	B C D E
3. Dalam melakukan <i>underwriting</i> yang prudent, perusahaan :		
3.1. Menerapkan prinsip-prinsip dasar asuransi	A	B C D E
3.2. Memperhatikan faktor-faktor yang mendukung proses pelaksanaannya , seperti : survey risiko, penentuan tarif premi dan penentuan nilai pertanggungan.	A	B C D E
3.3. Mematuhi peraturan perundang-undangan	A	B C D E
4. Perlindungan (coverage) yang diberikan oleh perusahaan harus jelas dan mudah dipahami untuk mencegah terjadinya dispute di kemudian hari serta memberi manfaat sebagaimana yang dibutuhkan oleh pemegang polis.	A	B C D E
B.Klaim		
1. Perusahaan menginformasikan kepada pemegang polis tentang tata cara penyelessaian klaim asuransi	A	B C D E
2. Memastikan perusahaan mendapatkan informasi tentang tata cara dan persyaratan pengajuan klaim reasuransi oleh	A	B C D E
3. perusahaan reasuransi dan perusahaan asuransi yang terkait dengan pertanggungan ulang yang dilakukan perusahaan	A	B C D E
4. Perusahaan menggunakan jasa penilai kerugian (adjuster) independen apabila diperlukan	Tidak	Ya
5. Kebijakan penanganan klaim dituangkan secara rinci dalam Pedoman Penyelesaian Klaim perusahaan	A	B C D E
6. 5. Perusahaan mengupayakan penyelesaian klaim secara cepat dan pembayaran tepat waktu sesuai ketentuan perundang- undangan	A	B C D E
C.Reasuransi dan retrosesi		
1. Perusahaan melakukan pertanggungan ulang (reasuransi/retrosesi)untuk risiko yang melebihi atau di luar batas kemampuan perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	A	B C D E

2. Pelaksanaan reasuransi/ retrosesi didasarkan pada kesepakatan tertulis antara Perusahaan dengan penanggung ulang, baik yang bersifat fakultatif maupun treaty
- A B C D E

D.Kepatuhan

1. Perusahaan memiliki fungsi kepatuhan
- Tidak Ya
2. Perusahaan menjalankan fungsi kepatuhan (compliance) terhadap ketentuan peraturan-perundangan, kebijakan internal serta perjanjian yang disepakati dengan pihak lain
- A B C D E
3. Perusahaan menjalankan fungsi kepatuhan terhadap etika bisnis dan pedoman perilaku
- A B C D E
4. Direksi bertugas untuk melakukan fungsi kepatuhan
- A B C D E
5. Dewan Komisaris memonitor pelaksanaan fungsi kepatuhan melalui Komite Pemantau Risiko atau Komite Kepatuhan yang khusus dibentuk.
- A B C D E
6. Informasi mengenai ketidakpatuhan berupa penyimpangan-penyimpangan dan atau kecurangan-kecurangangan yang terjadi ditampung melalui mekanisme Sistem Pelaporan pelanggaran nomor 4 tidak ada komite kepatuhan hanya ada komite pemantau risiko
- A B C D E
7. Perusahaan memiliki Direktur Kepatuhan.”
- A B C D E
8. Direktur yang membawahi fungsi teknik kepatuhan tidak merangkap teknik asuransi, fungsi keuangan, atau fungsi pemasaran
- A B C D E

E.Manajemen Risiko

1. Perusahaan memiliki fungsi manajemen risiko
- Tidak Ya
2. Perusahaan memiliki kebijakan manajemen risiko yang menjabarkan prinsip-prinsip utama dan penetapan tanggung jawab diantara semua aspek kegiatan yang meliputi :.
- 2.1. Sistem yang efisien dalam mengidentifikasi, menilai, mengukur, mengendalikan, mengurangi dan memonitor risiko.
- A B C D E
- 2.2. Strategi dan kebijakan dan prosedur yang tepat untuk memastikan dipenuhinya kebijakan internal dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- A B C D E
- 2.3. Sistem Pengendalian internal yang memadai untuk memastikan bahwa Manajemen Risiko dan Kepatuhan dapat dilaksanakan dengan baik
- A B C D E
- 2.4. Tenaga pelaksana Manajemen Risiko yang berintegritas tinggi, kompeten, berpengalaman, memenuhi kualifikasi yang ditetapkan.
- A B C D E
3. Perusahaan mengembangkan kerangka dasar strategi Asset and Liability Management (ALM) yang dilaksanakan pada komite tingkat Direksi. Tugas penting dari Komite tersebut adalah membahas produk baru yang akan dipasarkan oleh perusahaan
- A B C D E
4. Perusahaan melaksanakan Stress Test terkait risiko dalam memenuhi persyaratan solvabilitas, termasuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghadapi berbagai kemungkinan, seperti Perubahan kondisi ekonomi, yang dapat berdampak pada keadaan keuangan Perusahaan.
- A B C D E
5. Perusahaan mengembangkan Contingency Plans khususnya untuk menanggulangi risiko-risiko yang diyakini bisa terjadi, seperti
- A B C D E

bencana alam, serangan teroris, kegagalan sistem teknologi informasi, kekosongan Direksi atau posisi manajemen kunci. Penyusunan *Contingency Plans* dilakukan melalui pendekatan yang berkesinambungan dan dikomunikasikan kepada karyawan melalui training.

F.Audit Internal

Perusahaan memiliki satuan kerja yang melaksanakan fungsi auditor internal. Untuk dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, auditor internal harus :

1.Menyusun dan melaksanakan rencana audit dalam rangka menguji dan mengevaluasi kecukupan dan efektivitas dari sistem yang dimiliki Perusahaan	A	B	C	D	E
2.Mengaudit semua area kegiatan yang mengandung risiko cukup material diaudit dalam jangka waktu yang memadai	A	B	C	D	E
3.Menerbitkan laporan temuan dan rekomendasi berdasar hasil audit kepada Manajemen	A	B	C	D	E
4.Melaporkan hasil audit dan temuan yang signifikan ke Direksi dan Dewan Komisaris	A	B	C	D	E
5.Melaporkan kecukupan fungsi manajemen risiko, kepatuhan dan fungsi pengendalian lainnya kepada manajemen.	A	B	C	D	E
6.Rencana audit dibahas dengan komite audit dan disampaikan kepada Direksi untuk mendapatkan persetujuan.	A	B	C	D	E

G. Auditor Eksternal

1.Auditor Eksternal (kantor akuntan publik) melakukan pemeriksaan secara independen terhadap kebenaran laporan yang disajikan oleh Direksi	Tidak	Ya
2.Kantor akuntan publik (KAP) yang ditunjuk terdaftar di otoritas Pengawas	Tidak	Ya
3.Penunjukan KAP diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris dan selanjutnya dimintakan persetujuan RUPS.	Tidak	Ya
4.Auditor Eksternal bebas dari pengaruh Komisaris	Tidak	Ya
5.Auditor Eksternal bebas dari pengaruh Direksi	Tidak	Ya
6.Auditor Eksternal bebas dari pengaruh pihak yang berkepentingan lainnya di Perusahaan.	Tidak	Ya
7.Auditor Eksternal memiliki akses atas semua catatan akuntansi	Tidak	Ya
8.Auditor Eksternal memiliki akses atas semua data penunjang yang diperlukan	Tidak	Ya
9.Auditor Eksternal tidak memberikan jasa lain selain jasa audit.	Tidak	Ya
10.Penunjukan KAP diusulkan oleh komite audit kepada Dewan Komisaris dan selanjutnya dimintakan persetujuan RUPS	Tidak	Ya

H.Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System)

1.Perusahaan mempunyai mekanisme Sistem Pelaporan Pelanggaran yang mencatat setiap pelanggaran yang membahayakan kepentingan perusahaan	A	B	C	D	E
2.Penanggung jawab sistem pelaporan pelanggaran menyampaikan laporan pelanggaran kepada Perusahaan	A	B	C	D	E
3.Mekanisme Sistem Pelaporan Pelanggaran dapat melindungi Pelapor	A	B	C	D	E
4.Penanggung jawab Sistem Pelaporan Pelanggaran segera menindaklanjuti setiap laporan yang disampaikan oleh Pelapor	A	B	C	D	E

	Tidak langsung ke VI					Ya
I.Aktuaris Perusahaan						
1.Perusahaan memiliki aktuaris perusahaan yang bertindak independen						
2.Aktuaris wajib memberikan saran secara profesional kepada Direksi terkait :						
2.1. Pendapat tentang ketetapan teknis yang terkait kerangka evaluasi yang disiapkan perusahaan	A	B	C	D	E	
2.2. Identifikasi dan estimasi risiko utama dan manajemen risiko yang tepat	A	B	C	D	E	
2.3. Menilai manajemen risiko	A	B	C	D	E	
2.4. Testing kondisi keuangan	A	B	C	D	E	
2.5. Strategi investasi dan manajemen kekayaan-kewajiban	A	B	C	D	E	
2.6. Menilai kecukupan modal dari segi peraturan dan ekonomis	A	B	C	D	E	
2.7. Kecukupan premi dan nilai tunai	A	B	C	D	E	
2.8. Management participating fund, termasuk analisa pengaruh utama sebagai akibat strategi dan kebijakan	A	B	C	D	E	
2.9. Desain produk , mengurangi risiko dan kewajiban manajemen risiko lainnya	A	B	C	D	E	
3.Aktuaris mempunyai akses ke Direksi dan Rapat Direksi yang relevan maupun unit operasional	A	B	C	D	E	
4.Aktuaris diberikan wewenang untuk berkomunikasi dengan staf di divisi yang hasil pekerjaannya berkaitan dengan fungsi aktuaris yang ditunjuuk.	A	B	C	D	E	
5.Aktuaris memberikan rekomendasi tentang tarif premi dengan jaminan bahwa penetapan tarif premi tersebut telah sesuai dengan struktur internal.	A	B	C	D	E	
6.Aktuaris memberikan rekomendasi jumlah dividen bagi pemegang polis untuk dibagikan kepada participating policyholders, dengan memperhatikan faktor kewajaran dan keadilan diantara berbagai kelompok pemegang polis.	A	B	C	D	E	
7.Aktuaris dapat memberikan pendapat mengenai cara investasi yang harus dilakukan perusahaan	A	B	C	D	E	
8.Perusahaan tidak memberikan tugas lain kepada aktuaris yang dapat menimbulkan benturan kepentingan	Tidak					Ya
VI.PERNYATAAN PENERAPAN PEDOMAN GCG						
1.Pernyataan tentang Penerapan GCG dinyatakan dalam Laporan Tahunan Perusahaan yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan.	Tidak Ada					Ya
2.Laporan tahunan tersebut harus memuat informasi tentang struktur dan mekanisme kerja organ perusahaan meliputi:						
2.1 Nama anggota Dewan Komisaris	Tidak					Ya
2.2 Jumlah Rapat yang dilakukan Dewan Komisaris dan daftar hadir	Tidak					Ya
2.3 Mekanisme dan kriteria penilaian sendiri (self assessment) tentang kinerja masing-masing Komisaris	Tidak					Ya
2.4 Penjelasan mengenai komite penunjang Dewan Komisaris						
2.4.1. Nama	Tidak					Ya
2.4.2. Uraian Fungsi	Tidak					Ya
2.4.3. Mekanisme Kerja	Tidak					Ya
2.4.4. Jumlah Rapat	Tidak					Ya

2.4.5 Daftar hadir	Tidak	Ya
2.4.6. Mekanisme dan kriteria Penilaian Kinerja Komite	Tidak	Ya
2.5. Nama Anggota Direksi dengan jabatan dan fungsinya masing-masing	Tidak	Ya
2.6. Penjelasan singkat mengenai mekanisme kerja Direksi	Tidak	Ya
2.7. Jumlah rapat yang dilakukan Direksi dan Daftar hadir	Tidak	Ya
2.8. Pernyataan mengenai efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal, termasuk sistem pengendalian risiko dan sistem pengawasan dan audit internal.	Tidak	Ya
2.9. Informasi lainnya yang berkaitan dengan penerapan GCG, meliputi:		
2.9.1. Visi, Misi dan Nilai perusahaan	Tidak	Ya
2.9.2. Pemegang Saham pengendali	Tidak	Ya
2.9.3. Kebijakan dan Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi	Tidak	Ya
2.9.4. Transaksi dengan pihak yang memiliki benturan kepentingan	Tidak	Ya
2.9.5. Hasil penilaian penerapan GCG yang dilaporkan dalam RUPS Tahunan	Tidak	Ya
2.9.6. Kejadian luar biasa yang dialami perusahaan dan berpengaruh pada kinerja Perusahaan	Tidak	Ya

3. Rencana Tindak (Action Plan)

No.	Tindakan korektif	Target Penyelesaian	Kendala Penyelesaian	Keterangan
1.				
2				
dst				

4. Penerapan Strategi Anti Fraud

Nama Perusahaan).....

LAPORAN PENGENDALIAN FRAUD DAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD SEMESTER I/II*) - TAHUN

a. Inventarisasi Kejadian Fraud dan Tindak Lanjut

Jenis Fraud a)	Tanggal terjadinya Fraud	Divisi/Bagian Terjadinya Fraud	Pihak yang terlibat b)	Jabatan	Kerugian dalam rupiah c)	Tindakan Perusahaan d)	Kelemahan/Penyebab Terjadinya Fraud e)	Tindak Lanjut/Perbaikan f)	Kronologis kejadian Fraud

b. Perkembangan Pelaksanaan Penerapan Strategi Anti Fraud g)

1) Pencegahan :

.....

.....

.....

.....

2) Deteksi :

.....

.....

.....

.....

3) Investigasi, Pelaporan dan Sanksi :

.....

.....

.....

.....

4) Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut :

.....

.....

.....

.....

Disusun oleh, Mengetahui,

(Tanda Tangan)

(Tanda Tangan)

(Nama)

(Nama)

(Direktur Utama)

*) dicoret salah satu

PENJELASAN UNTUK PENGISIAN LAPORAN :

- a) Jenis *Fraud* antara lain, kecurangan, penipuan, penggelapan aset, pembocoran informasi, tindak pidana perusahaan, atau lainnya.
- b) Pihak yang terlibat meliputi seluruh pihak yang diindikasikan terlibat/ikut serta dalam *Fraud*. Jika pihak yang terlibat lebih dari 1 (satu) orang, dijelaskan peran masing-masing pihak.
- c) Kerugian diisi dengan kerugian yang telah terjadi ataupun perkiraan kerugian.
- d) Tindakan Perusahaan merupakan respon Perusahaan atas kejadian *Fraud* baik berupa tindakan kepada pelaku, pihak yang dirugikan ataupun tindakan lainnya. Tindakan kepada pelaku *Fraud* antara lain berupa sanksi administratif kepegawaian dan/atau kewajiban ganti rugi. Tindakan kepada pihak yang dirugikan antara lain berupa penggantian kerugian dan/atau upaya pemulihan nama baik. Tindakan lain misalnya laporan kepada pihak yang berwenang dan/atau upaya hukum yang dilakukan.
- e) Kelemahan/penyebab terjadinya *Fraud* merupakan identifikasi kelemahan pada Perusahaan yang menimbulkan *Fraud*, dapat berupa kelemahan kebijakan, sistem dan prosedur, atau sumber daya manusia, maupun penyebab lainnya yang tidak berasal dari Perusahaan.
- f) Tindak lanjut/perbaikan merupakan upaya yang telah atau akan dilakukan Perusahaan terkait kelemahan yang menimbulkan *Fraud*.
- g) Menjelaskan secara singkat mengenai proses pencegahan, deteksi, investigasi pelaporan sanksi dan pemantauan, evaluasi dan langkah-langkah tindak lanjut penerapan strategi anti *Fraud* pada periode laporan.

5. LAPORAN HASIL PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Pernyataan Dewan Pengawas Syariah

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Kami telah melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi/usaha reasuransi dengan prinsip syariah yang diselenggarakan oleh PT./Unit Syariah PT. ("perusahaan") selama periode tanggal sampai dengan tanggal

....., sebagaimana diamanatkan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah. Dalam rangka melakukan pengawasan tersebut, kami melaksanakan penilaian atas operasional perusahaan dimaksud yang mencakup aspek pengelolaan kekayaan dan kewajiban, aspek produk-produk yang dipasarkan, dan aspek praktik kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan dimaksud, dan kegiatan operasional lainnya.

Dari hasil pengawasan, diketahui bahwa Perusahaan telah melakukan praktik operasional yang melanggar prinsip-prinsip syariah Islam. Dengan demikian, berdasarkan hasil penilaian atas aspek-aspek pada paragraf 1 di atas, menurut kami, pelaksanaan hal-hal tersebut oleh Perusahaan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Ringkasan praktik operasional perusahaan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, periode terjadi dan faktor penyebabnya adalah sebagai berikut:

- 1.....
 - 2.....
 - 3.dst
-(Nama Kota),..... (Tanggal-Bulan-Tahun)

Dewan Pengawas Syariah :

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1			
2			
dst			

*) Pilih salah satu pernyataan yang sesuai

Kami telah melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi/usaha reasuransi dengan prinsip syariah yang dilakukan oleh PT/Unit Syariah PT. (“Perusahaan”) selama periode tanggal sampai dengan tanggal, sebagaimana diamanatkan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah. Dalam rangka melakukan pengawasan tersebut, kami melaksanakan penilaian atas operasional Perusahaan dimaksud yang meliputi aspek pengelolaan kekayaan dan kewajiban, aspek produk-produk yang dipasarkan, aspek praktik kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh Perusahaan dimaksud, dan kegiatan operasional lainnya.

Perusahaan tidak memberikan akses kepada kami untuk memperoleh dokumen dan informasi yang kami perlukan untuk melakukan penilaian atas aspek- aspek pada paragraf 1 di atas, sehingga kami tidak memberikan pendapat mengenai penerapan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi / usaha reasuransi dengan prinsip syariah dalam operasional Perusahaan.

.....(Nama Kota),.....(Tanggal-Bulan-Tahun)

Dewan Pengawas Syariah:

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan

*) Pilih salah satu pernyataan yang sesuai

**Pengisian kuesioner hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah.
Pengisian dilakukan dengan cara memberikan pilihan jawab atas
pertanyaan/pernyataan dalam kuesioner dimaksud.**

A. Pengelolaan Kekayaan dan Kewajiban

<u>Pokok Materi 1:</u> Sistem dan prosedur pengelolaan kekayaan dan kewajiban.	<u>Status Kesesuaian:</u> Tidak Ya
---	---------------------------------------

<u>Pokok Materi 2:</u> Pemisahan pencatatan kekayaan dan kewajiban secara jelas dan tegas antara Dana <i>Tabarru'</i> , Dana Perusahaan, dan Dana Investasi Peserta, termasuk pengadministrasian bukti kepemilikan kekayaannya dan kewajibannya yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan dalam polis.	<u>Status Kesesuaian:</u> Tidak Ya
--	---------------------------------------

<u>Pokok Materi 3:</u> Pembatasan penggunaan Dana <i>Tabarru'</i> sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) PMK No. 18/PMK.010/2010.	<u>Status Kesesuaian:</u> Tidak Ya
---	---------------------------------------

<u>Pokok Materi 4:</u> Pembentukan Dana <i>Tabarru'</i> dibuat terpisah: - per lini usaha atau gabungan lini usaha dan	<u>Status Kesesuaian:</u> Tidak Ya
--	---------------------------------------

<u>Pokok Materi 5:</u> Pembentukan Dana Investasi Peserta untuk setiap jenis portofolio investasi sesuai dengan akadnya.	<u>Status Kesesuaian:</u> Tidak Ya
---	---------------------------------------

<u>Pokok Materi 6:</u> Pencatatan dan pengadministrasian akun peserta secara individual sebagai bagian dari kekayaan dan kewajiban Dana Investasi Peserta.	<u>Status Kesesuaian:</u> Tidak Ya
---	---------------------------------------

<u>Pokok Materi 7:</u> Pemberian dan pengembalian <i>Qardh</i> ke/dari Dana <i>Tabarru'</i> .	<u>Status Kesesuaian:</u> Tidak Ya
--	---------------------------------------

<u>Pokok Materi 8:</u> Pengelolaan kekayaan Dana Tabarru', Dana Perusahaan dan Dana Investasi Peserta dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip syariah, misalnya kekayaan tersebut hanya ditempatkan pada bentuk instrumen investasi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.	<u>Status Kesesuaian:</u> Tidak Ya
---	---------------------------------------

<u>Pokok Materi 9:</u> Penghitungan dan pembagian <i>surplus underwriting</i> sesuai dengan polis. Dalam hal peserta memberikan amanah untuk membayarkan bagian <i>surplus underwriting</i> yang menjadi hak peserta sebagai shadaqah, pembayaran shadaqah dimaksud dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.	<u>Status Kesesuaian:</u> Tidak Ya
---	---------------------------------------

<u>Pokok Materi 10:</u> Dalam hal peserta memberikan amanah untuk membayarkan zakat atas dana investasi peserta, penghitungan, pemungutan dan pembayaran zakat dimaksud dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.	<u>Status Kesesuaian:</u> Tidak Ya
---	---------------------------------------

B. Produk-produk Yang Dipasarkan

<u>Pokok Materi 1:</u> Sistem dan prosedur perancangan, penerbitan, pelaksanaan dan pemantauan produk-produk yang dipasarkan.	<u>Status Kesesuaian:</u> Tidak Ya
--	---------------------------------------

<u>Pokok Materi 2:</u> Penyusunan dan pelaksanaan isi polis dan surat permohonan permintaan asuransi (SPPA)/surat permohonan kepesertaan yang meliputi: a. Penggunaan akad <i>tabarru'</i> dan akad <i>tijarah</i> . b. Substansi minimum yang harus termuat dalam setiap akad. c. Metode pengalokasian dan pembagian <i>surplus underwriting</i> yang adil dan wajar bagi semua peserta. d. Pemberian <i>qard</i> oleh Perusahaan dan pembayaran kembali <i>qard</i> kepada Perusahaan.	<u>Status Kesesuaian:</u> Tidak Ya
---	---------------------------------------

<u>Pokok Materi 3:</u> Penetapan dan pembebanan besar <i>ujrah</i> /imbalan dalam pengelolaan risiko dengan penggunaan akad <i>wakalah bil ujah</i> yang tertuang di polis dan surat permohonan permintaan asuransi (SPPA)/surat permohonan kepesertaan dilakukan secara wajar dan memenuhi prinsip-prinsip dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 POJK nomor 69/POJK.05/2016.	<u>Status Kesesuaian:</u> Tidak Ya
--	---------------------------------------

<u>Pokok Materi 4:</u> Penetapan dan pembebanan besar <i>ujrah</i> /imbalan dalam pengelolaan investasi dengan penggunaan akad <i>wakalah bil ujah</i> dan atau besar <i>nisbah</i> /bagi hasil dalam akad <i>mudharabah</i> dan akad <i>mudharabah musytarakah</i> yang tertuang di polis dan surat permohonan permintaan asuransi (SPPA)/surat permohonan kepesertaan dilakukan secara wajar dan memenuhi prinsip-prinsip dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 POJK nomor 69/POJK.05/2016.	<u>Status Kesesuaian:</u> Tidak Ya
--	---------------------------------------

<u>Pokok Materi 5:</u> Pemungutan atau pembebanan biaya kepada Peserta sesuai dengan yang tercantum di dalam polis.	<u>Status Kesesuaian:</u> Tidak Ya
--	---------------------------------------

<u>Pokok Materi 6:</u> Pelaksanaan prosedur <i>underwriting</i> untuk setiap produk dilakukan secara adil, wajar dan tidak diterapkan secara diskriminatif.	<u>Status Kesesuaian:</u> Tidak Ya
--	---------------------------------------

<u>Pokok Materi 7:</u> Dalam hal pengelolaan investasi Dana <i>Tabarru'</i> menggunakan akad <i>wakalah bil ujah</i> , Perusahaan tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi.	<u>Status Kesesuaian:</u> Tidak Ya
---	---------------------------------------

C. Praktik Pemasaran Yang Dilakukan Oleh Perusahaan

<u>Pokok Materi 1:</u> Perusahaan, dalam hal ini para tenaga pemasar atau agen asuransi, telah memperoleh pelatihan mengenai produk yang dipasarkan serta telah memberikan penjelasan dengan benar, akurat dan lengkap kepada calon peserta, antara lain: a. Akad-akad yang disepakati. b. Kedudukan, hak dan kewajiban masing-masing pihak.	<u>Status Kesesuaian:</u> Tidak Ya
<u>Pokok Materi 2:</u> Setiap penerbitan polis harus dilengkapi dengan surat permohonan permintaan asuransi (SPPA)/surat permohonan kepesertaan yang diisi benar dan lengkap, ditandatangani peserta dan Perusahaan sebagai bentuk persetujuan (<i>ijab qabul</i>) atas akad-akad di dalam polis.	<u>Status Kesesuaian:</u> Tidak Ya
<u>Pokok Materi 3:</u> Perjanjian Perusahaan dengan rekan bisnis, antara lain agen asuransi, pialang asuransi/reasuransi, penilai kerugian, reasuradur, dan pihak lainnya, dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.	<u>Status Kesesuaian:</u> Tidak Ya
<u>Pokok Materi 4:</u> Praktik pemasaran produk dan pelayanan peserta tidak bertentangan dengan prinsip syariah, misalnya tidak memberikan <i>riswah</i> /suap dalam rangka pemasaran produk dan pelayanan Peserta.	<u>Status Kesesuaian:</u> Tidak Ya
<u>Pokok Materi 5:</u> Pemberian komisi pemasaran dilakukan secara wajar, adil dan proporsional, termasuk tetapi tidak terbatas pada kegiatan perolehan bisnis/penutupan polis.	<u>Status Kesesuaian:</u> Tidak Ya

II. Laporan Penerapan Manajemen Risiko Perusahaan Asuransi Syariah /Perusahaan Reasuransi Syariah

1. Ikhtisar Penerapan Manajemen Risiko Secara Umum

a. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

(Diisi dengan uraian peran Direksi dan Dewan Komisaris dalam Manajemen Risiko dan struktur organisasi Manajemen Risiko)

b. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Risiko

(Diisi dengan uraian risk appetite, risk tolerance, dan penetapan limit Risiko)

c. Kecukupan Proses Indentifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko

(Diisi dengan uraian Proses Indentifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko)

d. Sistem Informasi Manajemen Risiko

(Diisi dengan uraian bagaimana sistem informasi perusahaan mendukung penerapan Manajemen Risiko)

e. Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh

(Diisi dengan uraian bagaimana pengendalian internal termasuk fungsi kepatuhan dilakukan perusahaan)

2. Penerapan Manajemen Risiko Untuk Setiap Jenis Risiko

a. Risiko Strategi

Cakupan Penerapan Manajemen Risiko	Uraian
Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris	<i>(Diisi dengan uraian pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris atas Risiko Strategi)</i>
Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Risiko	<i>(Diisi dengan uraian risk appetite, risk tolerance, dan penetapan limit atas Risiko Strategi)</i>
Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan	<i>(Diisi dengan uraian proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian atas Risiko Strategi)</i>

Cakupan Penerapan Manajemen Risiko	Uraian
Sistem Informasi Manajemen Risiko	<i>(Diisi dengan uraian bagaimana sistem informasi perusahaan mendukung penerapan Manajemen Risiko atas Risiko Strategi)</i>
Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh	<i>(Diisi dengan uraian bagaimana pengendalian internal termasuk fungsi kepatuhan dilakukan perusahaan untuk Risiko Strategi)</i>

b. Risiko Operasional

Cakupan Penerapan Manajemen Risiko	Uraian
Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris	<i>(Diisi dengan uraian pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris atas Risiko Operasional)</i>
Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Risiko	<i>(Diisi dengan uraian risk appetite, risk tolerance, dan penetapan limit atas Risiko Operasional)</i>
Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan	<i>(Diisi dengan uraian proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian atas Risiko Operasional)</i>
Sistem Informasi Manajemen Risiko	<i>(Diisi dengan uraian bagaimana sistem informasi perusahaan mendukung penerapan Manajemen Risiko atas Risiko Operasional)</i>
Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh	<i>(Diisi dengan uraian bagaimana pengendalian internal termasuk fungsi kepatuhan dilakukan perusahaan untuk Risiko Operasional)</i>

c. Risiko Aset dan Liabilitas

Cakupan Penerapan Manajemen Risiko	Uraian
Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris	<i>(Diisi dengan uraian pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris atas Risiko Aset dan Liabilitas)</i>
Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Risiko	<i>(Diisi dengan uraian risk appetite, risk tolerance, dan penetapan limit atas Risiko Aset dan Liabilitas)</i>
Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan	<i>(Diisi dengan uraian proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian atas Risiko Aset dan Liabilitas)</i>
Sistem Informasi Manajemen Risiko	<i>(Diisi dengan uraian bagaimana sistem informasi perusahaan mendukung penerapan Manajemen Risiko atas Risiko Aset dan Liabilitas)</i>

Cakupan Penerapan Manajemen Risiko	Uraian
Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh	<i>(Diisi dengan uraian bagaimana pengendalian internal termasuk fungsi kepatuhan dilakukan perusahaan untuk Risiko Aset dan Liabilitas)</i>

d. Risiko Kepengurusan

Cakupan Penerapan Manajemen Risiko	Uraian
Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris	<i>(Diisi dengan uraian pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris atas Risiko Kepengurusan)</i>
Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Risiko	<i>(Diisi dengan uraian risk appetite, risk tolerance, dan penetapan limit atas Risiko Kepengurusan)</i>
Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan	<i>(Diisi dengan uraian proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian atas Risiko Kepengurusan)</i>
Sistem Informasi Manajemen Risiko	<i>(Diisi dengan uraian bagaimana sistem informasi perusahaan mendukung penerapan Manajemen Risiko atas Risiko Kepengurusan)</i>
Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh	<i>(Diisi dengan uraian bagaimana pengendalian internal termasuk fungsi kepatuhan dilakukan perusahaan untuk Risiko Kepengurusan)</i>

e. Risiko Tata Kelola

Cakupan Penerapan Manajemen Risiko	Uraian
Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris	<i>(Diisi dengan uraian pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris atas Risiko Tata Kelola)</i>
Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Risiko	<i>(Diisi dengan uraian risk appetite, risk tolerance, dan penetapan limit atas Risiko Tata Kelola)</i>
Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan	<i>(Diisi dengan uraian proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian atas Risiko Tata Kelola)</i>
Sistem Informasi Manajemen Risiko	<i>(Diisi dengan uraian bagaimana sistem informasi perusahaan mendukung penerapan Manajemen Risiko atas Risiko Tata Kelola)</i>
Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh	<i>(Diisi dengan uraian bagaimana pengendalian internal termasuk fungsi kepatuhan dilakukan perusahaan untuk Risiko Tata Kelola)</i>

f. Risiko Dukungan Dana (Permodalan)

Cakupan Penerapan Manajemen Risiko	Uraian
Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris	<i>(Diisi dengan uraian pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris atas Risiko Dukungan Dana)</i>
Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Risiko	<i>(Diisi dengan uraian risk appetite, risk tolerance, dan penetapan limit atas Risiko Dukungan Dana)</i>
Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko	<i>(Diisi dengan uraian proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian atas Risiko Dukungan Dana)</i>
Sistem Informasi Manajemen Risiko	<i>(Diisi dengan uraian bagaimana sistem informasi perusahaan mendukung penerapan Manajemen Risiko atas Risiko Dukungan Dana)</i>
Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh	<i>(Diisi dengan uraian bagaimana pengendalian internal termasuk fungsi kepatuhan dilakukan perusahaan untuk Risiko Dukungan Dana)</i>

g. Risiko Asuransi

Cakupan Penerapan Manajemen Risiko	Uraian
Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris	<i>(Diisi dengan uraian pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris atas Risiko Asuransi)</i>
Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Risiko	<i>(Diisi dengan uraian risk appetite, risk tolerance, dan penetapan limit atas Risiko Asuransi)</i>
Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko	<i>(Diisi dengan uraian proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian atas Risiko Asuransi)</i>
Sistem Informasi Manajemen Risiko	<i>(Diisi dengan uraian bagaimana sistem informasi perusahaan mendukung penerapan Manajemen Risiko atas Risiko Asuransi)</i>
Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh	<i>(Diisi dengan uraian bagaimana pengendalian internal termasuk fungsi kepatuhan dilakukan perusahaan untuk Risiko Asuransi)</i>

III. Laporan Realisasi Rencana Bisnis

1. Laporan Realisasi Keuangan Untuk Perusahaan Asuransi Umum Syariah/Perusahaan Reasuransi Syariah

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Rencana Bisnis	Realisasi	Deviasi	
			Rupiah	%
ASET				
Investasi				
Surat berharga yang dimiliki				
Deposito dan Sertifikat Deposito				
Saham Syariah				
Sukuk atau Obligasi Syariah				
MTN Syariah				
Surat Berharga Syariah Negara				
Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia				
Surat Berharga Syariah Yang Diterbitkan oleh selain negara Republik Indonesia				
Surat Berharga Syariah Yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional				
Reksa Dana Syariah				
Efek Beragun Aset Syariah				
Dana Investasi Real Estate Syariah				
REPO				
Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain				
Penyertaan Langsung(rincian)				
Properti Investasi (rincian)				
Emas Murni				
Investasi Lain				
Jumlah Investasi				
Bukan Investasi				
Kas dan Bank				

URAIAN	Rencana Bisnis	Realisasi	Deviasi	
			Rupiah	%
Tagihan (rincian)				
Aset reasuransi				
Biaya akuisisi yang ditanggihkan				
Property Non Investasi (rincian)				
Aset Lain				
Jumlah Bukan investasi				
JUMLAH ASET				
LIABILITAS DAN				
EKUITAS				
Liabilitas				
Utang				
Utang klaim				
Utang lain (rincian)				
Biaya yang Masih Harus Dibayar				
Penyisihan Teknis				
Penyisihan ujroh				
Penyisihan penjaminan pokok investasi				
Penyisihan kontribusi				
Penyisihan kontribusi yang blum merupakan pendapatan				
Penyisihan klaim				
Penyisihan atas risiko bencana				
Qardh/ Qardh Subordinasi				
Ekuitas Dana				
Modal Disetor				
Agio Saham				
Penyisihan				
Akumulasi Dana				
Kenaikan (Penurunan) Surat Berharga				
Selisih Saldo SAK dan Saldo SAP				
Saldo Laba				
Kekayaan Yang Tidak				

URAIAN	Rencana Bisnis	Realisasi	Deviasi	
			Rupiah	%
Diperkenankan				

2. Laporan Realisasi Keuangan Untuk Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Rencana Bisnis	Realisasi	Deviasi
ASET			
Investasi			
Surat berharga yang dimiliki			
Deposito dan Sertifikat Deposito			
Saham Syariah			
Sukuk atau Obligasi Syariah			
MTN Syariah			
Surat Berharga Syariah Negara			
Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia			
Surat Berharga Syariah Yang Diterbitkan oleh selain negara Republik Indonesia			
Surat Berharga Syariah Yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional			
Reksa Dana Syariah			
Efek Beragun Aset Syariah			
Dana Investasi Real Estate Syariah			
REPO			
Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain			
Penyertaan Langsung(rincian)			
Properti Investasi (rincian)			
Emas Murni			
Investasi Lain			
Jumlah Investasi			
Bukan Investasi			
Kas dan Bank			
Tagihan (rincian)			
Aset reasuransi			
Biaya akuisisi yang ditangguhkan			
Property Non Investasi (rincian)			
Aset Lain			
Jumlah Bukan investasi			

URAIAN	Rencana Bisnis	Realisasi	Deviasi
JUMLAH ASET			
LIABILITAS DAN			
EKUITAS			
Liabilitas			
Utang			
Utang klaim			
Utang lain (rincian)			
Biaya yang Masih Harus Dibayar			
Penyisihan Teknis			
Penyisihan ujroh			
Penyisihan penjaminan pokok investasi			
Penyisihan kontribusi			
Penyisihan kontribusi yang blum merupakan pendapatan			
Penyisihan klaim			
Penyisihan atas risiko bencana			
Qardh/ Qardh Subordinasi			
Ekuitas Dana			
Modal Disetor			
Agio Saham			
Penyisihan			
Akumulasi Dana			
Kenaikan (Penurunan) Surat Berharga			
Selisih Saldo SAK dan Saldo SAP			
Saldo Laba			
Kekayaan Yang Tidak Diperkenankan			
ASET			
Investasi			
Surat berharga yang dimiliki			
Deposito dan Sertifikat Deposito			

3. Realisasi Laba/Rugi Komprehensif Untuk Perusahaan Asuransi Umum Syariah/Perusahaan Reasuransi Syariah

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Rencana	Realisasi	Deviasi
PENDAPATAN <i>UNDERWRITING</i>			
<u>Premi Bruto</u>			
a. Premi Penutupan Langsung			
b.Premi Penutupan Tidak Langsung			

URAIAN	Rencana	Realisasi	Deviasi
c. Komisi Dibayar			
Jumlah Premi Bruto			
<u>Premi Reasuransi</u>			
a. Premi Reasuransi Dibayar			
b. Komisi Reasuransi Diterima			
Jumlah Premi Reasuransi			
Premi Neto			
<u>Penurunan (Kenaikan) Cadangan Premi dan CAPYBMP</u>			
a. Penurunan (kenaikan) Cadangan Premi			
b. Penurunan (kenaikan) CAPYBMP			
<u>Penurunan (Kenaikan) Cadangan Premi dan CAPYBMP</u>			
Jumlah Pendapatan Premi Neto			
Pendapatan <i>Underwriting</i> Lain Neto			
PENDAPATAN U N D E R W R I T I N G			
<u>BEBAN UNDERWRITING</u>			
<u>Beban Klaim</u>			
a. Klaim Bruto			
b. Klaim Reasuransi			
c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim			
Jumlah Beban Klaim Netto			
Beban <i>Underwriting</i> Lain Neto			
JUMLAH BEBAN U N D E R W R I T I N G			
HASIL <i>UNDERWRITING</i>			
Hasil Investasi			
Beban Usaha:			
a. Beban Pemasaran			
b. Beban Umum dan Administrasi:			
- Beban Pegawai dan Pengurus			
Beban Pendidikan dan Pelatihan			
-Beban Umum dan AdministrasiLainnya			
Jumlah Beban Usaha			
LABA (RUGI) USAHA ASURANSI			
Hasil (Beban) Lain			
LABA (RUGI)SEBELUM PAJAK			
Pajak Penghasilan			
LABA SETELAH PAJAK			
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN			
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF			

4. Realisasi Laba/Rugi Komprehensif Untuk Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Rencana	Realisasi	Deviasi
PENDAPATAN			
Pendapatan Kontribusi Bruto			
a. Alokasi Kontribusi Langsung untuk Tabarru, Ujroh, dan Investasi			
b. Alokasi Kontribusi Tidak Langsung untuk Tabarru, Ujroh, dan Investasi			
Kontribusi Reasuransi			
a. Kontribusi Reasuransi dibayar			
b. Kontribusi Reasuransi diterima			
Penurunan (Kenaikan) Kontribusi Yang Belum Merupakan Pendapatan			
Pendapatan Kontribusi			
Jumlah Pendapatan Kontribusi Neto			
Hasil Investasi			
Pendapatan Lain			
JUMLAH PENDAPATAN			
BEBAN			
Klaim dan Manfaat			
Klaim dan Manfaat Dibayar			
Klaim Reasuransi			
Kenaikan (Penurunan) Penyisihan ujroh			
Kenaikan (Penurunan) Penyisihan penjaminan pokok investasi			
Kenaikan (Penurunan) Penyisihan kontribusi			
Kenaikan (Penurunan) Penyisihan kontribusi yang blum merupakan pendapatan			
Kenaikan (Penurunan) Penyisihan klaim			
Kenaikan (Penurunan) Penyisihan atas risiko bencana (rincian pending)			
Jumlah Beban Klaim dan Manfaat			
Biaya Akuisisi			
a. Beban Komisi Tahun Pertama			
b. Beban Komisi Tahun Lanjutan			

URAIAN	Rencana	Realisasi	Deviasi
PENDAPATAN			
c. Beban Komisi Overiding			
d. Beban Komisi Lainnya			
Jumlah Biaya Akuisisi			
Pemasaran			
Umum dan Administrasi			
Hasil (Beban) Lain			
JUMLAH BEBAN			
LABA (RUGI) SEBELUM ZAKAT			
PAJAK (TAXES)			
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK			

5. Realisasi Arus kas Perusahaan Asuransi Umum Syariah

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Rencana	Realisasi	Deviasi
SALDO AWAL			
SALDO AKHIR KAS			
ARUS KAS DARI AKTIFITAS OPERASI			
Arus Kas Masuk			
Kontribusi Para Peserta			
Ujroh yang diterima			
Klaim Reasuransi Diterima			
Penerimaan Distribusi Surplus Underwriting Reasuransi			
Lain - Lain			
Arus Kas Keluar			
Klaim Dibayar			
Ujroh			
Beban Pemasaran			
Pembayaran Ujroh Reasuransi			
Pembayaran Ujroh Asuransi			
Kontribusi Reasuransi Dibayar			
Pembayaran Sewa			
Pembayaran Zakat			
Pembayaran Pajak			
Lain-lain			

ARUS KAS DARI AKTIFITAS INVESTASI			
Arus Kas Masuk			
Penerimaan Hasil Investasi			
Penerimaan Alokasi Surplus Dana Tabarru'			
Penerimaan Bagi Hasil Investasi Dana Tabaru'			
Pencairan Investasi			
Penjualan Tanah dan Bangunan			
Penerimaan Kas Dari Para Peserta			
Penjualan Aktiva Tetap			
Lain-lain			
Arus Kas Keluar			
Penempatan Investasi			
Pembayaran Kepada Para Peserta			
Pembayaran Distribusi Surplus UW ke Perusahaan			
Pembayaran Distribusi Surplus UW ke Peserta/Pemegang Polis			
Pembayaran Bagi Hasil Investasi DT ke Perusahaan/Operator			
Pembayaran ujroh/fee kepada Perusahaan			
Pembelian Aktiva Tetap			
Lain-lain			
ARUS KAS DARI AKTIFITAS PENDANAAN			
Arus Kas Masuk			
Setoran Modal/Modal Kerja			
Pinjaman Subordinasi			
Penerimaan Qardh			
Qardh			
Lain-lain			
Arus Kas Keluar			
Pembayaran Pinjaman Subordinasi			
Pembayaran Dividen			
Pembayaran Qardh			
Qardh			
Lain-lain			

6. Realisasi Arus Kas Untuk Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	rencana	Realisasi	Deviasi
SALDO AWAL			
SALDO AKHIR KAS			
ARUS KAS DARI AKTIFITAS OPERASI			
Arus Kas Masuk			
Kontribusi Para Peserta			
Ujroh yang diterima			
Klaim Reasuransi Diterima			
Penerimaan Distribusi Surplus Underwriting Reasuransi			
Lain - Lain			
Arus Kas Keluar			
Klaim Dibayar			
Komisi			
Beban Pemasaran			
Pembayaran Ujroh Reasuransi			
Pembayaran Ujroh Asuransi			
Kontribusi Reasuransi Dibayar			
Pembayaran Sewa			
Pembayaran Zakat			
Pembayaran Pajak			
Lain-lain			
ARUS KAS DARI AKTIFITAS INVESTASI			
Arus Kas Masuk			
Penerimaan Hasil Investasi			
Penerimaan Alokasi Surplus Dana Tabarru'			
Penerimaan Bagi Hasil Investasi Dana Tabaru'			
Pencairan Investasi			
Penjualan Tanah dan Bangunan			
Penerimaan Kas Dari Para Peserta			
Penjualan Aktiva Tetap			
Lain-lain			
Arus Kas Keluar			
Penempatan Investasi			

URAIAN	rencana	Realisasi	Deviasi
Pembayaran Kepada Para Peserta			
Pembayaran Distribusi Surplus UW ke Perusahaan			
Pembayaran Distribusi Surplus UW ke Peserta/Pemegang Polis			
Pembayaran Bagi Hasil Investasi DT ke Perusahaan/Operator			
Pembayaran ujroh/fee kepada Perusahaan			
Pembelian Aktiva Tetap			
Lain-lain			
ARUS KAS DARI AKTIFITAS PENDANAAN			
Arus Kas Masuk			
Setoran Modal/Modal Kerja			
Pinjaman Subordinasi			
Penerimaan Qardh			
Qardh			
Lain-lain			
Arus Kas Keluar			
Pembayaran Pinjaman Subordinasi			
Pembayaran Dividen			
Pembayaran Qardh			
Qardh			
Lain-lain			

7. Realisasi Rasio-Rasio dan Pos-Pos Tertentu Lainnya Untuk Perusahaan Asuransi Umum Syariah/Perusahaan Reasuransi Syariah

(dalam jutaan rupiah)

(rasio dalam persentase)

URAIAN	Aktual	Proyeksi	Deviasi
TINGKAT SOLVABILITAS ASET YANG DIPERKENANKAN			
Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi)			
Jumlah Tingkat Solvabilitas (a)			
Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR)			

URAIAN	Aktual	Proyeksi	Deviasi
Jumlah MMBR (b)			
Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat Solvabilitas			
Rasio Pencapaian Solvabilitas (a:b)			
RASIO TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN SELAIN MMBR			
Rasio Likuiditas			
a. Aset Lancar			
b. Liabilitas Lancar			
c. Rasio (a : b)			
Rasio Kecukupan Investasi			
a. Investasi + Kas & Bank (Lihat Neraca SAP)			
b. Cadangan Teknis Retensi Sendiri			
c. Utang Klaim Retensi Sendiri + Utang Lain Kepada Tertanggung			
d. Rasio (a : (b + c))			
Rasio Perimbangan Hasil Investasi dengan Pendapatan Premi Neto			
a. Hasil Investasi			
b. Pendapatan Premi Neto			
c. Rasio (a : b)			
Rasio Beban Klaim, Beban Usaha, dan Komisi			
a. Beban Klaim Neto			
b. Beban Usaha			
c. Komisi Neto			
d. Pendapatan Premi Neto			
e. Rasio a : d (rasio I)			
f. Rasio b : d (rasio II)			
g. Rasio c : d (rasio III)			
h. Rasio I + Rasio II + Rasio III			
v. Return of Investment (ROI)			
a. Laba (Rugi) Setelah Pajak			
b. Rata-rata Investasi			
c. Rasio a:b			
vi. Return on Equity (ROE)			
a. Laba (Rugi) Setelah Pajak			
b. Ekuitas			
c. Rasio a:b			

8. Realisasi Rasio-Rasio dan Pos-Pos Tertentu Lainnya Untuk Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah

URAIAN	Rencana	Realisasi	Deviasi
TINGKAT SOLVABILITAS ASET YANG DIPERKENANKAN			
Aset Yang Diperkenankan			
Liabilitas (selain Qardh dari Dana Perusahaan)			
Dana Tabarru' dan Dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko (DTMBR)			
Rasio Tingkat Solvabilitas sebelum Aset yang Tersedia untuk Qardh			
Rasio target tingkat solvabilitas internal (tahunan) dengan DTMBR			
Rasio tingkat solvabilitas dengan DTMBR minimum yang dipersyaratkan peraturan			
Kelebihan (kekurangan) tingkat solvabilitas dari target internal			
Ketidakcukupan investasi, kas dan bank			
Aset yang Tersedia Untuk Qardh yang Diperhitungkan sebagai Penambah AYD Dana Tabarru'			
Rasio Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' dan Dana Tanahud			
B. RASIO TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN SELAIN MMBR			
i. Rasio Likuiditas			
a. Aset Lancar			
b. Liabilitas Lancar			
c. Rasio (a : b)			
ii.Rasio Kecukupan Investasi			
a. Investasi + Kas & Bank (Lihat Neraca SAP)			
b. Cadangan Teknis Retensi Sendiri			
c. Utang Klaim Retensi Sendiri + Utang Lain Kepada Tertanggung			
d. Rasio (a : (b + c))			
iii.Rasio Perimbangan Hasil Investasi dengan Pendapatan Premi Neto			

URAIAN	Rencana	Realisasi	Deviasi
a. Hasil Investasi			
b. Pendapatan Premi Neto			
c. Rasio (a : b)			
iv.Rasio Beban Klaim, Beban Usaha, dan Komisi			
a. Beban Klaim Neto			
b. Beban Usaha			
c. Komisi Neto			
d. Pendapatan Premi Neto			
e. Rasio a : d (rasio I)			
f. Rasio b : d (rasio II)			
g. Rasio c : d (rasio III)			
h. Rasio I + Rasio II + Rasio III			
v. Return of Investment (ROI)			
a. Laba (Rugi) Setelah Pajak			
b. Rata-rata Investasi			
c. Rasio a:b			
vi. Return on Equity (ROE)			
a. Laba (Rugi) Setelah Pajak			
b. Ekuitas			
c. Rasio a:b			

9. Realisasi non-keuangan

No	Uraian	Target	Realisasi	Keterangan
1	Permodalan			
2	Hasil Investasi			
3	Reasuransi			
4	Produk baru			
5	SDM			
6	Pendidikan dan pelatihan			
7	Jaringan kantor			
8	Tenaga Kerja Asing			
9	Pelaksanaan Pelatihan APU & PPT			
10	Lainnya			

10. Realisasi Pengembangan Produk dan Pemasaran Produk Asuransi bagi Perusahaan Asuransi atau Realisasi Pengembangan Program Pertanggungan Ulang bagi Perusahaan Reasuransi untuk 1 (Satu) Tahun Ke Depan.

No	Nama Produk Baru	Lini Usaha/Cabang Asuransi	Saluran Pemasaran	Realisasi penerbitan/ pelaksanaan
1				
2				
Dst.				

11. Laporan Realisasi Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan

Periode: Januari s.d. Desember ... (diisi dengan tahun)
... (diisi dengan nama pelaku usaha jasa keuangan)

No.	Komponen	Rencana	Keterangan
1	Nama Kegiatan	... <i>(diisi dengan nama kegiatan yang menggambarkan aktivitas dalam kegiatan)</i>	
2	Tujuan Kegiatan	... <i>(diisi dengan tujuan kegiatan yang akan dicapai oleh PUJK)</i>	
3	Bentuk Pelaksanaan	Edukasi Keuangan ☐ Sosialisasi ☐ Workshop ☐ Konsultasi ☐ Pendampingan ☐ Simulasi ☐ Training of Community ☐ Outreach program ☐ Lainnya: ... (sebutkan) Pengembangan Infrastruktur ☐ Training of trainers ☐ Training of facilitators ☐ Pengembangan e-learning ☐ Pengembangan website ☐ Pengembangan aplikasi mobile ☐ Penyusunan/ pengembangan modul/ materi Edukasi Keuangan	

		☐ Lainnya: ... (sebutkan) (beri tanda pada salah satu pilihan) Kategori ☐ Baru ☐ Lanjutan (beri tanda pada salah satu pilihan)			
4	Metode Pelaksanaan dan Metode serta Sarana Pengukuran	Metode Pelaksanaan Langsung ☐ Tatap muka ☐ Siaran langsung dengan sarana: ... (sebutkan) ☐ Lainnya: ... (sebutkan)	Metode Pengukuran Edukasi Keuangan ☐ Membandingkan hasil sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan (pre dan post test) ☐ Jajak pendapat bagi segmen tertentu mengenai: ☐ manfaat, ☐ kemudahan materi dipahami, ☐ kesesuaian dengan sasaran, ☐ lainnya: ... (sebutkan) ☐ Survei untuk mengetahui tingkat literasi keuangan perseorangan/ kelompok tertentu ☐ Lainnya: ... (sebutkan) (dapat diisi lebih dari satu)	Sarana Pengukuran ☐ Tertulis ☐ Media elektronik ☐ Sistem online ☐ Lainnya: ... (sebutkan)	

			Pengembangan Infrastruktur SDM ☐ Membandingkan hasil sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan (<i>pre dan post test</i>) ☐ Lainnya: ... (sebutkan) Non-SDM ☐ Pengamatan atas penyelesaian pengembangan infrastruktur ☐ Uji kesesuaian pengembangan fungsi infrastruktur bagi target tertentu ☐ Lainnya: ... (sebutkan) <i>(dapat diisi lebih dari satu)</i>		
		Metode Pelaksanaan Tidak langsung, melalui media ☐ Elektronik: ... (sebutkan) ☐ Cetak ☐ Lainnya: ... (sebutkan)	Metode Pengukuran Edukasi Keuangan ☐ Membandingkan hasil sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan (<i>pre dan post test</i>)	Sarana Pengukuran ☐ Tertulis ☐ Media elektronik ☐ Sistem online ☐ Lainnya: ... (sebutkan)	

			☐ Jajak pendapat bagi segmen tertentu mengenai: ☐ manfaat, ☐ kemudahan materi dipahami, ☐ kesesuaian dengan sasaran, ☐lainnya: ... <i>(sebutkan)</i> ☐ Survei untuk mengetahui tingkat literasi keuangan perseorangan/ kelompok tertentu ☐ Lainnya: ... <i>(sebutkan)</i> <i>(dapat diisi lebih dari satu)</i> Pengembangan Infrastruktur SDM ☐ Membandingkan hasil sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan <i>(pre dan post test)</i> ☐ Lainnya: ... <i>(sebutkan)</i> Non-SDM ☐ Pengamatan atas penyelesaian pengembangan infrastruktur		
--	--	--	--	--	--

		☐ Uji kesesuaian pengembangan fungsi infrastruktur bagi target tertentu ☐ Lainnya: ... (sebutkan) (dapat diisi lebih dari satu)		
		Kategori ☐ Baru ☐ Lanjutan (beri tanda pada salah satu pilihan)		
5	Materi	a. Pengelolaan Keuangan, meliputi: ☐Identifikasi kesehatan keuangan pribadi/perusahaan ☐ Tujuan pengelolaan keuangan ☐ Tahapan dalam pengelolaan keuangan ☐ Pencatatan aset/harta yang dimiliki ☐Pencatatan pemasukan dan pengeluaran (budgeting), termasuk perpajakan, identifikasi pendapatan dan pengeluaran rutin/non rutin bulanan/tahunan ☐ Perencanaan program untuk tujuan keuangan di masa depan ☐ Lainnya: ... (sebutkan) b. Jenis industri jasa keuangan dan karakteristik produk dan/atau layanan jasa keuangan Jenis industri jasa keuangan: ☐ Perbankan ☐ Pasar modal ☐ Perasuransian ☐ Dana pensiun ☐ Lembaga pembiayaan		

		☐ Lembaga penjaminan ☐ Pergadaian ☐ Lembaga jasa keuangan lainnya: ... <i>(sebutkan)</i> <i>(dapat diisi lebih dari satu)</i> Karakteristik produk dan/atau layanan jasa keuangan, meliputi: ☐ Manfaat ☐ Biaya ☐ Risiko ☐ Hak konsumen ☐ Kewajiban konsumen ☐ Cara mengakses atau memperoleh ☐ Informasi mekanisme transaksi ☐ Mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa ☐ Lainnya ... (sebutkan) c. Perpajakan ☐ Perpajakan terkait produk dan/atau layanan jasa keuangan Kategori ☐ Baru ☐ Lanjutan <i>(beri tanda pada salah satu pilihan)</i>	
6	Sasaran	☐ Pekerja informal ☐ Petani ☐ Nelayan ☐ Guru ☐ Dosen ☐ Penyuluh ☐ Profesional: ... <i>(sebutkan)</i> ☐ Karyawan ☐ Pedagang ☐ Pelaku UMKM ☐ Perempuan ☐ Pelajar	

		☐ Mahasiswa ☐ Pemuda ☐ Pensiunan ☐ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ☐ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) ☐ Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (KTKI) ☐ Disabilitas ☐ Kelompok masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS): ... <i>(sebutkan)</i> ☐ Masyarakat daerah tertinggal, terpencil, dan terluar ☐ Komunitas: ... <i>(sebutkan)</i> ☐ Masyarakat umum ☐ Lainnya: ... <i>(sebutkan)</i> <i>(beri tanda pada salah satu pilihan)</i> Kategori ☐ Baru ☐ Lanjutan (untuk peserta perorangan/kelompok masyarakat yang sama; tidak berlaku untuk Sasaran Masyarakat Umum) <i>(beri tanda pada salah satu pilihan)</i>	
7	Jumlah Peserta	... orang <i>(diisi dengan jumlah peserta)</i>	
8	Jadwal Pelaksanaan :	Dimulai ... selesai ... <i>(diisi dengan rencana tanggal dan/atau bulan pelaksanaan)</i>	
9	Wilayah Pelaksanaan	Provinsi ☐ Aceh ☐ Bali ☐ Banten ☐ Bengkulu ☐ Gorontalo ☐ DKI Jakarta ☐ Jambi ☐ Jawa Barat ☐ Jawa Tengah ☐ Jawa Timur ☐ Kalimantan Barat	

		☐ Kalimantan Selatan ☐ Kalimantan Tengah ☐ Kalimantan Timur ☐ Kalimantan Utara ☐ Kepulauan Bangka Belitung ☐ Kepulauan Riau ☐ Lampung ☐ Maluku ☐ Maluku Utara ☐ Nusa Tenggara Barat ☐ Nusa Tenggara Timur ☐ Papua ☐ Papua Barat ☐ Riau ☐ Sulawesi Barat ☐ Sulawesi Selatan ☐ Sulawesi Tengah ☐ Sulawesi Tenggara ☐ Sulawesi Utara ☐ Sumatera Barat ☐ Sumatera Selatan ☐ Sumatera Utara ☐ DI Yogyakarta ☐ Seluruh Indonesia (diisi apabila dilaksanakan di dalam negeri dan dapat diisi lebih dari satu) Kabupaten/Kota ... (diisi apabila ada) Wilayah Lainnya ... (diisi apabila ada) Kategori ☐ Baru ☐ Lanjutan (beri tanda pada salah satu pilihan)	
10	Frekuensi Pelaksanaan	... kali	

11	Sumber Biaya	☐ Anggaran edukasi keuangan ☐ Anggaran CSR ☐ Anggaran lainnya: ... <i>(sebutkan)</i> <i>(beri tanda pada salah satu pilihan)</i>	
12	Jumlah Biaya (dalam rupiah)	... <i>(diisi dengan rencana jumlah biaya yang dialokasikan untuk setiap kegiatan)</i>	
13	Parameter Pemantauan :	Edukasi Keuangan ☐ Kesesuaian bentuk kegiatan ☐ Kesesuaian materi ☐ Kesesuaian sasaran peserta ☐ Kesesuaian jumlah peserta ☐ Lainnya: ... <i>(sebutkan)</i> <i>(dapat diisi lebih dari satu)</i> Pengembangan Infrastruktur SDM ☐ Kesesuaian bentuk kegiatan ☐ Kesesuaian materi ☐ Kesesuaian sasaran peserta ☐ Kesesuaian jumlah peserta ☐ Lainnya: ... <i>(sebutkan)</i> Non-SDM ☐ Kesesuaian tahapan pengembangan infrastruktur ☐ Kesesuaian pelaksanaan kerangka acuan kerja pengembangan infrastruktur ☐ Lainnya: ... <i>(sebutkan)</i> <i>(dapat diisi lebih dari satu)</i>	
14	Bentuk Pemantauan	<i>(mengacu pada parameter pemantauan dilengkapi dengan bentuk pemantauan)</i> ☐ Kunjungan langsung ☐ Lainnya: ... <i>(sebutkan)</i> <i>(dapat diisi lebih dari satu)</i>	
15	Parameter Evaluasi	Edukasi Keuangan ☐ Pengetahuan ☐ Keterampilan	

		☐ Kepercayaan ☐ Sikap ☐ Perilaku ☐ Lainnya: ... <i>(sebutkan)</i> <i>(dapat diisi lebih dari satu)</i> Pengembangan Infrastruktur SDM ☐ Kemampuan trainers/fasilitator menyampaikan materi ajar ☐ Lainnya: ... <i>(sebutkan)</i> Non-SDM ☐ Ketersediaan infrastruktur dalam bentuk: ... <i>(sebutkan)</i> ☐ Kesesuaian fungsi infrastruktur dengan tujuan pengembangan infrastruktur ☐ Lainnya: ... <i>(sebutkan)</i> <i>(dapat diisi lebih dari satu)</i>	
16	Bentuk Evaluasi	☐ Memperhatikan data administratif seperti laporan kegiatan, dokumentasi pelaksanaan, dan/atau hasil wawancara peserta dan/atau staf pelaksana kegiatan ☐ Memperhatikan data dan laporan dari periode-periode sebelumnya untuk mengetahui tren dan pola ☐ Melakukan analisis keberhasilan atau ketercapaian melalui perbandingan antara perencanaan dan realisasi kegiatan ☐ Menganalisis informasi mengenai kesesuaian antara kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dengan sasaran yang telah ditentukan ☐ Lainnya: ... <i>(sebutkan)</i> <i>(dapat diisi lebih dari satu)</i>	
17	Hasil Pengukuran	<i>(secara sistem akan mengacu pada metode pengukuran yang digunakan dilengkapi dengan hasil pengukuran)</i>	

		Edukasi Keuangan ☐ Membandingkan hasil sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan (<i>pre dan post test</i>) ☐ Meningkat, ...% ☐ Tetap ☐ Menurun, ...% ☐ Jajak pendapat (<i>sesuai dengan topik jajak pendapat yang dilakukan</i>) ☐ 80% manfaat, ☐ 90% kemudahan materi dipahami, ☐ kesesuaian dengan sasaran, ☐ lainnya: ... (<i>sebutkan</i>) ☐ ...% hasil survei tingkat Literasi Keuangan perorangan/kelompok tertentu (<i>sesuai dengan kelompok yang ditentukan</i>) ☐ ... (<i>diisi dengan hasil pengukuran lainnya</i>) Pengembangan Infrastruktur SDM ☐ Membandingkan hasil sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan (<i>pre dan post test</i>) ☐ Meningkat, ...% ☐ Tetap ☐ Menurun, ...% ☐ Lainnya: ... (<i>sebutkan</i>) Non-SDM ☐ ...% penyelesaian pengembangan infrastruktur ☐ ...% hasil penilaian target tertentu dalam uji kesesuaian hasil pengembangan fungsi infrastruktur ☐ Lainnya: ... (<i>diisi dengan hasil pengukuran lainnya</i>)	
18	Hasil Pemantauan	Hasil Pemantauan <i>(secara sistem akan mengacu pada parameter pemantauan dilengkapi dengan pilihan penyesuaian)</i> ☐ Kesesuaian sasaran peserta ☐ Sesuai rencana, 90% peserta adalah nelayan ☐ Tidak sesuai rencana, ... (<i>deskripsi</i>)	

		☐ Kesesuaian jumlah peserta ☐ Sesuai rencana, jumlah peserta melebihi target ☐ Tidak sesuai rencana, ... <i>(deskripsi)</i>	
19	Hasil Evaluasi	☐ Peserta menilai simulasi yang dilakukan memberi manfaat positif bagi peningkatan kemampuan menghitung bunga KUR. Namun, masih terdapat 20% masyarakat yang menilai bahwa simulasi kurang bermanfaat dan 10% diantaranya menilai bahwa singkatnya simulai mempengaruhi pemahaman mereka. ☐ Terbatasnya waktu menjadi tantangan yang perlu disiasati ke depannya misalnya dengan menambah jumlah petugas yang menjelaskan mengenai simulasi. <i>(deskripsi hasil pengukuran dikaitkan dengan hasil analisis peluang dan tantangan pelaksanaan kegiatan)</i> Hasil Evaluasi <i>(secara sistem akan mengacu pada parameter evaluasi dilengkapi dengan pilihan penyesuaian)</i> ☐ Pengetahuan ☐ Keterampilan ☐ Meningkat, dikarenakan peserta memiliki kebutuhan yang besar terhadap KUR <i>(deskripsi)</i> ☐ Tetap, ... <i>(deskripsi)</i> ☐ Menurun, ... <i>(deskripsi)</i> ☐ Kepercayaan ☐ Sikap ☐ Perilaku ☐ Lainnya: ... <i>(sebutkan)</i> <i>(dapat diisi lebih dari satu)</i>	
20	Keterangan	☐ Peran masing-masing pihak dalam hal PUJK berkolaborasi dengan PUJK lain: 1. ... <i>(nama pihak 1)</i> ... <i>(deskripsi dari peran pihak 1),</i> 2. ... <i>(nama pihak 2)</i> ... <i>(deskripsi dari peran pihak 2), dst.</i>	Terdapat perubahan peran dalam pelaksanaan kolaborasi menyesuaikan

	☐ Bekerja sama dengan pihak lain: 1. ... (nama pihak 1) ... (deskripsi dari peran pihak 1), 2. ... (nama pihak 2) ... (deskripsi dari peran pihak 2), dst. Informasi lainnya: <i>Merupakan informasi tambahan yang dianggap perlu untuk lebih menjelaskan kegiatan Literasi Keuangan yang dilakukan oleh PUJK. ... (deskripsi)</i>	an dengan ketersediaa n sumber daya
--	--	-------------------------------------

Tabel 2
Pemenuhan Prinsip-Prinsip Literasi Keuangan

No	Prinsip	Pemenuhan Prinsip
1	Terencana dan Terukur	Otomatis terisi apabila PUJK mengisi tabel 1 angka 3 – 12 serta 13 – 14 dan/atau 15 – 16
2	Berorientasi pada Pencapaian	Otomatis terisi apabila PUJK mengisi tabel 1 angka 2, 6, 7, dan 11
3	Berkelanjutan	Otomatis terisi apabila PUJK mengisi Kategori “Lanjutan” pada salah satu tabel 1 angka 3, 4, 5, 6, dan 9
4	Kolaborasi	Otomatis terisi apabila PUJK mengisi tabel 1 angka 17 dengan deskripsi kerja sama dengan PUJK dan/atau pihak lain.

12. Laporan Realisasi Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan

Periode: Januari s.d. Desember ... (diisi dengan tahun)
... (diisi dengan nama pelaku usaha jasa keuangan)

No.	Komponen	Rencana	Keterangan
1	Ruang Lingkup Kegiatan	☐ Perluasan Akses ☐ Penyediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan <i>(beri tanda pada salah satu pilihan)</i>	
2	Nama	...	

	Kegiatan	(diisi dengan nama kegiatan yang menggambarkan aktivitas dalam kegiatan)	
3	Bentuk Pelaksanaan	Perluasan Akses ☐ Penambahan jaringan kantor ☐ Penambahan kerja sama dengan pihak lain ☐ Penambahan infrastruktur yang dapat mendukung perluasan akses keuangan masyarakat: ... (sebutkan) ☐ Penambahan saluran distribusi produk dan/atau layanan jasa keuangan: ... (sebutkan) ☐ Sarana bagi kelompok masyarakat berkebutuhan khusus: ... (sebutkan) ☐ Lainnya: ... (sebutkan) Penyediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan ☐ Penciptaan skema: ... (sebutkan) ☐ Pengembangan produk dan/atau layanan jasa keuangan: ... (sebutkan) ☐ Lainnya: ... (sebutkan) (beri tanda pada salah satu pilihan) Kategori ☐ Baru ☐ Lanjutan (beri tanda pada salah satu pilihan)	
4	Sasaran	☐ Pekerja informal ☐ Petani ☐ Nelayan ☐ Institusi pendidikan ☐ Profesional ☐ Karyawan ☐ Pedagang ☐ Pelaku UMKM ☐ Perempuan ☐ Pelajar ☐ Mahasiswa ☐ Pemuda ☐ Pensiunan	

		☐ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ☐ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) ☐ Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (KTKI) ☐ Disabilitas ☐ Kelompok masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS): ... (sebutkan) ☐ Masyarakat daerah tertinggal, terpencil, dan terluar ☐ Komunitas: ... (sebutkan) ☐ Masyarakat umum ☐ Lainnya: ... (sebutkan) (beri tanda pada salah satu pilihan) Kategori ☐ Baru ☐ Lanjutan (beri tanda pada salah satu pilihan)	
5	Target Pengguna	... pengguna (diisi dengan jumlah pengguna)	
6	Jadwal	Dimulai ... selesai ... (diisi dengan tanggal dan/atau bulan pelaksanaan)	
7	Wilayah	Provinsi ☐ Aceh ☐ Bali ☐ Banten ☐ Bengkulu ☐ Gorontalo ☐ DKI Jakarta ☐ Jambi ☐ Jawa Barat ☐ Jawa Tengah ☐ Jawa Timur ☐ Kalimantan Barat ☐ Kalimantan Selatan ☐ Kalimantan Tengah ☐ Kalimantan Timur ☐ Kalimantan Utara ☐ Kepulauan Bangka Belitung ☐ Kepulauan Riau	

		☐ Lampung ☐ Maluku ☐ Maluku Utara ☐ Nusa Tenggara Barat ☐ Nusa Tenggara Timur ☐ Papua ☐ Papua Barat ☐ Riau ☐ Sulawesi Barat ☐ Sulawesi Selatan ☐ Sulawesi Tengah ☐ Sulawesi Tenggara ☐ Sulawesi Utara ☐ Sumatera Barat ☐ Sumatera Selatan ☐ Sumatera Utara ☐ DI Yogyakarta ☐ Seluruh Indonesia (diisi apabila dilaksanakan di dalam negeri dan dapat diisi lebih dari satu) Kabupaten/Kota ... (diisi apabila ada) Wilayah Lainnya ... (diisi apabila ada) Kategori ☐ Baru ☐ Lanjutan (beri tanda pada salah satu pilihan)	
8	Parameter	Peningkatan akses terhadap lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan ☐ Penambahan jaringan kantor ☐ Penambahan kerja sama dengan pihak lain ☐ Penambahan infrastruktur yang dapat mendukung perluasan akses keuangan masyarakat ☐ Penambahan saluran distribusi produk	

		dan/atau layanan jasa keuangan ☐ Lainnya: ... (sebutkan) Peningkatan ketersediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan ☐ Penambahan jenis produk dan/atau layanan jasa keuangan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat pada berbagai saluran distribusi ☐ Lainnya: ... (sebutkan) Peningkatan penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan ☐ Penambahan jumlah rekening tabungan/kredit/pembiayaan/ efek/dana pensiun ☐ Penambahan jumlah transaksi ☐ Penambahan jumlah polis asuransi ☐ Penambahan jumlah sertifikat penjaminan ☐ Penambahan jumlah pasangan usaha dan/atau debitur modal ventura ☐ Penambahan jumlah transaksi gadai ☐ Lainnya: ... (sebutkan) Peningkatan kualitas penggunaan produk dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat ☐ Peningkatan jumlah Konsumen yang tidak hanya menggunakan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sejenis, namun juga menggunakan produk dan/atau layanan jasa keuangan lainnya ☐ Peningkatan kemampuan Konsumen yang dapat mengukur dan menganalisis produk dan/atau layanan jasa keuangan yang dapat mendorong peningkatan frekuensi pemanfaatan produk dan/atau layanan jasa keuangan serta dalam hal dibutuhkan mampu memanfaatkan layanan pengaduan/penyelesaian sengketa yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan keuangan yang ingin dicapai	
--	--	---	--

		☐ Lainnya: ... (sebutkan) (dapat diisi lebih dari satu)							
9	Bentuk Pemantauan	Bentuk Pemantauan (mengacu pada parameter pemantauan dilengkapi dengan bentuk pemantauan) ☐ Kunjungan langsung ☐ Lainnya: ... (sebutkan) (dapat diisi lebih dari satu) dilakukan secara (mengacu pada bentuk pemantauan) ☐ Bulanan ☐ Triwulanan ☐ Tahunan ☐ Periode lainnya: ... (sebutkan) (dapat diisi lebih dari satu)							
10	Evaluasi	☐ Memperhatikan data administratif seperti laporan kegiatan dan dokumentasi pelaksanaan ☐ Memperhatikan data dan laporan dari periode-periode sebelumnya ☐ Melakukan analisis keberhasilan atau ketercapaian melalui perbandingan perencanaan dan realisasi kegiatan ☐ Menganalisis informasi mengenai kesesuaian antara kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan dengan sasaran yang telah ditentukan ☐ Lainnya: ... (sebutkan) (dapat diisi lebih dari satu)							
11	Hasil Pemantauan dan/atau Evaluasi	Hasil Pemantauan (secara sistem akan mengacu pada parameter dilengkapi dengan hasil pemantauan) Peningkatan akses terhadap lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan <table><tr><td></td><td>Sebelum</td><td>Setelah</td></tr><tr><td> ☐ Jumlah jaringan kantor </td><td> ... (diisi dengan jumlah) </td><td> ... (diisi dengan jumlah) </td></tr></table>		Sebelum	Setelah	☐ Jumlah jaringan kantor	... (diisi dengan jumlah)	... (diisi dengan jumlah)	
	Sebelum	Setelah							
☐ Jumlah jaringan kantor	... (diisi dengan jumlah)	... (diisi dengan jumlah)							

		☐ Jumlah kerja sama dengan pihak lain	... <i>(diisi dengan jumlah)</i>	... <i>(diisi dengan jumlah)</i>		
		☐ Penambahan infrastruktur yang dapat mendukung perluasan akses keuangan masyarakat	... <i>(diisi dengan jumlah)</i>	... <i>(diisi dengan jumlah)</i>		
		☐ Penambahan saluran distribusi produk dan/atau layanan jasa keuangan	... <i>(diisi dengan jumlah)</i>	... <i>(diisi dengan jumlah)</i>		
		☐ Lainnya: ... (sebutkan)	... <i>(diisi dengan jumlah/ persentase)</i>	... <i>(diisi dengan jumlah/ persentase)</i>		
		Peningkatan ketersediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan				
			Sebelum	Sesudah		
		☐ Jumlah jenis produk dan/atau layanan jasa keuangan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat pada berbagai saluran	... <i>(diisi dengan jumlah)</i>	... <i>(diisi dengan jumlah)</i>		

		distribusi			
		☐ Lainnya: ... (sebutkan)	... (diisi dengan jumlah/ persentase)	... (diisi dengan jumlah/ persentase)	
		Peningkatan penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan			
			Sebelum	Sesudah	
		☐ Penambahan rekening tabungan/kredit/ pembiayaan/efek/dana pensiun	... (diisi dengan jumlah)	... (diisi dengan jumlah)	
		☐ Penambahan jumlah transaksi	... (diisi dengan jumlah)	... (diisi dengan jumlah)	
		☐ Penambahan jumlah polis asuransi	... (diisi dengan jumlah)	... (diisi dengan jumlah)	
		☐ Penambahan jumlah sertifikat penjaminan	... (diisi dengan jumlah)	... (diisi dengan jumlah)	
		☐ Penambahan jumlah pasangan usaha dan/atau debitur modal ventura	... (diisi dengan jumlah)	... (diisi dengan jumlah)	
		☐ Penambahan transaksi	... (diisi dengan jumlah)	... (diisi dengan jumlah)	

		gadai			
		☐ Lainnya: ... (sebutkan)	... (diisi dengan jumlah)	... (diisi dengan jumlah)	
		Peningkatan kualitas penggunaan produk dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat			
			Sebelum	Sesudah	
		☐ Peningkatan jumlah Konsumen yang tidak hanya menggunakan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sejenis, namun juga menggunakan produk dan/atau layanan jasa keuangan lainnya	... (diisi dengan jumlah)	... (diisi dengan jumlah)	
		Peningkatan kemampuan Konsumen yang dapat mengukur dan menganalisis produk dan/atau layanan jasa keuangan yang dapat mendorong peningkatan frekuensi pemanfaatan produk	... (diisi dengan kondisi)	... (diisi dengan kondisi)	

		dan/atau layanan jasa keuangan serta dalam hal dibutuhkan mampu memanfaatkan layanan pengaduan/ penyelesaian sengketa yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan keuangan yang ingin dicapai ☐ Lainnya: ... (sebutkan)	... (diisi dengan jumlah/ kondisi)	... (diisi dengan jumlah/ kondisi)	
		Hasil Evaluasi ... (deskripsi analisis hasil pemantauan yang dikaitkan dengan peluang dan tantangan pelaksanaan kegiatan)			
12	Keterangan	☐ Peran masing-masing pihak dalam hal PUJK berkolaborasi dengan PUJK lain: 1. ... (nama pihak 1) ... (deskripsi dari peran pihak 1), 2. ... (nama pihak 2) ... (deskripsi dari peran pihak 2), dst. ☐ Bekerja sama dengan pihak lain: 1. ... (nama pihak 1) ... (deskripsi dari peran pihak 1), 2. ... (nama pihak 2) ... (deskripsi dari peran pihak 2), dst.			

		Informasi lainnya: <i>Merupakan informasi tambahan yang dianggap perlu untuk lebih menjelaskan kegiatan Literasi Keuangan yang dilakukan oleh PUJK. ... (deskripsi)</i>	
--	--	---	--

Tabel 2

Pemenuhan Prinsip-Prinsip Inklusi Keuangan

No	Prinsip	Pemenuhan Prinsip
1	Terukur	<i>Otomatis terisi apabila PUJK mengisi tabel 1 angka 5, 8, serta 9 dan/atau 10</i>
2	Terjangkau	<i>Otomatis terisi apabila PUJK mengisi tabel 1 angka 3 dan 8</i>
3	Tepat Sasaran	<i>Otomatis terisi apabila PUJK mengisi tabel 1 angka 3, 4, dan 5</i>
4	Berkelanjutan	<i>Otomatis terisi apabila PUJK mengisi “Kategori” pada tabel 1 angka 3 secara lengkap, 4, dan 7</i>

IV. **Bukti sertifikat atau bukti lain yang menunjukkan bahwa Pihak Utama telah memenuhi syarat keberlanjutan.**

Bukti sertifikat atau bukti lain yang menunjukkan bahwa Pihak Utama telah memenuhi syarat keberlanjutan ini berdasarkan ketentuan POJK 4/ POJK.05/2013 Tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. Dalam rangka pelaporan, penyampaian sertifikat dapat diupload melalui sistem SIJINGGA.

FORM 3



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

FORM SELF ASSESSMENT

LAPORAN PEMENUHAN SYARAT KEBERLANJUTAN

PIHAK UTAMA LEMBAGA JASA KEUANGAN NON BANK

Nama Perusahaan

:

Nomor Surat Pelaporan

:

Tanggal Surat Pelaporan

:

Contact Person (Nama,
Telp/ e-mail)

:

NO	URAIAN	DASAR HUKUM	YA	TID AK	KETERANGAN
1.	Laporan pemenuhan syarat keberlanjutan disampaikan oleh Direksi Perusahaan kepada OJK paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode tahunan berakhir.	Pasal 21 POJK 4/POJK. 05/2013	☐	☐	
2.	Bukti pemenuhan syarat keberlanjutan		☐	☐	

Keterangan tambahan (bila diperlukan):

Kami menyatakan bahwa isian tersebut di atas telah sesuai dengan dokumen yang sebenarnya. Apabila terdapat perbedaan maka akan dilakukan perbaikan.

Direksi (Nama Perusahaan)

tanda tangan

(Nama jelas)

No	Nama	Jenis Pihak Utama)	No dan Tanggal SK FPT	Jenis Pemenuhan)	Judul Kegiatan	Penyelenggara Kegiatan *)	Nama Penyele nggara	Tanggal Pelaksana an	Pemen uhan Tahun	Bukti pemenu han *)
*) pilih salah satu										
		☐ Direk si ☐ Komis aris ☐ Aktua		☐ mengikuti seminar, workshop, atau kegiatan		☐ lembaga pengawas jasa keuangan di dalam dan				☐ertif ikat (nom or dan

		ris Perusahaan o Audit or Intern al o Pelaks ana Tugas Pengu rus		lain yang sejenis di bidang industri keuangan o mengikuti kursus, pelatihan, atau program pendidika n sejenis di bidang industri keuangan o menulis makalah, artikel, atau karya tulis lain yang dipublikas ikan di bidang industri keuangan o menjadi pembicara dalam kegiatan seminar, workshop, atau kegiatan lain yang sejenis di bidang industri keuangan, menjadi pengajar atau menjadi instruktur dalam kegiatan kursus, pelatihan, atau program pendidika n sejenis di bidang industri keuangan		luar negeri o asosiasi lembaga jasa keuangan di dalam dan luar negeri o perguruan tinggi di dalam dan luar negeri o lembaga pelatihan yang memperoleh izin dari instansi berwenang				tangg al) o bukti hadir o lainn ya, yaitu

Untuk Kepentingan Otoritas Jasa Keuangan

Catatan :

Diterima Analis	Diselesaikan Analis	Direview Kepala Subbagian	Direview Kepala Bagian
Tanggal	Tanggal	Tanggal	Tanggal
Paraf	Paraf	Paraf	Paraf

Keterangan:

1.

Cara pengisian ☐: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked"

2.

Form Self Assessment ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan OJK No. 4 /POJK.05/2013 Tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, Dan Perusahaan Penjaminan

V. Laporan Data profil Risiko Asuransi

Laporan Data profil Risiko Asuransi ini berdasarkan ketentuan POJK 2/POJK.05/2015 Tentang Pemeliharaan Dan Pelaporan Data Risiko Asuransi Serta Penerapan Tarif Premi Dan Kontribusi Untuk Lini Usaha Asuransi Harta Benda Dan Asuransi Kendaraan Bermotor dan SEOJK 28/SEOJK.05/2015 Tentang Pelaporan Data Risiko Asuransi. Dalam rangka pelaporan, laporan ini telah dimasukkan kedalam sistem OJK dengan nama aplikasi SIPETIR.

VI. Laporan Hasil Penilaian Tingkat Risiko

Laporan Hasil Penilaian Tingkat Risiko ini berdasarkan ketentuan POJK 10/POJK.05/2014 Tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dan SEOJK 3/SEOJK.05/2015 Tentang Penilaian Tingkat Risiko Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi. Dalam rangka pelaporan, laporan ini telah dimasukkan kedalam sistem OJK dengan nama aplikasi SIRIBAS.

VII. Laporan Tindak Lanjut atas Penilaian Tingkat Risiko

Laporan Tindak Lanjut atas Penilaian Tingkat Risiko ini berdasarkan ketentuan POJK 10/POJK.05/2014 Tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank POJK No.10/POJK.05/2014 dan dan SEOJK 3/SEOJK.05/2015 Tentang Penilaian Tingkat Risiko Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi. Dalam rangka pelaporan, laporan ini telah dimasukkan kedalam sistem OJK dengan nama aplikasi SIRIBAS.

IV. Laporan Penempatan Reasuransi

LAPORAN PELAKSANAAN REASURANSI/RETROSESI
20XX

Seluruh Lini Usaha
Asuransi

dalam
jutaan
rupiah

No	Keterangan	Uang Pertanggungan (UP)				Premi		
		Total UP	Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis Treaty	Reasuransi Fakultatif	Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis Treaty	Reasuransi Fakultatif
(1)	(2)	(3)						
A	Retensi Sendiri							
B	Dukungan Reasuradur Dalam Negeri							
	Luar Negeri per Negara							
	1.							
	2.							
	3.							
C	Total							

Keterangan:

1. Retensi sendiri pada kolom uang pertanggungan merupakan uang pertanggungan dikurangi sebagian uang pertanggungan yang direasuransikan

2. Retensi sendiri pada kolom premi merupakan premi bruto dikurangi premi reasuransi

3. Kolom Keterangan luar negeri per negara diisi dengan nama negara reasuradur yang mengacu pada lokasi reasuradur, bukan *country of origin* reasuradur.

Contoh swiss re singapore diisi singapore, bukan swiss.

LAPORAN PELAKSANAAN REASURANSI/RETROSESI
20XX

Lini Usaha Asuransi :
Harta Benda

dalam jutaan rupiah

					Uang Pertanggungan								
No	Keterangan	Rating	Negara	Jumlah Polis	Total UP	Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis Treaty				Reasuransi Fakultatif		
							Prop Risk		Non Prop Risk		Prop		Non Prop
							Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	Quota Share	Surplus	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
A	Retensi Sendiri												
B	Dukungan Reasuradur												
	Dalam Negeri												
	1.												
	2.												
	3.												
	4.												
	Luar Negeri												
	1.												
	2.												
	3.												
C	Total												

Keterangan:

- 1. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
- 2. Kolom (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan
- 3. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi
- 4. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur

LAPORAN PELAKSANAAN REASURANSI/RETROSESI
20XX

Lini Usaha

Asuransi :

Harta Benda

dalam

jutaan

rupiah

Premi							
Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis Treaty				Reasuransi Fakultatif		
	Prop Risk		Non Prop Risk		Prop		Non Prop
	Quota Share	Surpl us	Cath X/L	Work X/L	Quota Share	Surpl us	
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

Keterangan:

1. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.

2. Kolom (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan

3. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi

4. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur

LAPORAN PELAKSANAAN REASURANSI/RETROSESI
20XX

Lini Usaha Asuransi :
Kendaraan bermotor

dalam jutaan rupiah

No	Keterangan	Rating	Negara	Jumlah Polis	Total UP	Retensi Sendiri	Uang Pertanggungan						
							Reasuransi Otomatis Treaty				Reasuransi Fakultatif		
							Prop Risk		Non Prop Risk		Prop		Non Prop
							Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	Quota Share	Surplus	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
A	Retensi Sendiri												
B	Dukungan Reasuradur												
	Dalam Negeri												
	1.												
	2.												
	3.												
	4.												
	Luar Negeri												
	1.												
	2.												
	3.												
C	Total												

- Keterangan:
- 1. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
 - 2. Kolom (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan
 - 3. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi
 - 4. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur

LAPORAN PELAKSANAAN REASURANSI/RETROSESI
20XX

Lini Usaha

Asuransi :

Kendaraan

bermotor

dalam

jutaan

rupiah

[illegible]

Keterangan:

1. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
2. Kolom (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan
3. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi
4. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur

LAPORAN PELAKSANAAN REASURANSI/RETROSESI
20XX

Lini Usaha Asuransi :
Pengangkutan

dalam jutaan rupiah

No	Keterangan	Rating	Negara	Jumlah Polis	Total UP	Retensi Sendiri	Uang Pertanggungan						
							Reasuransi Otomatis Treaty				Reasuransi Fakultatif		
							Prop Risk		Non Prop Risk		Prop		Non Prop
							Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	Quota Share	Surplus	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
A	Retensi Sendiri												
B	Dukungan Reasuradur												
	Dalam Negeri												
	1.												
	2.												
	3.												
	4.												
	Luar Negeri												
	1.												
	2.												
	3.												
C	Total												

Keterangan:

- Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
- Kolom (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan
- Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi
- Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur

LAPORAN PELAKSANAAN REASURANSI/RETROSESI
20XX

Lini Usaha	dalam
Asuransi :	jutaan
Pengangkutan	rupiah

Premi							
Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis Treaty				Reasuransi Fakultatif		
	Prop Risk		Non Prop Risk		Prop		Non Prop
	Quota Share	Surpl us	Cath X/L	Work X/L	Quota Share	Surpl us	
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

Keterangan:

1. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
2. Kolom (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan
3. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi
4. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur

LAPORAN PELAKSANAAN REASURANSI/RETROSESI
20XX

Lini Usaha Asuransi :
Rangka Kapal

dalam jutaan rupiah

					Uang Pertanggungan								
No	Keterangan	Rating	Negara	Jumlah Polis	Total UP	Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis Treaty				Reasuransi Fakultatif		
							Prop Risk		Non Prop Risk		Prop		Non Prop
							Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	Quota Share	Surplus	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
A	Retensi Sendiri												
B	Dukungan Reasuradur												
	Dalam Negeri												
	1.												
	2.												
	3.												
	4.												
	Luar Negeri												
	1.												
	2.												
	3.												
C	Total												

Keterangan:

- 1. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
- 2. Kolom (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan
- 3. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi
- 4. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur

LAPORAN PELAKSANAAN REASURANSI/RETROSESI
20XX

Lini Usaha	dalam
Asuransi :	jutaan
Rangka Kapal	rupiah

Premi							
Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis Treaty				Reasuransi Fakultatif		
	Prop Risk		Non Prop Risk		Prop		Non Prop
	Quota Share	Surpl us	Cath X/L	Work X/L	Quota Share	Surpl us	
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

Keterangan:

1. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
2. Kolom (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan
3. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi
4. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur

LAPORAN PELAKSANAAN REASURANSI/RETROSESI

20XX

Lini Usaha Asuransi :
Rangka Pesawat

dalam jutaan rupiah

					Uang Pertanggungan								
No	Keterangan	Rating	Negara	Jumlah Polis	Total UP	Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis Treaty				Reasuransi Fakultatif		
							Prop Risk		Non Prop Risk		Prop		Non Prop
							Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	Quota Share	Surplus	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
A	Retensi Sendiri												
B	Dukungan Reasuradur												
	Dalam Negeri												
	1.												
	2.												
	3.												
	4.												
	Luar Negeri												
	1.												
	2.												
	3.												
C	Total												

Keterangan:

1. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
2. Kolom (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan
3. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi
4. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur

LAPORAN PELAKSANAAN REASURANSI/RETROSESI
20XX

Lini Usaha	dalam
Asuransi :	jutaan
Rangka Pesawat	rupiah

[illegible]

Keterangan:

1. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
2. Kolom (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan
3. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi
4. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur

LAPORAN PELAKSANAAN REASURANSI/RETROSESI

20XX

Lini Usaha Asuransi :
Satelit

dalam jutaan rupiah

					Uang Pertanggungan								
No	Keterangan	Rating	Negara	Jumlah Polis	Total UP	Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis Treaty				Reasuransi Fakultatif		
							Prop Risk		Non Prop Risk		Prop		Non Prop
							Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	Quota Share	Surplus	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
A	Retensi Sendiri												
B	Dukungan Reasuradur												
	Dalam Negeri												
	1.												
	2.												
	3.												
	4.												
	Luar Negeri												
	1.												
	2.												
	3.												
C	Total												

Keterangan:

1. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
2. Kolom (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan
3. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi
4. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur

LAPORAN PELAKSANAAN REASURANSI/RETROSESI
20XX

Lini Usaha

Asuransi :

Satelit

dalam

jutaan

rupiah

Premi							
Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis Treaty				Reasuransi Fakultatif		
	Prop Risk		Non Prop Risk		Prop		Non Prop
	Quota Share	Surpl us	Cath X/L	Work X/L	Quota Share	Surpl us	
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

LAPORAN PELAKSANAAN REASURANSI/RETROSESI
20XX

Lini Usaha Asuransi :
Energi Onshore

dalam jutaan rupiah

No	Keterangan	Rating	Negara	Jumlah Polis	Total UP	Retensi Sendiri	Uang Pertanggungan						
							Reasuransi Otomatis Treaty				Reasuransi Fakultatif		
							Prop Risk		Non Prop Risk		Prop		Non Prop
							Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	Quota Share	Surplus	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
A	Retensi Sendiri												
B	Dukungan Reasuradur												
	Dalam Negeri												
	1.												
	2.												
	3.												
	4.												
	Luar Negeri												
	1.												
	2.												
	3.												
C	Total												

- Keterangan:
- 1. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
 - 2. Kolom (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan
 - 3. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi
 - 4. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur

LAPORAN PELAKSANAAN REASURANSI/RETROSESI
20XX

Lini Usaha

Asuransi :

Energi Onshore

dalam

jutaan

rupiah

Premi							
Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis Treaty				Reasuransi Fakultatif		
	Prop Risk		Non Prop Risk		Prop		Non Prop
	Quota Share	Surpl us	Cath X/L	Work X/L	Quota Share	Surpl us	
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

LAPORAN PELAKSANAAN REASURANSI/RETROSESI
20XX

Lini Usaha Asuransi :
Energi Offshore

dalam jutaan rupiah

No	Keterangan	Rating	Negara	Jumlah Polis	Total UP	Retensi Sendiri	Uang Pertanggungan						
							Reasuransi Otomatis Treaty				Reasuransi Fakultatif		
							Prop Risk		Non Prop Risk		Prop		Non Prop
							Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	Quota Share	Surplus	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
A	Retensi Sendiri												
B	Dukungan Reasuradur												
	Dalam Negeri												
	1.												
	2.												
	3.												
	4.												
	Luar Negeri												
	1.												
	2.												
	3.												
C	Total												

- Keterangan:
- Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
 - Kolom (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan
 - Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi
 - Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur

LAPORAN PELAKSANAAN REASURANSI/RETROSESI
20XX

Lini Usaha

Asuransi :

Energi Offshore

dalam

jutaan

rupiah

Premi							
Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis Treaty				Reasuransi Fakultatif		
	Prop Risk		Non Prop Risk		Prop		Non Prop
	Quota Share	Surpl us	Cath X/L	Work X/L	Quota Share	Surpl us	
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

LAPORAN PELAKSANAAN REASURANSI/RETROSESI
20XX

Lini Usaha Asuransi :
Rekayasa

dalam jutaan rupiah

No	Keterangan	Rating	Negara	Jumlah Polis	Total UP	Retensi Sendiri	Uang Pertanggungan						
							Reasuransi Otomatis Treaty				Reasuransi Fakultatif		
							Prop Risk		Non Prop Risk		Prop		Non Prop
							Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	Quota Share	Surplus	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
A	Retensi Sendiri												
B	Dukungan Reasuradur												
	Dalam Negeri												
	1.												
	2.												
	3.												
	4.												
	Luar Negeri												
	1.												
	2.												
	3.												
C	Total												

Keterangan:

1. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
2. Kolom (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan
3. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi
4. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur

LAPORAN PELAKSANAAN REASURANSI/RETROSESI
20XX

Lini Usaha

Asuransi :

Rekayasa

dalam

jutaan

rupiah

Premi							
Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis Treaty				Reasuransi Fakultatif		
	Prop Risk		Non Prop Risk		Prop		Non Prop
	Quota Share	Surpl us	Cath X/L	Work X/L	Quota Share	Surpl us	
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

LAPORAN PELAKSANAAN REASURANSI/RETROSESI
20XX

Lini Usaha Asuransi :
Tanggung Gugat

dalam jutaan rupiah

					Uang Pertanggungan								
No	Keterangan	Rating	Negara	Jumlah Polis	Total UP	Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis Treaty				Reasuransi Fakultatif		
							Prop Risk		Non Prop Risk		Prop		Non Prop
							Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	Quota Share	Surplus	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
A	Retensi Sendiri												
B	Dukungan Reasuradur												
	Dalam Negeri												
	1.												
	2.												
	3.												
	4.												
	Luar Negeri												
	1.												
	2.												
	3.												
C	Total												

Keterangan:

1. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
2. Kolom (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan
3. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi
4. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur

LAPORAN PELAKSANAAN REASURANSI/RETROSESI
20XX

Lini Usaha	dalam
Asuransi :	jutaan
Tanggung Gugat	rupiah

Premi							
Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis Treaty				Reasuransi Fakultatif		
	Prop Risk		Non Prop Risk		Prop		Non Prop
	Quota Share	Surpl us	Cath X/L	Work X/L	Quota Share	Surpl us	
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

LAPORAN PELAKSANAAN REASURANSI/RETROSESI
20XX

Lini Usaha Asuransi :
Kematian

dalam jutaan rupiah

					Uang Pertanggungan								
No	Keterangan	Rating	Negara	Jumlah Polis	Total UP	Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis Treaty				Reasuransi Fakultatif		
							Prop Risk		Non Prop Risk		Prop		Non Prop
							Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	Quota Share	Surplus	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
A	Retensi Sendiri												
B	Dukungan Reasuradur												
	Dalam Negeri												
	1.												
	2.												
	3.												
	4.												
	Luar Negeri												
	1.												
	2.												
	3.												
C	Total												

- Keterangan:
- 1. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
 - 2. Kolom (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan
 - 3. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi
 - 4. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur

LAPORAN PELAKSANAAN REASURANSI/RETROSESI
20XX

Lini Usaha

Asuransi :

Kematian

dalam

jutaan

rupiah

Premi							
Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis Treaty				Reasuransi Fakultatif		
	Prop Risk		Non Prop Risk		Prop		Non Prop
	Quota Share	Surpl us	Cath X/L	Work X/L	Quota Share	Surpl us	
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

LAPORAN PELAKSANAAN REASURANSI/RETROSESI
20XX

Lini Usaha Asuransi :
Kecelakaan Diri

dalam jutaan rupiah

					Uang Pertanggungan								
No	Keterangan	Rating	Negara	Jumlah Polis	Total UP	Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis Treaty				Reasuransi Fakultatif		
							Prop Risk		Non Prop Risk		Prop		Non Prop
							Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	Quota Share	Surplus	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
A	Retensi Sendiri												
B	Dukungan Reasuradur												
	Dalam Negeri												
	1.												
	2.												
	3.												
	4.												
	Luar Negeri												
	1.												
	2.												
	3.												
C	Total												

Keterangan:

- 1. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
- 2. Kolom (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan
- 3. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi
- 4. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur

LAPORAN PELAKSANAAN REASURANSI/RETROSESI
20XX

Lini Usaha

Asuransi :

Kecelakaan Diri

dalam

jutaan

rupiah

Premi							
Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis Treaty				Reasuransi Fakultatif		
	Prop Risk		Non Prop Risk		Prop		Non Prop
	Quota Share	Surpl us	Cath X/L	Work X/L	Quota Share	Surpl us	
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

LAPORAN PELAKSANAAN REASURANSI/RETROSESI
20XX

Lini Usaha Asuransi :
Kesehatan

dalam jutaan rupiah

No	Keterangan	Rating	Negara	Jumlah Polis	Total UP	Retensi Sendiri	Uang Pertanggungan						
							Reasuransi Otomatis Treaty				Reasuransi Fakultatif		
							Prop Risk		Non Prop Risk		Prop		Non Prop
							Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	Quota Share	Surplus	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
A	Retensi Sendiri												
B	Dukungan Reasuradur												
	Dalam Negeri												
	1.												
	2.												
	3.												
	4.												
	Luar Negeri												
	1.												
	2.												
	3.												
C	Total												

Keterangan:

- Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
- Kolom (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan
- Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi
- Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur

LAPORAN PELAKSANAAN REASURANSI/RETROSESI
20XX

Lini Usaha

Asuransi :

Kesehatan

dalam

jutaan

rupiah

Premi							
Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis Treaty				Reasuransi Fakultatif		
	Prop Risk		Non Prop Risk		Prop		Non Prop
	Quota Share	Surpl us	Cath X/L	Work X/L	Quota Share	Surpl us	
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

LAPORAN PELAKSANAAN REASURANSI/RETROSESI
20XX

Lini Usaha Asuransi :
Kredit

dalam jutaan rupiah

No	Keterangan	Rating	Negara	Jumlah Polis	Total UP	Retensi Sendiri	Uang Pertanggungan						
							Reasuransi Otomatis Treaty				Reasuransi Fakultatif		
							Prop Risk		Non Prop Risk		Prop		Non Prop
							Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	Quota Share	Surplus	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
A	Retensi Sendiri												
B	Dukungan Reasuradur												
	Dalam Negeri												
	1.												
	2.												
	3.												
	4.												
	Luar Negeri												
	1.												
	2.												
	3.												
C	Total												

- Keterangan:
- 1. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
 - 2. Kolom (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan
 - 3. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi
 - 4. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur

LAPORAN PELAKSANAAN REASURANSI/RETROSESI
20XX

Lini Usaha

Asuransi :

Kredit

dalam
jutaan
rupiah

Premi							
Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis Treaty				Reasuransi Fakultatif		
	Prop Risk		Non Prop Risk		Prop		Non Prop
	Quota Share	Surpl us	Cath X/L	Work X/L	Quota Share	Surpl us	
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

LAPORAN PELAKSANAAN REASURANSI/RETROSESI
20XX

Lini Usaha Asuransi :
Suretyship

dalam jutaan rupiah

No	Keterangan	Rating	Negara	Jumlah Polis	Total UP	Retensi Sendiri	Uang Pertanggungan						
							Reasuransi Otomatis Treaty				Reasuransi Fakultatif		
							Prop Risk		Non Prop Risk		Prop		Non Prop
							Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	Quota Share	Surplus	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
A	Retensi Sendiri												
B	Dukungan Reasuradur												
	Dalam Negeri												
	1.												
	2.												
	3.												
	4.												
	Luar Negeri												
	1.												
	2.												
	3.												
C	Total												

- Keterangan:
- 1. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
 - 2. Kolom (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan
 - 3. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi
 - 4. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur

LAPORAN PELAKSANAAN REASURANSI/RETROSESI
20XX

Lini Usaha

Asuransi :

Suretyship

dalam

jutaan

rupiah

Premi							
Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis Treaty				Reasuransi Fakultatif		
	Prop Risk		Non Prop Risk		Prop		Non Prop
	Quota Share	Surpl us	Cath X/L	Work X/L	Quota Share	Surpl us	
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

LAPORAN PELAKSANAAN REASURANSI/RETROSESI
20XX

Lini Usaha Asuransi :
Aneka

dalam jutaan rupiah

No	Keterangan	Rating	Negara	Jumlah Polis	Total UP	Retensi Sendiri	Uang Pertanggungan						
							Reasuransi Otomatis Treaty				Reasuransi Fakultatif		
							Prop Risk		Non Prop Risk		Prop		Non Prop
							Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	Quota Share	Surplus	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
A	Retensi Sendiri												
B	Dukungan Reasuradur												
	Dalam Negeri												
	1.												
	2.												
	3.												
	4.												
	Luar Negeri												
	1.												
	2.												
	3.												
C	Total												

- Keterangan:
- 1. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
 - 2. Kolom (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan
 - 3. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi
 - 4. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur

LAPORAN PELAKSANAAN REASURANSI/RETROSESI
20XX

Lini Usaha

Asuransi :

Aneka

dalam

jutaan

rupiah

Premi							
Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis Treaty				Reasuransi Fakultatif		
	Prop Risk		Non Prop Risk		Prop		Non Prop
	Quota Share	Surpl us	Cath X/L	Work X/L	Quota Share	Surpl us	
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

V. Laporan Aktuaris

1. Pernyataan Aktuaris

1.1 Informasi Aktuaris Perusahaan:

- Nama Perusahaan;
- Nama Aktuaris;
- Alamat Rumah dan Nomor Telepon;
- Alamat Kantor dan Nomor Telepon;
- Tanggal Pengangkatan;
- Tempat dan Tanggal Lahir;
- Kualifikasi Profesi;
- Pengalaman Kerja (sesuai dengan bidang tugas pekerjaannya).

1.2 Uraian atas prosedur-prosedur yang telah dijalankan dan kesesuaian dengan standard praktik yang sehat.

1.3 Tanggung jawab Aktuaris Perusahaan atas laporan aktuaris tahunan.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. Seluruh informasi yang disampaikan telah dibuat berdasarkan pendapat profesional secara profesi aktuaris (*professional judgement*) dan telah menerapkan tes yang memadai;
2. Saya bertanggung jawab penuh atas laporan aktuaris tahunan ini secara keseluruhan; dan
3. Laporan ini disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip aktuarial yang berlaku umum.

Tempat, tanggal pembuatan

Ttd.

Nama

No. Register Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI)

No. Izin Aktuaris Publik:

2. Pernyataan Direksi

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. Prosedur penentuan liabilitas telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Informasi yang diberikan kepada Aktuaris Perusahaan dalam

laporan aktuaris tahunan PT ... tahun ... sudah akurat dan lengkap; dan

3. Telah memahami isi dari laporan aktuaris tahunan ini dan akan melaksanakan rekomendasi yang diuraikan dalam laporan aktuaris ini.

Tempat, tanggal pembuatan Jabatan*)

Ttd.

Nama

*)Direksi yang berwenang sesuai dengan mekanisme internal Perusahaan

3. Ikhtisar Eksekutif

Tujuan penyusunan laporan, ruang lingkup laporan, ikhtisar perubahan yang terjadi sejak laporan terakhir, kesimpulan utama (*key finding*) dari laporan termasuk perkiraan kemampuan Perusahaan untuk memenuhi kewajiban di masa depan dan rekomendasi yang diberikan Aktuaris Perusahaan kepada Direksi.

4. Pendahuluan

1. latar belakang dan tujuan laporan;
2. ruang lingkup laporan;
3. dasar hukum laporan; dan
4. materialitas (*materiality*), ketergantungan (*reliance*), dan keterbatasan (*limitation*) dalam penyusunan laporan.

5. Tindak Lanjut Rekomendasi Periode Sebelumnya

Rekomendasi yang sudah dilaksanakan dan rekomendasi yang belum dilaksanakan termasuk adanya keterbatasan yang terjadi dan target waktu penyelesaian.

6. Kualitas Data

Kelengkapan data, keandalan data, prosedur yang telah dilakukan untuk meyakini kelengkapan dan keandalan data termasuk metode yang dilakukan dan kelemahan atas data tersebut.

7. Gambaran Bisnis Perusahaan

Pada bagian ini, aktuaris memberikan uraian mengenai informasi umum Perusahaan yang terdiri dari struktur dan operasional Perusahaan meliputi:

a. Lini usaha atau produk yang dipasarkan

b. Target pasar

c. Saluran distribusi yang digunakan

8. Tingkat Kesehatan Keuangan Dan Kecukupan Modal

Pada bagian ini sekurang-kurangnya memuat:

a. Analisis kesehatan keuangan dan kecukupan permodalan

b. Proyeksi kesehatan keuangan dan kecukupan modal

c. Asumsi yang digunakan

d. Analisis akses Perusahaan terhadap kebutuhan modal

--

e. Analisis atas risiko Perusahaan terkait pembentukan aset bukan investasi

--

9. Penetapan Harga Premi Dan Profitabilitas

Pada bagian ini sekurang-kurangnya memuat:

a. Kebijakan penetapan harga premi

--

b. Tinjauan atas *pricing policy*

--

c. Analisis realisasi biaya dan profitabilitas

--

d. Analisis profitabilitas untuk pertanggungan baru dan lama

--

e. Distribusi profit

--

f. Analisis historis profitabilitas

10. Liabilitas

a. Metode, asumsi, dan model perhitungan yang digunakan

b. Pendapat aktuaris

11. Kesesuaian Aset Terhadap Liabilitas

12. Reasuransi

13. Manajemen Risiko

14. Proyeksi Keuangan

--

15. Area Lain Yang Perlu Mendapat Perhatian

--

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Januari 2018

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 2 /SEOJK.05/2018

TENTANG

BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN BERKALA PERUSAHAAN ASURANSI
SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH, DAN UNIT SYARIAH

FORMAT II A

BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN LAIN BAGI PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH, DAN UNIT SYARIAH

Laporan Rencana Korporasi ini berdasarkan ketentuan Pasal 68 dalam POJK 73/POJK.05/2016, dengan batas waktu penyampaian tiap 5 tahunan yaitu 31 Oktober tahun sebelumnya.

**LAPORAN RENCANA KORPORASI
PERUSAHAAN ASURANSI UMUM SYARIAH/PERUSAHAAN
REASURANSI SYARIAH/PERUSAHAAN ASURANSI JIWA SYARIAH/UNIT SYARIAH¹**

Tahun²

(diisi nama dan alamat perusahaan)

¹Tulis salah satu sesuai bidang usaha perusahaan.
²Periode Rencana Korporasi yang dilaporkan, misal tahun 2015 – 2020

_____, _____ 20xx

Direktur

(Cap Perusahaan)

 N a m a J e l a s
Jabatan

1. Ringkasan Eksekutif

Ringkasan eksekutif merupakan pintu masuk ke Rencana Korporasi. Paragraf ini hanya merupakan ringkasan yang menekankan pada isi dari rencana korporasi yang disampaikan.

2. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Korporasi Periode Sebelumnya

- (a) Perbandingan Antara Rencana Korporasi dengan Realisasi Rencana Bisnis Setiap Tahun (Abaikan jika perusahaan anda perusahaan baru)

Jabarkan secara detil rencana korporasi saat ini dan bagaimana realisasinya dengan rencana bisnis setiap tahun. Pada bagian ini, perusahaan dapat melihat kinerja perusahaan pada periode tersebut dengan membandingkan antara rencana korporasi dengan realisasi rencana bisnis. Contoh tabel di bawah dapat dimodifikasi lebih detil sesuai kebutuhan perusahaan.

Indikator	20XX-1			20XX-2			20XX-3			20XX-4			20XX-5		
	Rencana Korporasi	Realisasi	%	Rencana Korporasi	Realisasi	%	Rencana Korporasi	Realisasi	%	Rencana Korporasi	Realisasi	%	Rencana Korporasi	Realisasi	%
	(1)	(2)	(2 / 1)	(1)	(2)	(2 / 1)	(1)	(2)	(2 / 1)	(1)	(2)	(2 / 1)	(1)	(2)	(2 / 1)
Kontribusi Bruto															
Laba (Rugi) Setelah pajak															
Rasio Pencapaian Solvabilitas (%)															
Rasio Kecukupan Investasi															
Rasio Likuiditas															
Rasio Beban klaim, Beban Usaha dan Komisi															
Rasio Perimbangan Hasil Investasi dengan Pendapatan Kontribusi Neto															
Rasio Hasil Usaha Asuransi															
Return on Investment (ROI)															
Return on Equity (ROE)															
dst (tambah indikator lain yang dianggap perlu)															

Keterangan:

* Apabila penyampaian rencana korporasi adalah untuk tahun 2015-2019, maka 20XX-1 adalah 2014, 20XX-2 adalah 2013 dst

(b) Kendala Yang Dihadapi dan Upaya Pemecahan Masalah

Nyatakan secara jelas kendala yang dihadapi dalam melaksanakan rencana korporasi yang telah ditetapkan dan apa solusi dari pemecahan masalah

3. Posisi Perusahaan Asuransi Syariah Atau Perusahaan Reasuransi Syariah Saat Ini

No.	Lini usaha	Peringkat	Pangsa Pasar (%)	Keterangan
1.				
2.				
3.				
4.				
Dst	Lainnya			

4. Asumsi Yang Digunakan Dalam Menyusun Rencana Korporasi

No	Asumsi	Proyeksi				
		Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
1	Nilai tukar rupiah					
2	Tingkat inflasi					
3	Kerugian katastrofik (dalam rupiah)					
4	Tingkat hasil investasi					
5	Jumlah pertanggungan baru (dalam kontribusi rupiah)					
6	Tingkat penghentian polis (polis yang dihentikan/jumlah polis di awal periode)					
7	Tingkat klaim (klaim bruto/kontribusi bruto)					
8	dst (asumsi lain yang relevan)					

5. Tujuan, Sasaran Dan Strategi Pencapaian Rencana Korporasi

(a) Proyeksi Posisi Keuangan/Neraca Setiap Tahun Selama Lima Tahun

Uraian	Proyeksi (Jan – Des)				
	20XX*	20XX+1*	20XX+2*	20XX+3*	20XX+4*

(b) Proyeksi Laba/Rugi Komprehensif Setiap Tahun Selama Lima Tahun

Uraian	Proyeksi (Jan – Des)				
	20XX*	20XX+1*	20XX+2*	20XX+3*	20XX+4*

(c) Proyeksi Arus Kas Setiap Tahun Selama Lima Tahun

(1) Proyeksi Arus Kas Untuk Perusahaan Asuransi Umum Syariah/Perusahaan Reasuransi Syariah

Uraian	Proyeksi (Jan – Des)				
	20XX*	20XX+1*	20XX+2*	20XX+3*	20XX+4*
SALDO AWAL					
SALDO AKHIR KAS					
ARUS KAS DARI AKTIFITAS OPERASI					
Arus Kas Masuk					
Kontribusi Para Peserta					
Ujroh yang diterima					

Uraian	Proyeksi (Jan – Des)				
	20XX*	20XX+1*	20XX+2*	20XX+3*	20XX+4*
Klaim Reasuransi Diterima					
Penerimaan Distribusi Surplus Underwriting Reasuransi					
Lain - Lain					
Arus Kas Keluar					
Klaim Dibayar					
Ujroh					
Beban Pemasaran					
Pembayaran Ujroh Reasuransi					
Pembayaran Ujroh Asuransi					
Kontribusi Reasuransi Dibayar					
Pembayaran Sewa					
Pembayaran Zakat					
Pembayaran Pajak					
Lain-lain					
ARUS KAS DARI AKTIFITAS INVESTASI					
Arus Kas Masuk					
Penerimaan Hasil Investasi					
Penerimaan Alokasi Surplus Dana Tabarru'					
Penerimaan Bagi Hasil Investasi Dana Tabaru'					
Pencairan Investasi					
Penjualan Tanah dan Bangunan					
Penerimaan Kas Dari Para Peserta					
Penjualan Aktiva Tetap					
Lain-lain					
Arus Kas Keluar					
Penempatan Investasi					
Pembayaran Kepada Para Peserta					
Pembayaran Distribusi Surplus UW ke Perusahaan					
Pembayaran Distribusi Surplus UW ke Peserta/Pemegang Polis					
Pembayaran Bagi Hasil Investasi DT ke Perusahaan/Operator					
Pembayaran ujroh/fee kepada Perusahaan					
Pembelian Aktiva Tetap					
Lain-lain					

Uraian	Proyeksi (Jan – Des)				
	20XX*	20XX+1*	20XX+2*	20XX+3*	20XX+4*
ARUS KAS DARI AKTIFITAS PENDANAAN					
Arus Kas Masuk					
Setoran Modal/Modal Kerja					
Pinjaman Subordinasi					
Penerimaan Qardh					
Qardh					
Lain-lain					
Arus Kas Keluar					
Pembayaran Pinjaman Subordinasi					
Pembayaran Dividen					
Pembayaran Qardh					
Qardh					
Lain-lain					
Arus Kas Masuk					
Setoran Modal/Modal Kerja					
Pinjaman Subordinasi					
Penerimaan Qardh					
Qardh					
Lain-lain					

(2) Proyeksi Arus Kas Untuk Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah

Uraian	Proyeksi (Jan – Des)				
	20XX*	20XX+1*	20XX+2*	20XX+3*	20XX+4*
SALDO AWAL					
SALDO AKHIR KAS					
ARUS KAS DARI AKTIFITAS OPERASI					
Arus Kas Masuk					
Kontribusi Para Peserta					
Ujroh yang diterima					
Klaim Reasuransi Diterima					
Penerimaan Distribusi Surplus Underwriting Reasuransi					
Lain - Lain					
Arus Kas Keluar					
Klaim Dibayar					
Komisi					
Beban Pemasaran					
Pembayaran Ujroh Reasuransi					

Uraian	Proyeksi (Jan – Des)				
	20XX*	20XX+1*	20XX+2*	20XX+3*	20XX+4*
Pembayaran Ujroh Asuransi					
Kontribusi Reasuransi Dibayar					
Pembayaran Sewa					
Pembayaran Zakat					
Pembayaran Pajak					
Lain-lain					
ARUS KAS DARI AKTIFITAS INVESTASI					
Arus Kas Masuk					
Penerimaan Hasil Investasi					
Penerimaan Alokasi Surplus Dana Tabarru'					
Penerimaan Bagi Hasil Investasi Dana Tabaru'					
Pencairan Investasi					
Penjualan Tanah dan Bangunan					
Penerimaan Kas Dari Para Peserta					
Penjualan Aktiva Tetap					
Lain-lain					
Arus Kas Keluar					
Penempatan Investasi					
Pembayaran Kepada Para Peserta					
Pembayaran Distribusi Surplus UW ke Perusahaan					
Pembayaran Distribusi Surplus UW ke Peserta/Pemegang Polis					
Pembayaran Bagi Hasil Investasi DT ke Perusahaan/Operator					
Pembayaran ujroh/fee kepada Perusahaan					
Pembelian Aktiva Tetap					
Lain-lain					
ARUS KAS DARI AKTIFITAS PENDANAAN					
Arus Kas Masuk					
Setoran Modal/Modal Kerja					
Pinjaman Subordinasi					
Penerimaan Qardh					
Qardh					
Lain-lain					
Arus Kas Keluar					
Pembayaran Pinjaman Subordinasi					

Uraian	Proyeksi (Jan – Des)				
	20XX*	20XX+1*	20XX+2*	20XX+3*	20XX+4*
Pembayaran Dividen					
Pembayaran Qardh					
Qardh					
Lain-lain					

Keterangan:
* Apabila Keterangan:
Penyampaian rencana korporasi adalah untuk tahun 2015-2019, maka 20XX adalah 2015, 20XX+1 adalah 2016 dst.

(d) Proyeksi Rasio Tingkat Kesehatan Keuangan MMBR dan Rasio Tingkat Kesehatan Keuangan Selain MMBR dan Rasio Rentabilitas

URAIAN	Proyeksi Jan - Des				
	20XX*	20XX+1*	20XX+2*	20XX+3*	20XX+4*
TINGKAT SOLVABILITAS ASET YANG DIPERKENANKAN					
Aset Yang Diperkenankan					
Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi)					
Jumlah Tingkat Solvabilitas (a)					
Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR)					
Jumlah MMBR (b)					
Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat Solvabilitas					
Rasio Pencapaian Solvabilitas (a:b)					
RASIO TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN SELAIN MMBR					
Rasio Likuiditas	-				
a. Aset Lancar					
b. Liabilitas Lancar					
c. Rasio (a : b)					
Rasio Kecukupan Investasi					
a. Investasi + Kas & Bank (Lihat Neraca SAP)					
b. Cadangan Teknis Retensi Sendiri					
c. Utang Klaim Retensi Sendiri + Utang Lain Kepada Tertanggung	-				
d. Rasio (a : (b + c))	-				
Rasio Perimbangan Hasil Investasi dengan Pendapatan Kontribusi Neto					
a. Hasil Investasi					
b. Pendapatan Kontribusi Neto					
c. Rasio (a : b)					
Rasio Beban Klaim, Beban Usaha, dan Komisi					
a. Beban Klaim Neto					
b. Beban Usaha	-				
c. Komisi Neto					
d. Pendapatan Kontribusi Neto					
e. e. Rasio a : d (rasio I)					

f. f. Rasio b : d (rasio II)					
g. g. Rasio c : d (rasio III)	-				
h. h. Rasio I + Rasio II + Rasio III	-				
Return of Investment (ROI)					
a. Laba (Rugi) Setelah Pajak					
b. Rata-rata Investasi					
c. Rasio a:b					
vi. Return on Equity (ROE)					
a. Laba (Rugi) Setelah Pajak	-				
b. Ekuitas					
c. Rasio a:b					

(e) Proyeksi Rasio-Rasio dan Pos-Pos Tertentu Lainnya Untuk Perusahaan Asuransi Umum Syariah

(dalam jutaan rupiah) (rasio dalam persentase)

Uraian	Aktual	Proyeksi	Proyeksi				Proyeksi	
	Jan-Sept 20XX-1*	Jan-Des 20XX-1*	Tahun ke-1				Jan-Des 20XX+1*	Jan-Des 20XX+2*
			Jan-Mar 20XX*	Jan-Jun 20XX*	Jan-Sep 20XX*	Jan-Des 20XX*		
TINGKAT SOLVABILITAS ASET YANG DIPERKENANKAN								
Aset Yang Diperkenankan								
Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi)								
Jumlah Tingkat Solvabilitas (a)								
Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR)								
Jumlah MMBR (b)								
Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat Solvabilitas								
Rasio Pencapaian Solvabilitas (a:b)								
RASIO TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN SELAIN MMBR								
Rasio Likuiditas								
a. Aset Lancar								
b. Liabilitas Lancar								
c. Rasio (a : b)								
Rasio Kecukupan Investasi								
a. Investasi + Kas & Bank (Lihat Neraca SAP)								
b. Cadangan Teknis Retensi Sendiri								
c. Utang Klaim Retensi Sendiri + Utang Lain Kepada Tertanggung								
d. Rasio (a : (b + c))								
Rasio Perimbangan Hasil Investasi dengan Pendapatan Kontribusi Neto								

Uraian	Aktual	Proyeksi	Proyeksi				Proyeksi	
	Jan-Sept 20XX-1*	Jan-Des 20XX-1*	Tahun ke-1					
			Jan-Mar 20XX*	Jan-Jun 20XX*	Jan-Sep 20XX*	Jan-Des 20XX*	Jan-Des 20XX+1 *	Jan-Des 20XX+2 *
a. Hasil Investasi								
b. Pendapatan Kontribusi Neto								
c. Rasio (a : b)								
Rasio Beban Klaim, Beban Usaha, dan Komisi								
i. Beban Klaim Neto								
j. Beban Usaha								
k. Komisi Neto								
l. Pendapatan Kontribusi Neto								
m. e. Rasio a : d (rasio I)								
n. f. Rasio b : d (rasio II)								
o. g. Rasio c : d (rasio III)								
p. h. Rasio I + Rasio II + Rasio III								
Return of Investment (ROI)								
d. Laba (Rugi) Setelah Pajak								
e. Rata-rata Investasi								
f. Rasio a:b								
vi. Return on Equity (ROE)								
d. Laba (Rugi) Setelah Pajak								
e. Ekuitas								
f. Rasio a:b								

Keterangan:

*Apabila penyampaian rencana bisnis adalah untuk tahun 2015 - 2017, maka 20XX-1 adalah tahun 2014 (tahun berjalan), 20XX adalah tahun 2015 dst.

**Jika ada akun yang harus diisi dari perhitungan akumulasi, misal dari laporan laba rugi, maka diisi dengan nilai akumulasi.

(f) Proyeksi Rasio-Rasio dan Pos-Pos Tertentu Lainnya Untuk Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah

URAIAN	Aktual	Proyeksi	Proyeksi				Proyeksi	
			Tahun ke-1					
	Jan-Sept	Jan-Des	Jan-Mar	Jan-Jun	Jan-Sep	Jan-Des	Jan-Des	Jan-Des
	20XX-1*	20XX-1*	20XX*	20XX*	20XX*	20XX*	20XX+1*	20XX+2*
TINGKAT SOLVABILITAS ASET YANG DIPERKENANKAN								
Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi)								
Jumlah Tingkat Solvabilitas (a)								
Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR)								
Jumlah MMBR (b)								
Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat Solvabilitas								
Rasio Pencapaian								

URAIAN	Aktual	Proyeksi	Proyeksi				Proyeksi	
	Jan-Sept	Jan-Des	Tahun ke-1					
			Jan-Mar 20XX*	Jan-Jun 20XX*	Jan-Sep 20XX*	Jan-Des 20XX*	Jan-Des 20XX+1*	Jan-Des 20XX+2*
Solvabilitas (a:b)								
RASIO TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN SELAIN MMBR								
i. Rasio Likuiditas								
a. Aset Lancar								
b. Liabilitas Lancar								
c. Rasio (a : b)								
ii.Rasio Kecukupan Investasi								
a. Investasi + Kas & Bank (Lihat Neraca SAP)								
b. Cadangan Teknis Retensi Sendiri								
c. Utang Klaim Retensi Sendiri + Utang Lain Kepada Tertanggung								
d. Rasio (a : (b + c))								
iii.Rasio Perimbangan Hasil Investasi dengan Pendapatan Kontribusi Neto								
a. Hasil Investasi								
b. Pendapatan Kontribusi Neto								
c. Rasio (a : b)								
iv.Rasio Beban Klaim, Beban Usaha, dan Komisi								
a. Beban Klaim Neto								
b. Beban Usaha								
c. Komisi Neto								
d. Pendapatan Kontribusi Neto								
e. Rasio a : d (rasio I)								
f. Rasio b : d (rasio II)								
g. Rasio c : d (rasio III)								
h. Rasio I + Rasio II + Rasio III								
v. Return of Investment (ROI)								
a. Laba (Rugi) Setelah Pajak								
b. Rata-rata Investasi								
c. Rasio a:b								
vi. Return on Equity (ROE)								
a. Laba (Rugi) Setelah Pajak								
b. Ekuitas								
c. Rasio a:b								

Keterangan:

*Apabila penyampaian rencana bisnis adalah untuk tahun 2015 - 2017, maka 20XX-1 adalah tahun 2014 (tahun berjalan), 20XX adalah tahun 2015 dst.

**Jika ada akun yang harus diisi dari perhitungan akumulasi, misal dari laporan laba rugi, maka diisi dengan nilai akumulasi.

6. Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan Dan Program Kegiatan Non Keuangan

Contoh:

Isu Strategik 1: Struktur SDM						
Sasaran: 1. Peningkatan umur produktif menjadi 90.5%. 2. Peningkatan tenaga ahli dari 10% (40 orang) menjadi 25% 100 orang). 3. Terwujud struktur komposisi SDM yang ideal.						
Strategi: Rekomposisi dan Pemetaan SDM						
Kebijakan: Rekomposisi SDM didasarkan atas kompetensi yang dibutuhkan perusahaan						
No	Program	20XX	20XX+1	20XX+2	20XX+3	20XX+4
1	Melakukan <i>man power planning</i>					
2	<i>Job enrichment</i>					
3	Mutasi atau rotasi pegawai secara sistematis dan berkesinambungan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan perusahaan					
4	Melakukan rekrutmen sesuai kompetensi yang dibutuhkan perusahaan					

(a) SDM

Isu Strategik:						
Sasaran: 1. 2. 3.						
Strategi:						
Kebijakan: Rekomposisi SDM didasarkan atas kompetensi yang dibutuhkan perusahaan						
No	Program	20XX	20XX+1	20XX+2	20XX+3	20XX+4
1						
2						
3						
4						
Dst						

(b) Teknologi Informasi

Isu Strategik:	
Sasaran: 1.	

2.						
3.						
Strategi:						
Kebijakan: Rekomposisi SDM didasarkan atas kompetensi yang dibutuhkan perusahaan						
No	Program	20XX	20XX+1	20XX+2	20XX+3	20XX+4
1						
2						
3						
4						
Dst						

Keterangan:

* Apabila penyampaian rencana korporasi adalah untuk tahun 2015-2019, maka 20XX adalah 2015, 20XX+1 adalah 2016 dst.

(c) Pengembangan Produk

Isu Strategik:						
Sasaran: 1. 2. 3.						
Strategi:						
Kebijakan: Rekomposisi SDM didasarkan atas kompetensi yang dibutuhkan perusahaan						
No	Program	20XX	20XX+1	20XX+2	20XX+3	20XX+4
1						
2						
3						
4						
Dst						

(d) Pengembangan Jaringan Kantor

Isu Strategik:						
Sasaran: 1. 2. 3.						
Strategi:						
Kebijakan: Rekomposisi SDM didasarkan atas kompetensi yang dibutuhkan perusahaan						
No	Program	20XX	20XX+1	20XX+2	20XX+3	20XX+4
1						

2						
3						
4						
Dst						

- (e) Hal-hal lain Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Perusahaan
- Informasi lainnya paling sedikit meliputi informasi yang perlu disampaikan karena mempengaruhi kegiatan usaha yang tidak disebutkan dalam cakupan rencana bisnis.
- Contoh:
1. Rencana merger, akuisisi, dan konsolidasi
 2. Pengalihan portofolio pertanggungan
 3. Rencana perubahan bidang usaha perasuransian
 4. rencana perubahan kegiatan usaha tidak berdasarkan prinsip syariah berdasarkan prinsip syariah.

Isu Strategik:						
Sasaran: 1. 2. 3.						
Strategi:						
Kebijakan: Rekomposisi SDM didasarkan atas kompetensi yang dibutuhkan perusahaan						
No	Program	20XX	20XX+1	20XX+2	20XX+3	20XX+4
1						
2						
3						
4						
Dst						

FORMAT II B

BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN LAIN BAGI PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH, DAN UNIT SYARIAH

Laporan Rencana Bisnis sesuai dengan ketentuan pasal 68 ayat (4) POJK Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan dengan batas waktu penyampaian paling lambat 31 Oktober tahun sebelumnya.

LAPORAN RENCANA BISNIS

Tahun

(diisi nama dan alamat perusahaan)

_____, _____ 20xx

Direktur

(Cap Perusahaan)

 N a m a J e l a s

Jabatan

Rencana Bisnis Perusahaan

1. Ringkasan Eksekutif
a. Indikator Keuangan

No.	Uraian	Proyeksi	
		Jutaan Rupiah	% Pertumbuhan
1	Aset		
2	Investasi		
3	Utang		
4	Penyisihan Teknis		
5	Ekuitas		
6	Kontribusi Bruto		
7	Klaim Bruto		
8	Beban Akuisisi		
9	Beban Operasional		
10	Hasil Underwriting		
11	Laba (Rugi) Sebelum Pajak		
12	Laba (Rugi) Setelah Pajak		
13	Laba (Rugi) Komprehensif		

- b. Rasio Keuangan

No	Uraian	%
1	Rasio Pencapaian Solvabilitas	
2	Rasio Kecukupan Investasi	
3	Rasio Likuiditas	
4	Rasio Beban Klaim	
5	Rasio Beban Usaha	
6	Rasio Komisi	
7	Rasio Beban Klaim, Beban Usaha dan Komisi	
8	Rasio Perimbangan Hasil Investasi dengan Pendapatan Premi Neto	
9	Rasio Hasil Usaha Asuransi	
10	Return on Investment (ROI)	
11	Return on Equity (ROE)	

- c. Ringkasan Eksekutif Non Keuangan

Ringkasan eksekutif non keuangan berisi ringkasan informasi mengenai target Perusahaan 1 (satu) hingga 3 (tiga) tahun kedepan yang dianggap Perusahaan sangat perlu dicantumkan dalam ringkasan eksekutif.

2. Kebijakan Dan Strategi Manajemen
Dilengkapi dengan target yang akan dicapai 1 (satu) hingga 3 (tiga) tahun kedepan disertai dengan kebijakan dan strategi yang akan dijalankan.

No	Target	Kebijakan	Strategi
1.		a.	1)
			2)
			Dst
		b.	1)
			2)
			Dst

No	Target	Kebijakan	Strategi
		Dst	
2.		a.	1)
			2)
			Dst
		b.	1)
			2)
			Dst
		Dst	
Dst			

3. Kinerja Perusahaan Saat Ini

a. Pendapatan Premi

No.	Lini Usaha	RKAP Tahun n-1	RKAP Tahun n	Aktual per 30 September Tahun n	% Pencapaian	% Kenaikan (Penurunan) terhadap RKAP Tahun n-1
1	2	3	4	5	6=5/4	7=(4-3)/3

b. Hasil Investasi

No.	Jenis Investasi	Hasil Investasi				
		RKAP Tahun n-1	RKAP Tahun n	Aktual per 30 September Tahun n	% Pencapaian	% Kenaikan (Penurunan) terhadap RKAP Tahun n-1
1	2	3	4	5	6=5/4	7=(4-3)/3

c. Laba

No.	Laba	RKAP Tahun n-1	RKAP Tahun n	Aktual per 30 Septemb er Tahun n	% Pencapaian	% Kenaikan (Penurunan) terhadap RKAP Tahun n-1
1	2	3	4	5	6=5/4	7=(4-3)/3
	Laba Sebelum Pajak					
	Laba Setelah Pajak					
	Laba (Rugi) Komprehensif					

d. Hasil Underwriting

No.	Lini Usaha	RKAP Tahun n-1	RKAP Tahun n	Aktual per 30 Sept Tahun n	% Pencapaian	% Kenaikan (Penurunan) terhadap RKAP Tahun n-1
1	2	3	4	5	6=5/4	7=(4-3)/3

4. Proyeksi Laporan Keuangan Dan Asumsi Yang Digunakan
a. Proyeksi Posisi Keuangan Untuk Perusahaan Asuransi Umum
Syariah/Perusahaan Reasuransi Syariah

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Aktual per 30 Sept 20XX- 1*	Proyeksi per 31 Des 20XX-1*	Proyeksi Tahun ke-1				Proyeksi	
			per 31 Mar 20XX*	per 30 Jun 20XX*	per 30 Sep 20XX*	per 31 Des 20XX*	per 31 Des 20XX +1*	per 31 Des 20XX +2*
<u>ASET</u>								
<u>Investasi</u>								
Surat berharga yang dimiliki								
Deposito dan Sertifikat Deposito	-	-	-					-
Saham Syariah	-	-	-					-
Sukuk atau Obligasi Syariah	-	-	-					-
MTN Syariah	-	-	-					-
Surat Berharga Syariah Negara	-	-	-					-
Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia	-	-	-					-
Surat Berharga Syariah Yang Diterbitkan oleh selain negara Republik Indonesia	-	-	-					-
Surat Berharga Syariah Yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional	-	-	-					-
Reksa Dana Syariah	-	-	-					-
Efek Beragun Aset Syariah	-	-	-					-
Dana Investasi Real Estate Syariah	-	-	-					-
REPO	-	-	-					-
Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain	-	-	-					-
Penyertaan Langsung(rincian)	-	-	-					-
Properti Investasi (rincian)	-	-	-					-
Emas Murni	-	-	-					-
Investasi Lain								
Jumlah Investasi	-	-	-					-
Bukan Investasi								-
Kas dan Bank	-	-	-					-
Tagihan (rincian)	-	-	-					-
Aset reasuransi	-	-	-					-
Biaya akuisisi yang ditangguhkan	-	-	-					-
Property Non Investasi (rincian)	-	-	-					-
Aset Lain	-	-	-					-
Jumlah Bukan investasi	-	-	-					-
JUMLAH ASET	-	-	-					-
LIABILITAS DAN EKUITAS								-
<u>Liabilitas</u>								-

URAIAN	Aktual per 30 Sept 20XX- 1*	Proyeksi per 31 Des 20XX-1*	Proyeksi Tahun ke-1				Proyeksi	
			per 31 Mar 20XX*	per 30 Jun 20XX*	per 30 Sep 20XX*	per 31 Des 20XX*	per 31 Des 20XX +1*	per 31 Des 20XX +2*
Utang								-
Utang klaim	-	-	-					-
Utang lain (rincian)	-	-	-					-
Biaya yang Masih Harus Dibayar	-	-	-					-
Penyisihan Teknis	-	-	-					-
Penyisihan ujuh	-	-	-					-
Penyisihan penjaminan pokok investasi	-	-	-					-
Penyisihan kontribusi	-	-	-					-
Penyisihan kontribusi yang blum merupakan pendapatan	-	-	-					-
Penyisihan klaim								-
Penyisihan atas risiko bencana	-	-	-					-
Qardh/ Qardh Subordinasi	-	-	-					-
Ekuitas Dana	-	-	-					-
Modal Disetor	-	-	-					-
Agio Saham	-	-	-					-
Penyisihan	-	-	-					-
Akumulasi Dana	-	-	-					-
Kenaikan (Penurunan) Surat Berharga	-	-	-					-
Selisih Saldo SAK dan Saldo SAP	-	-	-					-
Saldo Laba	-	-	-					-
Kekayaan Yang Tidak Diperkenankan	-	-	-					-

Keterangan:

*Apabila penyampaian rencana bisnis adalah untuk tahun 2015 - 2017, maka 20XX-1 adalah tahun 2014 (tahun berjalan), 20XX adalah tahun 2015 dst.

** Jika uraian di bawah ini tidak ada angka yang terkait SAP maka di rasio dimasukkan secara manual:

- Saldo Investasi SAP • AYD • Jumlah cadangan teknis • Utang klaim
- Kewajiban kepada tertanggung

b. Proyeksi Posisi Keuangan Untuk Perusahaan Asuransi Jiwa

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Aktual per 30 Sept 20XX- 1*	Proyeksi per 31 Des 20XX-1*	Proyeksi Tahun ke-1				Proyeksi	
			per 31 Mar 20XX*	per 30 Jun 20XX*	per 30 Sep 20XX*	per 31 Des 20XX*	per 31 Des 20XX +1*	per 31 Des 20XX +2*
ASET								
Investasi								
Surat berharga yang dimiliki	-	-	-					-
Deposito dan Sertifikat Deposito	-	-	-					-
Saham Syariah	-	-	-					-
Sukuk atau Obligasi Syariah	-	-	-					-
MTN Syariah	-	-	-					-
Surat Berharga Syariah	-	-	-					-

URAIAN	Aktual per 30 Sept 20XX- 1*	Proyeksi per 31 Des 20XX-1*	Proyeksi Tahun ke-1				Proyeksi	
			per 31 Mar 20XX*	per 30 Jun 20XX*	per 30 Sep 20XX*	per 31 Des 20XX*	per 31 Des 20XX +1*	per 31 Des 20XX +2*
Negara								
Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia	-	-	-					-
Surat Berharga Syariah Yang Diterbitkan oleh selain negara Republik Indonesia	-	-	-					-
Surat Berharga Syariah Yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional	-	-	-					-
Reksa Dana Syariah	-	-	-					-
Efek Beragun Aset Syariah	-	-	-					-
Dana Investasi Real Estate Syariah	-	-	-					-
REPO	-	-	-					-
Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain	-	-	-					-
Penyertaan Langsung(rincian)	-	-	-					-
Properti Investasi (rincian)	-	-	-					-
Emas Murni	-	-	-					-
Investasi Lain								-
Jumlah Investasi	-	-	-					-
Bukan Investasi	-	-	-					-
Kas dan Bank	-	-	-					-
Tagihan (rincian)	-	-	-					-
Aset reasuransi	-	-	-					-
Biaya akuisisi yang ditangguhkan	-	-	-					-
Property Non Investasi (rincian)	-	-	-					-
Aset Lain	-		-					
Jumlah Bukan investasi	-		-					
JUMLAH ASET	-	-	-					-
LIABILITAS DAN	-	-	-					-
EKUITAS								-
Liabilitas								-
Utang								-
Utang klaim	-	-	-					-
Utang lain (rincian)	-	-	-					-
Biaya yang Masih Harus Dibayar	-	-	-					-
Penyisihan Teknis	-	-	-					-
Penyisihan ujroh	-	-	-					-
Penyisihan penjaminan pokok investasi	-	-	-					-
Penyisihan kontribusi	-	-	-					-
Penyisihan kontribusi yang blum merupakan pendapatan	-	-	-					-
Penyisihan klaim								-
Penyisihan atas risiko bencana	-	-	-					-

URAIAN	Aktual per 30 Sept 20XX- 1*	Proyeksi per 31 Des 20XX-1*	Proyeksi Tahun ke-1				Proyeksi	
			per 31 Mar 20XX*	per 30 Jun 20XX*	per 30 Sep 20XX*	per 31 Des 20XX*	per 31 Des 20XX +1*	per 31 Des 20XX +2*
Qardh/ Qardh Subordinasi	-	-	-					-
Ekuitas Dana	-	-	-					-
Modal Disetor	-	-	-					-
Agio Saham	-	-	-					-
Penyisihan	-	-	-					-
Akumulasi Dana	-	-	-					-
Kenaikan (Penurunan) Surat Berharga	-	-	-					-
Selisih Saldo SAK dan Saldo SAP	-	-	-					-
Saldo Laba	-	-	-					-
Kekayaan Yang Tidak Diperkenankan	-	-	-					-

- Keterangan:
- * Apabila penyampaian rencana bisnis adalah untuk tahun 2015 - 2017, maka 20XX-1 adalah tahun 2014 (tahun berjalan), 20XX adalah tahun 2015 dst.
 - ** Jika uraian di bawah ini tidak ada maka di rasio dimasukkan secara manual
 - Saldo Investasi SAP
 - AYD
 - Jumlah cadangan teknis
 - Utang klaim
 - Kewajiban kepada tertanggung

c. Proyeksi Laba/Rugi Komprehensif Untuk Perusahaan Asuransi Umum Syariah/Perusahaan Reasuransi Syariah

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Aktual	Aktual	Proyeksi Tahun ke-1				Proyeksi	
	Jan- Sept	Jan- Des	Jan- Mar	Jan- Jun	Jan- Sep	Jan- Des	Jan- Des	Jan-31
	20XX- 1*	20XX- 1*	20XX*	20XX*	20XX*	20XX*	20XX +1*	Des 20XX+ 2*
PENDAPATAN UNDERWRITING								
Kontribusi Bruto								
Alokasi Kontribusi Langsung untuk Tabarru, Ujroh, dan Investasi								
Alokasi Kontribusi Tidak Langsung untuk Tabarru, Ujroh, dan Investasi								
Jumlah Pendapatan Kontribusi								
c. Ujroh Dibayar	-							-
Jumlah Kontribusi Bruto								
Kontribusi Reasuransi								
a. Kontribusi Reasuransi Dibayar								
b. Ujroh Reasuransi Diterima	-							-
Jumlah Kontribusi Reasuransi	-							-
Kontribusi Neto								
Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi dan PKYBMP								

URAIAN	Aktual	Aktual	Proyeksi				Proyeksi	
			Tahun ke-1					
	Jan- Sept	Jan- Des	Jan- Mar 20XX*	Jan- Jun 20XX*	Jan- Sep 20XX*	Jan- Des 20XX*	Jan- Des 20XX +1*	Jan-31 Des 20XX+ 2*
20XX- 1*	20XX- 1*							
a. Penurunan (kenaikan) Penyisihan Kontribusi	-						-	
b. Penurunan (kenaikan) PKYBMP	-						-	
Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi dan PKYBMP								
Jumlah Pendapatan Kontribusi Neto	-						-	
Pendapatan Underwriting Lain Neto								
PENDAPATAN UNDERWRITING								
BEBAN UNDERWRITING								
Beban Klaim								
a. Klaim Bruto	-						-	
b. Klaim Reasuransi								
c. Kenaikan (Penurunan) Penyisihan Klaim	-						-	
Jumlah Beban Klaim Netto	-						-	
Beban Underwriting Lain Neto								
JUMLAH BEBAN UNDERWRITING								
HASIL UNDERWRITING								
Hasil Investasi								
Beban Usaha:								
a. Beban Pemasaran								
b. Beban Umum dan Administrasi:	-						-	
- Beban Pegawai dan Pengurus	-						-	
- Beban Pendidikan dan Pelatihan								
LABA (RUGI) USAHA ASURANSI	-						-	
Pendapatan Lain								
Beban Lain								
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	-						-	
Pajak Penghasilan	-						-	
LABA SETELAH PAJAK								
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN								
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF								

Keterangan:
* Apabila penyampaian rencana bisnis adalah untuk tahun 2015 - 2017, maka 20XX-1 adalah tahun 2014 (tahun berjalan), 20XX adalah tahun 2015 dst.

d. Proyeksi Laba/Rugi Komprehensif Untuk Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah
(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Aktual	Proyeksi	Proyeksi				Proyeksi	
	Jan- Sept	Jan-Des	Tahun ke-1				Jan- Des 20XX +1*	Jan- Des 20XX+ 2*
			Jan- Mar 20XX*	Jan- Jun 20XX*	Jan- Sep 20XX*	Jan- Des 20XX *		
PENDAPATAN								
Pendapatan Kontribusi Bruto								
a. Alokasi Kontribusi Langsung untuk Tabarru, Ujroh, dan Investasi								
b. Alokasi Kontribusi Tidak Langsung untuk Tabarru, Ujroh, dan Investasi								
Kontribusi Reasuransi								
a. Kontribusi Reasuransi dibayar								
b. Kontribusi Reasuransi diterima								
Penurunan (Kenaikan) Kontribusi Yang Belum Merupakan Pendapatan								
Pendapatan Kontribusi								
Jumlah Pendapatan Kontribusi Neto								
Hasil Investasi								
Pendapatan Lain								
JUMLAH PENDAPATAN								
BEBAN								
Klaim dan Manfaat								
Klaim dan Manfaat Dibayar								
Klaim Reasuransi								
Kenaikan (Penurunan) Penyisihan ujroh								
Kenaikan (Penurunan) Penyisihan penjaminan pokok investasi								
Kenaikan (Penurunan) Penyisihan kontribusi								
Kenaikan (Penurunan) Penyisihan kontribusi yang blum merupakan pendapatan								
Kenaikan (Penurunan) Penyisihan klaim								
Kenaikan (Penurunan) Penyisihan atas risiko bencana (rincian pending)								
Jumlah Beban Klaim dan Manfaat								
Biaya Akuisisi								

URAIAN	Aktual	Proyeksi	Proyeksi				Proyeksi	
			Tahun ke-1					
	Jan- Sept	Jan-Des	Jan- Mar 20XX*	Jan- Jun 20XX*	Jan- Sep 20XX*	Jan- Des 20XX *	Jan- Des 20XX + 1*	Jan- Des 20XX+ 2*
20XX- 1*	20XX- 1*							
PENDAPATAN								
a. Beban Komisi Tahun Pertama								
b. Beban Komisi Tahun Lanjutan								
c. Beban Komisi Overiding								
d. Beban Komisi Lainnya								
Jumlah Biaya Akuisisi								
Pemasaran								
Umum dan Administrasi								
Hasil (Beban) Lain								
JUMLAH BEBAN								
LABA (RUGI) SEBELUM ZAKAT								
PAJAK (TAXES)								
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK								

Keterangan:

* Apabila penyampaian rencana bisnis adalah untuk tahun 2015 - 2017, maka 20XX-1 adalah tahun 2014 (tahun berjalan), 20XX adalah tahun 2015 dst

e. Proyeksi Arus Kas Untuk Perusahaan Asuransi Umum Syariah/Perusahaan Reasuransi Syariah

URAIAN	Aktual	Proyeksi	Proyeksi				Proyeksi	
	Jan- Sept	Jan-Des	Tahun ke-1				Jan- Des 20XX +1*	Jan- Des 20XX+ 2*
			Jan- Mar 20XX*	Jan- Jun 20XX*	Jan- Sep 20XX*	Jan- Des 20XX *		
SALDO AWAL								
SALDO AKHIR KAS								
ARUS KAS DARI AKTIFITAS OPERASI								
Arus Kas Masuk								
Kontribusi Para Peserta								
Ujroh yang diterima								
Klaim Reasuransi Diterima								
Penerimaan Distribusi Surplis Underwriting Reasuransi								
Lain - Lain								
	-							
Arus Kas Keluar								
Klaim Dibayar								
Ujroh								
Beban Pemasaran								
Pembayaran Ujroh Reasuransi								
Pembayaran Ujroh Asuransi								
Kontribusi Reasuransi Dibayar	-							
Pembayaran Sewa	-							
Pembayaran Zakat								
Pembayaran Pajak								
Lain-lain								

ARUS KAS DARI AKTIFITAS INVESTASI								
Arus Kas Masuk	-							
Penerimaan Hasil Investasi								
Penerimaan Alokasi Surplus Dana Tabarru'								
Penerimaan Bagi Hasil Investasi Dana Tabaru'								
Pencairan Investasi								
Penjualan Tanah dan Bangunan	-							
Penerimaan Kas Dari Para Peserta	-							
Penjualan Aktiva Tetap Lain-lain								
Arus Kas Keluar								
Penempatan Investasi								
Pembayaran Kepada Para Peserta	-							
Pembayaran Distribusi Surplus UW ke Perusahaan								
Pembayaran Distribusi Surplus UW ke Peserta/Pemegang Polis								
Pembayaran Bagi Hasil Investasi DT ke Perusahaan/Operator								
Pembayaran ujroh/fee kepada Perusahaan								
Pembelian Aktiva Tetap	-							
Lain-lain	-							
ARUS KAS DARI AKTIFITAS PENDANAAN	-							
Arus Kas Masuk								
Setoran Modal/Modal Kerja								
Pinjaman Subordinasi								
Penerimaan Qardh Qardh								
Lain-lain								
Arus Kas Keluar								
Pembayaran Pinjaman Subordinasi								
Pembayaran Dividen								
Pembayaran Qardh Qardh								
Lain-lain								

Keterangan:
*Apabila penyampaian rencana bisnis adalah untuk tahun 2015 - 2017, maka 20XX-1 adalah tahun 2014 (tahun berjalan), 20XX adalah tahun 2015 dst

f. Proyeksi Arus Kas Untuk Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah

URAIAN	Aktual	Proyeksi	Proyeksi Tahun ke-1				Proyeksi	
	Jan-Sept	Jan-Des	Jan-Mar	Jan-Jun	Jan-Sep	Jan-Des	Jan-Des	Jan-Des
	20XX-1*	20XX-1*	20XX*	20XX*	20XX*	20XX*	20XX+1*	20XX+2*
SALDO AWAL								
SALDO AKHIR KAS								
ARUS KAS DARI AKTIFITAS OPERASI								
Arus Kas Masuk								
Kontribusi Para Peserta								
Ujroh yang diterima								
Klaim Reasuransi Diterima								
Penerimaan Distribusi Surplus Underwriting Reasuransi								
Lain - Lain								
Arus Kas Keluar								
Klaim Dibayar								
Komisi								
Beban Pemasaran								
Pembayaran Ujroh Reasuransi								
Pembayaran Ujroh Asuransi	-							
Kontribusi Reasuransi Dibayar	-							
Pembayaran Sewa								
Pembayaran Zakat								
Pembayaran Pajak								
Lain-lain								
ARUS KAS DARI AKTIFITAS INVESTASI								
Arus Kas Masuk								
Penerimaan Hasil Investasi	-							
Penerimaan Alokasi Surplus Dana Tabarru'								
Penerimaan Bagi Hasil Investasi Dana Tabaru'								
Pencairan Investasi								
Penjualan Tanah dan Bangunan								
Penerimaan Kas Dari Para Peserta	-							
Penjualan Aktiva Tetap	-							
Lain-lain								
Arus Kas Keluar								
Penempatan Investasi								
Pembayaran Kepada Para Peserta								
Pembayaran Distribusi Surplus UW ke Perusahaan	-							
Pembayaran Distribusi Surplus UW ke Peserta/Pemegang Polis								
Pembayaran Bagi Hasil								

URAIAN	Aktual	Proyeksi	Proyeksi Tahun ke-1				Proyeksi	
	Jan-Sept	Jan-Des	Jan-Mar	Jan-Jun	Jan-Sep	Jan-Des	Jan-Des	Jan-Des
	20XX-1*	20XX-1*	20XX*	20XX*	20XX*	20XX*	20XX+1*	20XX+2*
Investasi DT ke Perusahaan/Operator								
Pembayaran ujroh/fee kepada Perusahaan								
Pembelian Aktiva Tetap								
Lain-lain	-							
	-							
ARUS KAS DARI AKTIFITAS PENDANAAN	-							
Arus Kas Masuk								
Setoran Modal/Modal Kerja								
Pinjaman Subordinasi								
Penerimaan Qardh								
Qardh								
Lain-lain								
Arus Kas Keluar								
Pembayaran Pinjaman Subordinasi								
Pembayaran Dividen								
Pembayaran Qardh								
Qardh								
Lain-lain								

Keterangan:

* Apabila penyampaian rencana bisnis adalah untuk tahun 2015 - 2017, maka 20XX-1 adalah tahun 2014 (tahun berjalan), 20XX adalah tahun 2015 dst.

g. Proyeksi Rasio-Rasio dan Pos-Pos Tertentu Lainnya Untuk Perusahaan Asuransi Umum Syariah/Perusahaan Reasuransi Syariah

(dalam jutaan rupiah)
(rasio dalam persentase)

URAIAN	Aktual	Proyeksi	Proyeksi Tahun ke-1				Proyeksi	
	Jan-Sept	Jan-Des	Jan-Mar	Jan-Jun	Jan-Sep	Jan-Des	Jan-Des	Jan-Des
	20XX-1*	20XX-1*	20XX*	20XX*	20XX*	20XX*	20XX+1*	20XX+2*
TINGKAT SOLVABILITAS ASET YANG DIPERKENANKAN								
Aset Yang Diperkenankan								
Liabilitas (selain Qardh dari Dana Perusahaan)								
Dana Tabarru' dan Dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko (DTMBR)								
Rasio Tingkat Solvabilitas sebelum Aset yang Tersedia untuk Qardh								
Rasio target tingkat solvabilitas internal (tahunan) dengan DTMBR								

URAIAN	Aktual	Proyeksi	Proyeksi				Proyeksi	
			Tahun ke-1					
	Jan-Sept	Jan-Des	Jan-Mar 20XX*	Jan-Jun 20XX*	Jan-Sep 20XX*	Jan-Des 20XX*	Jan-Des 20XX+1*	Jan-Des 20XX+2*
Rasio tingkat solvabilitas dengan DTMBR minimum yang dipersyaratkan peraturan								
Kelebihan (kekurangan) tingkat solvabilitas dari target internal								
Ketidacukupan investasi, kas dan bank								
Aset yang Tersedia Untuk Qardh yang Diperhitungkan sebagai Penambah AYD Dana Tabarru'								
Rasio Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' dan Dana Tanahud								
B. RASIO TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN SELAIN MMBR								
i. Rasio Likuiditas								
a. Aset Lancar								
b. Liabilitas Lancar								
c. Rasio (a : b)								
ii.Rasio Kecukupan Investasi								
a. Investasi + Kas & Bank (Lihat Neraca SAP)								
b. Cadangan Teknis Retensi Sendiri								
c. Utang Klaim Retensi Sendiri + Utang Lain Kepada Tertanggung								
d. Rasio (a : (b + c))								
iii.Rasio Perimbangan Hasil Investasi dengan Pendapatan Premi Neto								
a. Hasil Investasi								
b. Pendapatan Premi Neto								
c. Rasio (a : b)								
iv.Rasio Beban Klaim, Beban Usaha, dan Komisi								
a. Beban Klaim Neto								
b. Beban Usaha								
c. Komisi Neto								
d. Pendapatan Premi Neto								
e. Rasio a : d (rasio I)								
f. Rasio b : d (rasio II)								
g. Rasio c : d (rasio III)								
h. Rasio I + Rasio II + Rasio III								
v. Return of Investment								

URAIAN	Aktual	Proyeksi	Proyeksi				Proyeksi	
			Tahun ke-1					
	Jan-Sept	Jan-Des	Jan-Mar 20XX*	Jan-Jun 20XX*	Jan-Sep 20XX*	Jan-Des 20XX*	Jan-Des 20XX +1*	Jan-Des 20XX+ 2*
(ROI)								
a. Laba (Rugi) Setelah Pajak								
b. Rata-rata Investasi								
c. Rasio a:b								
vi. Return on Equity (ROE)								
a. Laba (Rugi) Setelah Pajak								
b. Ekuitas								
c. Rasio a:b								

Keterangan:

*Apabila penyampaian rencana bisnis adalah untuk tahun 2015 - 2017, maka 20XX-1 adalah tahun 2014 (tahun berjalan), 20XX adalah tahun 2015 dst.

**Jika ada akun yang harus diisi dari perhitungan akumulasi, misal dari laporan laba rugi, maka diisi dengan nilai akumulasi.

h. Proyeksi Rasio-Rasio dan Pos-Pos Tertentu Lainnya Untuk Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah

URAIAN	Aktual	Proyeksi	Proyeksi				Proyeksi	
			Tahun ke-1					
	Jan-Sept	Jan-Des	Jan-Mar 20XX*	Jan-Jun 20XX*	Jan-Sep 20XX*	Jan-Des 20XX*	Jan-Des 20XX+1*	Jan-Des 20XX+2*
TINGKAT SOLVABILITAS ASET YANG DIPERKENANKAN								
Aset Yang Diperkenankan								
Liabilitas (selain Qardh dari Dana Perusahaan)								
Dana Tabarru' dan Dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko (DTMBR)								
Rasio Tingkat Solvabilitas sebelum Aset yang Tersedia untuk Qardh								
Rasio target tingkat solvabilitas internal (tahunan) dengan DTMBR								
Rasio tingkat solvabilitas dengan DTMBR minimum yang dipersyaratkan peraturan								
Kelebihan (kekurangan) tingkat solvabilitas dari target internal								
Ketidakcukupan investasi, kas dan bank								
Aset yang Tersedia Untuk Qardh yang Diperhitungkan sebagai								

URAIAN	Aktual	Proyeksi	Proyeksi Tahun ke-1				Proyeksi	
	Jan- Sept	Jan-Des	Jan- Mar 20XX*	Jan- Jun 20XX*	Jan- Sep 20XX*	Jan- Des 20XX *	Jan- Des 20XX +1*	Jan- Des 20XX+ 2*
	20XX- 1*	20XX- 1*						
Penambah AYD Dana Tabarru'								
Rasio Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' dan Dana Tanahud								
B. RASIO TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN SELAIN MMBR								
i. Rasio Likuiditas								
a. Aset Lancar								
b. Liabilitas Lancar								
c. Rasio (a : b)								
ii.Rasio Kecukupan Investasi								
a. Investasi + Kas & Bank (Lihat Neraca SAP)								
b. Cadangan Teknis Retensi Sendiri								
c. Utang Klaim Retensi Sendiri + Utang Lain Kepada Tertanggung								
d. Rasio (a : (b + c))								
iii.Rasio Perimbangan Hasil Investasi dengan Pendapatan Premi Neto								
a. Hasil Investasi								
b. Pendapatan Premi Neto								
c. Rasio (a : b)								
iv.Rasio Beban Klaim, Beban Usaha, dan Komisi								
a. Beban Klaim Neto								
b. Beban Usaha								
c. Komisi Neto								
d. Pendapatan Premi Neto								
e. Rasio a : d (rasio I)								
f. Rasio b : d (rasio II)								
g. Rasio c : d (rasio III)								
h. Rasio I + Rasio II + Rasio III								
v. Return of Investment (ROI)								
a. Laba (Rugi) Setelah Pajak								
b. Rata-rata Investasi								
c. Rasio a:b								
vi. Return on Equity (ROE)								
a. Laba (Rugi) Setelah Pajak								
b. Ekuitas								
c. Rasio a:b								

Keterangan:

*Apabila penyampaian rencana bisnis adalah untuk tahun 2015 - 2017, maka 20XX-1 adalah tahun 2014 (tahun berjalan), 20XX adalah tahun 2015 dst.

**Jika ada akun yang harus diisi dari perhitungan akumulasi, misal dari laporan laba rugi, maka diisi dengan nilai akumulasi.

i. Asumsi Yang Digunakan

No.	URAIAN	Aktual	Proyeksi	Proyeksi Tahun ke-1				Proyeksi	
		Jan-Sept	Jan-Des	Jan-Mar	Jan-Jun	Jan-Sep	Jan-Des	Jan-Des	Jan-Des
		20XX-1 ¹	20XX-1 ¹	20XX ²	20XX ²	20XX ²	20XX ²	20XX+1 ³	20XX+2 ³
1	Nilai tukar rupiah								
2	Tingkat inflasi								
3	Kerugian katastropik (dalam rupiah)								
4	Tingkat hasil investasi								
5	Jumlah pertanggungan baru (dalam premi rupiah)								
6	Tingkat penghentian polis (polis yang dihentikan/jumlah polis di awal periode)								
7	Tingkat klaim (klaim bruto/premi bruto)								
8	dst (asumsi lain yang relevan)								

5. Rencana Perusahaan Asuransi

a. Rencana Permodalan

Rencana permodalan paling sedikit meliputi rencana perubahan modal termasuk rencana penambahan modal dari pemegang saham lama atau pemegang saham baru, rencana penambahan modal melalui pasar modal dan rencana penambahan modal lain. Perusahaan dapat menggunakan format tabel di bawah jika tidak mempunyai format baku. Contoh tabel di bawah berlaku bagi perusahaan asuransi umum syariah/perusahaan asuransi jiwa syariah/perusahaan reasuransi syariah, dan dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan.

URAIAN	Aktual	Proyeksi	Proyeksi Tahun ke-1				Proyeksi	
	Per 30 Sept	Per 31 Des	Per 31 Mar	Per 30 Jun	Per 30 Sep	Per 31 Des	Per 31 Des	Per 31 Des
	20XX-1	20XX-1	Mar 20XX	Jun 20XX	Sep 20XX*	Des 20XX	20XX+1	20XX+2
POSISI MODAL								
Pemegang Saham	(diisi dgn nominal)							
1. -----								
2. -----								

3. -----								
4. -----								
Total Modal Disetor								
IPO (Initial Public Offering) - Go Public								
Penerbitan saham baru								
Lainnya (seperti pinjaman subordinasi)								

Keterangan:

* Apabila penyampaian rencana bisnis adalah untuk tahun 2015 - 2017, maka 20XX-1 adalah tahun 2014 (tahun berjalan), 20XX adalah tahun 2015 dst.

b. Rencana Komposisi Investasi

1) Komposisi Investasi

No.	Jenis investasi	Aktual	Proyeksi	Proyeksi				Proyeksi	
				Tahun ke-1					
		Per 30 sept	Per 31 des	Per 31 mar	Per 30 jun	Per 30 sep	Per 31 des	Per 31 des	Per 31 des
		20xx-1	20xx-1	20xx	20xx	20xx*	20xx	20xx+1	20xx+2
1									
2									
Dst.									

2) Hasil Investasi

No.	Jenis investasi	Aktual	Proyeksi	Proyeksi				Proyeksi	
				Tahun ke-1					
		Per 30 sept	Per 31 des	Per 31 mar 20xx	Per 30 jun 20xx	Per 30 sep 20xx*	Per 31 des 20xx	Per 31 des 20xx+1	Per 31 des 20xx+2
		20xx-1	20xx-1						
1									
2									
Dst.									

a) Rencana Pengembangan Produk dan Pemasaran Produk Asuransi bagi Perusahaan Asuransi Syariah atau Rencana Pengembangan Program Pertanggung Ulang bagi Perusahaan Reasuransi untuk 1 (Satu) Tahun Ke Depan.

No	Nama Produk Baru	Lini Usaha/Cabang Asuransi	Saluran Pemasaran	Rencana penerbitan/pelaksanaan
1				
2				
Dst.				

b) Rencana Pengembangan Organisasi dan SDM

1) Rencana kebutuhan jumlah SDM

[illegible]

Total											
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2) Rencana Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan SDM untuk Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai

No	Materi/Topik	Peserta	Waktu Pelatihan
1			
2			
Dst			

c) Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor

Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor paling sedikit meliputi rencana pembukaan dan penggabungan kantor di luar kantor pusat.

No	Jenis kantor	Waktu pelaksanaan ¹	Lokasi ²	Keterangan ³
A. Pembukaan				
1	Kantor yang memiliki kewenangan menerima atau menolak penutupan asuransi, menandatangani polis, menetapkan untuk membayar atau menolak klaim			
2	Kantor yang tidak memiliki kewenangan menerima atau menolak penutupan asuransi, menandatangani polis, menetapkan untuk membayar atau menolak klaim			
B. Perubahan Status				
1	Kantor yang memiliki kewenangan menerima atau menolak penutupan asuransi, menandatangani polis, menetapkan untuk membayar atau menolak klaim			
2	Kantor yang tidak memiliki kewenangan menerima atau menolak penutupan asuransi, menandatangani polis, menetapkan untuk membayar atau menolak klaim			
C. Penggabungan				
1	Kantor yang memiliki kewenangan menerima atau menolak penutupan asuransi, menandatangani polis, menetapkan untuk membayar atau menolak klaim a. Sesama kantor yang memiliki kewenangan menerima atau menolak penutupan asuransi, menandatangani polis, menetapkan untuk membayar atau menolak klaim			

No	Jenis kantor	Waktu pelaksanaan ¹	Lokasi ²	Keterangan ³
	b. Sesama kantor yang tidak memiliki kewenangan menerima atau menolak penutupan asuransi, menandatangani polis, menetapkan untuk membayar atau menolak klaim dst.			
D. Pemindahan Alamat				
1				
2				
Dst				
E. Penutupan Kantor				
1				
2				
Dst				

Keterangan:
1Diisi dengan bulan rencana waktu pelaksanaan.
2Untuk lokasi di wilayah DKI Jakarta paling kurang menyebutkan nama provinsi DKI Jakarta. Untuk lokasi di luar wilayah DKI Jakarta, paling kurang mencantumkan nama Kabupaten/Kotamadya.
3 - Keterangan detail dapat dilampirkan dalam lembaran terpisah
- Khusus untuk kantor yang memiliki kewenangan menerima atau menolak penutupan asuransi, menandatangani polis, menetapkan untuk membayar atau menolak klaim, diinformasikan tenaga ahli yang akan mengisi kantor tersebut

d) Laporan Rencana Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan Bagi Konsumen Dan/Atau Masyarakat

LAPORAN RENCANA KEGIATAN
DALAM RANGKA MENINGKATKAN LITERASI KEUANGAN
PERIODE: Januari s.d. Desember ... (diisi dengan tahun)
... (diisi dengan nama pelaku usaha jasa keuangan)

No.	Komponen	Rencana
1	Nama Kegiatan	... (diisi dengan nama kegiatan yang menggambarkan aktivitas dalam kegiatan)
2	Tujuan Kegiatan	... (diisi dengan tujuan kegiatan yang akan dicapai oleh PUJK)
3	Bentuk Pelaksanaan	Edukasi Keuangan ☐ Sosialisasi ☐ Workshop ☐ Konsultasi ☐ Pendampingan ☐ Simulasi ☐ Training of Community ☐ Outreach program ☐ Lainnya: ... (sebutkan) Pengembangan Infrastruktur ☐ Training of trainers

		☐ Training of facilitators ☐ Pengembangan e-learning ☐ Pengembangan website ☐ Pengembangan aplikasi mobile ☐ Penyusunan/ pengembangan modul/ materi Edukasi Keuangan ☐ Lainnya: ... (sebutkan) (beri tanda pada salah satu pilihan) Kategori ☐ Baru ☐ Lanjutan (beri tanda pada salah satu pilihan)		
4	Metode Pelaksanaan dan Metode serta Sarana Pengukuran	Metode Pelaksanaan Langsung ☐ Tatap muka ☐ Siaran langsung dengan sarana: ... (sebutkan) ☐ Lainnya: ... (sebutkan)	Metode Pengukuran Edukasi Keuangan ☐ Membandingkan hasil sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan (<i>pre dan post test</i>) ☐ Jajak pendapat bagi segmen tertentu mengenai: ☐ manfaat, ☐ kemudahan materi dipahami, ☐ kesesuaian dengan sasaran, ☐ lainnya: ... (sebutkan) ☐ Survei untuk mengetahui tingkat literasi keuangan perseorangan/ kelompok tertentu ☐ Lainnya: ... (sebutkan) (dapat diisi lebih dari satu) Pengembangan Infrastruktur SDM ☐ Membandingkan hasil sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan (<i>pre dan post test</i>) ☐ Lainnya: ... (sebutkan) Non-SDM ☐ Pengamatan atas penyelesaian pengembangan infrastruktur ☐ Uji kesesuaian pengembangan fungsi infrastruktur bagi target tertentu ☐ Lainnya: ... (sebutkan) (dapat diisi lebih dari satu)	Sarana Pengukuran ☐ Tertulis ☐ Media elektronik ☐ Sistem online ☐ Lainnya: ... (sebutkan)

			<i>satu)</i>	
		Metode Pelaksanaan Tidak langsung, melalui media ☐ Elektronik: ... <i>(sebutkan)</i> ☐ Cetak ☐ Lainnya: ... <i>(sebutkan)</i>	Metode Pengukuran Edukasi Keuangan ☐ Membandingkan hasil sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan <i>(pre dan post test)</i> ☐ Jajak pendapat bagi segmen tertentu mengenai: ☐ manfaat, ☐ kemudahan materi dipahami, ☐ kesesuaian dengan sasaran, ☐ lainnya: ... <i>(sebutkan)</i> ☐ Survei untuk mengetahui tingkat literasi keuangan perseorangan/ kelompok tertentu ☐ Lainnya: ... <i>(sebutkan)</i> <i>(dapat diisi lebih dari satu)</i> Pengembangan Infrastruktur SDM ☐ Membandingkan hasil sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan <i>(pre dan post test)</i> ☐ Lainnya: ... <i>(sebutkan)</i> Non-SDM ☐ Pengamatan atas penyelesaian pengembangan infrastruktur ☐ Uji kesesuaian pengembangan fungsi infrastruktur bagi target tertentu ☐ Lainnya: ... <i>(sebutkan)</i> <i>(dapat diisi lebih dari satu)</i>	Sarana Pengukuran ☐ Tertulis ☐ Media elektronik ☐ Sistem online ☐ Lainnya: ... <i>(sebutkan)</i>
		Kategori ☐ Baru ☐ Lanjutan <i>(beri tanda pada salah satu pilihan)</i>		
5	Materi	a. Pengelolaan Keuangan , meliputi: ☐ Identifikasi kesehatan keuangan pribadi/perusahaan ☐ Tujuan pengelolaan keuangan		

		☐ Tahapan dalam pengelolaan keuangan ☐ Pencatatan aset/harta yang dimiliki ☐Pencatatan pemasukan dan pengeluaran (budgeting), termasuk perpajakan, identifikasi pendapatan dan pengeluaran rutin/non rutin bulanan/tahunan ☐ Perencanaan program untuk tujuan keuangan di masa depan ☐ Lainnya: ... (sebutkan) b. Jenis industri jasa keuangan dan karakteristik produk dan/atau layanan jasa keuangan Jenis industri jasa keuangan: ☐ Perbankan ☐ Pasar modal ☐ Perasuransian ☐ Dana pensiun ☐ Lembaga pembiayaan ☐ Lembaga penjaminan ☐ Pergadaian ☐ Lembaga jasa keuangan lainnya: ... (sebutkan) <i>(dapat diisi lebih dari satu)</i> Karakteristik produk dan/atau layanan jasa keuangan, meliputi: ☐ Manfaat ☐ Biaya ☐ Risiko ☐ Hak konsumen ☐ Kewajiban konsumen ☐ Cara mengakses atau memperoleh ☐ Informasi mekanisme transaksi ☐Mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa ☐ Lainnya ... (sebutkan) c. Perpajakan ☐ Perpajakan terkait produk dan/atau layanan jasa keuangan Kategori ☐ Baru ☐ Lanjutan <i>(beri tanda pada salah satu pilihan)</i>
6	Sasaran	☐ Pekerja informal ☐ Petani ☐ Nelayan ☐ Guru ☐ Dosen ☐ Penyuluh

		☐ Profesional: ... (sebutkan) ☐ Karyawan ☐ Pedagang ☐ Pelaku UMKM ☐ Perempuan ☐ Pelajar ☐ Mahasiswa ☐ Pemuda ☐ Pensiunan ☐ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ☐ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) ☐ Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (KTKI) ☐ Disabilitas ☐ Kelompok masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS): ... (sebutkan) ☐ Masyarakat daerah tertinggal, terpencil, dan terluar ☐ Komunitas: ... (sebutkan) ☐ Masyarakat umum ☐ Lainnya: ... (sebutkan) (beri tanda pada salah satu pilihan) Kategori ☐ Baru ☐ Lanjutan (untuk peserta perorangan/kelompok masyarakat yang sama; tidak berlaku untuk Sasaran Masyarakat Umum) (beri tanda pada salah satu pilihan)
7	Jumlah Peserta	... orang (diisi dengan jumlah peserta)
8	Jadwal Pelaksanaan :	Dimulai ... selesai ... (diisi dengan rencana tanggal dan/atau bulan pelaksanaan)
9	Wilayah Pelaksanaan	Provinsi ☐ Aceh ☐ Bali ☐ Banten ☐ Bengkulu ☐ Gorontalo ☐ DKI Jakarta ☐ Jambi ☐ Jawa Barat ☐ Jawa Tengah ☐ Jawa Timur ☐ Kalimantan Barat ☐ Kalimantan Selatan ☐ Kalimantan Tengah ☐ Kalimantan Timur ☐ Kalimantan Utara ☐ Kepulauan Bangka Belitung ☐ Kepulauan Riau ☐ Lampung ☐ Maluku ☐ Maluku Utara ☐ Nusa Tenggara Barat

		☐ Nusa Tenggara Timur ☐ Papua ☐ Papua Barat ☐ Riau ☐ Sulawesi Barat ☐ Sulawesi Selatan ☐ Sulawesi Tengah ☐ Sulawesi Tenggara ☐ Sulawesi Utara ☐ Sumatera Barat ☐ Sumatera Selatan ☐ Sumatera Utara ☐ DI Yogyakarta ☐ Seluruh Indonesia (diisi apabila dilaksanakan di dalam negeri dan dapat diisi lebih dari satu) Kabupaten/Kota ... (diisi apabila ada) Wilayah Lainnya ... (diisi apabila ada) Kategori ☐ Baru ☐ Lanjutan (beri tanda pada salah satu pilihan)
10	Frekuensi Pelaksanaan	... kali
11	Sumber Biaya	☐ Anggaran edukasi keuangan ☐ Anggaran CSR ☐ Anggaran lainnya: ... (sebutkan) (beri tanda pada salah satu pilihan)
12	Jumlah Biaya (dalam rupiah)	... (diisi dengan rencana jumlah biaya yang dialokasikan untuk setiap kegiatan)
13	Parameter Pemantauan :	Edukasi Keuangan ☐ Kesesuaian bentuk kegiatan ☐ Kesesuaian materi ☐ Kesesuaian sasaran peserta ☐ Kesesuaian jumlah peserta ☐ Lainnya: ... (sebutkan) (dapat diisi lebih dari satu) Pengembangan Infrastruktur SDM ☐ Kesesuaian bentuk kegiatan ☐ Kesesuaian materi ☐ Kesesuaian sasaran peserta ☐ Kesesuaian jumlah peserta

		☐ Lainnya: ... (sebutkan) Non-SDM ☐ Kesesuaian tahapan pengembangan infrastruktur ☐ Kesesuaian pelaksanaan kerangka acuan kerja pengembangan infrastruktur ☐ Lainnya: ... (sebutkan) (dapat diisi lebih dari satu)
14	Bentuk Pemantauan	(mengacu pada parameter pemantauan dilengkapi dengan bentuk pemantauan) ☐ Kunjungan langsung ☐ Lainnya: ... (sebutkan) (dapat diisi lebih dari satu)
15	Parameter Evaluasi	Edukasi Keuangan ☐ Pengetahuan ☐ Keterampilan ☐ Kepercayaan ☐ Sikap ☐ Perilaku ☐ Lainnya: ... (sebutkan) (dapat diisi lebih dari satu) Pengembangan Infrastruktur SDM ☐ Kemampuan trainers/fasilitator menyampaikan materi ajar ☐ Lainnya: ... (sebutkan) Non-SDM ☐ Ketersediaan infrastruktur dalam bentuk: ... (sebutkan) ☐ Kesesuaian fungsi infrastruktur dengan tujuan pengembangan infrastruktur ☐ Lainnya: ... (sebutkan) (dapat diisi lebih dari satu)
16	Bentuk Evaluasi	☐ Memperhatikan data administratif seperti laporan kegiatan, dokumentasi pelaksanaan, dan/atau hasil wawancara peserta dan/atau staf pelaksana kegiatan ☐ Memperhatikan data dan laporan dari periode-periode sebelumnya untuk mengetahui tren dan pola ☐ Melakukan analisis keberhasilan atau ketercapaian melalui perbandingan antara perencanaan dan realisasi kegiatan ☐ Menganalisis informasi mengenai kesesuaian antara kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dengan sasaran yang telah ditentukan ☐ Lainnya: ... (sebutkan) (dapat diisi lebih dari satu)
17	Keterangan	☐ Peran masing-masing pihak dalam hal PUJK berkolaborasi dengan PUJK lain: 1. ... (nama pihak 1) ... (deskripsi dari peran pihak 1),

		2. ... (nama pihak 2) ... (deskripsi dari peran pihak 2), dst. ☐ Bekerja sama dengan pihak lain: 1. ... (nama pihak 1) ... (deskripsi dari peran pihak 1), 2. ... (nama pihak 2) ... (deskripsi dari peran pihak 2), dst. Informasi lainnya: Merupakan informasi tambahan yang dianggap perlu untuk lebih menjelaskan kegiatan Literasi Keuangan yang dilakukan oleh PUJK. ... (deskripsi)
--	--	--

Tabel 2
Pemenuhan Prinsip-Prinsip Literasi Keuangan

No	Prinsip	Pemenuhan Prinsip
1	Terencana dan Terukur	Otomatis terisi apabila PUJK mengisi tabel 1 angka 3 – 12 serta 13 – 14 dan/atau 15 – 16
2	Berorientasi pada Pencapaian	Otomatis terisi apabila PUJK mengisi tabel 1 angka 2, 6, 7, dan 11
3	Berkelanjutan	Otomatis terisi apabila PUJK mengisi Kategori “Lanjutan” pada salah satu tabel 1 angka 3, 4, 5, 6, dan 9
4	Kolaborasi	Otomatis terisi apabila PUJK mengisi tabel 1 angka 17 dengan deskripsi kerja sama dengan PUJK dan/atau pihak lain..

e) Laporan Rencana Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan Bagi Konsumen Dan/Atau Masyarakat

LAPORAN RENCANA KEGIATAN
DALAM RANGKA MENINGKATKAN INKLUSI KEUANGAN
PERIODE: Januari s.d. Desember ... (diisi dengan tahun)
... (diisi dengan nama pelaku usaha jasa keuangan)

No.	Komponen	Rencana	Keterangan
1	Ruang Lingkup Kegiatan	☐ Perluasan Akses ☐ Penyediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan (beri tanda pada salah satu pilihan)	
2	Nama Kegiatan	... (diisi dengan nama kegiatan yang menggambarkan aktivitas dalam kegiatan)	
3	Bentuk Pelaksanaan	Perluasan Akses ☐ Penambahan jaringan kantor ☐ Penambahan kerja sama dengan pihak lain ☐ Penambahan infrastruktur yang dapat	

		mendukung perluasan akses keuangan masyarakat: ... (sebutkan) ☐ Penambahan saluran distribusi produk dan/atau layanan jasa keuangan: ... (sebutkan) ☐ Sarana bagi kelompok masyarakat berkebutuhan khusus: ... (sebutkan) ☐ Lainnya: ... (sebutkan) Penyediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan ☐ Penciptaan skema: ... (sebutkan) ☐ Pengembangan produk dan/atau layanan jasa keuangan: ... (sebutkan) ☐ Lainnya: ... (sebutkan) <i>(beri tanda pada salah satu pilihan)</i> Kategori ☐ Baru ☐ Lanjutan <i>(beri tanda pada salah satu pilihan)</i>	
4	Sasaran	☐ Pekerja informal ☐ Petani ☐ Nelayan ☐ Institusi pendidikan ☐ Profesional ☐ Karyawan ☐ Pedagang ☐ Pelaku UMKM ☐ Perempuan ☐ Pelajar ☐ Mahasiswa ☐ Pemuda ☐ Pensiunan ☐ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ☐ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) ☐ Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (KTKI) ☐ Disabilitas ☐ Kelompok masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS): ... (sebutkan) ☐ Masyarakat daerah tertinggal, terpencil, dan terluar ☐ Komunitas: ... (sebutkan) ☐ Masyarakat umum ☐ Lainnya: ... (sebutkan) <i>(beri tanda pada salah satu pilihan)</i> Kategori ☐ Baru ☐ Lanjutan <i>(beri tanda pada salah satu pilihan)</i>	

5	Target Pengguna	... pengguna <i>(diisi dengan jumlah pengguna)</i>	
6	Jadwal	Dimulai ... selesai ... <i>(diisi dengan tanggal dan/ atau bulan pelaksanaan)</i>	
7	Wilayah	Provinsi ☐ Aceh ☐ Bali ☐ Banten ☐ Bengkulu ☐ Gorontalo ☐ DKI Jakarta ☐ Jambi ☐ Jawa Barat ☐ Jawa Tengah ☐ Jawa Timur ☐ Kalimantan Barat ☐ Kalimantan Selatan ☐ Kalimantan Tengah ☐ Kalimantan Timur ☐ Kalimantan Utara ☐ Kepulauan Bangka Belitung ☐ Kepulauan Riau ☐ Lampung ☐ Maluku ☐ Maluku Utara ☐ Nusa Tenggara Barat ☐ Nusa Tenggara Timur ☐ Papua ☐ Papua Barat ☐ Riau ☐ Sulawesi Barat ☐ Sulawesi Selatan ☐ Sulawesi Tengah ☐ Sulawesi Tenggara ☐ Sulawesi Utara ☐ Sumatera Barat ☐ Sumatera Selatan ☐ Sumatera Utara ☐ DI Yogyakarta ☐ Seluruh Indonesia <i>(diisi apabila dilaksanakan di dalam negeri dan dapat diisi lebih dari satu)</i> Kabupaten/Kota ... <i>(diisi apabila ada)</i> Wilayah Lainnya ... <i>(diisi apabila ada)</i> Kategori ☐ Baru ☐ Lanjutan <i>(beri tanda pada salah satu pilihan)</i>	
8	Parameter	Peningkatan akses terhadap lembaga, produk	

		dan/atau layanan jasa keuangan ☐ Penambahan jaringan kantor ☐ Penambahan kerja sama dengan pihak lain ☐ Penambahan infrastruktur yang dapat mendukung perluasan akses keuangan masyarakat ☐ Penambahan saluran distribusi produk dan/atau layanan jasa keuangan ☐ Lainnya: ... (sebutkan) Peningkatan ketersediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan ☐ Penambahan jenis produk dan/atau layanan jasa keuangan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat pada berbagai saluran distribusi ☐ Lainnya: ... (sebutkan) Peningkatan penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan ☐ Penambahan jumlah rekening tabungan/kredit/pembiayaan/ efek/dana pensiun ☐ Penambahan jumlah transaksi ☐ Penambahan jumlah polis asuransi ☐ Penambahan jumlah sertifikat penjaminan ☐ Penambahan jumlah pasangan usaha dan/atau debitur modal ventura ☐ Penambahan jumlah transaksi gadai ☐ Lainnya: ... (sebutkan) Peningkatan kualitas penggunaan produk dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat ☐ Peningkatan jumlah Konsumen yang tidak hanya menggunakan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sejenis, namun juga menggunakan produk dan/atau layanan jasa keuangan lainnya ☐ Peningkatan kemampuan Konsumen yang dapat mengukur dan menganalisis produk dan/atau layanan jasa keuangan yang dapat mendorong peningkatan frekuensi pemanfaatan produk dan/atau layanan jasa keuangan serta dalam hal dibutuhkan mampu memanfaatkan layanan pengaduan/penyelesaian sengketa yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan keuangan yang ingin dicapai ☐ Lainnya: ... (sebutkan) <i>(dapat diisi lebih dari satu)</i>	
9	Bentuk Pemantauan	Bentuk Pemantauan <i>(mengacu pada parameter pemantauan dilengkapi dengan bentuk pemantauan)</i> ☐ Lapangan	

		☐ Melalui laporan ☐ Lainnya: ... <i>(sebutkan)</i> <i>(dapat diisi lebih dari satu)</i> dilakukan secara <i>(mengacu pada bentuk pemantauan)</i> ☐ Bulanan ☐ Triwulanan ☐ Tahunan ☐ Periode lainnya: ... <i>(sebutkan)</i> <i>(dapat diisi lebih dari satu)</i>	
10	Evaluasi	☐ Memperhatikan data administratif seperti laporan kegiatan dan dokumentasi pelaksanaan ☐ Memperhatikan data dan laporan dari periode-periode sebelumnya ☐ Melakukan analisis keberhasilan atau ketercapaian melalui perbandingan perencanaan dan realisasi kegiatan ☐ Menganalisis informasi mengenai kesesuaian antara kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan dengan sasaran yang telah ditentukan ☐ Lainnya: ... <i>(sebutkan)</i> <i>(dapat diisi lebih dari satu)</i>	
12	Keterangan	☐ Peran masing-masing pihak dalam hal PUJK berkolaborasi dengan PUJK lain: 1. ... <i>(nama pihak 1)</i> ... <i>(deskripsi dari peran pihak 1),</i> 2. ... <i>(nama pihak 2)</i> ... <i>(deskripsi dari peran pihak 2), dst.</i> ☐ Bekerja sama dengan pihak lain: 1. ... <i>(nama pihak 1)</i> ... <i>(deskripsi dari peran pihak 1),</i> 2. ... <i>(nama pihak 2)</i> ... <i>(deskripsi dari peran pihak 2), dst.</i> Informasi lainnya: <i>Merupakan informasi tambahan yang dianggap perlu untuk lebih menjelaskan kegiatan Literasi Keuangan yang dilakukan oleh PUJK. ... (deskripsi)</i>	

Tabel 2
Pemenuhan Prinsip-Prinsip Inklusi Keuangan

No	Prinsip	Pemenuhan Prinsip
1	Terukur	<i>Otomatis terisi apabila PUJK mengisi tabel 1 angka 5, 8, serta 9 dan/atau 10</i>
2	Terjangkau	<i>Otomatis terisi apabila PUJK mengisi tabel 1 angka 3 dan 8</i>

3	Tepat Sasaran	Otomatis terisi apabila PUJK mengisi tabel 1 angka 3, 4, dan 5
4	Berkelanjutan	Otomatis terisi apabila PUJK mengisi “Kategori” pada tabel 1 angka 3 secara lengkap, 4, dan 7

- a) Rencana Pengembangan Sistem Teknologi Informasi
- Jabarkan rencana penggunaan teknologi informasi yang digunakan perusahaan untuk menunjang kegiatan usaha.

No	Jenis/Nama Aplikasi	Kepemilikan (Inhouse/vendor)	Nama Vendor	Fungsi Aplikasi

- b) Rencana Alih Program Tenaga Kerja Asing

No	Nama TKA	Materi/Topik	Jumlah Peserta	Waktu Pelatihan

- c) Informasi Lainnya

Informasi lainnya paling sedikit meliputi informasi yang perlu disampaikan karena mempengaruhi kegiatan usaha perusahaan, yang tidak disebutkan dalam cakupan Rencana Bisnis. Contoh: - rencana merger, akuisisi dan konsolidasi; - rencana pengalihan portofolio pertanggungan; - rencana perubahan bidang usaha perasuransian; - rencana perubahan kegiatan usaha tidak berdasarkan prinsip syariah menjadi berdasarkan prinsip syariah.
--

FORMAT II C

BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN LAIN BAGI PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH, DAN UNIT SYARIAH

Laporan Program Reasuransi Otomatis ini berdasarkan ketentuan Pasal 31 dalam P POJK 14/POJK.05/2015 dan SEOJK 31/2015, dengan batas waktu penyampaian 15 Januari atau 15 (lima belas) hari sejak tanggal perjanjian dukungan reasuransi/retrosesi otomatis berlaku

LAPORAN PROGRAM REASURANSI OTOMATIS

(diisi nama dan alamat perusahaan)

_____, _____ 20xx

Direktur

(Cap Perusahaan)

N a m a J e l a s

Jabatan

(1) Semua Lini Usaha Asuransi Jiwa dan Anuitas.

Nama Perusahaan

No.	U r a i a n	Bentuk Reasuransi		
		Yearly Renewable Term (YRT)	Koasuransi	Modifikasi Koasuransi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Retensi sendiri			
II	Reasuradur Dukungan			
	A. Dalam Negeri			
	1.			
	2. dst.			
	B. Luar Negeri			
	1. A S E A N			
	a.			
	b.			
	c. dst.			
	2. NON ASEAN			
	a.			
	b.			
	c. dst.			

(2) Lini Usaha Asuransi: Ekawarsa

Nama Perusahaan

No.	U r a i a n	Bentuk Reasuransi		
		Yearly Renewable Term (YRT)	Koasuransi	Modifikasi Koasuransi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Retensi sendiri			
II	Reasuradur Dukungan			
	A. Dalam Negeri			
	1.			
	2. dst.			
	C. Luar Negeri			
	1. A S E A N			
	a.			
	b.			
	c. dst.			
	2. NON ASEAN			
	a.			

	b.			

(3) Lini Usaha Asuransi: Kematian Berjangka Selain Ekawarsa
Nama Perusahaan

No.	U r a i a n	Bentuk Reasuransi		
		Yearly Renewable Term (YRT)	Koasuransi	Modifikasi Koasuransi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Retensi sendiri			
II	Reasuradur Dukungan			
	A. Dalam Negeri			
	1.			
	2. dst.			
	D. Luar Negeri			
	1. A S E A N			
	a.			
	b.			
	c. dst.			
	2. NON ASEAN			
	a.			
	b.			
	c. dst.			

(4) Lini Usaha Asuransi: Dwiguna
Nama Perusahaan

No.	U r a i a n	Bentuk Reasuransi		
		Yearly Renewable Term (YRT)	Koasuransi	Modifikasi Koasuransi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Retensi sendiri			
II	Reasuradur Dukungan			
	A. Dalam Negeri			
	1.			
	2. dst.			
	E. Luar Negeri			
	1. A S E A N			
	a.			
	b.			
	c. dst.			
	2. NON ASEAN			

a.			
b.			
c. dst.			

(5) Lini Usaha Asuransi: Dwiguna Kombinasi

Nama Perusahaan

No.	U r a i a n	Bentuk Reasuransi		
		Yearly Renewable Term (YRT)	Koasuransi	Modifikasi Koasuransi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Retensi sendiri			
II	Reasuradur Dukungan			
	A. Dalam Negeri			
	1.			
	2. dst.			
	F. Luar Negeri			
	1. A S E A N			
	a.			
	b.			
	c. dst.			
	2. NON ASEAN			
	a.			
	b.			
	c. dst.			

(6) Lini Usaha Asuransi: Seumur Hidup Kombinasi

Nama Perusahaan

No.	U r a i a n	Bentuk Reasuransi		
		Yearly Renewable Term (YRT)	Koasuransi	Modifikasi Koasuransi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Retensi sendiri			
II	Reasuradur Dukungan			
	A. Dalam Negeri			
	1.			
	2. dst.			
	G. Luar Negeri			
	1. A S E A N			
	a.			

	b.			
	2. NON ASEAN			
	a.			
	b.			
	c. dst.			

(7) Lini Usaha Asuransi: Anuitas Umum
Nama Perusahaan

No.	U r a i a n	Bentuk Reasuransi		
		Yearly Renewable Term (YRT)	Koasuransi	Modifikasi Koasuransi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Retensi sendiri			
II	Reasuradur Dukungan			
	A. Dalam Negeri			
	1.			
	2. dst.			
	H. Luar Negeri			
	1. A S E A N			
	a.			
	b.			
	c. dst.			
	2. NON ASEAN			
	a.			
	b.			
	c. dst.			

(8) Lini Usaha Asuransi: Anuitas Dana Pensiun
Nama Perusahaan

No.	U r a i a n	Bentuk Reasuransi		
		Yearly Renewable Term (YRT)	Koasuransi	Modifikasi Koasuransi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Retensi sendiri			
II	Reasuradur Dukungan			
	A. Dalam Negeri			
	1.			
	2. dst.			
	I. Luar Negeri			
	1. A S E A N			

	a.			
	b.			
	c. dst.			
	2. NON ASEAN			
	a.			
	b.			
	c. dst.			

(9) Lini Usaha Asuransi: Non-Tradisional
Nama Perusahaan

No.	U r a i a n	Bentuk Reasuransi		
		Yearly Renewable Term (YRT)	Koasuransi	Modifikasi Koasuransi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Retensi sendiri			
II	Reasuradur Dukungan			
	A. Dalam Negeri			
	1.			
	2. dst.			
	J. Luar Negeri			
	1. A S E A N			
	a.			
	b.			
	c. dst.			
	2. NON ASEAN			
	a.			
	b.			
	c. dst.			

(10) Lini Usaha Asuransi : Kesehatan
Nama Perusahaan

No.	Keterangan		S.I (b)	S.II	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	Retensi Sendiri (d)				
	Reasuradur Dukungan				
I	A. Dalam Negeri				
	1. (Rp / %) (e)				
	2. dst.				

I	B. Luar Negeri			
	1. A S E A N			
	a. (Rp / %) (e)			
	b.			
	c. dst			
	2. NON ASEAN			
	a. (Rp / %) (e)			
	b.			
	c. dst			

(11) Lini Usaha Asuransi : Kecelakaan Diri
Nama Perusahaan

No.	Keterangan		S.I (b)	S.II	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	Retensi Sendiri (d)				
	Reasuradur Dukungan				
I	A. Dalam Negeri				
	1. (Rp / %) (e)				
I	2. dst.				
	B. Luar Negeri				
	1. A S E A N				
	a. (Rp / %) (e)				
	b.				
	c. dst				
	2. NON ASEAN				
	a. (Rp / %) (e)				
	b.				
	c. dst				

(12) Lini Usaha Asuransi : Kecelakaan Diri.
Nama Perusahaan

No.	Keterangan		S.I (b)	S.II	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	Retensi Sendiri (d)				
	Reasuradur Dukungan				
I	A. Dalam Negeri				
	1. (Rp / %) (e)				
	2. dst.				

I	B. Luar Negeri			
	1. A S E A N			
	a.	(Rp / %)	(e)	
	b.			
	c. dst			
	2. NON ASEAN			
	a.	(Rp / %)	(e)	
	b.			
	c. dst			

Keterangan
(a). Q.S. = Quota Share Treaty Reinsurance.
(b). S = Surplus Treaty Reinsurance.
(c). Diisi sesuai dengan kebutuhan.
(d). Retensi Sendiri = termasuk dukungan reasuransi X/L jika ada.
(e). Coret yang tidak perlu.

(13) Lini Usaha Asuransi : Kecelakaan Diri.
Nama Perusahaan

No.	Keterangan	X/L 1 (a)	X/L 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Retensi (c)			
	Reasuradur Dukungan			
	A. Dalam Negeri			
	1. (Rp / %)	(d)		
	2. dst.			
	B. Luar Negeri			
	1. A S E A N			
	a. (Rp / %)	(d)		
	b.			
	c. dst.			
	2. NON ASEAN			
	a. (Rp / %)	(d)		
	b.			
	c. dst.			

Keterangan :
(a). X/L = Excess of Loss Treaty Reinsurance.
(b). Diisi sesuai dengan kebutuhan.
(c). R.S. = Tidak termasuk dukungan reasuransi X/L.
(d). Coret yang tidak perlu.

(14) Lini Usaha Asuransi : Kesehatan.
Nama Perusahaan

No.	Keterangan	X/L 1 (a)	X/L 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

No.	Keterangan	X/L 1 (a)	X/L 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Retensi (c)			
II	Reasuradur Dukungan			
	A. Dalam Negeri			
	1. (Rp / %)	(d)		
	2. dst.			
	B. Luar Negeri			
	1. A S E A N			
	a. (Rp / %)	(d)		
	b.			
	c. dst.			
	2. NON ASEAN			
	a. (Rp / %)	(d)		
	b.			
	c. dst.			

Keterangan :
(a). X/L = Excess of Loss Treaty Reinsurance.
(b). Diisi sesuai dengan kebutuhan.
(c). R.S. = Tidak termasuk dukungan reasuransi X/L.
(d). Coret yang tidak perlu.

FORMAT II D

BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN LAIN BAGI PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH, DAN UNIT SYARIAH

LAPORAN PENGADUAN KONSUMEN DAN TINDAK LANJUT PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN

Laporan Laporan Pengaduan Konsumen Dan Tindak Lanjut Pelayanan Dan Penyelesaian Konsumen ini berdasarkan ketentuan Pasal 34 POJK 1/POJK.07/2013 dan SE OJK 2/SE.OJK.07/2014, dengan batas waktu penyampaian pada tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan Januari, April, July, dan Oktober. Laporan ini telah dimasukan kedalam sistem OJK dengan nama aplikasi SIPEDULI

Bagian I : Jenis Produk Dan/Atau Layanan Dan Permasalahan Yang Diadukan

No.	Jenis Produk dan/atau Layanan	Kategori Permasalahan	Jumlah	Status Penyelesaian		
				Selesai	Tidak Selesai	Dalam Proses
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1						
2						
3						

Bagian Ii: Pengaduan Yang Diselesaikan Dalam Masa Laporan

No.	Keterangan	Jumlah		
		≤ 20 Hari	20 Hari < X ≤ 40 Hari	> 40 Hari
1	Pengaduan Yang Diterima Pada Periode Pelaporan Sebelumnya			
	1. Telah diselesaikan			
	2. Sedang dalam proses penyelesaian			
	SUB TOTAL			
2	Pengaduan Yang Diterima Dalam Periode Pelaporan			
	1. Telah diselesaikan			
	2. Sedang dalam proses penyelesaian			
	SUB TOTAL			
TOTAL				

Bagian III: Penyebab Pengaduan

No.	Keterangan	Jumlah
1	Pemahaman karakteristik produk oleh Konsumen	
2	Informasi produk kurang memadai	
3	Gangguan/kerusakan perangkat dan sistem teknologi informasi	
4	Pemahaman karakteristik produk oleh Konsumen	
5	Perubahan/pemutusan akad/perjanjian/kontrak	
6	Kelalaian Konsumen	
7	Kelalaian Pelaku Usaha Jasa Keuangan	
8	Tindak pidana Pelaku Usaha Jasa Keuangan	
9	Lainnya (sebutkan).....	
TOTAL		

Bagian IV: Publikasi Negatif

No.	Keterangan	Jumlah
1	Pengaduan Konsumen Pada Media Massa Cetak/Elektronik	
2	Artikel media cetak/Elektronik	
3	Liputan media Cetak/Elektronik	
4	Publikasi/tulisan di tempat umum	
5	Media Sosial, Surat Elektronik	
6	Lainnya (sebutkan).....	
TOTAL		

FORMAT II E

BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN LAIN BAGI PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH, DAN UNIT SYARIAH

Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan ini ketentuan Pasal 46 dalam POJK 18/POJK.03/2014 dengan batas waktu penyampaian tiap tanggal 30 Mei..

LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN

Tahun

(diisi nama dan alamat perusahaan)

_____, _____ 20xx

Direktur

(Cap Perusahaan)

N a m a J e l a s

Jabatan

Entitas Utama :.....

Posisi Laporan :.....

Hasil Penilaian Sendiri	
Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	
Peringkat	Definisi Peringkat
..... (diisi dengan Peringkat 1, 2, 3, 4 atau 5)	 (diisi dengan Definisi Peringkat sesuai dengan nilai peringkat)
Analisis	
..... (Berisi uraian mengenai kesimpulan atas penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi secara komprehensif dan terstruktur yang mencakup struktur, proses, dan hasil Tata Kelola Terintegrasi. Dalam uraian ini dijelaskan pula mengenai identifikasi permasalahan berupa kekuatan dan kelemahan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, penyebabnya (<i>root cause</i>) serta upaya-upaya perbaikan yang telah dan akan dilakukan)	

FORMAT II F

BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN LAIN BAGI PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH, DAN UNIT SYARIAH

Laporan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan ini berdasarkan ketentuan Pasal 45 dalam POJK 18/POJK.03/2014 dengan batas waktu penyampaian tiap tanggal 15 Agustus dan 15 Februari..

LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI
BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN

Tahun

(diisi nama dan alamat perusahaan)

_____, _____ 20xx

Direktur

(Cap Perusahaan)

 N a m a J e l a s

Jabatan

Tujuan :

1. Memperoleh gambaran pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan; dan
2. Mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi sehingga Entitas Utama dapat menyusun rencana tindak perbaikan sesuai dengan permasalahannya.

No.	Indikator	Analisis
1.	Direksi Entitas Utama a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi 1) Direksi Entitas Utama telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. 2) Direksi Entitas Utama memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama, antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan. b. Proses Tata Kelola Terintegrasi 1) Direksi Entitas Utama menyampaikan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi LJK dalam Konglomerasi Keuangan. 2) Direksi Entitas Utama mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. 3) Direksi Entitas Utama menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. 4) Direksi Entitas Utama menindaklanjuti temuan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi dan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi. c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi 1) Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah disempurnakan sesuai arahan dari Dewan Komisaris. 2) Direksi Entitas Utama telah memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari: (a) Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi; (b) auditor eksternal; (c) hasil pengawasan OJK; (d) hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain Bank Indonesia; dan/atau (e) hasil pengawasan otoritas pengawasan terhadap Kantor Pusat LJK dalam hal LJK merupakan kantor cabang dari entitas yang berkedudukan di luar negeri, telah ditindaklanjuti oleh	

No.	Indikator	Analisis
	LJK dalam konglomerasi Keuangan	
2.	Dewan Komisaris Entitas Utama a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi 1) Dewan Komisaris Entitas Utama telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. 2) Dewan Komisaris Entitas Utama memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan b. Proses Tata Kelola Terintegrasi 1) Dewan Komisaris Entitas Utama menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris Entitas Utama secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester. 2) Dewan Komisaris Entitas Utama melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama. 3) Dewan Komisaris Entitas Utama melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi. 4) Dewan Komisaris Entitas Utama mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi 1) Hasil rapat Dewan Komisaris Entitas Utama telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions beserta alasannya yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris Entitas Utama. 2) Rekomendasi hasil pengawasan Dewan Komisaris Entitas Utama atas: (a) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama; (b) penerapan Tata Kelola Terintegrasi; (c) hasil evaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi oleh Dewan Komisaris Entitas Utama telah disampaikan kepada Direksi Entitas Utama. 3) Dewan Komisaris Entitas Utama telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi	
3.	Komite Tata Kelola Terintegrasi a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi 1) Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit terdiri dari: (a) seorang Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu komite pada Entitas Utama, sebagai Ketua merangkap anggota;	

No.	Indikator	Analisis
	(b) Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota; (c) seorang pihak independen, sebagai anggota; (d) anggota Dewan Pengawas Syariah dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota (dalam hal Konglomerasi Keuangan memiliki LJK yang melakukan kegiatan usaha berdasar prinsip syariah). 2) Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi telah sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan b. Proses Tata Kelola Terintegrasi 1) Komite Tata Kelola Terintegrasi mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi. 2) Komite Tata Kelola Terintegrasi menyelenggarakan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester. c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi 1) Komite Tata Kelola Terintegrasi telah mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi. 2) Komite Tata Kelola Terintegrasi telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. 3) Hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions beserta alasannya yang terjadi dalam rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi.	
4.	Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi 1) Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi independen terhadap satuan kerja operasional. 2) Direksi Entitas Utama memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai anggota Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi. b. Proses Tata Kelola Terintegrasi Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi	

No.	Indikator	Analisis
	memantau dan mengevaluasi fungsi kepatuhan di LJK dalam Konglomerasi Keuangan. c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan Entitas Utama atau Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan	
5.	Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi 1) Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi independen terhadap satuan kerja operasional. 2) Direksi Entitas Utama telah memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai anggota Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi. b. Proses Tata Kelola Terintegrasi Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah memantau pelaksanaan audit intern pada LJK dalam Konglomerasi Keuangan. c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi 1) Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada: (a) Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan; (b) Dewan Komisaris Entitas Utama; dan (c) Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan Entitas Utama. 2) Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi bertindak obyektif dalam melakukan pemantauan pelaksanaan audit. 3) Rekomendasi hasil audit telah sesuai dengan permasalahan dan dapat digunakan sebagai acuan perbaikan	
6.	Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi 1) Entitas Utama memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko terintegrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan. 2) Entitas Utama memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan b. Proses Tata Kelola Terintegrasi Entitas Utama menerapkan manajemen	

No.	Indikator	Analisis
	risiko terintegrasi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan. c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi 1) Entitas Utama menerapkan manajemen risiko terintegrasi secara efektif sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan. 2) Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama mampu melakukan tugas dan tanggung jawabnya terkait manajemen risiko terintegrasi sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi	
7.	Pedoman Tata Kelola Terintegrasi a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi 1) Pedoman Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit meliputi: (a) Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama; (b) Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi LJK. 2) Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama paling sedikit memuat: (a) persyaratan Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama; (b) tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama; (c) tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi (d) tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi; (e) tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi; dan (f) penerapan manajemen risiko terintegrasi. 3) Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi LJK dalam Konglomerasi Keuangan paling sedikit memuat: (a) persyaratan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris; (b) persyaratan calon anggota Dewan Pengawas Syariah *); (c) struktur Direksi dan Dewan Komisaris; (d) struktur Dewan Pengawas Syariah *); (e) independensi tindakan Dewan Komisaris; (f) pelaksanaan fungsi pengurusan LJK oleh Direksi; (g) pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris; (h) pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah *); (i) pelaksanaan fungsi kepatuhan,	

No.	Indikator	Analisis
	fungsi audit intern, dan pelaksanaan audit ekstern; (j) pelaksanaan fungsi manajemen risiko; (k) kebijakan remunerasi; dan (l) pengelolaan benturan kepentingan. *) dalam hal Konglomerasi Keuangan memiliki LJK yang melakukan kegiatan usaha berdasar prinsip syariah. b. Proses Tata Kelola Terintegrasi Pelaksanaan proses Tata Kelola Terintegrasi oleh Entitas Utama dan LJK paling kurang telah mengacu pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi Hasil Tata Kelola Terintegrasi telah mencerminkan bahwa Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.	

Kesimpulan :

Berdasarkan analisis terhadap indikator pada seluruh faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi disimpulkan bahwa:

A. Struktur Tata Kelola Terintegrasi

1. Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek struktur Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah.....
2. Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek struktur Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah.....

B. Proses Tata Kelola Terintegrasi

1. Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek proses Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah.....
2. Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek proses Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah.....

C. Hasil Tata Kelola Terintegrasi

1. Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek hasil Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah.....
2. Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek hasil Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah.....

FORMAT II G

BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN LAIN BAGI PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH, DAN UNIT SYARIAH

Laporan Profil Risiko Terintegrasi ini ketentuan Pasal 28 dalam POJK 17/POJK.03/2014, dengan batas waktu penyampaian tiap tanggal 15 Agustus dan 15 Februari..

LAPORAN PROFIL RISIKO TERINTEGRASI

Tahun

(diisi nama dan alamat perusahaan)

_____, _____ 20xx

Direktur

(Cap Perusahaan)

 N a m a J e l a s

Jabatan

PENILAIAN PROFIL RISIKO TERINTEGRASI

Grup Konglomerasi Keuangan :.....
Tanggal Posisi Laporan :.....

Profil Risiko	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat KPMR Terintegrasi	Peringkat Tingkat Risiko
Risiko Kredit			
Risiko Pasar			
Risiko Likuiditas			
Risiko Operasional			
Risiko Hukum			
Risiko Strategik			
Risiko Kepatuhan			
Risiko Reputasi			
Risiko Transaksi Intra-Grup			
Risiko Asuransi (jika ada)			
Peringkat Profil Risiko			

Analisis
<i>(Kolom analisis ini diisi dengan kesimpulan mengenai profil Risiko Konglomerasi Keuangan secara keseluruhan meliputi penilaian atas Risiko inheren dan KPMR terintegrasi, dengan fokus analisis pada hal-hal signifikan yang mendukung eksposur Risiko pada Konglomerasi Keuangan).</i>

PENILAIAN ANALISIS RISIKO*)

Grup Konglomerasi Keuangan :

Tanggal Posisi Laporan :

Analisis
Peringkat Tingkat Risiko: <i>(Diisi dengan kesimpulan akhir mengenai peringkat tingkat Risiko Konglomerasi Keuangan setelah memperhitungkan peringkat Risiko inheren dan peringkat KPMR terintegrasi sehingga menggambarkan masing-masing tingkat Risiko Konglomerasi Keuangan).</i>
Peringkat Risiko Inheren: <i>(Diisi mengenai uraian penilaian peringkat Risiko inheren berdasarkan analisis terhadap faktor penilaian dengan menggunakan parameter dan indikator yang relevan sehingga menggambarkan masing-masing tingkat Risiko inheren Konglomerasi Keuangan).</i>
Peringkat KPMR Terintegrasi: <i>(Diisi mengenai uraian analisis terhadap KPMR terintegrasi terdiri dari empat cakupan sebagaimana dimaksud pada Lampiran I).</i>

*) Kertas kerja ini digunakan untuk mendukung analisis atas setiap jenis Risiko pada Konglomerasi Keuangan, meliputi Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi, Risiko Transaksi Intra-Grup, dan Risiko Asuransi.

Khusus untuk transaksi intra-grup wajib dilampirkan laporan transaksi intra-grup yang paling sedikit memuat:

- a. Rekapitulasi transaksi dengan pihak berelasi sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku; dan
- b. Perjanjian-perjanjian penting dengan pihak berelasi termasuk informasi yang paling sedikit memuat: (1) harga; (2) penetapan besaran suku bunga; (3) penetapan besaran *fee*; (4) agunan; (5) *term of payment*; dan (6) persyaratan yang signifikan.

FORMAT II H

BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN LAIN BAGI PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH, DAN UNIT SYARIAH

Laporan Kecukupan Permodalan Terintegrasi ini Pasal 17 dalam POJK 26/POJK.03/2015, dengan batas waktu penyampaian tiap tanggal 15 Agustus dan 15 Februari..

LAPORAN KECUKUPAN PERMODALAN TERINTEGRASI

Tahun

(diisi nama dan alamat perusahaan)

_____, _____ 20xx

Direktur

(Cap Perusahaan)

 N a m a J e l a s

Jabatan

Kecukupan Permodalan Terintegrasi

Nama Konglomerasi Keuangan :
Posisi :
Entitas Utama :

No.	Nama LJK	Jenis LJK	Modal Aktual (Juta Rp)	Faktor Pengurang Total Modal Aktual (Juta Rp)	Modal Minimum (Juta Rp)	Rasio KPMM Terintegrasi
1						
2						
3						
...						
Total			Rp.	Rp.	Rp.	Rp.

Keterangan:

1. Nama LJK diisi dengan nama LJK anggota Konglomerasi Keuangan.
2. Jenis LJK diisi dengan bank, perusahaan asuransi/reasuransi, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan efek.
3. Modal Aktual diisi dengan:
 - a. (Modal inti + Modal pelengkap) aktual setelah dikurangi faktor-faktor pengurang modal untuk jenis LJK berupa bank;
 - b. Modal yang disesuaikan aktual untuk jenis LJK berupa perusahaan pembiayaan;
 - c. (Aset atau kekayaan yang diperkenankan – liabilitas) aktual untuk jenis LJK berupa perusahaan asuransi/reasuransi;
 - d. Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) aktual untuk jenis LJK berupa perusahaan efek.
4. Faktor Pengurang Total Modal Aktual adalah penjumlahan dari:
 - a. penyertaan modal LJK kepada LJK lain dalam Konglomerasi Keuangan; dan/atau
 - b. penempatan dana LJK kepada LJK lain dalam Konglomerasi Keuangan yang diakui sebagai instrumen modal (regulatory capital) oleh LJK lain dimaksud,
 - c. sepanjang belum diperhitungkan dalam perhitungan modal atau belum diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal, pada masing-masing sektor keuangan.
5. Modal Minimum adalah modal minimum yang wajib dipenuhi oleh setiap LJK sesuai ketentuan pada masing-masing sektor keuangan. Modal Minimum diisi dengan:
 - a. modal minimum sesuai profil risiko untuk jenis LJK berupa bank;
 - b. modal yang disesuaikan minimum untuk jenis LJK berupa perusahaan pembiayaan;
 - c. nilai minimum dari selisih antara aset/kekayaan yang diperkenankan dengan liabilitas untuk jenis LJK berupa perusahaan asuransi/reasuransi;
 - d. nilai minimum Modal Kerja Bersih yang Disesuaikan (MKBD) untuk jenis LJK berupa perusahaan efek.
6. Rasio KPMM Terintegrasi dihitung dari (Total Modal Aktual – Faktor Pengurang Total Modal Aktual)/ Total Modal Minimum).

Rincian Faktor Pengurang Total Modal Aktual berupa Penyertaan Modal LJK
Kepada LJK lain dalam Konglomerasi Keuangan

Nama Konglomerasi Keuangan :
Posisi :
Entitas Utama :

No.	Nama LJK yang Melakukan Penyertaan Modal (Investor)	Nama LJK Tujuan Penyertaan Modal (Investee)	Waktu Penyertaan Modal ¹⁾	Porsi Penyertaan Modal ²⁾	Nilai Penyertaan Modal ³⁾ (Juta Rp)
Total Penyertaan Modal					

Keterangan:
1) Tanggal, bulan, dan tahun efektif dimulainya penyertaan modal.
2) Persentase penyertaan modal (kepemilikan) pada perusahaan *investee* per posisi laporan.
3) Nilai penyertaan modal per posisi laporan.

Rincian Faktor Pengurang Total Modal Aktual berupa Penempatan Dana LJK
kepada LJK Lain dalam Konglomerasi Keuangan yang Diakui sebagai Instrumen
Modal (*Regulatory Capital*) oleh LJK Lain

Nama Konglomerasi Keuangan :
Posisi :
Entitas Utama :

No.	Nama LJK yang Melakukan Penempatan Dana	Nama LJK Tujuan Penempatan Dana	Waktu Penempatan Dana ¹⁾	Nilai Penempatan Dana ²⁾ (Juta Rp)
Total Penempatan Dana				

Keterangan:
1) Tanggal, bulan, dan tahun efektif dimulainya penempatan dana.
2) Nilai penempatan dana per posisi laporan.

FORMAT II I

BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN LAIN BAGI PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH, DAN UNIT SYARIAH

*Laporan Rencana Kegiatan Pengkinian Data Dan
Laporan Realisasi Pengkinian Data Nasabah dalam rangka Penerapan Program
Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa
Keuangan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf c dan huruf d
dalam POJK 12/POJK.01/2017 dan SEOJK Nomor 37/SEOJK.05/2017 tentang
Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan
Terorisme di Sektor Industri Keuangan Non-Bank dengan batas waktu
penyampaian paling lambat akhir bulan Desember.*

**LAPORAN RENCANA KEGIATAN PENGKINIAN DATA DAN
LAPORAN REALISASI PENGKINIAN DATA**

**DALAM RANGKA PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN
PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

Tahun

(diisi nama dan alamat perusahaan)

_____, _____ 20xx

Direktur

(Cap Perusahaan)

N a m a J e l a s

Jabatan

FORMAT II J

BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN LAIN BAGI PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH, DAN UNIT SYARIAH

Laporan Keuangan PT
Tahun

PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS

Rasio Keuangan Selain Tingkat Solvabilitas		
Uraian	Dana Tabarru' dan Dana Tanahud	Gabungan
Rasio Likuiditas		
A. Kelayakan lancar	-	-
B. Kewajiban lancar	-	-
C. Rasio (ab)	0,00%	0,00%
Rasio pembagian investasi dengan liabilitas		
A. Investasi, kas dan bank	-	-
B. Penyisihan teknis	-	-
C. Utang klaim retensi sendiri	-	-
D. Rasio (a(b+c))	-	-
A. Pendapatan investasi netto	-	-
B. Rata-rata investasi	-	-
C. Rasio (ab)	0,00%	0,00%
Rasio beban klaim		
A. Beban klaim netto	-	-
B. Kontribusi netto	-	-
C. Rasio (ab)	0,00%	-
Rasio penjabaran dana		
A. Dana tahun/triwulan/bulan berjalan	-	-
B. Dana tahun/triwulan/bulan lalu	-	-
C. Perubahan dana (a-b)	-	-
D. Rasio (cb)	0,00%	0,00%
Rasio Aset Unit Syariah		
A. Aset Dana Tabarru' dan Dana Tanahud	-	-
B. Aset Dana Investasi Peserta	-	-
C. Aset Dana Asuransi Perusahaan	-	-
D. Rasio (ahb) : (a+b+c)	-	0,00%
Penghitungan Qardh yang Diperlukan Dana Tabarru'		
A. Jumlah Kewajiban selain Qardh	-	-
B. Jumlah Aset	-	-
Jumlah Qardh yang Diperlukan (a-b)	-	-
Penghitungan Qardh yang Diperlukan Dana		
A. Jumlah Kewajiban selain Qardh	-	-
B. Jumlah Aset	-	-
Jumlah Qardh yang Diperlukan (a-b)	-	-

Rasio Keuangan Selain Tingkat Solvabilitas

Uraian	Dana Tabarru' dan Dana Tanahud	Indikator Dana Perusahaan	Dana Investasi Peserta	Gabungan
Rasio Likuiditas				
A. Kelayakan lancar	-	-	-	-
B. Kewajiban lancar	-	-	-	-
C. Rasio (ab)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Rasio pembagian investasi dengan liabilitas				
A. Investasi, kas dan bank	-	-	-	-
B. Penyisihan teknis	-	-	-	-
C. Utang klaim retensi sendiri	-	-	-	-
D. Rasio (a(b+c))	-	-	-	-
A. Pendapatan investasi netto	-	-	-	-
B. Rata-rata investasi	-	-	-	-
C. Rasio (ab)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Rasio beban klaim				
A. Beban klaim netto	-	-	-	-
B. Kontribusi netto	-	-	-	-
C. Rasio (ab)	0,00%	-	-	-
Rasio penjabaran dana				
A. Dana tahun/triwulan/bulan berjalan	-	-	-	-
B. Dana tahun/triwulan/bulan lalu	-	-	-	-
C. Perubahan dana (a-b)	-	-	-	-
D. Rasio (cb)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Rasio Aset Unit Syariah				
A. Aset Dana Tabarru' dan Dana Tanahud	-	-	-	-
B. Aset Dana Investasi Peserta	-	-	-	-
C. Aset Dana Asuransi Perusahaan	-	-	-	-
D. Rasio (ahb) : (a+b+c)	-	-	-	0,00%
Penghitungan Qardh yang Diperlukan Dana Tabarru'				
A. Jumlah Kewajiban selain Qardh	-	-	-	-
B. Jumlah Aset	-	-	-	-
Jumlah Qardh yang Diperlukan (a-b)	-	-	-	-
Penghitungan Qardh yang Diperlukan Dana				
A. Jumlah Kewajiban selain Qardh	-	-	-	-
B. Jumlah Aset	-	-	-	-
Jumlah Qardh yang Diperlukan (a-b)	-	-	-	-

Uraian	Nominal (Jutaan Rp)
PENDAPATAN USAHA	
Pendapatan urjah pengelolaan dana tabarru'	x
Pendapatan urjah pengelolaan investasi dana peserta	x
Pendapatan alokasi surplus underwriting	x
Pendapatan investasi	x
BEBAN USAHA	
Beban usaha	x
LABA (RUGI) USAHA	
Pendapatan nonusaha	x
Beban nonusaha	x
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	x
Beban pajak penghasilan	x
LABA (RUGI)	x
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
Surplus revaluasi aset tetap & takberwujud	x
Pengukuran-kembali liabilitas imbalan pasti	x
Paik penghasilan	x
Salah nilai wajar sukuk PYTOG & aset keuangan AFS	x
Paik penghasilan	x
PENGHASILAN KOMPREHENSE	x

Uraian	Nominal (Jutaan
PENDAPATAN ASURANSI	
Pendapatan kontribusi	x
Bagian pengelola atas kontribusi	x
Bagian reasuransi atas kontribusi	x
BEBAN ASURANSI	
Beban klaim	x
Bagian reasuransi atas klaim	x
Perubahan penyisihan klaim dalam proses	x
Perubahan penyisihan klaim sudah terjadi namun belum dilaporkan	x
Perubahan penyisihan iuran belum merupakan pendapatan	x
Perubahan penyisihan manfaat polis masa depan	x
SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING	
Surplus underwriting yang dialokasikan ke peserta individual	x
Surplus underwriting yang dialokasikan ke entitas pengelola	x
Surplus underwriting yang dialokasikan ke dana tabarru'	x
PENDAPATAN DAN BEBAN INVESTASI	
Pendapatan bagi hasil	x
Keuntungan pelepasan investasi	x
Perubahan nilai wajar investasi	x
Beban investasi	x
SURPLUS (DEFISIT) DANA TABARRU'	x
SALDO AWAL DANA TABARRU'	x
SALDO AKHIR DANA TABARRU'	x

Laporan Surplus Defisit Underwriting Dana Tabarru'

Uraian	Nominal (Jutaan
PENDAPATAN ASURANSI	
Pendapatan kontribusi	x
Bagian pengelola atas kontribusi	x
Bagian reasuransi atas kontribusi	x
BEBAN ASURANSI	
Beban klaim	x
Bagian reasuransi atas klaim	x
Perubahan penyisihan klaim dalam proses	x
Perubahan penyisihan klaim sudah terjadi namun belum dilaporkan	x
Perubahan penyisihan iuran belum merupakan pendapatan	x
Perubahan penyisihan manfaat polis masa depan	x
SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING	
Surplus underwriting yang dialokasikan ke peserta individual	x
Surplus underwriting yang dialokasikan ke entitas pengelola	x
Surplus underwriting yang dialokasikan ke dana tabarru'	x
PENDAPATAN DAN BEBAN INVESTASI	
Pendapatan bagi hasil	x
Keuntungan pelepasan investasi	x
Perubahan nilai wajar investasi	x
Beban investasi	x
SURPLUS (DEFISIT) DANA TABARRU'	x
SALDO AWAL DANA TABARRU'	x
SALDO AKHIR DANA TABARRU'	x

Laporan Posisi Keuangan Asuransi Syariah (Audited)

Uraian	Nominal (Jutaan Rp)
ASET	
Kas dan setara kas	x
Piutang kontribusi	x
Piutang reasuransi	x
Piutang murabahah	x
Piutang istithna'	x
Pembayaran mudharabah	x
Pembayaran musarakah	x
Investasi pada surat berharga	x
Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama	x
Piutang salam	x
Aset jarrah	x
Properti investasi	x
Aset tetap	x
Aset takberwujud	x
TOTAL ASET	xxx
LIABILITAS	
Utang reasuransi	x
Bagian peserta atas surplus underwriting	x
Urajan diterima di muka	x
Penyisihan klaim dalam proses	x
Penyisihan klaim sudah terjadi tetapi belum dilaporkan	x
Penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak	x
Penyisihan manfaat polis masa depan	x
DANA PESERTA	
Dana investasi	x
Dana tabarru'	x
EKUITAS	
Modal disetor	x
Tambahan modal disetor	x
Saldo penghasilan komprehensif lain	x
Saldo laba	x
TOTAL LIABILITAS, DANA PESERTA, DAN EKUITAS	

Laporan Laba Rugi dan Pendapatan Komprehensif Lain (Audited)

Uraian	Nominal (Jutaan Rp)
PENDAPATAN USAHA	
Pendapatan urjah pengelolaan dana tabarru'	x
Pendapatan urjah pengelolaan investasi dana peserta	x
Pendapatan alokasi surplus underwriting	x
Pendapatan investasi	x
BEBAN USAHA	
Beban usaha	x
LABA (RUGI) USAHA	
Pendapatan nonusaha	x
Beban nonusaha	x
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	x
Beban pajak penghasilan	x
LABA (RUGI)	x
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
Surplus revaluasi aset tetap & takberwujud	x
Pengukuran-kembali liabilitas imbalan pasti	x
Paik penghasilan	x
Salah nilai wajar sukuk PYTOG & aset keuangan AFS	x
Paik penghasilan	x
PENGHASILAN KOMPREHENSE	x

Laporan Posisi Keuangan,
Laporan Laba Rugi dan
Pendapatan Komprehensif Lain,
dan Laporan Surplus Defisit
Underwriting Dana Tabarru'
disusun berdasarkan standar
akuntansi keuangan yang berlaku
umum dan telah diaudit oleh

Laporan Tingkat Solvabilitas dan
Rasio Keuangan Selain Tingkat
Solvabilitas Disusun Berdasarkan
Peraturan Perundangan.

Jakarta20xx

Direksi

PT

tsd

(Nama Lengkap)

PT
Triwulan ... Tahun

Laporan Posisi Keuangan

[illegible]

Laporan Kinerja Keuangan

[illegible]

PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS

	Keterangan	Dana Tabung dan Dana Tashrif	Dana Penjualan
	Tingkat Solabilitas		
	A. Airtang Sportswear (AVD)		
	B. Lisensi selan Qatir dan Dana Penjualan		
	Dana Tabung dan Tashrif Minimum Berbasis Risiko (DTMBR)		
	C. Risiko Kredit	-	-
	D. Risiko Likuiditas	-	-
	E. Risiko Pasar	-	-
	F. Risiko Asuransi	-	-
	G. Risiko Pajak	-	-
	H. Risiko PAVD Digransi	-	-
	I. Risiko PAVD Digransi	-	-
	a. Risiko Kredit	-	-
	b. Risiko Likuiditas	-	-
	c. Risiko Pasar	-	-
	2. Dana PAVD Digransi	-	-
	3. Lisensi PAVD Digransi	-	-
	Tingkat Solabilitas sebelum memperhatikan Asat yang Transisi awal Grup (dalam %)	0,00%	0,00%
	Tingkat Solabilitas setelah memperhatikan Asat yang Transisi awal Grup (dalam %)	0,00%	0,00%
	Tingkat Solabilitas setelah memperhatikan Asat yang Transisi awal Grup (dalam %)	0,00%	0,00%
	Asat yang Transisi Untuk Grup yang Diperhatikan sebagai Penambahan ATD Dana Tabung/ Tashrif	-	-
	A. Kekurangan Likedaban Tingkat solabilitas dari target internal	-	-
	B. Tingkat solabilitas Dana Tabung/ dan Dana Tashrif, dan Dana Penjualan	-	0,00%

RASIO KEUANGAN SELAIN TINGKAT SOLVABILITAS

Uraian		Indikator		
		Data Tahun/ dan	Data Investasi	Gesungan
Rasio Likuiditas	A. Rasio likuiditas	-	-	-
	B. Rasio likuiditas	-	-	-
	C. Rasio (a/b)	0,00%	0,00%	0,00%
	Rasio perimbangan investasi dengan likuiditas	-	-	-
	A. Rasio likuiditas	-	-	-
	B. Rasio likuiditas	-	-	-
	C. Rasio (a/b)	-	-	-
	Rasio likuiditas investasi dengan likuiditas	-	-	-
	A. Rasio likuiditas	-	-	-
	B. Rasio likuiditas	-	-	-
	C. Rasio (a/b)	0,00%	0,00%	0,00%
	Rasio beban kiam	-	-	-
	A. Beban kiam netto	-	-	-
Rasio pendanaan	A. Rasio pendanaan	-	-	-
	B. Rasio pendanaan	-	-	-
	C. Rasio (a/b)	0,00%	-	-
	Rasio pendanaan dana	-	-	-
	A. Dana tahun/tawaran	-	-	-
	B. Dana tahun/tawaran	-	-	-
	C. Rasio (a/b)	-	-	-
	Rasio pendanaan dana (a-b)	-	-	-
	D. Rasio (c/d)	0,00%	0,00%	0,00%
	Rasio Aktifitas Syariah	-	-	-
	A. Aktifitas Syariah	-	-	-
	B. Aktifitas Syariah	-	-	-
	C. Aktifitas Syariah	-	-	-
Rasio Profitabilitas	A. Rasio Profitabilitas	-	-	-
	B. Rasio Profitabilitas	-	-	-
	C. Rasio (a/b)	-	-	-
	Rasio Profitabilitas	-	-	-
	A. Rasio Profitabilitas	-	-	-
	B. Rasio Profitabilitas	-	-	-
	C. Rasio (a/b)	-	-	-
	Rasio Profitabilitas	-	-	-
	A. Rasio Profitabilitas	-	-	-
	B. Rasio Profitabilitas	-	-	-
	C. Rasio (a/b)	-	-	-
	Rasio Profitabilitas	-	-	-
	A. Rasio Profitabilitas	-	-	-

Jakarta20xx
Direksi
PT

ttd

(Nama Lengkap)

Laporan Posisi Keuangan, Laporan Kinerja Keuangan, Laporan Tingkat Solvabilitas, dan Laporan Rasio Keuangan Selain Solvabilitas merupakan laporan unaudited yang disusun berdasarkan peraturan perundangan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Januari 2018

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA Pensiun,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana